



**INTERAKSI DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA
PASCA KONFLIK ANTARSUKU**

DISERTASI

**diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

**Oleh
Didi Susanto
0301614001**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**

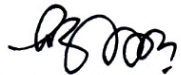
PERSETUJUAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II

Disertasi dengan judul “Interaksi dan Perubahan Sosial Budaya Pasca Konflik Antar Suku di Sampit Kalimantan Tengah (kasus kerusuhan antara suku Dayak dan suku Madura)” karya,

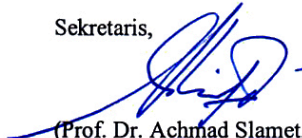
nama : Didi Susanto
NIM : 0301614001
program studi : Doktor (S3) Pendidikan IPS
telah dipertahankan dalam Ujian Disertasi Tahap II Pascasarjana Universitas Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2019

Semarang, 26 Pebruari 2019


Ketua,


(Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum)
NIP (196612101991031003)

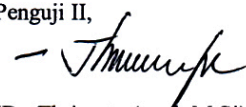
Sekretaris,


(Prof. Dr. Achmad Slamet, M.Pd)
NIP (19610524 198601 1 001)

Penguji I,


(Prof. Dr. Nurdien Harry Kistanto, MA)
NIP (19521103 198012 1 001)

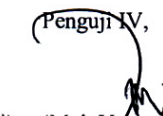
Penguji II,


(Dr. Thriwaty Arsal, M.Si)
NIP (19630404 199003 2 001)


Penguji III,


(Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M.Si)
NIP (19620811 198803 2 001)

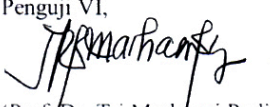
Penguji IV,


(Moh Yasin Alimi S.Ag., M.A., Ph.D)
NIP (19751016 200912 1 001)

Penguji V,


(Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd)
NIP (19620508 198803 1 002)

Penguji VI,


(Prof. Dr. Tri Marheni Pudji Astuti, M.Hum)
NIP (19650609 198901 2 001)

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

nama : Didi Susanto

nim : 0301614001

program studi : Program Doktor (S3) Pendidikan IPS

menyatakan bahwa yang tertulis dalam disertasi yang berjudul “**INTERAKSI DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA PASCA KONFLIK ANTAR SUKU DI SAMPIT KALIMANTAN TENGAH (KASUS KERUSUHAN ANTARA SUKU DAYAK DAN SUKU MADURA)**” ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam disertasi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya **secara pribadi** siap menanggung resiko/sanksi hukum yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 26 Pebruari 2019

Yang membuat pernyataan,

Didi Susanto

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. Semakin tinggi nilai manusia, semakin tinggi nilai toleransinya
2. Semakin baik toleransinya, Semakin tinggi adab budayanya
3. Semakin menghindari konflik, semakin beradab manusia
4. Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung

Persembahan

1. Universitas Negeri Semarang
2. Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

ABSTRAK

Susanto, Didi. 2018 “Interaksi dan Perubahan Sosial Budaya Pasca Konflik Antar Suku di Sampit Kalimantan Tengah (kasus kerusuhan Antara Suku Dayak dan Suku Madura). *Disertasi*. Program Studi Pendidikan IPS. Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Promotor Prof. Tri Marhaeni Pudji Astuti, M.Hum, Kopromotor Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd, Anggota Promotor, Moh Yasir Alimi S.Ag., M.A., Ph.D.

Kata Kunci: Interaksi, Perubahan Sosial Budaya, Konflik Suku

Penelitian ini bertujuan mengkaji interaksi dan perubahan sosial budaya Pasca konflik di Sampit, meliputi bentuk interaksi sosial antara suku Dayak dan suku Madura, proses sosial dan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial pasca konflik, juga upaya masyarakat suku Dayak dan suku Madura dalam menjaga keharmonisan, serta mengkaji perubahan sosial budaya masyarakat pasca konflik antara suku dayak dan suku Madura di Sampit kalimantan tengah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dan sumber data penelitian ini diperoleh melalui sumber primer dan sumber sekunder, tehnik pengumpulan data melalui tehnik observasi, tehnik wawancara dan tehnik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data dengan model interaktif berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Hasil penelitian menemukan bahwa pada awalnya warga suku Dayak menyimpan rasa khawatir bahwa sikap dan perilaku penyebab konflik pada warga suku Madura korban konflik akan kembali, tetapi pada kenyataannya kehidupan orang Madura yang dulu eksklusif dan tertutup sudah mereka tinggalkan baik karena kesadaran pentingnya interaksi dan komunikasi, maupun karena adanya kesepakatan dan perjanjian damai “*dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung*” yang disepakati oleh kedua belah pihak. Warga suku Madura yang berada di Sampit terbagi menjadi dua kelompok, pertama adalah warga suku madura keturunan yang lahir dan besar di Sampit, kedua adalah warga Madura pendatang. Sebagian besar warga madura yang lahir dan besar di Sampit telah mampu beradaptasi, berasimilasi dan berakulturasi dengan kehidupan orang Dayak, berbeda dengan warga Madura pendatang mereka inilah yang seringkali membuat pandangan orang Dayak terhadap orang Madura menjadi negatif. Interaksi antar suku Dayak dan Madura pada beberapa daerah di Sampit menunjukkan seakan-akan tidak pernah terjadi konflik, tetapi faktor identitas masih sangat sensitif jika melibatkan orang suku Dayak dan suku Madura. Pemahaman falsafah “*Huma Betang*” yang semakin baik merubah cara pandang dan kehidupan sosial budaya orang Madura baik perekonomian, peran dalam masyarakat, status sosial, kebiasaan, pola pikir serta pendidikannya.

ABSTRACT

Susanto, Didi. 2019 "Interaction and social and cultural changes post conflict among tribes in Sampit Central Kalimantan". *Dissertation*. Social Studies Program. Post Gradutes Universitas Negeri Semarang. Promotor Prof. Tri Marhaeni Pudji Astuti, M.Hum, copromotor Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd, ass.promotor, Moh Yasir Alimi S.Ag., M.A., Ph.D.

Kata Kunci: Interaction, social and culture change, ethnic conflict

This study aims to examine the interactions and changes in socio-cultural post-conflict in Sampit, including forms of social interaction between Dayak tribes and Madurese, social processes and factors that influence post-conflict social interactions, as well as the efforts of Dayak tribes and Madurese in maintaining harmony, and studying post-conflict socio-cultural changes between the Dayaks and the Madurese in Sampit, Central Kalimantan.

This study uses qualitative methods with a phenomenological approach. Data and data sources of this study were obtained through primary sources and secondary sources, techniques for collecting data through observation techniques, interview techniques and documentation techniques. This study uses data analysis techniques with interactive models in the form of data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification.

The results of the study found that at the beginning the Dayak tribes were concerned that the conflict-causing attitudes and behavior of the Madurese conflict victims would return, but in reality the lives of the Madurese who were exclusive and closed had been abandoned because of the awareness of the importance of interaction and communication. because of the agreement and peace agreement "*dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung*" agreed upon by both parties. Madurese residents who are in Sampit are divided into two groups, first are the descendants of Madurese who are born and raised in Sampit, the second are immigrant Madurese. Most Madurese born and raised in Sampit have been able to adapt, assimilate and acculturate to the lives of Dayaks, in contrast to Madurese migrants who often make the Dayak view of the Madurese negative. The interaction between the Dayak and Madura tribes in several regions in Sampit shows that there has never been a conflict, but the identity factor is still very sensitive if it involves the Dayaks and Madurese. The understanding of the philosophy of "*Huma Betang*" is increasingly good for changing the way of life and the socio-cultural life of Madurese people, both in the economy, role in society, social status, habits, mindset and education.

PRAKATA

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Berkat karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul “Interaksi dan perubahan Sosial Budaya Pasca Konflik Antar Suku di Sampit Kalimantan Tengah (Kasus Kerusuhan Antara Suku Dayak dan Suku Madura)”. Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Doktor Kependidikan ada Program Studi Pendidikan IPS Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. ucapan terima kasih peneliti sampaikan pertama kali kepada para pembimbing: Prof. Tri Marhaeni Pudji Astuti, M.Hum (Promotor), Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd (Kopromotor), Moh. Yasir Alimi, S.Ag., MA., Ph.D. (Anggota Promotor) (Ucapan terima kasih disesuaikan dengan kontribusi para pembimbing kepada peneliti)

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian studi, di antaranya:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Negeri Semarang.

2. Direksi Program Pascasarjana Unnes atau dukungan kelancaran yang diberikan kepada penulis dalam menempuh studi.
3. Kepala Program Studi Pendidikan IPS, Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M.Si, yang telah Banyak membantu penulis dalam spirit untuk terus semangat dalam menyelesaikan disertasi ini.
4. Kepada Orang Tua, Rudyson (Alm) dan Ibu Saripah, serta Istri Nurmiati, S.Pd.M.Pd.Kons yang telah memberikan segalanya kepada penulis, Do'a serta dorongan moril kepada penulis untuk tidak pantang menyerah dalam menghadapi cobaan pada saat masa-masa studi.
5. Kepada bapak Najamudin (Batamad) yang telah meluangkan waktu untuk mengawal serta memberikan pengamanan kepada penulis selama melakukan penelitian ini.
6. Semua pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis yang tidak dapat di sebutlan nama satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan pahala atas kebaikan dan bantuan mereka kepada penulis.

Semarang, September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II-----	i
PERNYATAAN KEASLIAN-----	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN-----	iii
ABSTRAK-----	iv
ABSTRACT-----	v
PRAKATA-----	vi
DAFTAR ISI-----	vii
DAFTAR TEBEL-----	xiii
DAFTAR GAMBAR-----	xiv
DAFTAR LAMPIRAN-----	xvi
I. Pendahuluan-----	
1.1. Latar Belakang-----	1
1.2. Identifikasi Masalah-----	17
1.3. Cakupan Masalah-----	18
1.4. Rumusan Masalah-----	19
1.5. Tujuan Penelitian-----	19
1.6. Manfaat Penelitian-----	20
II. Kajian Pustaka, Kerangka Teoritis dan Kerangka Berfikir-----	
2.1. Kajian Pustaka-----	21
2.1.1. Pengertian Interaksi Sosial-----	21
2.1.2. Pengertian Perubahan Sosial-----	30
2.1.3. Pengertian Konflik-----	34
2.1.4. Hasil Penelitian yang Relevan-----	44
2.2. Kerangka Teoritis-----	55
2.2.1. Teori Interaksi (George Herbert Mead & Soerjono Soekamto)-----	55
2.2.2. Teori Perubahan Sosial (Piotr Sztompka)-----	65
2.2.3. Teori Konflik (George Simmel)-----	67

2.2.4. Teori Struktural Fungsional-----	70
2.3. Kerangka Berfikir-----	77
III. Metode Penelitian-----	78
3.1. Pendekatan Penelitian-----	78
3.2. Desain Penelitian-----	79
3.3. Fokus Penelitian-----	79
3.4. Data dan Sumber Data Penelitian-----	80
3.5. Instrumen dan Tehnik Pengumpulan Data-----	81
3.6. Tehnik Keabsahan Data-----	86
3.7. Tehnik Analisis Data-----	89
IV. Gambaran Umum Masyarakat di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur-----	
4.1. Kondisi Geografis Wilaya Sampit KotawaringinTimur-----	92
4.2. Sekilas Sejarah Singkat Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur-----	96
4.2.1. Zaman Pendudukan Hindia Belanda-----	99
4.2.2. Zaman Pendudukan Fasisme Jepang-----	101
4.2.3. Masa Pendudukan Nica-----	103
4.2.4. Menjadi Kabupaten Sendiri-----	106
4.2.5. Pemekaran Daerah Otonom-----	108
4.2.6. Era Reformasi-----	110
4.3. Sekilas sejarah konflik suku di Sampit-----	111
4.4. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Sampit Kotawaringin Timur-----	113
4.5. Kondisi Pendidikan Masyarakat di Sampit-----	134
4.6. Kehidupan Ekonomi Masyarakat di Sampit-----	135
4.7. Sikap Masyarakat Suku Dayak Terhadap Suku Madura-----	139
V. Interaksi Sosial Antara Suku Dayak dan Suku Madura Pasca Konflik Antar Suku di Sampit Kotawaringin Timur-----	
5.1. Interaksi Sosial Antara Suku Dayak dan Suku Madura Pasca Konflik-----	144

5.2. Faktor-Faktor Pembentuk Interaksi Antara Suku Dayak dan Suku Madura-----	150

5.2.1. Faktor Imitasi dalam Interaksi Sosial-----	151
5.2.2. Faktor Sugesti dalam Interaksi Sosial-----	154
5.2.3. Faktor Identifikasi dalam Interaksi Sosial-----	158
5.2.4. Faktor Simpati dalam Interaksi Sosial-----	159
5.3. Bentuk Interaksi Pasca Konflik suku Dayak dan Suku Madura-----	162
5.3.1. Interaksi dengan Syarat-----	164
5.3.2. Kohesivitas Antar Masyarakat Pasca Perjanjian Damai-----	171
5.3.3. Interaksi dalam Sosial Politik-----	176
5.3.4. Interaksi dalam Proses Penguatan Ekonomi-----	179
VI. Proses Sosial dan Faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial Pasca Konflik Antara Suku Dayak dan Suku Madura di Sampit-----	184
6.1. Proses Sosial Pasca Konflik Antar Suku Dayak dan Suku Madura Di Sampit-- -----	184
6.1.1. Proses Sosial Asosiatif Pasca Konflik-----	185
6.1.2. Proses Sosial Diasosiatif Pasca Konflik-----	203
6.2. Faktor Pengaruh Interaksi Sosial Pasca Konflik Antar Suku Dayak dan Suku Madura di Sampit-----	212
6.2.1. Faktor Historis-----	219
6.2.2. Faktor Sosial Budaya-----	222
6.2.3. Faktor Ekonomi Politik-----	225
6.3. Potensi Munculnya Konflik Baru Antar Suku Dayak dan Madura di Sampit--- -----	227
6.3.1. Persepsi Masyarakat Suku Dayak Terhadap Suku Madura Pasca Konflik- -----	228
6.3.2. Tragedi di Baamang-----	236
6.3.3. Tragedi Perkelahian di Banjarmasin-----	239

VII. Pola Edukasi Oleh Pemerintah dan Masyarakat dalam Menjaga Keharmonisan Pasca Konflik di Sampit Kalimantan Tengah-----	243
7.1. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Menjaga Keharmonisan Pasca Konflik Antar Suku Dayak dan Madura di Sampit-----	243
7.1.1. Keputusan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah-----	245
7.1.2. Musyawarah Besar Pengungsi Korban Kerusakan Kalimantan Tengah se Jawa Timur-----	248
7.1.3. Kebijakan Pemerintah Bakornas PBP-----	249
7.1.4. Tekat Mufakat Masyarakat Kalimantan-----	251
7.1.5. Peran yang Berkelanjutan-----	256
7.2. Pola Edukasi Masyarakat Pasca Konflik antarsuku di Sampit-----	259
VIII. Perubahan Sosial Budaya Pasca Konflik Antara Suku Dayak dan Suku Madura di Sampit-----	268
8.1. Perubahan Sosial Pasca Konflik Antara Suku Dayak dan Suku Madura di Sampitan-----	268
8.1.1. Perubahan Status Sosial-----	270
8.1.2. Perubahan Struktur/Lembaga-----	275
8.1.3. Perubahan Pola Interaksi-----	278
8.1.4. Integrasi Sosial-----	281
8.1.5. Rekonsiliasi-----	283
8.1.6. Mediasi-----	284
8.2. Perubahan Budaya Pasca Konflik Antara Suku Dayak dan Suku Madura di Sampit-----	287
8.2.1. Perubahan Nilai-----	291
8.2.2. Perubahan Adat Kebiasaan-----	294
8.2.3. Perubahan Budaya Perilaku-----	295
8.2.4. Perubahan Pola Pikir-----	298
8.2.5. Perubahan Budaya Bahasa-----	299
8.2.6. Perubahan Mata Pencaharian-----	301

IX. Penutup-----	305
9.1. Kesimpulan-----	305
9.2. Saran-----	307
DAFTAR PUSTAKA	309
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian yang Relevan-----	44
Tabel 3.1 Informan Utama Penelitian-----	83
Tabel 3.2 Informan Pendukung Penelitian-----	84
Tabel 3.3 Jadwal Wawancara-----	87
Tabel 4.1 Luas Wilayah Perkecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur-----	95
Tabel 4.2 Jumlah Persentasi persuku di Sampit -----	117
Tabel 4.3 Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Sampit -----	133
Tebel 4.4 Data Siswa Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Tahun 2015-----	136
Tabel 4.5 Daftar Kecamatan Penghasil Karet di Kabupaten Kotawaringin Timur-----	139
Tebel 8.1 Perubahan Sosial di Sampit-----	285
Tebel 8.2 Perubahan Budaya di Sampit-----	302

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Interkasi Mead-----	63
Gambar 2.2 Struktur sistem tindakan Umum-----	73
Gambar 2.3 Skema tindakan Parsons-----	73
Gambar 2.4 Kerangka Berfikir-----	78
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kotawaringi Timur-----	94
Gambar 4.2 Upacara Ritual Tiwah Hindu Keharingan-----	126
Gambar 4.3 Upacara Budaya Mandi Safar-----	129
Gambar 4.4 Upacara Budaya Meayun Anak-----	130
Gambar 4.5 Upacara Budaya Mampakanan Saur-----	132
Gambar 4.6 Upacara Budaya Mamapas Lewu-----	133
Gambar 5.1 Wawancara Peneliti dengan Dewan Adat Dayak Kecamatan Kotabesi-----	149
Gambar 5.2 Wawancara Peneliti dengan Ketua Forum Komunikasi Korban Kerusuhan Kal-Teng-----	157
Gambar 5.3 Interaksi Sosial suku Dayak dan suku Madura Pasca Konflik -----	162
Gambar 5.4 Wawancara Peneliti dengan Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur-----	164
Gambar 5.5 Interaksi antara Masyarakat Suku Dayak dan Suku Madura di Pasar-----	182
Gambar 5.6 Bentuk Interaksi antara suku dayak dan suku Madura-----	183
Gambar 6.1 Wawancara dengan Warga Suku Madura-----	188
Gambar 6.2 Bagan Proses Sosial Asosiatif-----	204
Gambar 6.3 Bagan Proses Sosial Diasosiatif Pasca Konflik-----	212
Gambar 7.1 Peran Pemerintah dan Masyarakat Menjaga Keharmonisan Pasca Konflik--	257
Gambar 7.1 Wawancara dengan Wakil Bupati Kotawaringin Timur di Sampit-----	261
Gambar 7.2 Pola Edukasi Masyarakat Pasca Konflik-----	267
Gambar 8.1 Wawancara Peneliti Bersama Kepala Desa Bajarum dan tokoh Madura di	

Desa Bajarum----- 271

Gambar 8.2 Proses Membaur warga Suku Madura dengan suku Dayak, Jawa, dan banjar

Di Desa Parit----- 278

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pengantar Ijin Penelitian dari Universitas Negeri Semarang
- Lampiran 2 Surat Rekomendasi Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Timur
- Lampiran 3 Surat Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur
- Lampiran 4 Informan Penelitian
- Lampiran 5 Jadwal Wawancara
- Lampiran 6 Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 Transkrip Hasil Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang penduduknya sangat majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, etnis serta agama yang sangat beragam. Data dari Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2013 menyebutkan bahwa ada 633 kelompok suku besar di Indonesia, Sehingga jika dilihat secara vertikal dan horisontal, masyarakat kita memang masyarakat yang paling majemuk di dunia, selain Amerika Serikat dan India.

Kenyataan kemajemukan bangsa kita tersebut merupakan potensi yang sangat besar sekaligus juga menjadi potensi rawan terjadinya konflik (La Iba, 2016). Konflik yang terjadi di Indonesia sebagian besar didasari oleh adanya pertentangan serta perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA). Kemajemukan dan perbedaan selalu dipertentangkan sehingga cepat menyebar dalam masyarakat dan akhirnya terjadi konflik sosial yang menegangkan dan meresahkan (Pettalongi, 2013; Santoso, 2016).

Masyarakat yang mejemuk terdapat berbagai kelompok yang memiliki latar belakang adat istiadat, budaya, agama, dan kepentingan. Pernyataan ini diperkuat oleh Furnivall (Nasikun, 1986), yang menyatakan

bahwa masyarakat majemuk (*plural societies*) adalah suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembaharuan satu dan lainnya dalam suatu kesatuan politik (Suryana & Rusdiana, 2015:3).

Masyarakat yang memahami kemajemukan akan mempertahankan hubungan yang saling melengkapi satu sama lain, jauh dari prasangka dan keceburuan sosial, hal tersebut jika terus dibina dan dipupuk akan semakin mempererat hubungan. Akan tetapi jika pola hubungan yang dibangun atas keinginan menguasai serta mendominasi maka akan muncul persepsi dan prasangka yang akan menimbulkan kerengangan serta konflik suku, ras dan agama baik pada individu serta kelompok masyarakat.

Prasangka merupakan kekakuan pada suatu kelompok tertentu berdasarkan keyakinan yang salah serta sulit untuk dirubah penuh dengan emosi yang tergambar dari perilaku individu dan kelompok yang berprasangka. Kebanyakan prasangka tertuang melalui ekspresi dan percakapan yang negatif dari kelompok tertentu, lebih banyak menghindar pada siapa yang tidak disukai, diskriminasi dengan jalan mengucilkan kelompok tertentu, serangan fisik dengan kekerasan, dan eksterminasi (pemusnahan) kelompok yang dibenci (Hufad, 2003).

Prasangka yang terus menerus dipelihara akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat yang mejemuk, sehingga perbedaan suku, agama, ras serta golongan seringkali memperlebar jarak

dan justru akan melahirkan konflik dalam masyarakat yang sangat multikultur, yang terus mengalami perubahan akibat perkembangan global serta akan berimbas juga pada berubahnya kultur serta budayanya di dalam masyarakat.

Konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Pontianak yang mengakibatkan banyaknya pengungsi dari warga Madura antara tahun 2000 sampai dengan 2002 misalnya, merupakan gambaran bahwa nilai-nilai keberagaman dan pluralisme pada masyarakat kita telah semakin luntur (Ulum, 2013). Konflik yang berasal dari perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang mengakibatkan pengerusakan tempat ibadah oleh kelompok pendukung agama lain dan juga konflik yang berbasis suku yang berbeda seperti di Sampit, Solo (Wasino, 2006), Aceh, dan lain sebagainya menunjukkan masih lemahnya pemahaman tentang kemajemukan dan multikulturalnya dalam masyarakat kita (Wasino, 2011).

Kemajemukan ditandai dengan beraneka ragam budaya, etnis, dan latar belakang sejarah, menuntut adanya upaya penataan diri bersama dalam masyarakat yang stabil dan dinamis (Molan, 2015:1). Sehingga dengan begitu plural dan mejemuknya dalam masyarakat di Indonesia tentu sudah merupakan suatu keharusan untuk kita selalu menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, oleh sebab itu perbedaan dan kemajemukan jangan dijadikan alasan terjadinya perpecahan antara suku, etnis serta agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemajemukan harus selalu dimaknai dengan pikiran yang positif dengan menjauhi prasangka terhadap Suku, Ras dan Agama tertentu, karena dalam interaksi disetiap individu masyarakat akan melalui proses yang berbeda-beda, karena pada setiap individu akan membawa budayanya masing-masing, individu juga adalah bagian dari anggota kelompok etnis, dan setiap kelompok etnis memiliki latar belakang sejarah yang berbeda-beda pula, sehingga interaksi di dalam lingkungan masyarakat tentu saja sedikit banyaknya akan dipengaruhi oleh budaya, etnis dan latar belakang sejarah yang dibawa oleh masing-masing setiap individu di dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Persoalan yang sangat sentral dalam kehidupan masyarakat majemuk adalah seringkali memunculkan akulturasi budaya, dalam akulturasi budaya selain terjadinya percampuran bukan tidak mungkin juga terjadi konflik baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar (Berry, 1995; Hidayah, 2002). Keberagaman disatu sisi merupakan sebuah anugerah, tetapi disisi lain juga merupakan menjadi sumber-sumber konflik jika perbedaan suku, ras dan agama terus menerus dimunculkan (Haryanto, 2013).

Kemajemukan serta perbedaan budaya, etnis dan latar belakang dari apa yang dipaparkan diatas memang seringkali merupakan faktor penyebab terjadinya hubungan yang kurang baik pada kehidupan masyarakat, pengelompokan dan pengkotakan oleh sebagian suku, etnis serta agama

oleh mereka yang memang mayoritas mengakibatkan peleburan dan akulturasi budaya sulit terlaksana, di samping itu juga suku dan etnis minoritas misalnya suku Madura di Sampit yang tinggal secara berkoloni dan berkelompok tentu saja berdampak pada kurang harmonisnya hubungan antar etnis.

Masyarakat mejemuk sangat rentan terhadap gesekan, seringkali ujung-ujungnya berakhir pada konflik sosial akibat dari tingginya stereotip dan prasangka (Murdianto, 2018). Kesalahpahaman dan konflik yang terjadi juga disebabkan oleh banyak faktor, ada konflik karena faktor identitas dalam hal ini adalah konflik antar suku dan agama, ada juga konflik yang berlatar belakang permasalahan ekonomi seperti halnya dominasi pendatang dalam perekonomian, serta konflik agraria yang kebanyakan disebabkan perebutan lahan.

Konflik karena faktor identitas, sering kali cenderung berakhir pada pertikaian antar suku seperti yang terjadi di Sampit, Poso, Ambon, Bali dan Papua serta konflik lainnya di beberapa daerah di Indonesia. Konflik dalam negara karena identitas cenderung lebih bertahan dalam jangka panjang, silih berganti antara fase laten dengan ledakan kekerasan yang bertahan selama periode beberapa tahun atau dekade. (Harris dan Reilly, 2000). Menurut Liliweri, identitas berkaitan dengan berbagai pikiran, perasaan, masalah, dan rasa simpatik (empati) dalam komunikasi antarbudaya (Prathama, 2017).

Konflik Identitas karena perbedaan suku 15 tahun yang lalu di Sampit misalnya merupakan sejarah buruk dalam hubungan antar suku di Indonesia yang secara langsung menghancurkan sendi-sendi persaudaraan sesama anak bangsa. Sejarah konflik berupa pembantaian dan pengusiran paksa warga suku Madura oleh warga suku Dayak dari Sampit yang menjadi perhatian seluruh masyarakat Nasional dan bahkan Internasional tersebut disebabkan oleh persepsi yang negatif terhadap citra warga suku Madura yang terbentuk dari proses interaksi serta hubungan selama bertahun-tahun.

Hubungan atau interaksi yang kurang baik antara warga suku Dayak dan suku Madura tersebut di Sampit, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh gesekan sosial antara budaya serta adanya kesenjangan dan ketidakseimbangan dalam perekonomian. Misalnya orang Madura yang dikenal sebagai pekerja keras mampu membuktikan diri sebagai salah satu motor penggerak perekonomian di Sampit, sehingga sebelum terjadinya konflik antara orang Dayak dan Madura di Sampit kegiatan perdagangan di dominasi sebagian besar oleh warga suku Madura.

Jika memang benar penyebab konflik yang dikemukakan dari paparan diatas, ada kekhawatiran konflik akan sulit untuk dihindari mengingat hubungan antara orang Dayak dan orang Madura selama ini lebih banyak dipenuhi prasangka dan kecurigaan yang terus menerus serta

turun temurun dipelihara, sehingga puncaknya pada tahun 2001 konflik tidak dapat di redam.

Akibat dari prasangka yang dipertahankan terus-menerus secara berlebihan akan memunculkan konflik (Pebrynda, 2015). Relasi warga suku Dayak dan suku Madura yang telah lama hidup dalam suasana yang penuh dengan pencitraan serta stereotip yang berkepanjangan dalam bentuk ketegangan dan syakwasangka, akhirnya kembali terlibat dalam aksi pembantaian etnis yang kejam dan brutal (Haryanto, 2013). Kasus kerusuhan Sampit, bukan hanya menimbulkan gelombang pengungsian dan bencana kemanusiaan yang menohok masa depan anak-anak tetapi juga makin memanaskan bara api yang sudah bertahun-tahun mengendap (Narwoko dan Suyanto, 2011:201).

Pertanyaan besarnya adalah mengapa konflik beberapa tahun silam di Sampit hanya melibatkan antara orang Dayak dan Madura saja justru memunculkan anggapan bahwa ada pola interaksi dan hubungan yang salah selama ini terbangun antara orang Dayak dan Madura. Padahal jika kita melihat di Sampit suku-suku yang ada sangat beragam baik suku banjar, jawa, arab, melayu, bugis dan china sampai saat ini belum pernah ada sekalipun terdengar konflik selain antara orang Dayak dan Madura.

Jika kita membandingkan pola interaksi sosial warga suku Madura dengan warga suku Jawa misalnya akan memunculkan tanggapan yang berbeda dari warga suku Dayak karena berdasarkan catatan sejarah tidak

pernah terjadi konflik antara warga suku Dayak dengan warga suku Jawa kerana dalam berinteraksi warga suku Jawa menjunjung tinggi keharmonisan, kelembutan, pandai bergaul serta sikap mau mengalah jika permasalahan tidak terlalu prinsip, tidak ada sikap yang agresif yang dilakukan warga suku Jawa, sehingga orang Dayak menganggap mereka telah menjunjung tinggi sikap “di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung” (Putra, 2011).

Meletusnya konflik horisontal yang berskala masif dalam masyarakat multi-etnik di Kalimantan Tengah beberapa tahun lalu, misalnya merupakan kristalisasi akumulasi kekecewaan yang mengalami titik kulminasi, di mana wacana perbedaan semakin mengeras dan menciptakan ruang konflik yang sangat dahsyat. Wacana perbedaan berwujud sintemen dieksploitasi sedemikian rupa, sehingga melahirkan perspektif dan sikap antagonime *out-group-in-group* yang kaku dalam interaksi sosial antara kelompok masyarakat multi-etnik (Mahfud, 2014:131).

Kristalisasi akumulasi kekecewaan dapat disebabkan oleh berbagai macam permasalahan diantaranya adalah masalah akulturasi budaya dimana orang Madura belum sepenuhnya mampu membaaur pada lingkungan masyarakat di Sampit khususnya orang Dayak, orang Madura masih hidup dan menetap secara berkelompok sesama suku Madura saja yang mengakibatkan seolah-olah ada dinding pemisah antara orang Dayak

dan orang Madura sehingga interaksi sosial atau hubungan tidak berjalan dengan baik.

Kehidupan orang Madura yang serba tertutup dan kurang berinteraksi dengan lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal, sehingga akibatnya jika terjadi pertentangan dan perselisihan hal yang kecil akan menjadi besar karena saluran komunikasi cenderung tertutup. Masalah sosial akan timbul apabila dalam masyarakat tidak terdapat saluran yang mapan dan dapat mengakomodasikan berbagai inspirasi, nilai dan kepentingan yang saling berbeda tersebut. Saluran yang mampu berfungsi seperti ini akan dapat mencegah atau paling tidak mengurangi letupan permusukan yang bersifat terbuka (Soetomo, 2013:194).

Masalah konflik yang tergambar dari beberapa paparan di atas menunjukkan bahwa rasa toleransi dan persaudaraan antara sesama anak bangsa Indonesia sedikit demi sedikit sudah mulai hilang dan mengalami pergeseran baik pada nilai dan bahkan budayanya sehingga mengakibatkan interaksi sosial di dalam kehidupan masyarakat menjadi terganggu lama-kelamaan akan mengancam integrasi sosial dalam masyarakat. Konflik yang terus menerus terjadi juga mengakibatkan perubahan sosial yang membuat masyarakat semakin menutup diri serta menganggap bahwa kelompok suku, etnis, budaya, serta agama atau golongan merekalah yang paling baik juga merupakan sebuah bom waktu yang kapan saja dapat

meledak dan dapat mengancam kemajemukan, keberagaman umat beragam, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sebenarnya orang Madura yang ada di Sampit telah banyak mendapatkan keuntungan secara berlebihan (tanah-tanah pertanian dan kebun, rumah, perekonomian, jasa, dan bisnis, eksploitasi atas sumber-sumber daya alam yang ada di Sampit) tetapi akibat dari dominasi yang berlebihan dan sebagian dari oknum warga Madura memperolehnya dengan cara-cara tidak baik, ancaman, pemerasan, dan kekerasan berupa teror mental dan penyiksaan serta pembunuhan yang luput dari jeratan hukum maka orang Madura selalu tercitrakan Negatif (Ruslikan, 2001).

Akibat dari dominasi orang Madura terhadap orang Dayak, sedikit-demi sedikit akan muncul benih-benih konflik sosial di dalam masyarakat, walaupun orang Madura tinggal sudah sangat lama dan turun-temurun namun anggapan bahwa orang Madura adalah warga pendatang di Pulau Kalimantan tersebutlah yang menjadikan masalah seakan-akan masih adanya garis pembatas antara orang Dayak dan Madura.

Adanya Garis pembatas akan menimbulkan berbagai macam gesekan antara budaya orang Dayak dan orang Madura, mengakibatkan gesekan yang pada akhirnya akan memunculkan benih konflik kemudian hubungan menjadi semakin tidak baik, akibatnya konflik tentu saja tidak dapat dihindari, sehingga disadari atau tidak akan terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat.

Perubahan sosial baik interaksi atau hubungan sosial yang disebabkan oleh konflik sosial, akan semakin subur jika munculnya anggapan bahwa situasi yang dihadapi tidak adil atau menganggap bahwa kebijakan yang berlaku saat ini salah, biasanya mengalami pertentangan, tatanan aturan yang berlaku sebelumnya. Konflik sosial juga memfalisitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan (Alexander, 2005).

Perubahan sosial yang disebabkan oleh konflik, akan membuat hilangnya toleransi, keretakan, serta tingginya kecurigaan dalam masyarakat (Sadjim, dkk., 2016). Masyarakat akan mengalami perubahan sosial pada nilai strukturnya secara revolusioner maupun evolusioner, perubahan dipengaruhi oleh gerakan sosial dari individu dan kelompok sosial masyarakat. Gerakan sosial dalam sejarah masyarakat dunia bisa muncul dalam berbagai bentuk kepentingan, seperti mengubah struktur hubungan sosial, mengubah pandangan hidup dan kepentingan merebut peran politik (kekuasaan) (Susan, 2014:19).

Pasca konflik antar etnik, sampai saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan baik oleh pihak yang terkait terutama pemerintah daerah. Permasalahan yang sampai saat ini masih perlu dibenahi adalah pada pola interaksi atau hubungan antar etnik yang harus terus menerus diperbaiki, serta perlu adanya perekat hubungan yang selalu dijaga mengingat pasca konflik beberapa tahun yang lalu telah

terjadi banyak sekali perubahan sosial dalam masyarakat multietnik di Sampit.

Studi yang dilakukan oleh Ardiansyah (2010), menyatakan bahwa yang menjadi pemicu konflik antara konflik etnis Samawa dengan etnis Bali jika di lihat dari aspek sosial politik, karena disebabkan oleh tingginya kecemburuan sosial warga etnis Samawa, terhadap etnis Bali yang sebagian besar tergolong banyak yang berprestasi, selain itu juga faktor kedekatan dengan pemerintah pusat menjadikan mereka banyak menduduki jabatan cukup strategis sebagai birokrat pada instansi negeri dan berbagai posisi penting baik di BUMN serta perusahaan swasta lainnya.

Sementara penelitian Herlambang dkk (2012), mengenai masyarakat multikultural: studi tentang interaksi sosial antara masyarakat etnis Bali dan etnis sasak, bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya interaksi sosial masyarakat etnis Bali dan masyarakat etnis Sasak di Kota Amlapura yang paling kuat pengaruhnya adalah faktor sugesti dalam kekuasaan dan pengaruh pihak puri terhadap masyarakat etnis Bali dan etnis Sasak.

Penguatan faktor sugesti tersebut disebabkan oleh besarnya pengaruh dan peran Puri Karangasem yang sudah meletakkan dasar-dasar pembauran dan penyatuan dalam kehidupan masyarakat etnis Bali dan etnis Sasak, yang terlemah adalah faktor imitasi, identifikasi, dan simpati hal tersebut disebabkan kepatuhan dan pemahaman terhadap norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat masih memerlukan waktu panjang.

Demikian pula dalam hal beradaptasi dan bekerjasama dalam kehidupan kemasyarakatan antara etnis Bali dan etnis Sasak.

Berbagai macam cara telah dilakukan untuk mencegah agar konflik tidak lagi terjadi, mengingat akibat dan dampak dari konflik etnik hanya akan menimbulkan luka dan kesedihan yang berkepanjangan. Salah satu upaya pemerintah daerah adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 9 Tahun 2001 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik yang menekankan penuh pada rekonsiliasi dan rehabilitasi bagi mereka yang menjadi korban konflik etnik di Sampit.

Upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi yang dilakukan agar permasalahan yang selama ini muncul dapat dicari jalan keluarnya sehingga konflik yang lebih besar tidak terjadi lagi dikemudian hari. Rekonsiliasi merupakan sebuah solusi dan usaha perbaikan untuk mempererat hubungan serta mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik dengan keinginan mencari jalan penyelesaiannya secara kekeluargaan sebagai langkah maju menata kembali komunikasi dari pihak yang terlibat konflik.

Pasca konflik agar tidak menumbulkan dampak yang berkepanjangan, maka proses rekonsiliasi merupakan suatu proses resolusi konflik melalui perdamaian antara kedua belah pihak secara terbuka, walaupun proses perdamaian yang dilakukan melalui berbagai macam tahapan-tahapan, proses yang dilakukan harus secara komprehensif dan

mekanisme yang dilakukan juga harus melalui pendekatan baik secara individu dan bahkan kelompok mereka yang terlibat konflik (Bakri, 2015).

Rehabilitasi diharapkan akan mampu mengupayakan perbaikan terhadap psikologis masyarakat suku Dayak dan suku Madura yang terlibat konflik secara langsung dan juga bagi mereka yang tidak secara langsung berkonflik, dan bagi mereka suku Madura yang telah kembali dari pengungsian diharapkan akan mampu menjalani kehidupan mereka sebagaimana orang normal pada umumnya.

Berdasarkan fakta lapangan semenjak berakhirnya kerusuhan pada tahun 2001 di Sampit Kalimantan Tengah, sampai saat ini setelah 15 tahun pasca konflik antar suku, dampaknya di lingkungan masyarakat masih belum bisa hilang penyebabnya adalah masyarakat yang semakin sensitif terhadap isu-isu yang berkembang berkaitan dengan kesukuan. Permasalahan lain yang juga muncul yaitu masalah interaksi atau hubungan sosial masyarakat yang belum sepenuhnya kembali serta berjalan dengan baik sehingga sedikit saja terjadi gesekan-gesekan pada lingkungan masyarakat selalu mengarah pada isu konflik.

Pada bulan Pebruari dan Maret 2016 saja berkembangnya isu yang menjurus pada konflik antar suku di daerah provinsi tetangga yakni Kalimantan Selatan berimbas pada kondisi dan situasi interaksi sosial dan hubungan masyarakat di masyarakat Kalimantan Tengah, sehingga kehidupan masyarakat masih lebih banyak dihantui dan dibayang-bayangi

oleh perasaan akan terjadinya konflik yang sama. Kondisi demikian jika terus dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya usaha untuk memperbaikinya maka akan mempengaruhi kondisi dan interaksi kehidupan sosial di dalam lingkungan masyarakat Sampit khususnya Kalimantan Tengah pada umumnya, dan dapat dipastikan sangat sulit untuk masyarakat mampu menjalankan kehidupannya dengan normal sebagaimana mestinya.

Pada bulan Mei 2016 kembali melakukan observasi lanjutan mengenai perubahan sosial pada masyarakat multikultural di daerah Sampit dan dari situ tergambar bahwa perubahan sosial dalam masyarakat pasca konflik memang berimbas pada kondisi interaksi sosial, ada beberapa hal yang jelas terlihat diantaranya perubahan struktur sosial pada lingkungan mereka tinggal kemudian pasar-pasar tradisional yang ada di beberapa daerah di kecamatan sudah tidak lagi di dominasi oleh suku Madura, tetapi lebih bervariasi yakni ada yang berasal dari suku Dayak, banjar dan Jawa.

Pada sekitar minggu pertama bulan september 2016 kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Kecamatan Baamang Kota Sampit, yang pada dasarnya adalah merupakan kasus kriminal pada akhirnya hampir menjurus pada kerusuhan antar suku Madura dan suku Dayak. Isu dengan cepat menyebar dari mulut kemulut masyarakat hingga pada akhirnya tokoh adat Dayak yang dikenal dengan Dewan Adat Dayak (DAD) turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan agar tidak menyebar lebih luas lagi sehingga situasi masih dalam kondisi aman.

Pada surat kabar harian Kalteng Pos pada tanggal 12 September 2016 memberitakan tentang permintaan Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran agar masyarakat Kalteng, khususnya Kota Waringin Timur untuk bersama-sama menjaga situasi daerah yang kondusif, sehingga proses pembangunan dapat tetap berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Gubernur menyatakan bahwa “terkait insiden yang terjadi di baamang beberapa waktu lalu, yang diisukan sudah masuk ranah antar etnis. Saya imbau semuanya tidak mudah terpropokasi akan isu yang berpotensi merusak ketentraman dan kedamaian” (<http://m.kelteng.prokal.co/read>).

Walaupun konflik telah berlalu, kehidupan masyarakat di Sampit juga sudah mulai berbenah menuju arah perbaikan sehingga usaha merevitalisasi hubungan sosial budaya pasca konflik semuanya diarahkan pada perbaikan terhadap apa saja yang dulu dianggap belum maksimal dan menjadi penghambat pembangunan dalam usaha menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam interaksi serta hubungan sosial antar suku khususnya Dayak dan Madura di Sampit.

Peneliti merasa masih ada yang menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai interaksi dan perubahan sosial budaya pasca konflik pada kehidupan masyarakat di Sampit, terlebih lagi faktor identitas kesukuan seringkali masih menjadi sesuatu yang sangat tabu dan sensitif untuk diungkap serta disebarluaskan. Penelitian ini menjadi penting karena akan

memberikan paradigma baru terhadap fakta empirik yang menyangkut identitas serta hubungan antarsuku khususnya pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pasca konflik.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan penelitian di atas sebagai berikut:

1. Kemajemukan di dalam masyarakat kurang dipahami secara utuh, masyarakat masih terkotak-kotak sehingga seringkali muncul benih-benih konflik
2. Pasca konflik terjadi pergeseran nilai di dalam masyarakat sehingga masyarakat sulit untuk kembali pada kehidupan normalnya sehingga masih sering terjadi gesekan.
3. Interaksi sosial masyarakat pasca konflik mengalami perubahan sehingga berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat.
4. Masih adanya masyarakat yang menonjolkan dari mana asal suku, etnik, dan serta budaya dalam berinteraksi.
5. Masih sulitnya masyarakat berinteraksi dan memahami perubahan sosial budaya pasca konflik sehingga cenderung masih individual.

6. Pemahaman masyarakat asli Sampit bahwa masyarakat Madura memiliki citrakan negatif sehingga mempengaruhi interaksi sosial budaya kehidupan masyarakat di Sampit Kalimantan Tengah.

1.3 Cakupan Masalah

Mengingat konflik yang terjadi di Sampit Kalimantan Tengah sudah terjadi sangat lama hampir 15 tahun yang telah lalu, seharusnya interaksi sosial di dalam kehidupan masyarakat sudah berjalan dan kembali seperti sediakala akan tetapi interaksi sosial hubungan di dalam lingkungan masyarakat masih belum mengalami perubahan. Cakupan masalah dalam penelitian ini terdiri dari: 1) interaksi sosial masyarakat pasca konflik antar suku di Kalimantan Tengah; 2) Perubahan sosial masyarakat pasca konflik antar suku di Kalimantan Tengah; 3) Upaya yang dilakukan suku Dayak dan Madura menjaga keharmonisan pada kehidupan sosialnya di lingkungan masyarakat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada sejumlah permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk interaksi sosial antara suku Dayak dan suku Madura pasca konflik antar suku di Sampit Kalimantan Tengah?

2. Bagaimana proses sosial dan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial pasca konflik antar suku Dayak dan suku Madura di Sampit Kalimantan Tengah?
3. Bagaimana pola edukasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan pasca konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Sampit Kalimantan Tengah?
4. Bagaimana perubahan sosial budaya masyarakat pasca konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Sampit Kalimantan Tengah?

1.5 Tujuan Penelitian

Berpijak pada latar belakang, penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk interaksi sosial antara suku Dayak dan suku Madura pasca konflik antar suku di Sampit Kalimantan Tengah.
2. Menganalisis proses sosial dan faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi sosial pasca konflik antar suku Dayak dan suku Madura di Sampit Kalimantan Tengah.
3. Menganalisis Pola Edukasi Yang Dilakukan Pemerintah Dan Masyarakat dalam Menjaga Keharmonisan Pasca Konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Sampit Kalimantan Tengah.
4. Menganalisis perubahan sosial budaya masyarakat pasca konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Sampit Kalimantan Tengah.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan akan dihasilkan sintesis mengenai pembagunan dan pengembangan gagasan serta penguatan kajian interaksi sosial, perubahan sosial budaya pasca konflik antara suku, yang akan semakin memperkuat kajian konflik sosial dilihat dari perspektif perubahan sosial budaya, struktural fungsional dan teori konflik yang akan menambah dan memperkuat kajian bidang sosiologi.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menata dan merekonstruksi interaksi serta perubahan sosial budaya dalam masyarakat multietnik di Sampit.
2. Penelitian ini memberikan kerangka prosedur pengembangan interaksi dan perubahan sosial budaya pasca konflik antar suku di Kalimantan Tengah.
3. Penelitian ini memberikan pemahaman hermeneutis proses-proses dan kebijakan interaksi dan perubahan sosial budaya pasca konflik antar suku di Kalimantan Tengah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Interaksi sosial

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berinteraksi dengan sesamanya karena itu mencapai kebutuhan-kebutuhan yang dikehendaki bergantung bantuan dari orang lain. inilah dasar dan alasan antara individu yang satu dengan yang lain melakukan interaksi sosial. Dilingkungan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat tidak lepas adanya hubungan sosial (Rustanto, 2015:7).

Menurut Turner, interaksi adalah proses individu saling bertukar gestur atau sikap tubuh, menafsirkan sikap tubuh dan menggunakan alat peraga fisik untuk memproyeksi citra diri tertentu kepada orang lain (*interaction-process of individuals mutually exchanging gestures, interpreting those gesture and physical props to project a particular image of oneself to others*). Alam semesta sosial pada akhirnya terdiri dari individu yang berinteraksi satu sama lain (Zacky, 2015:25).

Berger dan Luckman (1990), interaksi akan dapat berjalan dengan dengan baik apabila dilakukan melalui suatu media, yang dimaksudkan sebagai sarana penunjang agar proses interkasi dapat berjalan dengan baik dalam hali ini misalnya penggunaan bahasa. Bahasa dapat dikatakan sarana

agar proses interaksi menjadi memiliki makna atau dapat dikatakan sebagai “*shared values*” yang esensial dalam mendukung kelancaran interaksi (Sikwan, 2017).

Tatanan interaksi adalah (*interaction order*) adalah suatu tatanan institusional tersendiri. Tatanan interaksi terdiri dari serangkaian hak dan kewajiban-kewajiban interaksional yang kompleks yang keduanya terkait erat dengan “wajah” (klaim-klaim langsung seseorang tentang “siapa dirinya” dalam suatu interaksi), ciri-ciri identitas personal yang lebih tahan lama, dan juga institusi-institusi sosial makro pada skala yang besar. (Goffman, 1983, Turner, 2012).

Menurut Bonner, interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. Rumusan ini dengan tepat menggambarkan kelangsungan timbal-baliknya interaksi sosial antara dua atau lebih manusia (Gerungan, 2004:62).

Bagi Dawson dan Gelty, interaksi sosial adalah proses di mana antara individu saling menembus pikiran satu sama lain. Interaksi dapat terjadi antara dua atau lebih individu atau kelompok. Definisi sederhana interaksi sosial merupakan sebuah perilaku antaradua orang atau lebih yang saling memberi arti (*social interacton a behavior between two or more people that is given meaning*) (Zacky, 2015:25).

Interaksi merupakan hubungan sosial antara individu dengan lingkungannya, bisa juga dalam bentuk penyesuaian diri hubungan individu dengan lingkungannya (Umar A., Sumule, dan Jaya, 2016). Penyesuaian diri dan interaksi pasca konflik dalam masyarakat tentu saja tidak mudah, Haba (2012) berpendapat, mereka yang berkonflik baik mereka yang terlibat langsung maupun mereka yang hanya terpapar konflik akan mengalami trauma sehingga dalam proses pemulihan pasca konflik memerlukan waktu cukup panjang, karena berkaitan dengan mental serta psikologis masyarakat.

Interaksi manusia terjadi setiap kali seseorang mengadakan tanggapan terhadap aksi orang lain. berarti bahwa kita menentukan apa arti perbuatan orang tersebut kepada kita, lantas kita mengadakan tanggapan yang sesuai dengan penafsiran tingkah laku orang tersebut menurut pendapat kita. Oleh karena itu sebetulnya tanggapan kita merupakan daya rangsang terhadap orang tersebut yang pada gilirannya akan mengadakan reaksi terhadap tindakan kita (Cohen dalam Simamora,1983).

Interaksi sosial tak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu (1) adanya kotak sosial, dan (2) adanya komunikasi. Kontak sosial dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Kontak juga berifat primer jika itu terjadi secara langsung atau *face-to-*

face, dan sekunder jika hubungan itu melalui perantara orang atau media lain (Dayakisni, Hudaniah, 2012).

Menurut Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun manusia dengan kelompok masyarakat (Rozi, 2013;). Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial (yang juga dapat dinamakan proses sosial) karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial (Soekanto & Sulistyowati, 2014:55).

Menurut Gillin dan Gillin Interaksi sosial antar manusia terjadi dalam konteks proses sosial. Ada dua jenis proses sosial yakni; (1) proses yang asosiatif yaitu akomodasi, akulturasi, dan asimilasi; (2) proses yang diasosiatif yaitu persaingan/kompetisi, kontraversi dan konflik (Soekanto, 1989;Liliweri, 1994). Sementara Robert E. Parkada empat bentuk proses sosial yang penting, yakni konflik (*conflict*), akomodasi (*accomodation*), persaingan (*competition*), dan asimilasi (*assimilation*) (Poerwanto, 1999).

Proses sosial asosiatif merupakan proses sosial yang menjadi bagian dari fakta sosial, anggota kelompok masyarakat yang ada di dalamnya saling melengkapi satu sama lain terciptanya harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Kehidupan harmoni sosial ini terbentuk dari kondisi sosial yang teratur atau disebut *social order*. Proses sosial

asosiatif menyangkut di dalamnya, kerjasama (*co-operation*), akomodasi (*accomodation*), dan asimilasi (*asimilation*). Secara umum dapat dimengerti bahwa dari ketiga bagian tersebut dapat terlaksana apabila masyarakat menjadi dinamis, dapat hidup saling melengkapi serta hidup berdampingan. (Setiadi dan Kolip, 2011; Irfani, 2018).

Tiap masyarakat merupakan suatu kesatuan dari individu-individu yang satu dengan lainnya berada dalam hubungan interaksi yang berpola mantap. Interaksi itu terjadi bila seorang individu dalam masyarakat berbuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu respons atau reaksi dari individu-individu lainnya (Koentjaraningrat, 1990:61-61).

Banyak proses interaksi dalam banyak masyarakat di dunia, salah salah menangkap serupa itu sangat sering terjadi yang menjadi pangkal utama dari berbagai ketegangan yang ada dalam tiap masyarakat yang hidup. Tindakan interaksi antara individu dalam rangka kehidupan masyarakat. di antara semua tindakannya yang berpola tadi perlu diadakan perbedaan antara tindakan-tindakan yang dilaksanakan menurut pola-pola yang resmi (Koentjaraningrat, 1990: 62-63).

Konsep interaksi itu penting karena tiap masyarakat merupakan suatu kesatuan dari individu yang satu dengan lain berada dalam hubungan berinteraksi yang berpola mantap. Interaksi itu terjadi bila seseorang individu dalam masyarakat berbuat sedemikian rupa sehingga

menimbulkan suatu respon atau reaksi dari individu-individu lain (Koentjaraningrat, 2009:131).

Semua interaksi manusia pasti melibatkan saling tukar pesan secara terus menerus antara orang-orang yang terlibat didalamnya, di mana seseorang kadang menjadi pembicara dan kadang menjadi pendengar. Hak-hak dan kewajiban untuk berbicara dan mendengarkan naik turun sesuai dengan dan diakomodasi di dalam suatu sistem giliran-bicara yang mengatur kesempatan-kesempatan untuk bertindak tanpa harus banyak pengacu pada aktor-aktor tertentu yang terlibat di dalam interaksi yang bersangkutan (Rawls, 1971, Turner, 2012).

Proses interaksi dan komunikasi merupakan pertukaran makna-makna dan simbol-simbol yang syarat akan muatan makna. Pada prosesnya bagian-bagian individu akan selalu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh individu lainnya. Sehingga dengan demikian individu tidak terpengaruh oleh apapun atau dapat dikatakan bebas nilai dari pengaruh individu lainnya, baik secara individu dan bahkan dalam anggota kelompok. Dengan demikian individu dalam berinteraksi dan komunikasi akan sangat tergantung pada bagaimana proses penyesuaian dirinya pada lingkungannya yang sangat majemuk (Tripambudi, 2012).

Interaksi sosial menurut Setiadi dan Kolip (2013) merupakan hubungan timbal balik antarmanusia dalam kehidupan sosial. Adapun manusia sebagai insan individu masing-masing memiliki karakter dan

kepribadian yang berbeda. Setiadi dan Kolip kemudian mempertegas, bahwa Realitas tersebut berarti kehidupan sosial terdiri dari kelompok manusia yang beragam karakter dan kepribadian. Jika ada dua orang mengadakan interaksi, maka dalam proses sosial tersebut akan dua kepribadian yang berbeda (Hafid, 2016).

Interaksi sosial adalah proses dasar dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi hanya ketika hubungan sosial berlangsung antara manusia; kontak sosial hanya ketika orang-orang saling berkomunikasi dalam memberikan makna. Simbol adalah media komunikasi dan rangkuman pengalaman yang memberikan dasar untuk pemahaman umum dari situasi dalam interaksi sosial. konteks dimana interaksi sosial merupakan tempat dalam struktur sosial dengan norma-norma, peran, serta nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia (Chitambar, 1973: 266).

Barth, berpendapat bahwa perbedaan yang muncul dalam proses interaksi merupakan hal yang wajar, serta tidak seharusnya perbedaan identitas etnis menjadi halangan dan menjadikan salah satu pihak melepaskan identitas etniknya. Keharmonisan dalam hubungan antaretnik merupakan suatu keharusan dalam menjalani kehidupan yang harmonis pada masyarakat multibudaya (Lampe, 2010). Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara individu satu dengan individu lainnya dimana individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lainnya sehingga

terdapat hubungan yang saling timbal balik (Walgito, 1990;Dayakisni, Hudaniah, 2012).

Secara teoritis, sekurang-kurangnya ada dua syarat bagi terjadinya suatu interaksi sosial, yaitu terjadinya kontak sosial dan komunikasi. Terjadinya suatu kontak sosial tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga tergantung kepada adanya tanggapan terhadap tindakan tersebut (Narwoko & Suyanto, 2011:16).

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama. bertemunya orang-perorang secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosia. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan-persaingan, pertikaian dan lainsebagainya maka dapat dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan dasar proses sosial, yang menunjukkan pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis (Soekanto & Sulistyowati, 2014:54-55).

Menurut Gillin dan Gillin, Interaksi sosial merupakan kunci kehidupan sosial. Interaksi mengacu pada hubungan antar individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok (Wasino, 2006; Rozida, 2011). Interaksi dapat dilihat

sebagai tindakan-tindakan yang saling ditunjukkan oleh dan di antara dua orang pelaku atau lebih. Dalam kaitannya dengan interaksi sosial antar etnik, maka tindakan-tindakan itu dipandang terkait dengan identitas etnik (Suparlan, 1989; Wasino, 2006).

Interaksi sosial merupakan proses untuk memahami keragaman serta perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia (Mahrudin, 2013). Interaksi sosial mempunyai tujuan tertentu. Orang bertindak dan bereaksi terhadap orang lain dalam rangka mencapai tujuan mereka. Dalam beberapa interaksi partisipan mempunyai tujuan yang berbeda-beda (Sumarti dalam Nasdian, 2015).

Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat. Interaksi tersebut lebih nyata ketika terjadi benturan antara kepentingan perorangan dan kepentingan kelompok. Jika antarkelompok terdapat kesamaan-kesamaan tertentu, maka akan terjadi kerja sama antarkelompok sosial, sebaliknya jika di antara kelompok-kelompok terdapat beberapa perbedaan, maka kemungkinan akan terjadi konflik antarkelompok sosial. Interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak-pihak jika terjadi reaksi terhadap dua belah pihak (Setiadi dan Kolip, 2011:63).

Menurut Hoogvelt, masyarakat selain dikonsepsikan sebagai sistem interaksi, juga kehidupan masyarakat ditempatkan pada dua posisi secara gradual (*cybernetic level*). Konsep ini mengandung konsekuensi dalam

dua hal: pertama, interaksi sosial yang bersifat individual; dan kedua, interaksi sosial yang bersifat kolektif. Masyarakat tidak terlepas dari problematikanya masing-masing. Ini berarti masyarakat mempunyai realitas sendiri sebagaimana apa adanya (*suigeneris*) atau sebagaimana sesuatu yang ada pada dirinya sendiri (*as a thing in itself*) yang karenanya keanggotaan tak dapat diperkecil lagi (Narwoko dan Suyanto, 2011:371).

2.1.2 Pengertian Perubahan Sosial

Herbert Spenser adalah salah satu tokoh yang mendefinisi makna dari perubahan sosial. Menurut Spencer perubahan sosial merupakan suatu masyarakat tradisional yang kemudian mengalami perubahan, selanjutnya masyarakat tersebut kembali lagi pada kehidupan tradisionalnya (Setyaningrum, Astuti, & Alimi, 2017). Sedangkan pandangan Gillin dan Gillin, mengartikan perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, dan ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat (Ngafifi, 2014).

Perubahan sosial, dapat dikatakan bahwa perubahan pada segi struktural masyarakat seperti pola-pola perilaku dan pola interaksi antar-anggota masyarakat; perubahan pada segi struktur masyarakat seperti nilai-nilai, sikap-sikap, serta norma-norma sosial masyarakat; perubahan

di berbagai tingkat kehidupan manusia mulai dari tingkat individual, keluarga, masyarakat hingga tingkat masyarakat dunia; perubahan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan (*disequilibrium*) dalam suatu sistem masyarakat (Abdullah, 2011:208).

Perubahan sosial menurut Soekanto (2012), adalah pergeseran nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, pelapisan sosial, kekuasaan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan sosial juga disebut transformasi sosial. Perubahan sosial mengarah pada pergeseran yang bersifat dari pola-pola tradisional atau bahkan mengalami kehancuran (Setiadi dan Kolip, 2011; Suryanegara, dkk., 2015).

Secara umum, menurut Soekanto (2012), perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Unwanullah (2012) menyatakan bahwa globalisasi menjadi salah satu faktor dalam proses perubahan dalam aspek kehidupan manusia yang dewasa ini perilaku, gaya hidup serta nilai-nilai dalam masyarakat era global menjadi kebudayaan global.

Ogburn (1932) menjelaskan mengenai makna perubahan sosial yang meliputi perubahan teknologi, sehingga mengakibatkan perubahan lingkungan material dan mengaturnya, kemudian akibat dari perubahan

tersebut menimbulkan perubahan atau modifikasi sikap-sikap, kebiasaan-kebiasan serta lembaga sosial (Hatu, 2011). Perubahan sosial adalah tranformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu (Macionis, 1987;Sztompka, 2014). Perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antarindividu, kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu tertentu (Ritzer, 1990; Sztompka, 2014).

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur sosial dan lembaga sosial masyarakat. Perubahan sosial meliputi perubahan dalam berbagai hal, seperti perubahan teknologi, perilaku, sistem sosial, dan norma. Perubahan tersebut mempengaruhi individu dalam masyarakat tertentu (Maksum, 2016:159).

Pendapat Morrison MacIver, bahwa perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial (Social Relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial. Perubahan sosial adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk perubahan yang terjadi dalam interaksi manusia dan relasinya. Masyarakat merupakan jaringan hubungan sosial dan perubahan sosial. Berarti terdapat perubahan dalam sistem hubungan sosial. Perubahan terjadi dalam proses sosial interaksi sosial dan organisasi sosial (Jacky, 2015:86).

Bangsa Indonesia saat ini juga dihadapkan pada perubahan sosial yang luar biasa kompleks akibat globalisasi dan modernitas tahap lanjut atau pos-modernisme yang membawa dampak luas pada kehidupan masyarakat diberbagai bidang. Lebih-lebih dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin canggih, yang membawa perubahan lingkungan dan alam pikiran serta sikap hidup manusia yang menurut Jean Baudrillard disebut sebagai *hyper-reality* atau realitas buatan yang mempesona tetapi menimbulkan masalah sosial yang kompleks (Haedar, 2016:16).

Perubahan sosial budaya terjadi karena adanya kontak budaya antar negara. Kontak budaya dapat dimaknai sebagai pertemuan antara nilai-nilai baru dengan nilai-nilai lama yang saling mendominasi dan sangat berpengaruh dalam tataran *surface structure*, yakni pada sikap dan pola-pola perilaku, serta dalam tataran *deep structure* yaitu pada perubahan sistem nilai, Pandangan hidup, filsafat, dan keyakinan (Suwardani, 2015).

Berbagai macam perubahan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan hasil dari interaksi individu dengan individu lainnya, maupun individu dengan kelompok masyarakat baik dalam bentuk kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi dan integrasi, bahkan yang lebih banyak muncul interaksi dalam bentuk konflik dan persaingan dalam hubungan individu dan masyarakat (Poerwanto, 2005).

2.1.3 Pengertian Konflik

Lewis A. Coser menjelaskan mengenai pengertian konflik yang selama ini terus menerus terjadi selama masyarakat masih dalam tahapan perkembangan global. menurut Coser konflik merupakan sebuah pertentangan nilai-nilai yang belum ditemukannya titik penyelesaiannya baik yang berhubungan dengan kekuasaan, identitas, status/identitas, serta sumber ekonomi. Pada satu sisi konflik merupakan penyebab diintegrasikan, disisi lain konflik merupakan pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan identitas mereka dalam struktur sosial di Masyarakat (Humaidy, 2007; Imanuddin, 2009; Demartoto, 2010).

Menurut Minnery (1985), konflik merupakan pertentangan yang disebabkan oleh faktor interaksi antara dua atau lebih, dimana salah satu pihak memiliki perbedaan tujuan, perbedaan tersebut kemudian semakin dipertajam dan lahirnya tindakan-tindakan saling menjatuhkan salah satu pihak baik dengan adanya pertikaian atau pertentangan, dimana pertikaian merupakan bentuk persaingan yang berkembang secara negatif. (Astri, 2012).

Konflik adalah keadaan anggota masyarakat yang saling bertikai, bertentangan, dan bersaing dengan keinginan untuk saling menyingkirkan, menjatuhkan, mengalahkan, hingga memusnahkan, walaupun harus menggunakan kekerasan untuk mewujudkan keinginan tersebut (Setiadi dan Kolip, 2011:34). Konflik tidak akan terjadi jika

antara kedua belah pihak yang bertikai masing-masing memiliki keterbukaan baik dalam sikap serta interaksi sosialnya di lingkungan masyarakat (Juditha, 2015).

Konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Mitchell, 1981; Suharno, 2006). Pengertian ini harus dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh (Fisher, et.al., 2001; Suharno, 2006).

Konflik dapat muncul karena tingginya prasangka yang ada tengah masyarakat, dan kelompok baik dikarenakan perbedaan suku, agama ras dan golongan (Saleh, 2010). Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial, dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan akan selalu terjadi (Rustanto, 2015:68).

Menurut Gay Lumsden dan Donald Lumsden, konflik merupakan pertentangan atau perselisihan tujuan dari individu secara perorangan

maupun individu dalam anggota kelompok (Inayah, 2014). Konflik biasanya terjadi ketika norma sosial dalam keadaan lemah atau sedang mengalami perubahan. Pada saat-saat semacam itu cenderung membentuk cara-pandang yang bersifat *idiosyncratic* mengenai hak-haknya cara pandang yang tidak cocok dengan cara-pandang yang dibentuk orang lain (Pruitt & Rubin, 2009:32).

Konflik sosial juga dapat menjadi efek domino jumlah penduduk yang semakin banyak. Konflik ini dapat disebabkan persaingan untuk mendapatkan berbagai hal. Persaingan budaya, persaingan kerja, persaingan teknologi, dan sebagainya. Beberapa negara harus berkonflik dengan negara lain hanya untuk menunjukkan kekuatannya. Menunjukkan kecanggihan senjata yang mereka ciptakan, konflik juga terjadi dalam lingkungan keluarga akibat kesenjangan pisisi suami dan istri (Martono, 2016:28).

Menurut Simmel, bentuk lain dari konflik sosial adalah interaksi sosial, dalam interaksi sosial pasti akan memunculkan konflik sosial, di samping bentuk hubungan lainnya seperti akomodasi, kerjasama dan kompetisi. Konflik sosial yang berlangsung dalam komunitas majemuk tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor internal individu seperti watak dan kepribadian serta konflik-konflik kepentingan subjektif dari setiap individu tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, seperti yang menyangkut kebijakan (Romli, 2015).

Menurut Soetomo, masalah konflik atau paling tidak terhambatnya proses integrasi antara transmigrasi dengan penduduk asli seringkali juga didasari oleh perbedaan atau pertentangan nilai inti, sedangkan perbedaan yang menyangkut unsur budaya fisik juga dapat menyulut terjadinya konflik yang bersifat destruktif atau fungsional negatif terhadap integrasi sosial. Apalagi kalau kemudian didasari bahwa antara kedua belah pihak terdapat juga pertentangan kepentingan sehingga masing-masing pihak berposisi sebagai kelompok kepentingan terhadap yang lain (Soetomo, 2013;108).

Setiap masyarakat yang majemuk dari segi etnis dan memungkinkan ekspresi bebas tuntutan-tuntutan politik, konflik etnis secara umum tidak terhindarkan. Sesungguhnya konflik tersebut mungkin bersifat inheren dalam seluruh sistem politik yang pluralistik, baik otoritarian atau demokrasi (Varshney, 2009:29).

Konflik etnis merupakan ciri lazim dari sistem demokrasi yang mejemuk secara etnis, karena jika terdapat kelompok-kelompok etnis yang berbeda dan tersedia kebebasan untuk berorganisasi, maka konflik menyangkut sumber daya, identitas, patronasi dan kebijakan mungkin terjadi. Konflik seringkali terjadi tidak terlepas dari kondisi bangsa Indonesia yang memiliki masyarakat multientik (Varshney, 2009; Basir, 2011; Suratman, 2017).

Konflik sosial dalam pandangan Dahrendorf adalah persoalan dinamika masyarakat yang mengkaitkan kekuasaan, kepentingan, dan kelompok sosial. Menurut Dahrendorf konflik memiliki dua perspektif yakni, *Pertama*, konflik terjadi disebabkan oleh proses integrasi sosial di dalam masyarakat yang belum terselesaikan. Penyebabnya gagalnya proses integrasi adalah akulturasi yang tidak berjalan dengan baik diantara dua kelompok komunitas atau lebih yang memiliki sistem kebudayaan, agama, dan etnisitas yang berbeda. *Kedua*, konflik merupakan sebuah proses alamiah yang merupakan proyek rekonstruksi sosial, pandangan ini seirama dengan pendapat Paul Wehr (Rosidi, 2016). Sehingga konflik jika dilihat dari sudut pandang “fungsional” sebagai suatu strategi untuk menghilangkan unsur-unsur disintegratif di masyarakat yang tidak terintegrasi secara sempurna (Gonceng, 2012; Humaedi, 2014; Kolopaking, Lubis, & Pattiselanno, 2007).

Menurut Dahrendorf dalam upaya penyelesaian konflik perlu adanya pemaksaan yang bersumber dari kesepakatan bersama (konsensus) yang diaplikasikan melalui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. melalui kesepakatan bersama maka nilai-nilai dan norma-norma yang dipaksakan dimaksudkan akan mempersatukan serta dapat mengendalikan masyarakat, sehingga konflik dapat di minimalisir serta tidak terjadi konflik yang mengarah kepada kehancuran (Bahari, 2014).

Pandangan Fisher, dalam lingkungan komunitas, perpecahan antara kelompok-kelompok kepentingan pada isu-isu sosial penting dapat menyebabkan polarisasi dan permusuhan, sementara konflik intensitas rendah antara kelompok-kelompok etnis, ras, atau agama dinyatakan dalam prasangka, diskriminasi, dan aktivisme sosial untuk mengurangi kesenjangan (Deutsch, Coleman dan Marcus, 2016:197).

Konflik merupakan pertikaian antara individu maupun kelompok, dalam konflik yang terjadi dalam masyarakat banyak faktor yang mendasarinya diantaranya sosial, ekonomi, politik, budaya serta lain sebagainya (Retnowati, 2014). Sementara menurut Fisher, di masyarakat pada konflik dengan intensitas tinggi antara kelompok identitas tersebut dalam skala yang lebih luas dapat pecah menjadi perang etnopolitis, yang melibatkan komunitas internasional dan aktor-aktor lokal. Di semua tingkat interaksi manusia, konflik yang ditangani dengan buruk antara pemerintah dan konstituen atau antara mayoritas dan minoritas dapat menyebabkan frustrasi dan keterasingan di kedua pihak. (Deutsch, Coleman dan Marcus, 2016:197).

Secara teoritis, konflik yang terjadi beberapa daerah di Indonesia menjelaskan bahwa interaksi dan hubungan antarmanusia pada semua level baik antarindividu, kelompok, serta komunitas suku, etnis dan agama tidak selalu berjalan dengan baik seperti diharapkan. konflik antar etnis memang terkadang dapat dieliminasi dengan adanya proses interaksi

sosial yang intens dan mekanisme *cross-cutting affiliation*. Tetapi, pada tingkat kelompok niscaya yang namanya syakwasangkadan dendam akan tetap membara (Hartono, 2011; Narwoko dan Suyanto, 2011:202).

Kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di akhir tahun 1990-an di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam Negara-bangsa, betapa kentalnya prasangka antar kelompok, dan betapa rendahnya saling pengertian antarkelompok menyangkut nilai-nilai multikulturalisme masyarakat (Mahfid, 2014;87).

Semakin plural atau multikultural suatu masyarakat akan memunculkan benih-benih konflik dan isu baru seperti minoritas nasional dan etnis, menuntut pengakuan dan dukungan terhadap identitas sosial mereka (Kymlicka, 2003;Herlambang dkk, 2015).

Masyarakat multikultural mengandung potensi konflik. Konflik adalah situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat yang kacau atau tidak adanya ketertiban, saling klaim antar pihak, berselisih, bersengketa, bermusuhan dari yang sifatnya ancaman kekerasan sampai kepada kekerasan fisik (Suharno, 2013).

Masyarakat multikultural sebagai berikut. *Pertama*, adalah kelompok masyarakat yang memiliki budaya sebagaimana umumnya masyarakat, namun dalam beberapa hal mereka memiliki keyakinan dan praktek keyakinan yang berbeda sesuai dengan wilayah kehidupan dan

cara hidup yang berlainan. *Kedua*, kelompok masyarakat yang di dalamnya ada kalangan yang kritis terhadap berbagai nilai dan prinsip utama yang ada dalam budaya dominan masyarakat tersebut, untuk kemudian berupaya mengkonstruksinya kembali. *Ketiga*, kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran diri yang berbeda, terorganisir dengan baik, dan mereka memiliki hidup dengan sistem keyakinan dan praktek keyakinan yang berlainan. Gejala ini disebut keanekaragaman komunal (*communal diversity*). (Parekh, 2000; Suharno dkk, 2013).

Konflik sosial selalu berhubungan dengan proses interaksi sosial, baik konflik tersebut belum terjadi, maupun pasca terjadinya konflik. proses interaksi sosial dapat terjadi dalam bentuk kerjasama, persaingan, atau pertentangan. Interaksi sosial berdampak pada proses sosial yang di dalamnya berhubungan dengan akomodasi, asimilasi, dan akulturasi dan asosiatif berkaitan dengan kompetisi dan konflik (Arraiyyah dan Nahravi, 2005).

Konflik menyebabkan terjadinya interaksi pada tataran yang lebih serius dari sekadar kompetisi. Sebagaimana yang dinyatakan Schelling, konflik, kompetisi, dan kerja sama (*cooperation*) pada dasarnya saling berkaitan, konflik terjadi ketika tujuan, kebutuhan, dan nilai-nilai kelompok yang bersaing bertabrakan dan akibatnya terjadilah agresi, walaupun belum tentu berbentuk kekerasan (Schelling, 1960; Suryana & Rusdiana, 2015).

Konflik bisa disebabkan oleh banyak hal. Konflik dapat disebabkan oleh polarisasi yang terus menerus terjadi di masyarakat. Polarisasi sosial yang memisahkan masyarakat berdasarkan penggolongan-penggolongan tertentu dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan dan permusuhan antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang dapat berujung pada munculnya kekerasan yang terbuka (Suharno, 2006).

Dua elemen kuat seringkali bergabung dalam konflik seperti ini. Yang pertama adalah *identitas*: mobilisasi orang dalam kelompok-kelompok identitas komunal yang didasarkan atas ras, agama, kultur, bahasa, dan seterusnya. Yang kedua adalah *distribusi*: cara untuk membagi sumber daya ekonomi, sosial dan politik dalam sebuah masyarakat. Ketika distribusi yang dianggap tidak adil dilihat bertepatan dengan perbedaan identitas (dimana, misalnya, suatu kelompok agama kekurangan sumber daya tertentu yang didapat kelompok lain), kita menemukan potensi konflik. (Harris dan Reilly, 2000).

Karakteristik yang paling menonjol dari konflik internal seperti ini adalah tingkat ketahanannya. Dan ini timbul, di atas semuanya, karena seringkali dasarnya terletak pada isu identitas. Dalam hal ini, istilah *konflik etnis* seringkali digunakan. Etnisitas adalah konsep yang luas, mencakup banyak sekali elemen: ras, kultur, agama, keturunan, sejarah, bahasa, dan seterusnya. Tetapi pada dasarnya, semua ini merupakan isu

identitas. Konflik yang disebabkan faktor-faktor ini disebut konflik yang berhubungan dengan identitas. (Harris dan Reilly, 2000).

Seringkali, faktor-faktor yang berhubungan dengan identitas ini bercampur dengan konflik atas pendistribusian sumber daya seperti wilayah, kekuasaan ekonomi, prospek lapangan kerja, dan seterusnya. Dalam kasus-kasus di mana identitas dan isu distributif dibaurkan, kesempatan bagi pemimpin yang oportunistik untuk mengeksploitasi dan memanipulasinya, dan ini menjadi potensi konflik yang paling tinggi (Harris dan Reilly, 2000).

Konflik identitas jauh lebih rumit, bertahan dan sulit dikelola, biasanya sulit sekali sampai pada kompromi, negosiasi atau pertukaran. Konflik-konflik seperti ini melibatkan klaim hak-hak kelompok: kelompok kebangsaan, kelompok jender, kelompok rasial, kelompok agama, kelompok kultural, dan seterusnya. Sebuah konflik dimana sebuah komunitas kekurangan sumber daya tertentu saja sudah cukup parah; tapi orang mungkin saja berharap untuk menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik tentang sumber-sumber daya ini. Konflik yang juga mengancam diri kita sendiri karena siapa kita sebenarnya lebih sulit untuk dikelola (Harris dan Reilly, 2000).

2.1.4 Hasil Penelitian yang Relevan

Tebel 2.1 Hasil Peneletian yang relevan

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Ida Bagus Wicaksana Herlambang, dkk/	2015	Masyarakat Multikultural : Studi Interaksi sosial antara masyarakat etnis bali dan etnis sasak di kota Alampua	Interaksi sosial masyarakat yang berpengaruh adalah faktor sugesti dalam kekuasaan dan pengaruh pihak puri terhadap masyarakat etnis Bali dan etnis Sasak.
2	Nasriadi	2014	Dinamika interaksi ke arah kepentingan integrasi sosial (studi pada komunitas masyarakat bugis dan toraja di desa lara kecamatan Baebunta Kabupaten luwu utara Provinsi sulawesi selatan)	Interaksi pada komunitas bugis dan toraja di desa lara mengarah pada kepentingan integrasi sosial karena adanya kepentingan yang sama yang menjadi perekat atau kohesi sosial yang menciptakan xenosentrisme masing-masing suku dalam beradaptasi
3	Rendra Havid Pranata dan Umi Hartati	2017	Interaksi sosial suku sunda dengan suku jawa (kajian akulturasi dan akomodasi di desa buko poso, kabupaten mesuji)	Proses interaksi antara suku Sunda dengan suku Jawa membentuk akulturasi dan melahirkan akomodasi. Interaksi di dorong oleh faktor sejarah kedatangan, keyakinan, serta kehidupan yang saling membutuhkan satu sama lain yang melahirkan sikap bekerjasama dan rasa satu kesatuan dalam lingkungan masyarakat.
4	Robert Alexander P	2005	Konflik Antar Etnis dan Penangulangannya	Konflik yang terjadi antara etnis Madura dan dayak di Sampit merupakan konflik

			(studi tinjauan Kronologi dalam kasus etnis di Sampit Kalimantan Tengah)	kultural yang telah berlangsung lama disebabkan oleh akumulasi tindakan kekerasan masa lalu yang dilakukan etnis Madura. Faktor penyebabnya diantaranya adalah hubungan yang tidak seimbang
5	Suharno, Samsuri, Iffah Nur Hayati	2013	Pengembangan Model Resolusi Konflik Untuk Masyarakat Multikultural (Studi Implementasi Kebijakan Resolusi Konflik di Sampit, Poso, dan Ambon)	Model penyelesaian konflik multikultural secara permanen yang dapat digunakan melalui belajar dari konflik di tiga daerah adalah model resolusi konflik dengan pendekatan politik rekognisi
6	Peter Arthur	2011	Capacity Development And Rconstruction In Post Conflict African Environmets	Pembangunan kembali pasca konflik adalah tergantung dari seberapa besar kemampuan membangun pembagunan infrastruktur, membangun struktur negara secara institusional, mewujudkan iklim politik ekonomi yang baik, pendidikan keahlian, perlindungan dan pelayanan sosial.
7	Christophe r R. Duncan	2009	Reconciliation And Revitalization: The Resurgence Of Tradition In Post Conflict Tobelo, North Maluku, Eastern Indonesia.	Penguatan identitas dan ketradisional adat tobelo merupakan bentuk pencegahan kekerasan/koflik antar etnis dan agama, yaitu islam dan kristen yang terjadi di Maluku.
8	Juozas Lakis	2008	Social conflicts and the culture of cooperation in	Kompleksitas dari masyarakat post komunis yg ingin menciptakan

			transitional society	lingkungan yang legal dan institusional dengan pengaruh dari para aktor sosial dalam bekerjasama untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan kesenjangan yang terjadi. Membangun lingkungan yang baru di akui secara institusional, meningkatkan kerjasama dan manage konflik dalam interaksi sosial merupakan indikator agar masa transisi dapat berlanjut dan progress.
9	Vicente Martinez, Vicente Penarroja, Miguel A. Seraano, Vanesa Hidalgo, Carolina Moliner, Alcia Salvador, Adrian Alacreu Crespo, Esther Gracia, Agustin Molina.	2014	Intergroup conflict and rational decision making	Konflik dalam group di perlukan kemauan saling diskusi agar keputusan rasional di dapatkan. Dengan mengedepankan kesadaran individual sebagaimana dalam teori of thingking dan affect heuristic bisa meningkatkan kemampuan dalam rasionalitas dalam pengambilan keputusan.
10	Zulfikar Ulil Multazam, Wahab Hasbullah, Lukmanul Hakim	2014	View Point Of Religious Conflict Based On The Conflict Vulnerable Index In Indonesia Underdeveloped	Penyelesaian konflik adalah dengan eksplorasi data sebagai bentuk alternatif dalam prioritas penyelesaian konflik. bahwa konflik pertengkaran, tawuran

			Areas	menempati posisi tertinggi, di ikuti konglik agama, etnis. Sedangkan daerah yang rawan akan konflik di mulai dari kupang, mimika, Maluku tengah. Data tersebut di ambil dari mulai tahun 2011 sampai 2013.
11	Greg Landsman, Jong Hyun Ham, Hyun Jung Min	2014	Multiculturalism In South Korea And Differing Views On Adaptional Based On Foreign Interaction With Korean Culture	Interaksi dan adaptasi orang luar yang ada di korea selatan dengan budaya korea, di ketahui bahwa keinginan multikultural orang luar terhadap budaya di korea selatan kurang di mengerti karena di dasari oleh latar belakang yang berbeda dan kemudian prespektif yang berbeda, bahkan dari mayoritas orang luar yang ada di korea mengatakan bahwa multikulturalisme adalah positif namun mereka tidak percaya bahwa korea selatan mempunyai kebijakan multikultural seperti contoh bahwa bagaimana beradaptasi jika orang korea sendiri tidak ramah dan toleran terhadap orang luar.
12	Stefania Kolegarki	2012	Migrant Related Attitudes And Perceived Threats Between In Group And Out Groups, The Cases Of Greece And Sweden	Hasilnya adalah bahwa di Yunani pembiayaan hidup yang di berikan oleh pemerintah dalam jumlah kuantitasnya dari migran oposisi lebih tinggi dari in group dan out group, sedangkan persoalan

				ekonomi, budaya, etnis, dimana mayoritas lebih tinggi dalam finansial hidup daripada mayoritas. Sedangkan di swedia finansial living dalam in group lebih tinggi daripada out groups.
13	Stephen M, Croucher, Kyle J. Holody, Manda V. Hicks, Deepa Ommen, Alfred De Maris	2010	An Examination Of Conflict Style Preference in India	Bahwa ada perbedaan model konflik dari konflik agama di india, antara hindu dan islam. Jika hindu selain suka integratif dan dominasi, namun juga cenderung menghindar dan ada karakter obligasi juga. Sedangkan muslim lebih pada integratif dan compromi, kurang dalam dominasi dan menghindar.
14	Claude Helene Mayer, Christian Bones	2016	Spiritual Insight In Cross Cultural Conflicts And Mediation In Ecclesiastical Organizations In Tanzania.	Pegawai kegerejaan senior menjadi mediator untuk membangun kembali keharmonisan dan kedamaian melalui intervensi third party (pesta ketiga) dan pengembangan spiritual diri (spiritual self development). Di bentuk juga dewan kegerejaan sebagai solusi dalam konflik hubungan, konflik pekerja, proses restrukturisasi gereja dan sebagai bentuk resolusi dengan mengembangkan nilai nilai kerohanian kegerejaan seperti menggunakan konsep shalom dan creating love.
15	Y. Yasmi,	2007	Conflict	Ada usaha yang dilakukan

	C.J.P.Cof er, L.Yuliani, Y. Indriatmo ko Dan V. Heri		Manajemen Approaches Under Unclear Boundaries Of The Commons: Experiences From Danau Sentarum National Park Indpnesia	melalui Pendekatan managemen konflik dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi antara dayak iban dengan malay.
16	Zeric kay smith	2000	The Impact Of Political Liberalisation And Democratisation On Ethnic Conflict In Africa: An Empirical Test Of Common Assumptions	Terindikasi bahwa hubungan antara politik liberasi dan konflik etnik berkebalikan dengan prediksi asumsi umum. Liberasi yang dalam faktanya memiliki hubungan terbalik pada konflik etnik yang terjadi di wilayah gurun sahara antara 1988 dan 1997. Sedangkan demokrasi tidak memiliki pengaruh pada konflik etnik yang terjadi di dalam wilayah tersebut.
17	Oluseyi O.Fabiyi, Olufunmil ayo E. Thontteh,P aul Borisade	2012	The Spatial And Social Dimensioan Of Post Conflict Urban Recontruction Programme I Southwestern Nigeria. The Caseof Ile Ile, Nigeria.	Post konflik antara dua komunitas di nigerikaran a yaitu Ife dan modakkeke meninggalkan bangunan yang dibakar serta di tinggalkan begitu saja seperti sekolahan, klinik, dan kantor polisi. Terdapat perbedaan dalam proses pembangunan fisik dari 2 komunitas tersebut, dimana dalam kelompok ife pembangunan begitu lambat di karenakan faktor oposisi, sedangkan di klompok modakkke pembangunan begitu cepat

				karena faktor urban community. Berbagai program yang di lakukan untuk membangun kembali setelah post urban konflik antara lain, pembangunan institusi keamanan, membangun kembali program dan berbagai solusi politik, rebuild psiko sosial dan humanitis.
18	Dara Fatia & Alamsyah Taher	2017	Proses integrasi sosial dalam masyarakat Multikultural (Studi Pada Masyarakat Asli dan Masyarakat Pendatang yang Berdomisili di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa)	Masyarakat asli dan masyarakat pendatang, para transmigran maupun pendatang lain mampu berinteraksi dan terintegrasi dengan baik di tengah kemajemukan yang ada di daerah tersebut akibat adanya sikap keterbukaan serta toleransi yang tinggi diantara mereka dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Langsa. Semenara faktor faktor pendukung terjadinya integrasi dalam masyarakat diantaranya; faktor budaya, faktor kekerabatan, kepatuhan terhadap pemerintahan, perkawinan campuran, perekomonian, serta pendidikan.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh penelitian sejenis diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa temuan studi yang ada dalam penelitian terdahulu menggambarkan mengenai manajemen

konflik, interaksi antarsuku, penyelesaian konflik serta pembangunan pasca konflik. Hasil penelitian Ida Bagus Wicaksana Herlambang, dkk misalnya lebih menggambarkan bahwa faktor sugesti dan kekuasaan yang paling berpengaruh dalam interaksi sosial masyarakat etnis Bali dan etnis Sasak.

Kemudian hasil temuan studi yang dilakukan oleh Nasriadi (2014), menggambarkan bahwa interaksi pada kelompok suku bugis dan toraja di desa lara, ditekan pada kepentingan integrasi sosial sehingga masing masing suku menyesuaikan diri dan beradaptasi demi kerekatan hubungan. Hasil penelitian dari Pranata dan Hartani (2017), mengenai interaksi antara suku Sunda dan suku Jawa menunjukkan bahwa proses interaksi antara suku Sunda dengan suku Jawa membentuk akulturasi dan melahirkan akomodasi. Interaksi di dorong oleh faktor sejarah kedatangan, keyakinan, serta kehidupan yang saling membutuhkan satu sama lain yang melahirkan sikap bekerjasama dan rasa satu kesatuan dalam lingkungan masyarakat.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Robert (2005), memiliki kesamaan dengan studi Christopher (2009), Suharmo dkk. (2013) serta Zulfikar dkk. (2014), yang menjelaskan proses pencegahan, penanganan konflik, strategi dan model yang digunakan dalam penanggulangan konflik, rekonsiliasi serta resolusi konflik.

Sementara hasil studi Peter Arthur (2011), lebih menggambarkan pada pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan atau peningkatan keahlian sumber daya manusia, pada tataran ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Juozas Lakis (2008), Yasmi dkk (2007), serta Oluseyi dkk. (2012), yang menggambarkan menyelesaikan berbagai konflik sosial melalui pendekatan manajemen, pembangunan lingkungan yang baru, legal dan konstitusional agar tidak adanya kesenjangan sosial sehingga konflik dapat di *manage* dalam interaksi sosial dengan adanya peningkatan kerjasama. Namun temuan hasil penelitian Oluseyi dkk lebih spesifik kelompok Ife dari segi pembangunan lebih tertinggal dari kelompok Modakkeke, karena Kelompok Ife merupakan kelompok Oposisi sedangkan kelompok Modakkeke adalah kelompok komunitas di perkotaan.

Begitu juga hasil temuan yang didapat oleh Vicente Martinez dkk. (2014), bahwa dalam konflik grup diperlukan pemahaman setiap individu sehingga diperoleh keputusan yang rasional yang berdasarkan teori *of thingking dan affect heuristic*, dalam meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Temuan hasil penelitian Claude Helene Mayer dan Christian Bones (2016), lebih spesifik dari apa paparkan Vicente Martinez dkk, bahwa pegawai senior menjadi mediator dalam menjaga dan membangun keharmonisan serta kedamaian pengembangan spiritual diri (*spiritual self development*). Adanya dewan kegerejaan sebagai solusi

adanya konflik, proses restrukturisasi gereja dan sebagai bentuk resolusi dengan mengembangkan nilai nilai kerohanian kegerejaan seperti menggunakan konsep shalom dan creating love.

Hasil penelitian Landsman, Hyun Ham dan Jung Min (2014), menggambarkan tentang interaksi, serta adaptasi pendatang dengan budaya di Korea Selatan yang menganggap positif kehidupan serta kebijakan tentang multikultural di Negara tersebut, tetapi masih adanya keraguan bahwa sebagian orang korea selatan yang tidak ramah dan toleran terhadap orang luar. Sementara temuan penelitian Dara Fatia & Alamsyah Taher (2017), memberikan arah yang lebih jelas bahwa proses integrasi dalam menjaga keharmonisan pada masyarakat pendatang dan transmigrasi di Kota Langsa harus selalu didasarkan atas sikap keterbukaan dan toleransi yang tinggi ditunjang adanya faktor kekerabatan, ketaatan terhadap aturan yang berlaku, perkawinan campur, perekonomian dan pendidikan.

Kemudian hasil temuan Stefania Kolegarki (2012), memberikan gambaran bahwa di Yunani pemerintah memberikan biaya dengan perbedaan jumlah dari migran oposisi lebih tinggi dari in group dan out group, sedangkan persoalan ekonomi, budaya, etnis, dimana mayoritas lebih tinggi dalam finansial hidup dari pada minoritas tetapi di Swedia finansial living dalam in group lebih tinggi daripada out groups.

Penelitian Stephen M. Dkk (2010), menemukan perbedaan model konflik agama di india, antara hindu dan islam. Jika hindu selain suka integratif, dominasi, serta cenderung menghindar tetapi muslim lebih pada integrative berkompromi tidak dominasi dan cenderung menghindar. Sementara hasil temuan Zeric Kay Smith (2000), indikasi hubungan antara politik liberasi dan konflik etnik berkebalikan dengan prediksi asumsi umum. Liberasi yang dalam faktanya memiliki hubungan terbalik pada konflik etnik yang terjadi di wilayah gurun sahara antara 1988 dan 1997. Sedangkan demokrasi tidak memiliki pengaruh pada konflik etnik yang terjadi di dalam wilayah tersebut.

Dari temuan hasil penelitian diatas, jelas posisi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, *pertama* yaitu, dari teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan pasca konflik antarsuku, *kedua*, hasil penelitian ini nantinya akan memberikan varian baru dalam tipologi interaksi sosial pasca konflik, perubahan sosial pasca konflik, serta perubahan budaya pasca konflik antarsuku, lebih spesifik lagi antara suku Dayak dan suku Madura yang belum pernah diungkap oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

2.2. Kerangka Teoretis

2.2.1 Teori Interaksi (George Herbert Mead & Konsep Soerjono Soekamto)

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, kelompok dengan kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. apabila dua orang bertemu, baik dalam bentuk saling menegur, berjabat tangan saling berbicara bahkan mungkin saling berkelahi sudah dapat dikatakan berinteraksi sosial (Soekamto, 2014).

Menurut Soekamto (2014), interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok. dua syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu:

1. Adanya kontak sosial (social-contact), yang dapat berlangsung dalam tiga bentuk. Yaitu antarindividu, antarindividu dengan kelompok, antarkelompok. Selain itu, kontak dapat pula bersifat langsung maupun tidak langsung.
2. Adanya komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang di sampaikan oleh orang tersebut.

Soekamto (2014) berpendapat bahwa kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Antara orang-perorangan

Kontak sosial ini adalah apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dengan keluarganya. Proses demikian terjadi melalui sosialisasi (*socialization*), yaitu suatu proses, di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi anggota.

2. Antara perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya

Kontak sosial ini misalnya adalah apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat atau apabila suatu partai politik memaksa anggota-anggota untuk menyesuaikan diri dengan ideologi dan programnya.

3. Antara suatu kelompok manusia dengan manusia lainnya

Umpamanya adalah dua partai politik mengadakan kerjasama untuk mengalahkan partai politik yang ketiga di dalam pemilihan umum. Atau apabila dua buah perusahaan bangunan mengadakan suatu kontrak untuk membuat jalan raya, jembatan, dan seterusnya di suatu wilayah yang baru dibuka.

Menurut Soekamto (2014), berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor, antara lain, faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung. Apabila

masing-masing ditinjau secara mendalam, faktor imitasi misalnya, mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi sosial.

Soekamto melanjutkan bahwa, imitasi merupakan tindakan manusia untuk meniru tingkah laku orang lain yang berada disekitarnya. Imitasi banyak dipengaruhi oleh tingkat jangkauan inderanya, sebatas yang di lihat, didengar, dan dirasakan (Setiadi & Kolip, 2012).

Pandangan Soekamto (2014), Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi sesuatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Jadi proses ini sebenarnya hampir sama dengan dengan imitasi, tetapi titik tolaknya berbeda, berlangsungnya sugesti dapat terjadi karena pihak yang menerima dilanda oleh emosi, yang menghambat daya berpikir secara rasional.

Pendapat Soekamto (2014), Identifikasi sebenarnya merupakan kecendrungan-kecendrungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain. identifikasi sifatnya lebih mendalam dari pada imitasi, karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. proses identifikasi dapat berlangsung dengan sendirinya (secara tidak sadar), maupun dengan disengaja karena sering seseorang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu di dalam proses keidupannya.

Proses yang terakhir menurut Soekamto (2014), proses simpati sebenarnya merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya.

Melihat pandangan Soekamto tentang interaksi khususnya interaksi sosial, pada tataran konsep jelas memperkuat apa yang telah dikembangkan oleh George Herbert Mead sebelumnya, yakni mengenai teori interaksi simbolik. George Herbert Mead merupakan tokoh yang mempunyai pengaruh besar dalam mengagas munculnya teori interaksi simbolik yang telah dia kembangkan pada karyanya *Mind, Self, and Society* (1934), yang menjadi rujukan teori Interaksi Simbolik. Menurutnya, inti dari teori interaksi simbolik adalah tentang “diri” (*self*), menganggap bahwa konsepsi-diri adalah suatu proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain (Ahmadi, 2008).

Mead menjelaskan, agar interaksi sosial bisa berjalan dengan tertib dan teratur dan agar anggota masyarakat bisa berfungsi secara “normal”, maka yang diperlukan bukan hanya kemampuan untuk bertindak sesuai dengan konteks sosialnya, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk menilai secara objektif perilaku kita sendiri dari sudut pandang orang lain (Norwoko dan Suyanto, 2013:20).

Bagi Mead, individu adalah makhluk yang bersifat sensitif, aktif, kreatif, dan inovatif. Keberadaan sosialnya sangat menentukan bentuk lingkungan sosialnya dan dirinya sendiri secara efektif (Soeprapto, 2002, Ahmadi, 2008). Lebih jauh, Mead menjelaskan bahwa konsep “diri” (*self*) dapat bersifat sebagai objek maupun subjek sekaligus. Objek yang dimaksud berlaku pada dirinya sendiri sebagai karakter dasar dari makhluk lain, sehingga mampu mencapai kesadaran diri (*self consciousness*), dan dasar mengambil sikap untuk dirinya, juga untuk situasi sosial.

Argumentasi Mead dijabarkan dengan konsep “pengambilan peran orang lain” (*taking the role of the other*,) sebagai penjelasan “diri sosial” (*social self*) dari William James, dan pengembangan teori “diri” dari Cooley. Menurutnya, “diri” akan menjadi objek terlebih dahulu sebelum ia berada pada posisi subjek. Dalam hal ini, “diri akan mengalami proses internalisasi atau interpretasi subjek, atas realitas struktur yang luas. Dia merupakan produk dialektis dari “*I*” impulsive dari “diri”, yaitu aku, sebagai subjek dan “*Me*” sisi sosial dari manusia yaitu “saya” sebagai objek, Perkembangan “diri” (*self*), sejalan dengan sosialisasi individu dalam masyarakat yakni merujuk kepada kapasitas dan pengalaman manusia sebagai objek bagi diri sendiri. Ringkasnya, argumen Mead, bahwa “diri” muncul dalam proses interaksi karena manusia baru menyadari dirinya sendiri dalam interaksi social (Ahmadi, 2008).

Menurut Mead, orang tak hanya menyadari orang lain tetapi juga mampu menyadari dirinya sendiri. Dengan demikian orang tidak hanya berinteraksi dengan orang lain, tetapi secara simbolis dia juga berinteraksi dengan dirinya sendiri. Interaksi simbolik dilakukan dengan menggunakan bahasa sebagai satu-satunya simbol yang terpenting dan melalui isyarat simbol bukan merupakan fakta-fakta yang sudah jadi (Sulistiati, 2001).

Kemudian Mead menjelaskan, simbol berada dalam proses kontinu. Proses penyampaian makna inilah yang merupakan materi subjektif dari sejumlah analisis kaum interaksionalis simbolis. Dalam interaksi orang belajar memahami simbol-simbol konvensional dan dalam suatu pertandingan mereka belajar menggunakannya, sehingga mampu memahami peranan aktor-aktor lainnya (Sulistiati, 2001).

Menurut Mead (1934) kadang-kadang menggunakan konsep "*matrix triadic*" untuk menggambarkan dinamika penting dalam semua interaksi. Pertama, setiap organisme akan bergerak di dalam lingkungannya, sehingga ia akan mengirimkan sinyal untuk organisme lain. Kedua, organisme lain melihat gerakan ini dengan menyadari gerak tubuh, dan kemudian merespon gerakan tersebut dengan mengubah gerakan di lingkungan, sehingga sinyal akan terkirim dengan sendirinya. Ketiga, organisme asli merasakan sinyal-sinyal yang terakhir dan merespon mereka dengan mengubah jalurnya perilaku. Ketika tiga peristiwa ini

terjadi, maka proses telah selesai dan interaksi telah terjadi (Turner, 1988).

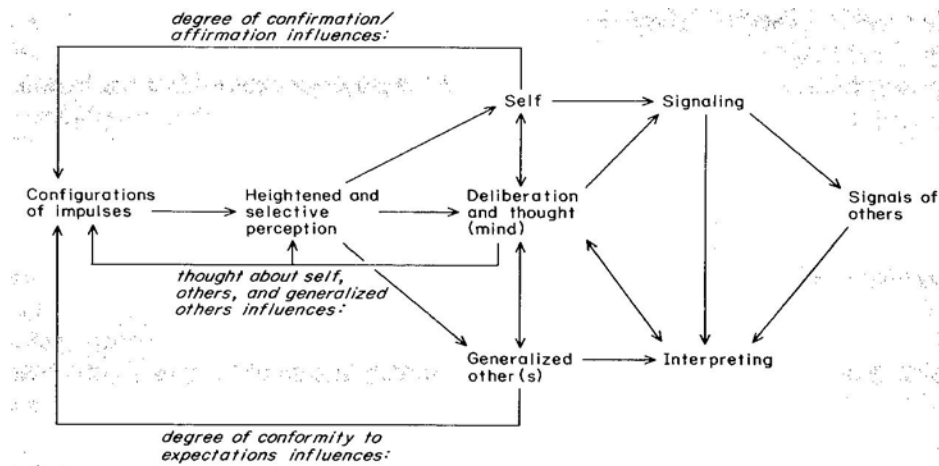
Pendapat Mead bahwa meskipun interaksi manusia mengandung tiga unsur dasar, secara kualitatif berbeda dengan interaksi non-manusia, Perbedaan kualitatif ini berawal dari apa yang Mead percaya (mungkin benar) untuk memastikan kemampuan unik dari manusia. Pertama, manusia menggunakan isyarat "konvensional" atau "signifikan", karena tanda-tanda yang terkoordinasi di antara manusia "berarti" hal yang sama baik pada organisme pengirim dan penerima (yaitu, mereka mengajukan tanggapan serupa, baik terselubung atau terbuka (Turner, 1988).

Kedua, manusia memiliki kapasitas untuk "mengambil peran," atau untuk menafsirkan isyarat konvensional orang lain dan secara mental "mengambil" atau menganggap perspektif dan kemungkinan tindakan orang lain. Ketiga, manusia memiliki kapasitas untuk "diri", karena mereka dapat memandang dirinya sebagai objek dalam situasi dengan membaca gerak tubuh mereka sendiri dan juga gerakan orang lain; Dan mereka dapat menggunakan perasaan diri ini sebagai pedoman untuk mengatur tanggapan mereka kepada orang lain.

Keempat, manusia mengungkapkan kapasitas untuk "pikiran" dalam arti bahwa mereka dapat "secara imajinatif melatih" jalur perilaku alternatif, memperkirakan berbagai hasil, menghambat apa yang dilihat sebagai tanggapan yang tidak tepat, dan memilih garis perilaku yang

tepat. Kelima, berdasarkan kemampuan mereka untuk "pengambilan peran" dan "pikiran," manusia dapat mengasumsikan perspektif "orang lain yang terionisasi" atau "komunitas sikap" dan menggunakan perspektif ini sebagai kerangka kerja untuk evaluasi diri dan memilih sebuah Garis perilaku yang tepat (Turner, 1988).

Analisis Mead (1938) mengenai "tindakan" tersebut menekankan empat fase: (1) "dorongan," atau keadaan disequilibrium dengan lingkungan; (2) "persepsi" yang tinggi dan selektif di mana benda, termasuk diri sendiri, orang lain, dan generalisasi orang lain, dipandang berkaitan dengan relevansinya untuk memulihkan keseimbangan; (3) "manipulasi" lingkungan eksternal melalui perilaku terbuka dan atau lingkungan internal dan internal melalui kemampuan perilaku terselubung untuk "pikiran," atau kemampuan untuk "menggunakan secara imajinatif" alternatif; Dan (4) "penyempurnaan," atau penghapusan dorongan. Penyumbatan dorongan meningkatkan intensitasnya, mempertinggi persepsi, dan mendorong pertimbangan pemikiran serta upaya terang-terangan dalam manipulasi lingkungan. Jadi, interaksi adalah, menurut pandangan Mead, selalu dibatasi oleh konfigurasi dorongan, karena ini mempengaruhi persepsi dan pemikiran. Tentu saja, interaksi masa lalu dan masa kini dengan orang lain adalah sumber utama dorongan; Konfigurasi dorongan berubah saat dorongan lama diperbaiki atau frustrasi dengan apa yang baru dimulai (Turner, 1988).



Gambar. 2.1 Model interaksi Mead

Daya tarik (1) persepsi "diri" sebagai obyek; (2) persepsi tentang "generalisasi lainnya" yang relevan; (3) manipulasi terselubung, atau pemikiran reflektif dan deliberatif yang melibatkan penilaian alternatif, self, dan generalisasi lainnya (s); (4) manipulasi terbuka, atau memberi sinyal melalui pancaran gerak tubuh; Dan (5) interpretasi orang lain, dan juga tindakan seseorang terhadap generalisasi konsepsi diri. dari seluruh proses baik secara langsung atau tidak langsung, berdampak pada konfigurasi dorongan individu saat mereka membatasi arus interaksi (Turner, 1988).

Mead kemudian membedakan interaksi sosial menjadi dua, yaitu interaksi non-simbolis dan interaksi simbolis. Interaksi non-simbolis berarti bahwa manusia merespon secara langsung terhadap tindakan atau isyarat orang lain, sedangkan interaksi simbolis berarti bahwa manusia

menginterpretasikan masing-masing tindakan dan isyarat orang lain tersebut berdasarkan arti yang dihasilkan dari interpretasi yang ia lakukan (Zajuli, 2014:122).

Ditambahkan oleh Mead, berpikir (*thinking*) sebagai “percakapan implisit individu dengan dirinya sendiri dengan memakai isyarat. Mead bahkan menyatakan “berfikir adalah sama dengan berbicara dengan orang lain. Berfikir melibatkan tindakan berbicara dengan dirinya sendiri. Jelas disini Mead mendefinisikan berfikir menurut aliran behavioris. Percakapan meliputi perilaku (berbicara) dan perilaku itu juga terjadi di dalam diri individu; ketika perilaku terjadi, berfikir pun terjadi (Ritzer dan Goodman, 2008).

Simbol signifikan juga memungkinkan Interaksi simbolik. Artinya, orang dapat saling berinteraksi tidak hanya isyarat tetapi juga melalui simbol signifikan. Kemampuan ini jelas mempengaruhi kehidupan dan memungkinkan terwujudnya pola interaksi dan bentuk organisasi sosial yang jauh lebih rumit ketimbang melalui isyarat. Simbol signifikan jelas penting perannya dalam pemikiran Mead (Ritzer dan Goodman, 2008).

Penjelasan Mead (1934) bahwa, pikiran sebagai proses percakapan seseorang dengan dirinya sendiri, tidak ditemukan di dalam diri individu; pikiran adalah fenomena sosial. Pikiran muncul dan berkembang dalam proses sosial dan merupakan bagian integral dari proses sosial. Proses sosial mendahului pikiran, proses sosial bukanlah produk dari pikiran.

Jadi pikiran juga dijelaskan secara fungsional ketimbang secara substantif. Melakukan sesuatu berarti memberi respon terorganisir tertentu; dan bila seseorang mempunyai respon itu dalam dirinya, ia mempunyai apa yang kita sebut pikiran (Ritzer dan Goodman, 2008).

2.2.2 Teori Perubahan Sosial (Piotr Sztompka)

Menurut Sztompka, perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Untuk itu konsep dasar mengenai perubahan sosial menyangkut tiga hal yaitu: *pertama*, studi mengenai perbedaan; *kedua*, studi harus dilakukan pada waktu yang berbeda; dan *ketiga*, Pengamatan pada sistem sosial yang sama (Martono, 2016).

Bagi Sztompka (2014:3), perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada sudut pengamatannya: apakah dari sudut aspek, fragmen atau dimensi sistem sosialnya. Ini disebabkan keadaan sistem sosial itu tidak sederhana, tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi muncul sebagai kombinasi atau gabungan hasil keadaan berbagai komponen.

Menurut Sztompka (2014:3), gabungan berbagai komponen tersebut sebagai berikut:

1. Unsur-unsur pokok (misalnya: jumlah dan jenis individu, serta tindakan mereka)
2. Hubungan antar unsur (misalnya: ikatan sosial, loyalitas, ketergantungan, hubungan antarindividu, integrasi)
3. Berfungsi unsur-unsur di dalam sistem (misalnya: peran pekerjaan yang dimainkan oleh individu atau diperlukannya tindakan tertentu untuk melestarikan ketertiban sosial)
4. Pemeliharaan batas (misalnya: kriteria untuk menentukan siapa saja yang termasuk anggota sistem, syarat penerimaan individu dalam kelompok, prinsip rekrutmen dalam organisasi, dan sebagainya)
5. Subsistem (misalnya: jumlah dan jenis seksi, segmen, atau divisi khusus yang dapat dibedakan)
6. Lingkungan (misalnya: keadaan alam atau lokasi geopolitik)

Kemudian Sztompka (2014:4) menjelaskan, adakalanya perubahan hanya terjadi sebagian, terbatas ruang lingkupnya, tanpa menimbulkan akibat besar terhadap unsur lain dari sistem. Sistem sebagai keseluruhan tetap utuh, tak terjadi perubahan menyeluruh atas unsur-unsurnya meski di dalamnya terjadi perubahan sedikit demi sedikit.

Ditambahkan Sztompka (2014:7), konsep perubahan sosial meliputi 'atom' terkecil dinamika sosial, perubahan keadaan sistem sosial atau perubahan setiap aspeknya. Tetapi perubahan tunggal jarang terjadi dalam keadaan terisolasi. Dengan demikian konsep proses sosial menunjukkan:

1. Berbagai perubahan
2. Mengacu pada sistem sosial yang sama (terjadi di dalam atau mengubahnya sebagai satu kesatuan)
3. Saling berhubungan sebab-akibat dan tidak hanya merupakan faktor yang mengiringi atau mendahului faktor yang lain
4. Perubahan itu saling mengikuti satu sama lain dalam rentetan waktu (berurutan menurut rentetan waktu)

Penjelasan Sztompka (2014:13) bahwa, untuk memahami masalah perubahan sosial yang sangat kompleks diperlukan tipologi proses sosial. Tipologinya dapat didasarkan atas empat kriteria utama berikut : (1) bentuk proses sosial yang terjadi; (2) hasilnya; (3) kesadaran tentang proses sosial di kalangan anggota masyarakat bersangkutan; (4) kekuatan yang mengerjakan proses itu. Selain itu perlu diperhatikan; (5) tingkat realitas sosial di tempat proses sosial itu terjadi; dan (6) jangka waktu berlangsungnya proses sosial itu.

2.2.3 Teori Konflik (George Simmel)

Pandangan Simmel tentang konflik, pertama, bahwa konflik menetapkan batasan antara kelompok dalam sistem sosial dengan memperkuat kesadaran kelompok dan kesadaran akan terpisah, sehingga membentuk identitas kelompok di dalam sistem. Kedua, dia mengatakan bahwa gejala timbal balik mempertahankan seluruh sistem sosial dengan

menciptakan keseimbangan antara kasta india dapat membentuk pemisahan dan kekhasan berbagai kasta, namun juga dapat memastikan terbentuknya struktur sosial seluruh india dengan membawa keseimbangan klaim oleh kasta saingan, di tempat lain, Simmel telah menekankan lebih kuat lagi karakter pengikat kelompok konflik (Cosser,1964).

Menurut Simmel, konflik berfungsi untuk membangun dan mempertahankan garis identitas serta batas masyarakat dan kelompok. Sementara konflik berkontribusi pada pembentukan dan penegasan kembali identitas kelompok tersebut dan mempertahankan batasan-batasan terhadap dunia sosial yang suram (Cosser,1964).

Bagi Simmel, ketika konflik menjadi bagian dari interaksi sosial maka konflik menciptakan batasan-batasan antarkelompok dengan memperkuat kesadaran internal yang membuat kelompok tersebut terbedakan dan terpisah dari kelompok lain. hal ini berlaku secara resiprokal antagonistik atau permusuhan timbal balik. Akibat dari “*reciprocal antagonism*” antarkelompok itulah terbentuk divisi-divisi sosial dan sistem stratifikasi. Permusuhan timbal balik ini mendirikan identitas dari berbagai jenis kelompok dalam sistem dan sekaligus juga mendorong untuk memelihara keseluruhan sistem sosial (Susan, 2014:34).

Teori konflik merupakan salah satu teori dalam paradigma fakta sosial. Teori konflik merupakan sebuah pendekatan umum terhadap

keseluruhan lahan sosiologi. Salah satu landasannya adalah seperti teori Simmel. Kontribusi pokok dari teori konflik Simmel adalah berpendapat bahwa kekuasaan, otoritas atau pengaruh merupakan sifat dari kepribadian individu yang bisa menyebabkan terjadinya konflik. Misalnya, anggota-anggota kelompok minoritas akan bermusuhan dengan struktur kekuasaan yang sudah mapan (Wirawan, 2013).

Simmel melihat dalam kehidupan sosial, bahwa individu tidak hanya mau melibatkan diri dalam konflik, tetapi bersemangat untuk berkonflik. Kalau isu-isu yang penting tidak ada, orang mau berkonflik karena isu yang kecil dan sepele. Simmel membedakan antara konflik orang perorang secara langsung dan persaingan. Persaingan tidak perlu kontak antarpribadi secara langsung, sebaliknya mereka yang bersaing berjuang sendiri-sendiri untuk tujuan bersama dengan antagonisme yang muncul dari kenyataan bahwa keuntungan seseorang merupakan kerugian bagi pihak lain (Wirawan, 2013).

Simmel mengatakan, kalau hubungan intim mungkin cukup kuat memungkinkan percekocokan atau masalah untuk hidup bersama, maka tidak mengherankan bahwa intensitas konflik sering berbanding langsung dengan tingkat solidaritas atau persamaan dalam hubungan itu (Wirawan, 2013).

Simmel mengatakan bahwa, ungkapan permusuhan di dalam konflik membantu fungsi-fungsi positif, sepanjang konflik itu dapat

mempertahankan perpecahan kelompok dengan cara menarik orang-orang yang sedang berkonflik. Jadi konflik itu dipahami sebagai suatu alat yang berfungsi untuk menjaga kelompok sepanjang dapat mengantarkan sistem-sistem hubungan (Wirawan, 2013).

Simmel memandang konflik sebagai gejala yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat. Pendekatan Simmel dilandaskan pula pada postulat yang menyatakan bahwa dalam organisme secara menyeluruh terdapat dorongan-dorongan untuk bermusuhan ada pula dorongan untuk jatuh cinta atau memberikan kasih sayang. Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Simmel salah satunya adalah bahwa semakin besar keterlibatan emosional, semakin besar kekerasan (Sulistiati, 2001).

2.2.4 Teori Struktural Fungsional (Talcott Parsons)

Untuk tujuan memperjelas teori struktural fungsional, untuk itu perlu diperjelas kembali mengenai dua gambaran dasar tentang masyarakat secara sederhana melalui teori integrasi kemasyarakatan, seperti yang ditunjukkan oleh karya Parsons.

Menurut Parsons bahwa struktural-fungsionalis didasarkan pada sejumlah asumsi tipe sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat adalah struktur elemen yang relatif gigih dan stabil
2. Setiap masyarakat adalah struktur elemen yang terintegrasi dengan baik

3. Setiap elemen dalam suatu masyarakat memiliki fungsi, serta memberikan kontribusi terhadap pemeliharaannya sebagai sebuah sistem
4. Setiap struktur sosial yang berfungsi didasarkan pada konsensus nilai di antara anggotanya (Dahrendorf, 1959: 161).

Bahasan tentang struktural fungsional Parsons ini akan di mulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem “tindakan” terkenal dengan skema AGIL. Parsons yakin ada empat fungsi penting diperlukan semua sistem, *adaptation* (A), *goal attainment* (G), *integration* (I), dan *latensi* (L) atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional ini dikenal dengan skema AGIL (Ritzer dan Goodman, 2008).

Parsons menjelaskan, agar tetap bertahan (*survive*), suatu sistem harus memiliki skema fungsi ini:

1. *Adaptation* (Adaptasi): sebuah sistem harus menanggapi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. *Goal attainment* (Pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapaitujuan utamanya.
3. *Integration* (Integrasi): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,L).

4. *Latency* (Latensi atau Pemeliharaan pola); sebuah sistem harus meperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (Ritzer dan Goodman, 2008; Azhari, 2016; Ruslan, 2018).

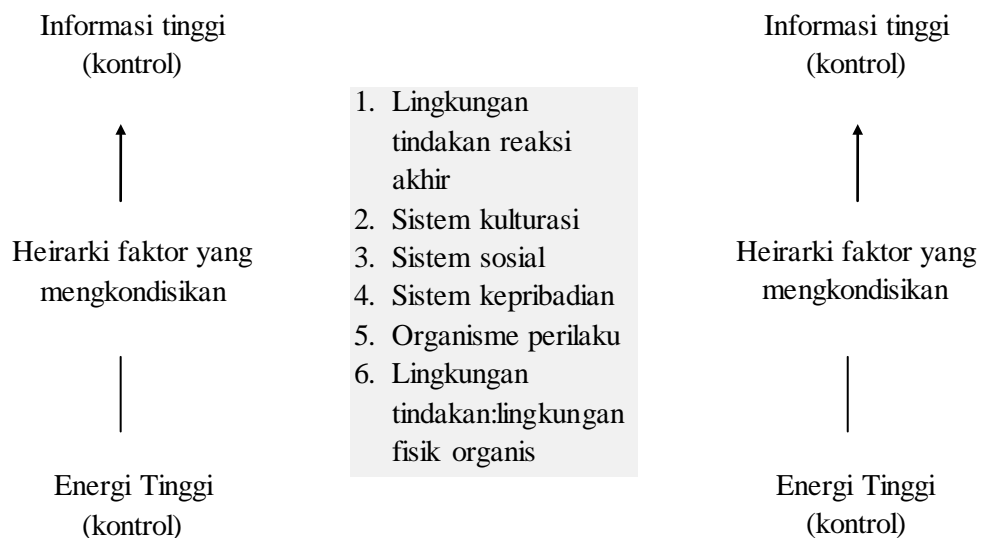
Parsons mendesain skema AGIL ini untuk digunakan di semua tingkat dalam sistem teorinya. *Organisme Perilaku* adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal. *Sistem kepribadian* melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. *Sistem sosial* menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Terakhir, *sistem kultural* melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. (Ritzer dan Goodman, 2008).

Struktur sistem tindakan umum skema AGIL Parsons dalam gambar berikut:

L	I
SISTEM KULTURAL	SISTEM SOSIAL
ORGANISASI PERILAKU	SISTEM KEPRIBADIAN
A	G

Gambar 2.2 Struktur sistem tindakan Umum

Bentuk menyeluruh sistem tindakan (*action system*) Parsons yang merupakan sebuah sistem tingkatan analisis sosialnya. Garis besar dari tingkatan utama menurut skema Parsons dalam Ritzer dan Goodman (2008), sebagai berikut:



Gambar 2.3 Skema tindakan Parsons

Nyata bahwa Parsons mempunyai gagasan yang jelas mengenai “tingkatan” analisis sosial maupun mengenai hubungan antara berbagai tingkatan itu. Susunan hierarkisnya jelas, dan tingkat integrasi menurut sistem Parsons terjadi dalam dua cara: *Pertama*, masing-masing tingkat yang lebih rendah menyediakan kondisi atau kekuatan yang diperlukan untuk tingkat yang lebih tinggi. *Kedua*, tingkat yang lebih tinggi mengendalikan tingkat yang berada di bawahnya (Ritzer dan Goodman, 2008).

Inti pemikiran Parsons ditemukan dalam empat sistem tindakan ciptaannya. Dengan asumsi yang dibuat Parsons dalam sistem tindakanya, kita berhadapan dengan masalah yang sangat diperhatikan Parsons dan telah menjadi sumber utama kritikan atas pemikirannya (Schwanenberg, 1971; Ritzer dan Goodman, 2008).

Parsons menemukan jawaban problem di dalam fungsionalisme struktural dengan asumsi sebagai berikut:

1. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung.
2. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan-diri atau keseimbangan.
3. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur.
4. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain.
5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
6. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.
7. Sistem cenderung menuju kearah pemeliharaan keseimbangan-diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kedenderungan untuk merubah sistem dari dalam (Ritzer dan Goodman, 2008).

Menurut Parsons, masyarakat akan berkembang melalui tiga tingkatan utama: (1) primitif; (2) *intermediate*; dan (3) *modern*. Dari tiga tahapan ini, oleh Parson dikembangkan lagi ke dalam subklasifikasi evolusi sosial lagi sehingga menjadi 5 tingkatan: (a) primitif; (b)

advanced primitif and arcchaic; (c) historic intermediate; (d) seedbed societies; dan (e) modern societies (Narwoko dan Suyanto, 2007).

Parsons menyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama; kultural (pendidikan), kehakiman (integritas) , pemerintahan (pencapaian tujuan) , dan ekonomi (adaptasi). Masing-masing subsistem secara otonom, subkollektif-subkollektif. Dalam konteks ini, kemampuan adaptasi terhadap lingkungan merupakan tolak ukur dari tingkat otonominya (Narwoko dan Suyanto, 2007).

Bagi Parsons, kian adaptif berarti kian tinggi otonominya. Konkretnya, semakin tinggi tingkat masing-masing subkollektif dalam melakukan fungsi utamanya dalam rangka fungsi *interdependensy system* secara keseluruhan, semakin besar pula kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, dan ini berarti semakin maju masyarakat yang bersangkutan (Narwoko dan Suyanto, 2007).

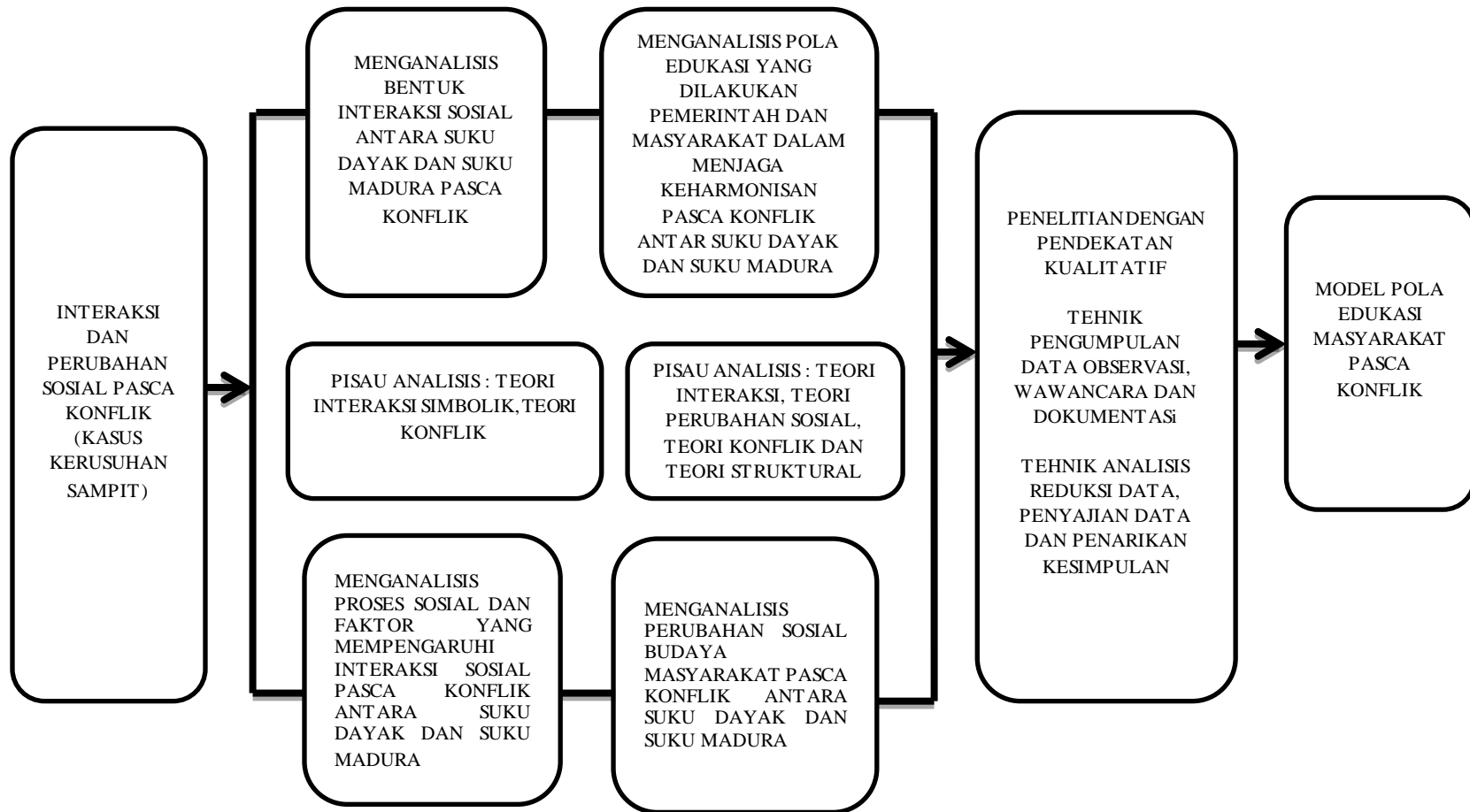
Tolak ukur yang digunakan Parsons untuk mendeteksi dan sekaligus membedakan tingkat perubahan masyarakat (ke dalam 5 tingkatan di atas) adalah artikulasi pengembangan fungsi integrasinya. Puncak perkembangan terpenting terhadap fungsi integrasi ini adalah ditemukannya bahasa tulisan dan kunci terhadap persambungan proses evolusi sosial. Penemuan simbol komunikasi bahasa menandai fase transisi dari masyarakat primitif ke tingkat *intermediate*. Sedangkan

penemuan hukum formal menandai fase transisi dari *intermediate* ke masyarakat maju (*advanced*) (Narwoko dan Suyanto, 2007).

Parsons dan rekan sezamannya, menyimpulkan prasyarat-prasyarat fungsional, atau syarat-syarat yang perlu, bagi masyarakat. pada daftar teratas semua orang harus dimasukan mekanisme-mekanisme kontrol sosial yang bertujuan melindungi proses sosialisasi untuk memastikan setiap pengikut kelompok anak muda menginternalisasikan norma-norma itu dan mendorong untuk memainkan peran-peran konvensional (Ritzer dan Smart, 2014).

Parsons memiliki asumsi bahwa setiap subsistem normalnya memiliki sarana untuk menolak perubahan dan sebagian besar tulisan teoritis intinya menganggap perubahan itu menyusahkan karena bisa membahayakan imperatif-imperatif sistem. Kekhawatiran juga dikemukakan oleh Parsons bahwa akibat dari perubahan yang tampaknya remeh boleh jadi jangkauannya lebih luas (dan lebih buruk) dari pada yang mungkin diperhitungkan orang (Ritzer dan Smart, 2014).

2.2.5 Kerangka Berpikir



BAB V

BENTUK INTERAKSI SOSIAL ANTARA SUKU DAYAK DAN SUKU MADURA PASCA KONFLIK DI SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

5.1. Interaksi Sosial Antara Suku Dayak dan Suku Madura Pasca Konflik

Menurut Soekamto (2014), ada dua syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu *pertama*, adanya kontak sosial (*social-contact*), yang dapat berlangsung dalam tiga bentuk. Yaitu antar individu, antar individu dengan kelompok, antar kelompok. Selain itu, kontak dapat pula bersifat langsung maupun tidak langsung; *kedua*, adanya komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang di sampaikan oleh orang tersebut.

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor, antara lain, faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung. Apabila masing-masing ditinjau secara mendalam, faktor imitasi misalnya, mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi sosial (Soekamto, 2014).

Berdasarkan hasil temuan peneliti berkaitan dengan interaksi sosial antara suku Dayak dan suku Madura pasca konflik di Sampit Kotawaringin Timur sebagai berikut;

Enam belas tahun Pasca Konflik interaksi dan hubungan sosial antarsuku yang ada di wilayah Kotawaringin Timur pada umumnya sudah banyak mengalami perubahan, keberadaan warga suku Madura pasca konflik sebagian besar sudah dapat diterima oleh warga suku Dayak dan Suku lain yang ada di Sampit, bahkan sudah mampu hidup berdampingan, sehingga saat ini hubungan sosial masyarakat di Sampit terbilang cukup harmonis walaupun masih ada yang perlu diperbaiki dalam hubungan antar suku di Sampit.

Kembalinya warga suku Madura pasca konflik tidak terlepas dari usaha pemerintah daerah dalam melakukan pendekatan dengan mendamaikan antara pihak warga Suku Dayak dan warga Suku Madura yang terlibat konflik, agar menjaga keharmonisan sehingga dapat saling menghormati setiap perbedaan etnis, Suku dan budaya yang ada di sampit Kotawaringin Timur.

Sikap saling menghargai perbedaan etnis Suku dan budaya di Sampit yang multikultural telah dimaknai dengan sikap saling toleransi antara agama, Suku dan kelompok bisa dibilang masih sangat tinggi, hal yang sangat berbeda jika menyangkut hubungan interaksi sosial antara warga Suku Dayak dengan Suku Madura yang masih diperlukan pendekatan khusus dan sangat spesifik mengingat kedua belah pihak memiliki pengalaman pernah saling berkonflik.

Pendekatan yang dilakukan melalui kesepakatan dan perjanjian damai antara Suku Dayak dan Suku Madura adalah merupakan awal lahirnya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnis, Pada Pasal 7 ayat 2a bahwa warga Madura yang kembali wajib dan sanggup mentaati nilai-nilai budaya serta adat istiadat setempat dan meninggalkan budaya kekerasan, serta sebagai warga pendatang sudah sepantasnya jika nilai-nilai budaya orang Dayak harus dijunjung tinggi “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” agar tidak terjadi benturan antara budaya yang dapat menimbulkan benih konflik di dalam masyarakat.

Kesadaran warga Suku Madura Pasca Konflik sebagai warga pendatang, yang harus mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial warga Suku Dayak telah mulai tumbuh di tengah-tengah lingkungan masyarakat di Sampit, tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa stereotif dan kecemburuan sosial kadang masih belum hilang dan juga kadang seringkali muncul sehingga warga Madura harus selalu berusaha semaksimal mungkin untuk membangun interaksi dan hubungan sosial yang harmonis pada masyarakat multietnis.

Sebagian besar masyarakat yang ada di Sampit Kotawaringin Timur faktanya memang sudah mampu berasimilasi serta berakulturasi kebudayaan dalam pergaulan di lingkungan warga suku Dayak dan melupakan peristiwa konflik antar Suku Dayak dan Madura 16 tahun yang

lahu. Stereotipe yang dulu seringkali muncul pada awal kepulangan warga suku Madura walaupun sekarang masih saja ada tetapi perlahan sudah mulai hilang dan di masyarakat sudah tidak terlihat lagi perbedaan yang mencolok, karena masyarakat Suku Madura sudah hampir mampu membaaur di dalam lingkungan masyarakat di Sampit.

Menurut Idar yang merupakan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Kotabesi, proses asimilasi telah secara keseluruhan terjadi pada seluruh kehidupan warga suku Madura yang ada di Kecamatan Kotabesi Kotawaringin Timur, selain itu warga Suku Madura juga telah berusaha menghilangkan gaya hidup yang eksklusif dan berkelompok agar dapat memahami seluruh corak kehidupan budaya orang Dayak dan bahkan harus dapat menyatu dengan tidak menonjolkan kebudayaan orang Madura yang sering menjadi penyebab konflik.

Warga suku Madura diharapkan mampu memahami serta mempelajari budaya orang Dayak untuk dapat hidup berdampingan serta berusaha meninggalkan budaya kekerasan, selain itu agar dapat membangun kehidupan pasca konflik, warga Madura wajib untuk dapat berenkulturasi dengan budaya masyarakat Dayak di Sampit yang tercermin dari perubahan sikap dan tingkah laku, adat dan kebiasaan serta pola pikir warga Suku Madura secara keseluruhan.



Gambar 5.1 Wawancara Peneliti dengan Bapak Idar selaku Ketua (DAD) Kecamatan Kotabesi

Hubungan sosial warga Dayak dan Madura yang ada pada beberapa kecamatan di Kotawaringin Timur, baik sebelum konflik maupun sesudah konflik tidak jauh berbeda, karena warga Dayak di beberapa daerah sama sekali tidak terpengaruh oleh adanya konflik dan ketika konflik terjadi justru sebagian warga Madura yang pergi ke pengungsian menitipkan barang mereka pada warga Dayak. Ketika warga Suku Madura di pengungsian ada yang meminta harta benda yang dititipkan untuk dijual, justru warga suku Dayak yang dengan sukarela bersedia membantu kemudian hasil dari penjualan tersebut diserahkan sepenuhnya ketika warga Madura berada di pengungsian.

Pasca warga Madura kembali dari pengungsian harta benda yang masih tersisa seluruhnya di kembalikan kembali pada warga Suku Madura, sehingga sebenarnya kehidupan warga Madura yang ada di beberapa

daerah di Kotawaringin Timur sudah sangat harmonis serta hidup berdampingan. Pasca konflik interaksi dan hubungan sosial justru semakin baik, karena masyarakat suku Dayak menyadari bahwa sebagian orang Suku Madura hanya terkena imbas dari perbuatan segelintir orang dari Suku Madura yang tidak bertanggungjawab.

Pada kecamatan Kotabesi dan Desa Bajarum misalnya ketika warga Madura kembali, secara keseluruhan sama sekali tidak adanya penolakan, karena memang pada daerah tersebut perilaku dan sikap warga Suku Madura tidak pernah bermasalah dengan warga suku Dayak, sehingga proses pengembalian warga Suku Madura dari pengungsian tergolong sangat cepat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Kotawaringin Timur.

Dewan Adat Dayak Kecamatan Kotabesi justru bersyukur dengan kedatangan warga Suku Madura karena roda perekonomian kembali normal, yang tidak kalah penting adalah interaksi dan hubungan sosial pada masyarakat Suku Dayak dan Suku Madura sudah mulai harmonis dan sampai saat ini tidak ada pernah terdengar ada yang berusaha mengungkit-ungkit masalah konflik antar etnis di Sampit Kotawaringin Timur.

Rasa syukur terhadap kedatangan warga suku Madura di Kecamatan Kota Besi disebabkan oleh kehidupan warga suku Madura di daerah tersebut yang mampu membangun dan membina hubungan yang baik dengan warga suku Dayak, dan bahkan dengan warga pendatang lainnya

seperti warga suku Jawa, orang bima, Bugis dan lain sebagainya. Keyakinan warga suku Dayak terhadap kedatangan warga suku Madura membawa dampak yang baik di Kecamatan Kota Kesi juga disebabkan tidak pernah terjadinya konflik yang melibatkan warga suku Dayak dan suku Madura di daerah tersebut.

5.2. Faktor-Faktor Pembentuk Interaksi antara suku Dayak dan suku Madura

Interaksi antara suku Dayak dan suku Madura dibentuk oleh berbagai macam faktor yakni faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, serta faktor simpati. Faktor tersebut dalam prosesnya saling berkaitan satu sama lain yang tergambar dari kehidupan yang harmonis, toleransi yang tinggi, kerjasama, gotong royong, rukun dan damai serta suasana yang jauh dari pertengkaran dan kekerasan.

Kehidupan yang harmonis pasca konflik antara suku Dayak dan Suku Madura merupakan keinginan kedua belah pihak yang telah sadar bahwa konflik masa lalu merupakan sebuah pelajaran berharga dalam hubungan antarsuku, sehingga hubungan antara suku Dayak dan suku Madura terus menerus terjaga dalam bingkai persatuan dan kesatuan antarsuku di tengah kemajemukan masyarakat khususnya di Sampit. Konflik yang dulu sempat memperlebar jarak antara warga suku Dayak dan suku Madura saat ini sudah sangat berubah, terlihat dari gambaran dalam kehidupan warga

Dayak dan warga suku Madura telah dipenuhi dengan sikap toleransi, kerjasama, serta gotong royong.

5.2.1 Faktor Imitasi dalam Interaksi Sosial

Menurut Soekamto, imitasi merupakan tindakan manusia untuk meniru tingkah laku orang lain yang berada disekitarnya. Imitasi banyak dipengaruhi oleh tingkat jangkauan inderanya, sebatas yang dilihat, didengar, dan dirasakan (Setiadi & Kolip, 2012).

Karakteristik warga Suku Madura yang ada di Sampit terbagi menjadi dua bagian, *pertama*, warga Suku Madura keturunan adalah mereka yang lahir di Sampit dan hampir tidak mengenal akan kebudayaan asal mereka sebagai orang Madura, *kedua*, warga Suku Madura perantauan atau pendatang yang memang ke sampit untuk mencari pekerjaan.

Karakteristik warga Suku Madura keturunan sampit dan warga suku Madura pendatang yang ada di Sampit tersebut membuat proses pengimitasian budaya sikap dan tingkah laku atau proses meniru kehidupan warga Suku Dayak juga berbeda-beda. Bagi warga Suku Madura keturunan proses mengimitasi kebudayaan, sikap serta tingkah laku orang Dayak prosesnya tidak mengalami kendala atau kesulitan karena memang sudah sejak lahir mereka berinteraksi, kemudian berhubungan satu sama lain sehingga proses memahami bagaimana kehidupan warga Dayak telah terjadi dengan sendirinya.

Kehidupan warga Suku Madura keturunan yang telah lama dan bertahun-tahun tinggal dan menetap hingga turun-temurun dan telah mampu mengimitasi kebudayaan, sikap dan tingkah laku orang Dayak atau orang lokal lainnya di Sampit Kotawaringin Timur, jelas tidak dapat disamakan dengan warga Suku Madura pendatang, karena warga Suku Madura pendatang masih sangat kesulitan beradaptasi, berakulturasi serta mengimitasi sikap, perilaku serta gaya hidup orang Dayak khususnya dan masyarakat di Sampit pada umumnya.

Proses mengimitasi kehidupan budaya, tingkah laku sifat dan kebiasaan orang Dayak secara tidak sadar telah dilakukan oleh warga Suku Madura keturunan di Sampit, melalui cara perkebunan, pola mencari peluang pekerjaan dan juga dalam mencari sumber-sumber perekonomian dalam memenuhi kebutuhan hidup. Warga Suku Madura keturunan telah mampu mengimitasi cara dan pola pertanian Suku Dayak dengan mempelajari dan terlibat langsung dalam kelompok tani sehingga warga Suku Madura mendapat pengetahuan bagaimana pola bercocok tanam orang Dayak yang ada di Sampit Kotawaringin Timur.

Proses imitasi dalam mencari sumber pekerjaan juga telah banyak dilakukan oleh warga Suku Madura keturunan yang ada di Sampit, contohnya warga Suku Madura sebagian besar telah banyak yang berprofesi sebagai penyadap karet atau disebut warga di Sampit *memantat* (menyadap karet), kemudian juga ada warga Madura yang bekerja

memagat (mengambil rotan) yang sebelumnya hanya dilakukan warga dari Suku Dayak di Sampit.

Usaha warga Suku Madura keturunan agar dapat menyatu bersama warga Suku Dayak dan Suku lainnya juga dengan mengimitasi proses berlangsungnya upacara pernikahan serta perkawinan warga Suku Dayak pada umumnya. Warga Suku Madura sepenuhnya sudah tidak memunculkan dan menonjolkan lagi kebudayaan Ronggeng dan Sandur yang biasanya menjadi ciri khas pelengkap kegiatan perkawinan warga Suku Madura di Sampit.

Kebiasaan, tingkah laku, serta tutur kata warga Suku Dayak yang banyak di pengaruhi ketetapan hukum adat Dayak yang sudah mendarah daging dan telah sejak lama berlaku di Sampit bahkan sebelum negara Indonesia merdeka sudah menjadi pedoman nilai serta norma sosial yang mengatur bagaimana kehidupan mereka, juga belum sepenuhnya mampu dipahami dan dimengerti oleh warga Suku Madura Pendatang yang selalu tertutup, eksklusif dan berkelompok.

Para tokoh Dayak dan tokoh Madura sependapat bahwa kehidupan yang selalu tertutup, eksklusif dan berkelompok banyak dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang tergolong masih rendah, sehingga sulit bagi warga suku Madura pendatang mengimitasi sifat, perilaku dan kebudayaan orang Dayak. Pendidikan yang masih sangat rendah pada warga Suku Madura pendatang, mengakibatkan mereka kurang percaya diri dalam bergaul

sehingga tidak terbuka dan sulit bergaul dan berinteraksi dengan orang Dayak yang seringkali menimbulkan benturan budaya, ditambah belum maksimalnya sosialisasi terhadap warga Suku Madura pendatang secara berkelanjutan terhadap kesepakatan damai, sehingga warga Suku Madura pendatang kembali pada kehidupan mereka yang eksklusif dan berkelompok membuat interaksi menjadi terbatas, dan proses imitasi juga tidak terjadi sehingga prasangka semakin menguat, secara psikologis juga tidak terciptanya kedekatan, sehingga tidak ada perekat hubungan sosial yang meminimalisir meluasnya masalah penyebab konflik.

5.2.2 Faktor Sugesti dalam Interaksi Sosial

Menurut Soekanto (2014), Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi sesuatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Jadi proses ini sebenarnya hampir sama dengan dengan imitasi, tetapi titik tolaknya berbeda, berlangsungnya sugesti dapat terjadi karena pihak yang menerima dilanda oleh emosi, yang menghambat daya berpikir secara rasional.

Pada daerah tertentu interaksi sosial warga Suku Dayak dan warga Suku Madura yang ada di sampit menyimpan permasalahan yang cukup besar, penyebabnya adalah masih sangat tingginya rasa curiga serta prasangka di dalam masyarakat yang membuat hubungan sosial kurang harmonis dan seringkali permasalahan kecil dapat memunculkan konflik.

Jika dilihat dari permukaan antara warga Suku Dayak dan warga Suku Madura seakan-akan tidak terjadi masalah, tetapi fakta-fakta kejadian kasus-kasus kekerasan serta kenakalan remaja yang selalu dikaitkan dengan masalah etnisitas pada hakikatnyamengambarkan bahwa masyarakat di Sampit masih belum mampu keluar dan melupakan konflik.

Stereotip dan prasangka yang membuat warga Suku Dayak dan Suku Madura cepat terpancing amarah pasca konflikjustru masih seringkali muncul, dalam beberapa tahun terakhir misalnya kejadian di Baamang dan Samuda yang diselesaikan melalui hukum adat Dayak yang berlaku Di Sampit, membuktikan bahwa masih adanya saluran-saluran komunikasi yang menghambat proses interaksi dan hubungan sosial, sehingga membuat proses akulturasi serta asimilasi budayamenjadi sangat terganggu.

Proses akulturasi dan asimilasi yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik pada masyarakat multietnis di Sampit, dikarenakan ego keSukuan masih sangat tinggi dan emosi masyarakat belum stabil, sehingga terkadang membuat saluran komunikasi di dalam masyarakat menjadi terganggu, penyebabnya adalah terbentuknya pola pikir masyarakat bahwa warga Suku Madura memiliki sifat dan tingkah laku serta citra negatif merupakan wujud dari kulminasi pandangan yang terus menerus di pelihara dalam hubungan sosial masyarakat.



Gambar 5.2 Wawancara Peneliti dengan Bapak Abdul Wahid
Ketua Forum Komunikasi Korban Kerusuhan Kal-Teng (FK-4)

Menurut Abdul Wahid (Ketua FK-4), terbentuknya citra negatif pada masyarakat Suku Madura di Sampit karena memang ada sebagian kecil warga Suku Madura yang memiliki tabiat selalu ingin menang sendiri, sulit untuk diatur dan serta tabiat yang kurang baik sehingga warga Suku Madura perlu banyak mengambil pelajaran berharga dari sejarah konflik agar citra negatif yang membuat hubungan sosial antara Suku terus menerus mengalami ketegangan dapat segera dihilangkan.

Untuk menghilangkan citra negatif yang selama ini terbentuk pada warga Suku Madura di Sampit maka “Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” harus dipahami secara komprehensif, karena bagi warga Suku Dayak peribahasa ini merupakan harga mati dan tidak dapat ditawar. Masyarakat Suku Dayak sangat menjunjung tinggi terhadap hukum adat

Dayak yang secara turun temurun diwariskan dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah, yang didalamnya berlaku aturan dan norma yang mengikat maka wajar jika tingkat sensitifitas juga masih sangat tinggi.

Penuturan dari tokoh Madura, faktor pendidikan atau sumber daya manusia yang relatif masih rendah menjadi salah satu kendala dalam pembinaan interaksi dan hubungan sosial masyarakat, karena dalam hal pendidikan mayoritas warga Suku Madura masih jauh tertinggal dibanding warga Suku lain yang ada di Sampit, salah satu penyebabnya akibat dari pola yang salah dengan menikahkan anak mereka pada usia yang masih sangat muda. Pada Kelurahan Sawahan atau yang sering dikenal dengan daerah Pelalangan, warga Suku Madura yang tinggal di daerah tersebut terbilang mayoritas adalah warga suku Madura tetapi dari segi pendidikan masih diperlukannya perhatian untuk di tingkatkan.

Pemerintah daerah Kotawaringin Timur sebenarnya telah mengupayakan peningkatan sumber daya manusia atau pendidikan seluruh masyarakat yang ada di Sampit kotawaringin timur, tidak terkecuali korban konflik Sampit dengan harapan agar Suku Madura yang kembali mampu serta memiliki sikap yang baik dapat beradaptasi, membaur bersama warga Dayak khususnya dan masyarakat di Kalimantan Tengah pada umumnya.

5.2.3 Faktor Identifikasi dalam Interaksi Sosial

Menurut Soekanto (2014), Identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan-kecendrungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. Proses identifikasi dapat berlangsung dengan sendirinya (secara tidak sadar), maupun dengan disengaja karena sering seseorang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu di dalam proses kehidupannya.

Bagi pengungsi korban konflik antara Suku, Sampit merupakan kampung halaman mereka karena seluruh warga Suku Madura yang dulu mengungsi adalah merupakan warga Suku Madura yang telah turun temurun tinggal dan lahir serta besar di Sampit Kotawaringin Timur, sehingga sewaktu berada di pengungsian mereka juga merasa kesulitan untuk proses adaptasi dengan lingkungan masyarakat di Sampang Madura.

Kesulitan mereka disebabkan oleh sikap serta kebiasaan hidup mereka sudah sangat jauh berbeda dengan kehidupan warga asli Suku Madura yang ada di Pulau Madura, baik budaya, cara bertahan hidup serta kebiasaannya. Warga Suku Madura keturunan Sampit sudah tidak lagi mengenal nilai-nilai dan norma budaya yang dimiliki sebagai orang warga Suku Madura, tetapi mereka lebih memahami norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat adat khususnya adat Dayak di Kalimantan Tengah akibat

dari proses interaksi dan hubungan sosial selama bertahun-tahun bersama orang Dayak.

Warga Suku Madura sebenarnya merasa sudah menjadi bagian dari warga Sampit karena, adat kebiasaan dan tingkah laku mereka sudah tidak jauh berbeda dengan kehidupan warga lokal di Sampit, sebagian warga Madura juga telah mahir dalam penggunaan bahasa Dayak.

5.2.4 Faktor Simpati dalam Interaksi Sosial

Proses yang terakhir menurut Soekanto (2014), proses simpati sebenarnya merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya.

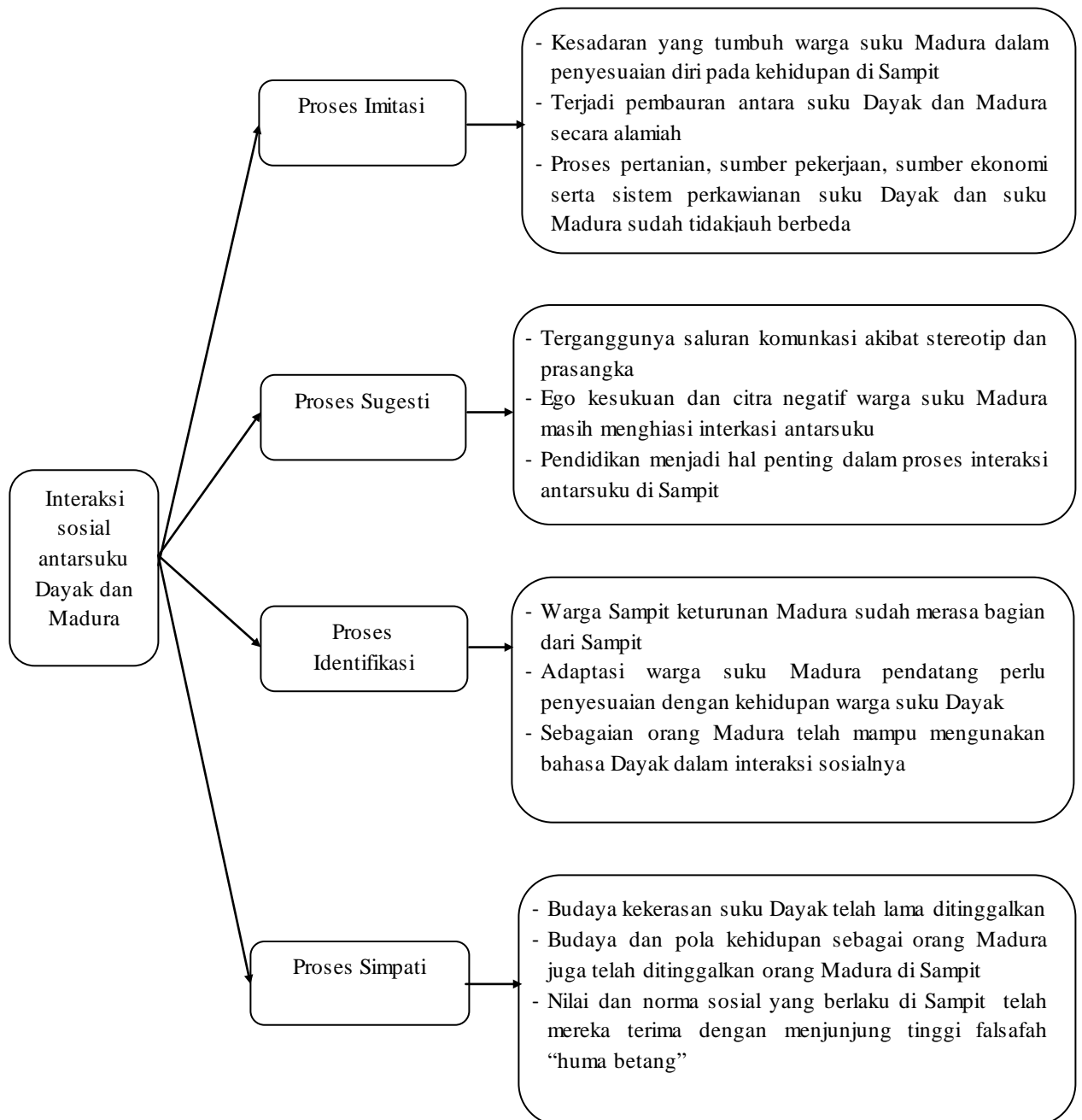
Secara kebudayaan warga Suku Dayak juga telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, orang Dayak sudah sama sekali menghilangkan budaya kekerasan yang dikenal dengan budaya *mengayau* dan sangat menjunjung tinggi nilai dasar rumah betang (rumah panjang) “dimana bumi di pijak, di situ langit dijunjung”, belum bahadat dan keterbukaan.

Proses interaksi untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antar suku Dayak dan suku Madura, memerlukan waktu yang cukup panjang serta upaya yang sungguh-sungguh sehingga antara warga Suku Dayak dan

warga Suku Madura mampu untuk saling memahami budaya masing-masing, saling pengertian dan saling menjaga sikap toleransi antara suku.

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas terungkap bahwa faktor imitasi sudah terjadi pada kehidupan warga suku Madura baik kebudayaannya, sikap dan tingkah laku mereka, tetapi faktor ini hanya terjadi pada kehidupan warga Madura yang lahir dan besar di Sampit sedangkan pada orang Madura pendatang mereka masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan budaya dan kehidupan orang Dayak. Sedangkan pada faktor sugesti, terungkap bahwa citra orang Madura yang egois dan sulit diatur masih membekas, sehingga prasangka dan rasa curiga masih seringkali muncul dipermukaan.

Aspek yang tidak kalah menarik dari hasil temuan penelitian ini adalah pada faktor identifikasi dan faktor simpati, ketika berada di pengungsian di Sampang, warga suku Madura keturunan Sampit pada kenyataannya juga mengalami kesulitan beradaptasi dengan kehidupan masyarakat lokal di Sampang Madura, penyebabnya karena kebudayaan dan pola kehidupan sebagai orang Madura asli sudah sama sekali mereka tinggalkan, pada kenyataannya orang Madura keturunan lebih mengenal bagaimana nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku pada masyarakat Dayak.



Gambar 5.3 Interaksi Sosial suku Dayak dan suku Madura Pasca konflik

5.3. Bentuk Interaksi Sosial antara Suku Dayak dan Suku Madura Pasca

Konflik

Menurut Soekamto (2014), kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, bentuk pertama yakni antara orang-perorangan, kontak sosial ini adalah apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dengan keluarganya. Proses demikian terjadi melalui sosialisasi (*socialization*), yaitu suatu proses, di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi anggota.

Bentuk kedua, antara perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya. Kontak sosial ini misalnya adalah apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat atau apabila suatu partai politik memaksa anggota-anggota untuk menyesuaikan diri dengan ideologi dan programnya (Soekamto, 2014).

Menurut Soekamto (2014), bentuk ketiga, antara suatu kelompok manusia dengan manusia lainnya. Umpamanya adalah dua partai politik mengadakan kerjasama untuk mengalahkan partai politik yang ketiga di dalam pemilihan umum. Atau apabila dua buah perusahaan bangunan mengadakan suatu kontrak untuk membuat jalan raya, jembatan, dan seterusnya di suatu wilayah yang baru dibuka.

Menurut Bapak Untung (Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotim), perdamaian adalah merupakan harga mati tidak boleh terulang,

konflik pada tahun 2001 adalah untuk yang pertama dan yang terakhir adalah suatu kewajiban semua unsure untuk terus menerus menjaga dan menjunjung tinggi kesepakatan damai, tetapi tokoh Dayak menilai bahwa dari warga Suku Madura seringkali yang pertama kali melakukan pelanggaran, tidak mematuhi perda, kesepakatan damai serta perjanjian damai, oleh sebab maka seringkali menjadi pemicu dan membuat keresahan di masyarakat.



Gambar 5.4 Wawancara Peneliti dengan Bapak Drs. Untung, MM Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur

Menurut Ketua DAD, sampai saat ini pasca konflik, orang Madura masih saja belum mampu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan masa lalu mereka yang dianggap berperilaku kurang sopan dan kurang beradab, sebagai masih menggunakan egonya dan belum bisa membawa diri untuk berinteraksi dengan warga Suku Dayak dan Suku lainnya, sehingga untuk

berinteraksi seringkali belum dapat diterima oleh Suku Dayak dan juga Suku lain yang ada di Sampit Kotawaringin Timur.

Penyesuaian diri dalam berinteraksi serta berusaha membangun kehidupan sosial yang baik, normal dan tidak dihantui oleh perasaan takut serta trauma yang berkepanjangan merupakan keinginan dari seluruh warga Suku Madura korban konflik yang ada di Sampit. Tetapi ada segelintir orang warga Suku Madura yang belum mampu taat terhadap kesepakatan damai dan perjanjian yang telah disepakati para tokoh Dayak dan Madura.

5.2.1 Interaksi dengan Syarat

Sejak pasca konflik tahun 2001 di Sampit Kalimantan Tengah, banyak masyarakat Suku Madura yang mengungsi atau bahkan kembali ke tempat asalnya di Madura sangat berkeinginan untuk kembali ke tempat dimana mereka mudah dalam mencari penghidupan seperti yang selama ini dilakukan. Bayangan susah nya jika harus memulai dari awal, sementara mereka sudah banyak mengumpulkan harta benda seperti rumah, tanah, dan berbagai bentuk persaudaraan antara teman, saudara dari masyarakat Suku Dayak yang bagi masyarakat keturunan dari Suku Dayak dan Suku Madura mereka adalah satu jiwa dalam raga menjadi tujuan sendiri untuk kembali ditengah-tengah keluarga meskipun ancaman dan hambatan nampak di depan mata.

Perasaan takut konflik akan terjadi lagi selalu hinggap dalam benak masyarakat Suku Madura yang berkeinginan rujuk kembali di tengah-tengah saudara yang sudah lama saling memadu kasih dalam susahny kehidupan bermasyarakat. Bagaimana tidak, hanya dengan sebab setitik noda maka sebelangga terkena imbasnya. Perlu diketahui bahwa sejarah konflik etnis di Sampit Kalimantan Tengah antara masyarakat Suku Dayak dan Suku Madura diawali oleh setitik noda dari konflik individu dan kemudian melebar menjadi segregasi kelompok dengan membawa identitas kelompoknya. Identitas kelompok juga menjadi sumber konflik karena pada tahun yang sama telah terjadi konflik yang bermuatan SARA yang terjadi di Poso, Maluku, yang merembet ke Sampit Kalimantan Tengah.

Proses rujuk-pun tidak semudah dalam angan, karena masih banyak pertentangan terjadi pada masyarakat Suku Dayak di Sampit Kalimantan Tengah. Banyak dari kalangan masyarakat Suku Dayak menolak hadirnya masyarakat Suku Madura di lingkungan mereka, namun sebagian lagi merasa perlu hadirnya kembali masyarakat Suku Madura dikarenakan ada kepentingan yang positif yaitu adanya hubungan saling menguntungkan diantara mereka (*simbiosis mutualisme*) yang sudah terjadi selama beberapa dasawarsa.

Penolakan oleh sebagian besar masyarakat Suku Dayak terhadap Suku Madura dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tentang persoalan budaya yang masih melekat erat dalam diri masyarakat Suku Madura

sehingga membuat proses interaksi tidak berjalan dengan maksimal. Ketidaktertarikan sebagian besar masyarakat Suku Dayak terhadap Suku Madura dikarenakan faktor perilaku, dan perangai mereka yang masih cenderung membawa kebudayaan asli mereka yang masih sangat nampak dalam kehidupan sehari-hari, dan hal itu yang menghambat proses interaksi.

Disamping itu juga filosofi masyarakat Suku Madura yang membawa dinasti kekerasan atau bahkan bersedia membunuh dengan *carok* atau *clurit* menjadi salah satu faktor yang menghambat proses simpati dari masyarakat Suku Dayak terhadap Suku Madura sehingga proses rekonsiliasi kembalinya masyarakat Suku Madura menjadi terhambat.

Berbeda di beberapa daerah yang tidak mengalami hambatan dalam interaksi, justru mendorong rekonsiliasi dengan mengharap kehadiran masyarakat Suku Madura kembali di tengah-tengah mereka. Mereka merasa tidak memiliki masalah dengan masyarakat Suku Madura, karena selama ini telah berlangsung proses interaksi yang baik diantara mereka, dan bahkan telah terjadi simbiosis mutualisme atau kerjasama yang saling menguntungkan diantara kedua kelompok masyarakat tersebut tanpa di batasi oleh identitas masing-masing.

Bagi masyarakat campuran berkumpul dengan keluarga adalah merupakan kebahagiaan tiada terkira. Hal inilah yang mendorong rekonsiliasi agar cepat terlaksana. Peran tokoh masyarakat Suku Dayak dan

peran pemerintah menjadi kunci terjadinya rekonsiliasi kembalinya masyarakat Suku Madura ke Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.

Satu kata yang bisa terucap dalam menyebut proses rekonsiliasi antara masyarakat Suku Dayak dengan Suku Madura, yaitu benci tapi cinta. Gambaran konflik etnis yang menjadi korban karena kondisi penguatan identitas serta beberapa kasus di beberapa wilayah di Indonesia yang sama menyertainya dikarenakan faktor masa transisi demokrasi dari masa orde baru ke masa reformasi, dimana peran pemerintah belum maksimal dalam proses pelaksanaan demokrasi. Masa transisi yang di balut luka oleh banyak masyarakat Indonesia yang terkena imbas akibat proses penguatan dan pendewasaan demokrasi dengan terbentuknya desentralisasi kedaerahan sehingga memunculkan penguatan identitas kelompok yang ada di daerah dengan munculnya konflik identitas atau SARA.

Pepatah benci tapi cinta adalah gambaran masyarakat Indonesia yang dengan kemajemukannya kedua terbesar di dunia namun menjadi satu kesatuan tanpa memandang identitas dengan satu simbol yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap sama, dan saling cinta. Filosofi Bhinneka Tunggal Ika diharapkan mampu meredam dan menyelesaikan setiap persoalan etnisitas yang mungkin saja setiap saat akan dapat terjadi lagi, untuk itu sangat diperlukan tindakan yang konkret dan nyata untuk selalu mengingat dan mengimplementasikan filosofi yang telah dibangun

oleh *founding fathers*, agar jangan sampai terjadi lagi konflik etnis di Indonesia tercinta ini. Dengan mengedepankan filosofi benci tapi cinta, atau rindu tapi benci diharapkan meredam setiap persoalan antar etnis di Negara ini jangan sampai terjadi tindakan kekerasan atau bahkan perang antar etnis.

Proses rekonsiliasi kembalinya masyarakat Suku Madura di Sampit dalam beberapa tahun pasca konflik mengiringi proses penguatan demokrasi lewat desentralisasi politik kedaerahan, dengan terbentuknya Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberi kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengelola sumber dayanya sendiri, termasuk memanfaatkan kearifan lokal di daerah tersebut, menandakan bahwa pemerintah daerah Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dianggap telah mampu mengelola dan mengatasi persoalan konflik etnis yang terjadi di wilayahnya, yaitu proses rekonsiliasi dengan berlandaskan pada penguatan desentralisasi demokrasi Pancasila dengan ke-Bhinneka Tunggal Ika-nya.

Konsolidasi-konsolidasi yang dilakukan oleh baik masyarakat, tokoh adat serta pemerintah dalam upaya untuk mengembalikan interaksi yang baik sebelumnya membuahkan hasil yang positif, meskipun pada awalnya hal tersebut ditolak oleh kebanyakan masyarakat Suku Dayak. Setelah melewati beberapa proses penyadaran dan sosialisasi yang intens dilakukan, proses rekonsiliasi sukses dilakukan dan dilakukan bertahap, dengan memilah (*limitation of space*) tempat-tempat yang aman, karena

tidak semua tempat di tiap kecamatan di Sampit Kotawaringin Timur menghendaki hal tersebut. Maka langkah awal adalah dengan menanyakan ketersediaan masyarakat di tiap wilayah Sampit Kotawaringin Timur dalam menerima kembalinya masyarakat Suku Madura.

Bagi masyarakat di beberapa tempat di Sampit yang dulunya tidak memiliki masalah dengan masyarakat Suku Madura memang sangat menginginkan kembalinya masyarakat Suku Madura tanpa syarat. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ; (1) telah terjadi ikatan yang kuat melebihi ikatan saudara antara masyarakat Suku Dayak dengan Suku Madura, dan hal tersebut telah terjadi selama beberapa dasawarsa; (2) banyaknya perkawinan campuran antara masyarakat Suku Dayak dan Suku Madura yang melahirkan keturunan campuran; (3) faktor simbiosis mutualisme yang terjadi dalam bidang ekonomi, pertanian, sosial, dan politik diantara keduanya.

Demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses rekonsiliasi dalam kasus konflik antar etnis di Sampit, pihak pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat menyepakati bahwa rekonsiliasi kembalinya masyarakat Suku Madura ke Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah bisa dilakukan dengan berbagai syarat yang sudah diatur dengan perjanjian damai diantaranya keduanya yang telah diwakili oleh tokoh adat masing-masing dan disaksikan oleh pemerintah sebagai mediator, dan aparat keamanan. Hal ini dimaksudkan untuk

mengembalikan kohevisitas sosial yang baik seperti sebelum adanya konflik.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian damai antara Suku Madura dan Suku Dayak dijabarkan dalam inti perjanjian damai, sebagai berikut; (1) masyarakat Suku Madura harus bersedia menanggalkan segala bentuk perilaku, perangai yang bertentangan dengan adat masyarakat Suku Dayak; (2) masyarakat Suku Madura harus membaaur dengan masyarakat Suku Dayak, seperti yang selama ini terjadi yaitu masyarakat Suku Madura hidup dengan berkelompok; (3) masyarakat pendatang wajib lapor ke RT/RW; (4) segala persoalan yang terkait dengan etnis harus diselesaikan terlebih dahulu dengan ketua adat masing-masing.

Di samping warga suku Madura di pengungsian telah dipersiapkan dengan pemberian arahan, sosialisasi serta nasehat kemudian bagi mereka yang akan kembali telah di berikan surat pernyataan yang berisikan sembilan pokok kesanggupan yakni bersedia menjunjung tinggi falsafah “dimana bumi di pijak di situ langit di junjung”, sanggup menghilangkan budaya kekerasan, menyatakan bersedia menghilangkan perasaan dendam, dan menyatakan bahwa konflik adalah merupakan ketetapan dari Allah, serta mengihklaskan harta benda dengan lapang dada, menghindari konflik dan menghilangkan sifat emosional.

5.2.2 Kohesivitas Antar Masyarakat Pasca Perjanjian Damai

Kohesivitas antar masyarakat Suku Madura dan masyarakat Suku Dayak terjalin kembali setelah adanya perjanjian damai yang menjadi syarat mutlak buat masyarakat Suku Madura yang ingin kembali ke tanah penghidupan mereka di Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. Perjanjian damai menjadi instrument rekonsiliasi yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang harus dilakukan untuk mengembalikan interaksi seperti semula.

Kohesivitas awal pasca konflik antara masyarakat Suku Madura dengan Suku Dayak ditengarai dengan penuh keragu-raguan, rasa was-was, takut dan Perasaan terasing (*allienasi*) dari masyarakat Suku Madura. Akankah warga masyarakat Suku Dayak dapat menerima kembali mereka seperti sediakala. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Korban Konflik Sampit;

“Awal hubungan sosial masyarakat di sampit ketika kepulangan warga suku Madura dari pengungsian sangat terasa berbeda dengan kondisi sebelum konflik, pada awal masa kepulangan warga suku Madura ke Sampit, sebagai besar warga Madura seperti orang asing dan ada perasaan ragu apakah warga suku Dayak bisa menerima mereka di kehidupan masyarakat. ketika memutuskan kembali ke sampit masih ada perasaan yang membuat takut, tetapi dengan keyakinan yang kuat karena warga suku Madura merasa sama sekali tidak terlibat dengan konflik dan hanya sebagai korban maka sebelum mereka sudah mempersiapkan mental dengan sangat matang”. (*Wawancara dengan Bapak Abdul Hamid Ketua Forum Komunikasi Konflik Sampit*)

Kegagalan hubungan antara masyarakat Suku Madura dengan masyarakat Suku Dayak diawal pasca konflik terjadi di wilayah Kecamatan Ketapang. Sebagian besar masyarakat setempat menolak rekonsiliasi kedatangan kembali masyarakat Suku Madura di tengah-tengah lingkungan mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rahmad (warga Suku Dayak) sebagai berikut:

“Setelah mendapat rekomendasi dari Camat, lurah serta beberapa tokoh suku Dayak warga Suku Madura di ijin kembali, tetapi walaupun begitu proses pengembalian warga suku Madura tidak berjalan baik karena pada awalnya juga ada yang mendapat penolakan dari warga suku Dayak dengan berbagai macam alasan misalkan mengingat tabiat dan perilaku warga suku Madura sebelum konflik”. *(Wawancara dengan Tokoh Adat Dayak Kecamatan Ketapang Sampit Kotawaringin Timur)*

Berbeda dengan kohesivitas antara masyarakat Suku Madura dengan Masyarakat Suku Dayak di Kecamatan Kotabesi. Interaksi sosial yang terjadi di Kecamatan Kotabesi antara masyarakat Suku Madura dan masyarakat Suku Dayak tidak terpengaruh oleh konflik yang terjadi dikarenakan memang dalam interaksi sebelumnya tidak ada persoalan yang menjadi sumber konflik, sehingga justru pada saat rekonsiliasi akan hadirnya warga Suku Madura kembali ke Kecamatan Kotabesi sangat diharapkan oleh warga setempat. Seperti yang dikemukakan oleh Amang Idar (Tokoh DAD Kecamatan Kotabesi Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, sebagai berikut;

“Hubungan sosial warga Madura yang ada di kotabesi sebelum dan sesudah konflik tidak jauh berbeda, dulu ketika pecah konflik antar suku, barang-barang yang dimiliki oleh warga suku Madura banyak yang ditiptkan pada tetangga yang merupakan warga suku Dayak yang ada di kotabesi, ketika warga suku Madura di pengungsian ada yang meminta harta benda yang ditinggalkan dijual, justru warga suku Dayak yang dengan sukarela untuk membantu menjual dan dananya diserahkan ketika warga Madura berada di pengungsian, begitu juga ketika warga suku Madura kembali dari pengungsian seluruh barang yang dulu ditiptkan seluruhnya di kembalikan kembali pada warga suku Madura. Menurut Dewan Adat Dayak korban jiwa akibat pecahnya konflik di Kecamatan Kotabesi hampir tidak ada, baik dari warga suku Dayak maupun dari warga Suku Madura karena proses asimilasi dan akulturasi hubungan antara suku berjaan dengan baik, hingga sampai saat ini warga suku Madura semakin berusaha untuk mempererat lagi hubungan tali persaudaraan agar tetap terciptanya kerukunan baik dalam kegiatan arisan, kelompok pertanian dan perdagangan. Warga Madura yang kembali dari pengungsian ke kecamatan Kotabesi secara keseluruhan samasekali tidak ada penolakan, karena perilaku dan sikap warga suku Madura yang ada di kotabesi memang tidak pernah bermasalah dengan warga suku Dayak sehingga proses pengembaliannya sangat cepat dibanding daerah-daerah lain yang ada di kotawaringin timur. Dewan adat Dayak justru bersyukur dengan kedatangan warga suku Madura dari pengungsian karena roda perekonomian kembali berjalan, dimasyarakat pun tidak ada yang lagi yang berusaha mengungkit-ungkit masalah etnis dan sara di tengah masyarakat”.
(wawancara dengan Tokoh Adat Dayak Kecamatan Kotabesi Sampit Kotawaringin timur)

Proses rekonsiliasi awal pasca konflik dengan hadirnya kembali masyarakat Suku Madura di tengah-tengah masyarakat Suku Dayak menuai pro dan kontra sesuai dengan daerahnya masing-masing. Sebagian besar masyarakat Suku Dayak menolak hadirnya kembali masyarakat Suku Madura dikarenakan adanya sumber konflik yang sebelumnya terjadi, namun juga ada beberapa tempat yang menerima dengan ikhlas bahkan

mendorong percepatan rekonsiliasi dikarenakan memang tempat tersebut tidak pernah ada persoalan antar entis.

Interaksi sosial antar masyarakat Suku Madura dan Suku Dayak sejak awal kedatangan, hasil dari proses rekonsiliasi memang belum nampak baik. Sikap-sikap seperti sediakala dari masyarakat Suku Dayak masih belum terlihat dalam proses interaksi, justru yang nampak adalah sikap kurang harmonis dan terkesan kurang bersahabat. Hubungan yang kurang harmonis dialami oleh H. Madin seorang warga Suku Madura di Kecamatan kotabesi;

“.....Kondisi penerimaan warga suku Madura sekembalinya dari pengungsian sangat beragam, ada yang sudah berusaha melakukan komunikasi dan kontak sosial dan ada juga sebagian warga suku Dayak yang masih berusaha menghindar jika bertemu warga suku Madura. Tetapi setelah berjalannya waktu, kondisi pada lingkungan masyarakat berangsur-angsur mulai berubah.....”.
(Wawancara dengan warga Madura Mat Mosel).

Seiring berjalannya waktu, kohesivitas antara masyarakat Suku Madura dan Masyarakat Suku Dayak mulai berangsur-angsur membaik. Hal tersebut dikarenakan sudah berubahnya kebiasaan, perilaku dan perangai warga masyarakat Madura dalam kesehariannya. Sikap masyarakat Suku Madura yang dulunya tidak mau bergaul sekarang sudah mulai bisa membarui dalam setiap kegiatan di lingkungan sekitar, berkumpul bersama dengan warga Suku Dayak. Seperti yang disampaikan oleh Anang Nur Ali (DAD Ketapang) bahwa,

“.....Sebagian besar warga suku Madura pasca konflik, sudah berusaha menyesuaikan diri dan mencoba menyatu serta membaur dengan warga Suku Dayak dan Suku-Suku lainnya yang ada di kecamatan ketapang, dulu sebelum konflik menurut tokoh Dewan Adat Dayak Kecamatan Ketapang warga suku Madura sama sekali tidak mau menghadiri setiap kegiatan yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka.....” (*Wawancara dengan Tokoh Adat Kecamatan Ketapang Sampit*).

Perubahan perilaku masyarakat Suku Madura juga terlihat dalam interaksi pasca konflik, dimana warga Suku Madura lebih sopan dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada para tokoh Adat Suku Dayak sebelum melakukan kegiatan yang *kondangan* atau *hajatan besar*. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Ahmad warga Suku Dayak, sebagai berikut:

“.....Pasca konflik Sampit warga suku Madura jauh sangat berbeda pada saat sebelum konflik, sekarang jika ada warga suku Madura yang ingin melaksanakan kegiatan yang mengundang orang banyak mereka tidak berani melaksanakan jika belum meminta ijin dan mendapat persetujuan dari para tokoh dan warga suku Dayak.

“.....ada perbedaan yang sangat mencolok antara sebelum konflik dan sesudah konflik perubahan tersebut tergambar dari perilaku warga suku Madura yang dulu selalu mengendepankan sifatnya individualis dan tidak peduli dengan lingkungan masyarakat sekarang sudah mulai perbaikan misal jika ada acara perkawinan mereka terlebih dahulu menyampaikan langsung dengan pada tokoh-tokoh disekitar tempat tinggal mereka. Jika ada warga suku Dayak yang melakukan kegiatan, warga suku Madura sekarang telah membaur dan seringkali kebanyakan membantu....”. (*Wawancara dengan warga Suku Dayak di Kecamatan Kotabesi*).

Kohesivitas pasca konflik antara Suku Dayak dengan Suku Madura semakin membaik dari masa ke masa. Iktikad baik nampak dari perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat Suku Madura dalam keseharian

membraur dengan masyarakat Suku Dayak di Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Selatan.

Interaksi yang ditunjukkan masyarakat Suku Madura dalam bersosialisasi saat ini adalah bentuk implementasi dari suksesnya proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh bantuan semua pihak baik pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam mewujudkan ke-Bhineeka Tunggal Ika yang menjadi simbol warisan budaya Indonesia.

Apresiasi yang sangat patut diberikan bagi masyarakat Suku Madura dan masyarakat Suku Dayak yang masih bisa menjaga nilai-nilai integrasi dalam proses kehidupan sosial, agar dapat menjaga sendi-sendi kerukunan, kebersamaan dan persatuan yang merupakan simbol warisan budaya Indonesia.

5.2.3 Interaksi dalam Sosial Politik

Proses kohesivitas masyarakat Suku Madura dan Suku Dayak pasca konflik dalam sosial politik nampak dalam proses pemilihan kepala desa Bajarum di Kecamatan Kotabesi, dimana kekuatan interaksi sosial yang selama puluhan tahun telah dibangun kembali sejak masa rekonsiliasi akibat konflik etnis di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah di uji kembali.

Uji tentang interaksi dinyatakan sukses berjalan dengan baik meskipun diawal proses awal mengalami sedikit gesekan yang disebabkan

oleh adanya kesalahpahaman dari masing-masing kelompok masyarakat. Berhasilnya uji interaksi di Kecamatan Kotabesi tercapai dengan terpilihnya salah satu warga keturunan campuran dua etnis Suku Dayak dan Suku Madura menjadi pimpinan desa Bajarum, menjadi bukti kuat bahwa pada dasarnya interaksi sosial antara dua kelompok etnis di Sampit Kotawaringin Timur terbilang sudah sangat kuat dan tidak terpengaruh oleh isu etnis yang menjadi sebab konflik dimasa lalu. hal itu disebabkan karena tidak melebarnya agitasi-agitasi awal menjadi sensitifitas identitas atas dasar etnis dari masing-masing kelompok.

Menurut H. Hadriansyah yang merupakan Kepala Desa Bajarum, memang agitasi diawal pencalonan sangat nampak, namun dengan dasar iktikad baik semua itu dapat teratasi. Seperti yang disampaikan dalam kutipan berikut:

“Meskipun diproses awal sedikit ada kesalahpahaman akan tetapi pada saat proses berlangsungnya pemilihan, apa yang di khawatirkan tidak terbukti dan pemilihan berlangsung aman dan lancar dan yang terpilih adalah kepala desa saat ini yang merupakan warga suku Madura Keturunan campuran berdarah suku Madura dan Suku Dayak. Ini membuktikan bahwa dibeberapa daerah khususnya desa bajarum kecamatan Kotabesi tingkat toleransinya sangat tinggi jika dibandingkan dengan desa-desa lainya yang ada di Kotawaringin Timur walaupun mayoritas suku adalah merupakan warga dari suku Dayak tetapi dalam hal memilih pemimpin desa pada kenyataanya tidak ada diskriminasi”. (*Wawancara dengan Bapak Hadriyansah Kepala Desa Bajarum*)

Proses interaksi antara masyarakat Suku Madura dan Suku Dayak terkait dengan sosial politik dalam proses pemilihan kepala desa di desa

Bajarum Kecamatan Kotabesi menjadi contoh bahwa hubungan antara kedua kelompok yang sempat bertikai dimasa lalu telah membaik. Masyarakat sudah tidak terpengaruh oleh adanya provokasi dengan dasar mengatasnamakan etnis tertentu. Dengan kata lain bahwa kondisi masyarakat pasca konflik di Kecamatan Kotabesi dan sekitarnya telah sadar betul untuk tidak mau terjebak dalam siklus perpolitikan dimasa lalu yang menimbulkan banyak kerugian dan korban karena mungkin saja ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Masyarakat lebih memilih mengupayakan untuk memelihara nilai-nilai persaudaraan, dan nilai-nilai persatuan dengan dasar ke-Indonesian.

Berdasar pada konsep interaksi dalam sosial politik yang terjadi di desa Bajarum Kecamatan Kotabesi mengasumsikan bahwa interaksi yang didasari dengan nilai-nilai ketulusan, kesabaran, dan keberagaman menjadi dasar keberhasilan sebuah proses interaksi, meskipun dalam prosesnya mengalami pasang surut, karena ibarat pepatah benci tapi cinta, itulah kalimat yang pas untuk mendiskripsikan interaksi antara masyarakat di Indonesia yang multi etnis dan multikultur khususnya masyarakat Suku Madura dan Suku Dayak.

5.2.4 Interaksi dalam Proses Penguatan Ekonomi

Sejak awal penyebaran masyarakat Suku Madura ke daerah-daerah di wilayah Indonesia memang sengaja memiliki tujuan dalam persoalan ekonomi, dikarenakan sebagaimana daerah yang sangat Islami konsep Hijrah menjadi anjuran bagi umat untuk melakukannya demi mendapatkan kehidupan yang layak. Terbukti dengan bagaimana diaspora dari masyarakat Suku Madura tersebar di seluruh pelosok Bangsa Indonesia. Selain itu kondisi geografis daerah Madura sangat mendukung terbentuknya perilaku masyarakatnya yang memiliki etos kerja sangat tinggi, penuh persaingan, senang dengan pertengkaran bahkan memiliki filosofis selalu menggunakan *carok* atau *clurit*, dikarenakan kondisi daerah Madura disamping padat penduduk dalam ruang yang sempit sekaligus juga sumberdaya di Madura tidak memadai dan tidak ada pengelolaan sumber daya alamnya dengan baik dikarenakan sumber daya manusia rendah.

Peristiwa konflik di Sampit antara kelompok masyarakat Suku Madura dengan Suku Dayak adalah bentuk entitas dari *in group feeling* yang dibawa masuk kedalam kelompok yang memiliki *in group feeling* yang berbeda. Harusnya pada saat masuk atau bergabung dalam kelompok tertentu perasaan *in group feeling* mau tidak mau harus ikut melebur atau bisa menjaga identitas dari kelompoknya untuk menghindari benturan atau konflik dengan kelompok lain.

Proses interaksi di Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah antara masyarakat Madura dengan masyarakat Suku Dayak dalam hubungan ekonomi mengambil konsep saling menguntungkan dan saling membutuhkan diantara keduanya. *Take and give*, saling menerima dan saling memberi yang sudah terjadi dari berpuluh-puluh tahun yang lalu menjadi hampa dan terhenti setelah konflik, dimana masyarakat Suku Madura berada di pengungsian selama beberapa tahun. Perasaan kehilangan dan mengharap kembali agar roda perekonomian berjalan kembali menjadi ungkapan oleh Amang Idar salah satu Tokoh Adat Dayak di Kecamatan Kotabesi,

“.....Dewan adat Dayak justru bersyukur dengan kedatangan warga suku Madura dari pengungsian karena roda perekonomian kembali berjalan, dimasyarakat pun tidak ada yang lagi yang berusaha mengungkit-ungkit masalah etnis dan sara di tengah masyarakat.....”.

Interaksi dalam bidang ekonomi tercakup dalam hubungan jual beli, dan hubungan antara pekerja dengan pemilik lahan. Hubungan dalam konteks ekonomi tersebut dapat terlihat di pasar-pasar, pertokoan yang menjadi pekerjaan mayoritas masyarakat Suku Madura dan hubungan antara pekerja sawit atau pekerja karet dengan pemilik lahan yang dimiliki oleh kebanyakan masyarakat Suku Dayak.

Kembalinya masyarakat Suku Madura di tengah-tengah kehidupan masyarakat Suku Dayak memberikan keceriaan, seolah kemeriahan sebuah

proses kehidupan bersemi kembali. Gelora ekonomi nampak menggeliat di pasar-pasar yang ramai kembali, dan nampak bagaimana interaksi pasar menjadi ikon hubungan yang dinamis antara masyarakat Suku Madura dengan Suku Dayak dan menjadi magnet untuk tetap merawat agar harapan dimasa depan dengan penuh kebahagiaan.

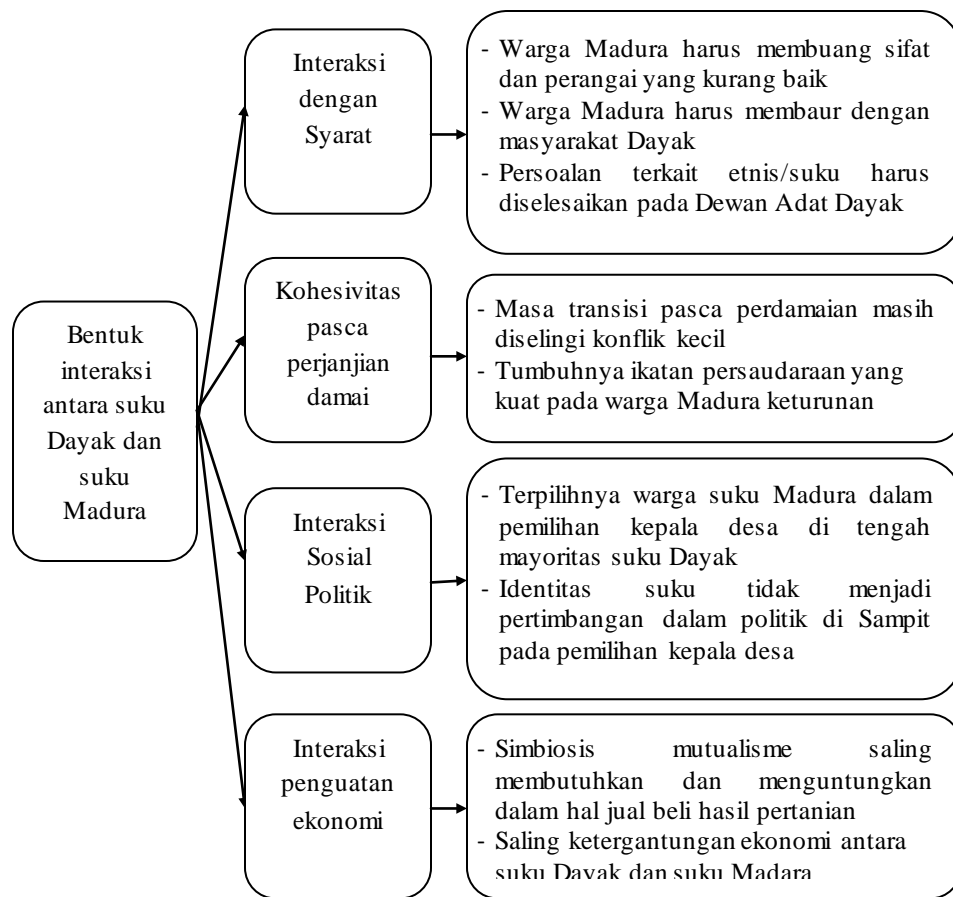
Nampak wajah-wajah semringah, berseri-seri dari para pedagang yang mayoritas masyarakat Suku Madura, mengharap pembelinya datang agar selain barang dagangannya laku, keuntungan didapat dan juga interaksi antar masyarakat Suku Dayak semakin erat dan dinamis.



Gambar 5.5 Interaksi antara Masyarakat Suku Madura dengan Suku Dayak di Pasar

Hubungan antara masyarakat Suku Madura dengan Suku Dayak dalam konteks ekonomi sesudah konflik menjadi faktor dominan atas

keberhasilan proses rekonsiliasi kembalinya masyarakat Suku Madura ke Sampit, dikarenakan telah terjadi ketergantungan ekonomi diantara keduanya, dimana konsep *simbiosis mutualisme* yang terjadi sejak ratusan tahun yang lalu diantara keduanya. Hubungan yang saling menguntungkan dibalut dengan rasa cinta dan kasih. Selain itu konsep interaksi dengan dasar penguatan ekonomi di pasar justru menguatkan proses interaksi itu sendiri, karena mereduksi konsep identitas, yang memandang latar belakang baik dari suku, agama, dan ras.



Gambar 5.6 Bentuk Interaksi antara suku Dayak dan suku Madura

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk interaksi antara suku Dayak dan suku Madura walaupun pada awalnya merupakan bentuk interaksi bersyarat melalui kesepakatan dan perjanjian perdamaian dengan menjunjung tinggi falsafah “*huma betang*” tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa ketergantungan suku Dayak terhadap keberadaan warga suku Madura juga menjadi faktor pendorong cepatnya masa transisi yang pada mulanya menolak seluruh warga Madura baik keturunan dan pendatang ke Sampit menjadi lebih terbuka dan bersedia menerima akan keberadaan warga Madura. Menariknya dari hasil temuan penelitian ini juga sudah ada warga dari Suku Madura yang menjadi Kepala Desa di tengah mayoritas suku Dayak.

BAB VI
PROSES SOSIAL DAN FAKTOR PENGARUH INTERAKSI SOSIAL
PASCA KONFLIK ANTAR SUKU DAYAK DAN SUKU MADURA DI
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

6.1 Proses Sosial Pasca Konflik Antar Suku Dayak dan Suku Madura di Sampit

Menurut Gillin dan Gillin Interaksi sosial antar manusia terjadi dalam konteks proses sosial. Ada dua jenis proses sosial yakni; (1) proses yang asosiatif yaitu akomodasi, akulturasi, dan asimilasi; (2) proses yang diasosiatif yaitu persaingan/kompetisi, kontraversi dan konflik (Soekanto, 1989; Liliweri, 1994).

Berkaca pada beberapa kejadian yang hampir menjurus pada konflik dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sampai saat ini warga suku dayak dan tokoh Dayak masih menyimpan kekhawatiran dan perasaan bahwa sikap dan tingkah laku warga suku Madura belum sepenuhnya mengalami perubahan. Alasan kekhawatiran tersebut diungkapkan oleh dewan adat Dayak bahwa ada sebagian kecil warga suku Madura yang tidak memahami betul sejarah konflik dan faktor pemicu konflik di Sampit Kotawaringin Timur.

Kekhawatiran akan kembalinya kebiasaan sikap dan perilaku warga Madura pada kebiasaan lama mereka yang lebih menonjolkan kekerasan tersebut akan terus membayangi interaksi sosial dan hubungan sosial antara

warga suku dayak dan suku Madura di Sampit, sehingga pasca konflik proses interaksi antara warga suku Dayak dan warga suku Madura masih saja mengalami pasang surut, terkadang interaksi terlihat harmonis, tetapi sering kali juga mengalami krisis karena tingkat sensitifitas masyarakat Dayak masih sangat tinggi.

Pasang surutnya hubungan sosial antara warga suku Dayak dan suku Madura karena, serta pengalaman pernah berkonflik selama ini terus berdampak pada tingginya sensitifitas kesukuan, kemudian faktor lain juga adalah sebabkan karena tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh oknum warga suku Madura yang kadang menjadi pemicu ketidakharmonisan hubungan sosial masyarakat, misalnya respon masyarakat suku dayak yang bersifat spontanitas pada kejadian perkelahian antara warga suku Dayak dan Madura baik di Sampit dan juga provinsi tetangga yakni banjarmasin, pencurian pada sarang walet milik warga Dayak yang dilakukan oleh oknum warga Madura, serta adanya sejumlah anak muda yang membentuk genk motor dengan nama "*Kacung Jaya Madura*" menambah panjang faktor pemicu konflik sehingga kembali membuat stereotif dan kecurigaan dalam hubungan sosial antarsuku di Sampit kembali muncul.

6.1.1 Proses Sosial Asosiatif Pasca Konflik

Pertemuan di Tumbang Anoi pada Tahun 1894, yang berisi kesepakatan mengakhiri konflik antara seluruh suku Dayak di

Kalimantan, meninggalkan budaya kekerasan dan menerima dengan tangan terbuka terhadap siapa dan suku mana saja yang datang, patuh terhadap hukum adat yang berlaku di Sampit Kotawaringin Timur kemudian memahami apa yang disebut orang Dayak '*belum behadat*' serta tidak melanggar nilai-nilai budaya, maka orang Dayak senantiasa akan menerima dan siap hidup berdampingan.

Falsafah Madura "*Rampak Naong Beringin Korong*" atau hidup dalam suasana rukun damai dan harmonis juga sebenarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum adat yang berlaku di masyarakat suku Dayak, tetapi sebenarnya ada persoalan lain yang menimbulkan gesekan yang menurut penuturan Ketua Dewan Adat Dayak adalah terletak pada proses interkasi sosial antara orang Dayak dan Madura yang selama ini dipenuhi dengan ketidaktulusan.

Interkasi sosial orang Madura yang selama ini masih dirasakan seperlunya dan kadang hanya untuk memenuhi dan mementingkan keperluan pribadi mereka saja "*karebbha dhibi*" atau hanya ingin menang sendiri juga diakui oleh tokoh Madura kebiasaan yang memang harus mereka buang sejauh-jauhnya agar proses rekonsiliasi dan kampanye perdamaian berjalan dengan baik serta bertambahnya kesadaran rasa persaudaraan yang tinggi.

Tidak tulusnya proses interkasi sosial orang Madura yang dirasakan warga suku Dayak juga diakibatkan tidak dipahaminya nilai-nilai falsafah

orang Madura “*Oreng Deddhi Taretan*” atau orang jadi saudara dalam kehidupan warga suku Madura di Sampit mengakibatkan berkurangnya kerjasama serta rasa solidaritas antar individu dan antar etnis menimbulkan kesan ada jarak yang memutus interaksi sosial antara orang Dayak dan orang Madura.

Kerjasama dan solidaritas yang kurang baik disadari oleh tokoh Madura disebabkan oleh sikap dan tingkah laku sebagian warga Madura yang sombong dan juga sangat sulit untuk diatur, untuk itu orang Madura diminta agar dapat mengintrospeksi diri dan bersabar dalam menghadapi kehidupan sosial di Sampit, bahkan menurut tokoh Madura sejauh ini mereka diterima kembali ke Sampit saja sudah sangat berterima kasih, jika ada warga Madura yang tidak bisa bersabar dan masih dengan pola perilaku yang sama maka diminta untuk meninggalkan kota Sampit.

Konflik telah banyak mengubah perilaku orang madura sehingga menjadi sedikit lebih terbuka serta sudah meninggalkan sifat yang individual dengan lebih mengedepankan solidaritas kerjasama antarsuku dengan berbagai macam suku yang ada di Sampit melalui penguatan rasa kekeluargaan, kebersamaan melalui pertemuan-pertemuan penting dengan tokoh masyarakat dan tokoh Dayak melalui kegiatan penanaman pendidikan multikultural, penyuluhan budaya, kampanye penanaman nilai-nilai perdamaian, persamaan derajat, dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan.

Kerjasama yang berkelanjutan untuk memperbaiki hubungan sosial yang sudah dilakukan dalam mempererat kembali hubungan sosial serta tali persaudaraan antara warga suku Dayak dan Madura diwujudkan dalam pembentukan kelompok di bidang pertanian dan kerjasama pada bidang perdagangan. Anggota yang terlibat dalam kelompok pertanian tersebut terdiri dari berbagai macam suku baik dari suku Dayak, suku Jawa dan suku Madura, dilanjutkan dengan kerjasama pada bidang perdagangan, hasil dari pertanian dari warga suku Dayak di pasarkan oleh warga suku Madura sehingga yang di harapkan dari kerjasama tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguatkan rasa kekeluargaan.

6.1.1.1 Akomodasi

Proses pengembalian warga suku Madura ke Sampit ternyata memakan waktu yang cukup panjang hingga membutuhkan waktu sampai 3 tahun pasca konflik agar warga suku Madura yang dulu mengungsi bisa kembali ke Sampit Kotawaringin Timur, hal tersebut disebabkan oleh masih adanya penolakan oleh warga suku Dayak serta belum kondusifnya Kota Sampit yang merupakan pusat konflik, Penolakan oleh warga Dayak masih terasa sampai pada akhirnya ada kesepakatan damai dari tokoh Dayak yang sebagian besar berada di Sampit khususnya dan juga warga Dayak yang berada di seluruh Kabupaten Kotawaringin Timur pada umumnya dengan para tokoh Suku Madura untuk mengakhiri konflik.

Proses rekonsiliasi pasca konflik antara para tokoh Dayak dan tokoh Madura dengan melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur beserta Forum Komunikasi Korban Kerusuhan Kalimantan Tengah (FK-4) dalam usaha mengembalikan warga suku Madura korban konflik yang berada di pengungsian Sampang Madura, akhirnya membuahkan hasil yang positif dan Para tokoh sepakat bahwa warga suku Madura diperbolehkan kembali asalkan dengan menyetujui persyaratan dan bersedia mengikuti aturan-aturan dan patuh terhadap hukum adat yang ada di Sampit Kotawaringin Timur.

Kesepakatan damai dan kesepakatan untuk mengakhiri konflik memuat sejumlah perjanjian diantaranya, warga suku Madura yang diterima dan diperbolehkan kembali ke sampit adalah merupakan warga Madura yang dulu tidak memiliki masalah dengan warga lokal pada lingkungan sosial tempat tinggal mereka sebelum konflik sehingga proses pengembalian yang terjadi telah berjalan dengan baik.

Pasca Konflik hampir sebagian besar warga Madura di penampungan pengungsi di Sampang dikembalikan pada tempat asal mereka masing-masing, yang terbagi diberbagai wilayah Kotawaringin Timur diantaranya Kecamatan Kotabesi, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Baamang, Mentawa Baru/Ketapang, Desa Bajarum, mentaya hilir utara, kelurahan Sawahan dan lain-lain.

Pengembalian dan pemulangan warga suku Madura ke Sampit tergolong paling cepat, Jika kita bandingkan serta melihat konflik-konflik lain yang ada di Indonesia, penyebabnya adalah karena konflik hanya bersifat lokal dan hanya ada pada lokasi-lokasi serta wilayah tertentu, seperti daerah Kecamatan Kotabesi dan Desa Bajarum sebagian besar warga suku Madura pada saat konflik memilih mengungsi dan menghindari konflik serta tidak melakukan perlawanan sehingga dua daerah tersebut korban jiwa hampir tidak ada. Selain konflik bersifat lokal saja, yang menjadi faktor pendorong cepatnya pengembalian warga suku Madura adalah sebenarnya warga suku Dayak dan Madura yang di beberapa tempat telah menjadi satu kesatuan dan saling membutuhkan satu sama lain baik dalam hal pertanian serta dalam memenuhi perekonomian.

Setelah kembali ke Sampit dari pengungsian, warga suku Madura ada yang memutuskan untuk membersihkan sisa-sisa rumah yang dulu terbakar dan membangun kembali tempat tinggal seadanya, ada juga yang menyewa bedak-bedak untuk tinggal sementara waktu, tetapi uniknya ada sebagian warga suku Dayak yang dulu pernah menjadi tetangga merasa kasian dan mempersilahkan warga suku Madura untuk tinggal di pondok-pondok mereka sampai memperoleh tempat tinggal yang tetap.

Kembali ke Sampit Kotawaringin Timur bagi warga suku Madura berarti siap memulai dari nol serta rela dengan tidak menuntut banyak terhadap rumah beserta harta benda yang ditinggalkan yang ikut terbakar

imbas dari konflik antara suku. Bagi warga suku Madura korban konflik yang terpenting adalah dapat diperbolehkan kembali ke Sampit untuk menata serta mencari penghidupan yang layak walaupun harus memulai kembali kehidupan mereka dari awal.

Kondisi sosial masyarakat suku Dayak awal kembalinya warga suku Madura korban Konflik di Sampit sangat bervariasi, ada yang menyambut baik dan merasa terharu dengan kedatangan warga madura, karena sebagai besar warga Suku Madura yang kembali adalah warga yang memang lahir dan besar di Sampit. Tetapi masih ada sebagian kecil warga suku Dayak yang masih belum mampu dan memerlukan waktu untuk dapat menerima kembali warga suku Madura, penyebabnya adalah ketakutan akan kembalinya warga suku Madura pada kebiasaan-kebiasaan lama yang dulu dapat memicu dan memunculkan konflik etnis yang berkepanjangan.

Menurut penuturan Mat Mosel (warga suku Madura), interaksi yang dilakukan pada awal kepulangan dari pengungsian adalah interaksi yang masih diselimuti rasa takut dan trauma yang membuat hubungan masih sangat kaku dan terkesan seadanya, untuk berhubungan secara langsung serta bertatap muka dalam lingkungan masyarakat masih ada kesan rasa canggung, walaupun sebelum terjadinya konflik antara suku hubungan antara warga suku Madura dan warga suku Dayak penuh dengan keharmonisan.

Kondisi penerimaan sebagian dari warga suku Dayak juga diawal kepulauan warga suku Madura dari pengungsian, terkesan masih ada rasa tidak nyaman, bahkan sekedar untuk melakukan komunikasi dan kontak sosial saja dengan suku warga Madura sehingga kondisi ini membuat sebagian warga suku Madura sempat berfikir untuk kembali ke pulau Jawa.



Gambar 6.1 Wawancara dengan warga suku Madura di Kotabesi

Pada saat konflik tidak banyak harta benda yang dapat diselamatkan membuat warga suku Madura yang kembali dari penampungan pengungsi di Sampang, harus benar-benar berusaha dan memulai dari awal untuk mencari peluang usaha baru agar dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari, sehingga pada awal kepulauan warga suku Madura pekerjaan jenis apapun akan mereka terima asalkan kebutuhan tercukupi. Sebagian besar

lagi warga suku Madura memutuskan untuk kembali menggeluti pekerjaan lama mereka pada saat sebelum konflik Sampit yakni berdagang dan bertani.

6.1.1.2 Akulturasi

Proses Akulturasi budaya di Sampit bukan lagi sekadar antar budaya tetapi sudah pada multibudaya karena memang warga Suku Dayak di Sampit telah puluhan tahun bahkan ratusan tahun berinteraksi dengan banyak budaya yakni kebudayaan suku Jawa, suku Banjar, suku Bugis, etnis Tianghoa, dan juga suku Madura. Proses akulturasi dengan budaya-budaya lain yang ada di Sampit misalnya budaya suku Jawa, suku Banjar, suku bugis dan bahkan etnis Tionghoa terlihat sangat menguatkan satu sama lain, tetapi jika melihat proses akulturasi budaya antara Dayak dan Madura masih belum sepenuhnya melebur menjadi kesatuan budaya.

Kehidupan warga suku Madura di Sampit secara tidak sadar telah banyak terpengaruh oleh budaya orang Dayak, akan tetapi orang Dayak justru masih memiliki tingkat selektivitas yang tinggi terhadap budaya orang Madura. Selektivitas itu muncul karena memang akibat dari sikap pandangan bahwa budaya orang Madura yang mereka hadirkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Sampit justru terkadang malah memperlihatkan serta menonjolkan perbedaan budaya yang relatif bertentangan.

Selektivitas terhadap budaya orang Madura terjadi ketika pola interaksi warga suku Madura yang berlaga di arena persaingan sosial masyarakat terkulminasi melalui pandangan negatif terhadap budaya suku Madura yang dikenal dengan sikap kekerasan dan sulit diaturnya warga Madura, seakan-akan hal tersebut menjadi gambaran mayoritas budaya orang Madura umumnya.

Sehingga pasca konflik perbedaan dan pertentangan antar budaya Dayak dan Madura seakan melebur menjadi satu, dan tidak nampak menonjolkan identitas masing-masing, dimana etnis Madura lebih bisa menerima budaya masyarakat Dayak pada umumnya, dan mengesampingkan identitas budaya aslinya. Nampak dalam interaksi sehari-hari bahwa masyarakat Madura seringkali membaaur dengan kelompok masyarakat Dayak dalam bentuk paguyuban pertanian, pasar, sekolah dan komunitas lainnya.

Sebagian dari warga suku Dayak juga sudah ada yang menikah dengan warga suku Madura dan proses upacara perkawinannya pun sudah tidak kental dengan budaya Madura dan juga sudah mengikuti bagaimana proses budaya adat perkawinan suku Dayak pada umumnya.

Proses penyatuan budaya tersebut disadari oleh warga suku Madura yang sudah memahami bahwa mereka merupakan warga pendatang yang harus menjunjung tinggi budaya lokal yang menjunjung tinggi falsafah *dimana bumi dipijak disitu bumi dijunjung*. Menerima kebudayaan diluar

kebudayaan sendiri dengan perlahan misalnya budaya pecutan yang dilakukan orang Madura yang juga di gunakan masyarakat Dayak.

Perkembangan akulturasi pasca konflik semakin nampak terlihat dalam berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh baik masyarakat Suku Dayak dengan Suku Madura. Faktor utama adalah mereka tidak ingin konflik kelam yang terjadi dalam dekade sebelumnya terulang kembali, dan sungguhpun demikian bahwa keberagaman budaya yang ada di bangsa ini adalah harga mati menjadi acuan universal bagi etnis yang ada di Indonesia agar mengedepankan musyawarah sebagai cara menyelesaikan masalah yang merupakan karakteristik bangsa ini.

Pembauran antar kelompok masyarakat di Sampit Kotawaringin Timur yang harmonis memiliki persamaan dengan sebelum konflik pada umumnya, hanya beberapa kelompok saja yang masih menggunakan dominasi identitasnya, meskipun begitu harapan dari seluruh masyarakat Suku Dayak adalah harus ada nilai-nilai kebersamaan, saling menjaga, dan saling menghormati dengan prinsip *dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung* sebagai panduan dalam berintegrasi dengan kelompok lain. Dengan kata lain adalah meskipun masing-masing kelompok masih mengutamakan identitasnya, namun harus memiliki batasan-batasan tertentu, yang artinya bahwa nilai-nilai *in group feeling* tidak semestinya diterapkan berdasarkan ruang dan waktu (Barth, 2006).

6.1.1.3 Asimilasi

Percampuran dua kebudayaan yang disertai hilangnya kebudayaan asli hingga membentuk kebudayaan baru menciptakan ruang interaksi yang semakin terbuka bagi masyarakat Dayak dengan masyarakat Madura. Terciptanya kebudayaan baru dengan menerima segala bentuk nilai-nilai budaya *in group feeling* memberikan pengaruh pada proses interaksi yang semakin subur diantaranya keduanya, dan semakin mengaburkan identitas masing-masing yang sama-sama mengedepankan kepentingan universal yaitu keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika.

Sikap warga Madura pasca konflik sangat berubah total dengan adanya peristiwa konflik, yang dulu sangat menonjolkan kebudayaan Madura seperti ronggeng, sandur dan karapan sapi sudah hampir tidak ada, karena memang tokoh Madura sendiri melarang kegiatan tersebut mengingat kadang kegiatan tersebut dibarengi dengan perjudian sehingga hal tersebut hanya menambah kerawanan menimbulkan konflik.

Pelarangan segala bentuk kegiatan yang didalamnya memiliki unsur negatif, dalam arti bertentangan dengan nilai-nilai keluhuran budaya *in group feeling* dari masyarakat Dayak menjadi kunci utama dalam proses interaksi berkelanjutan. Pencegahan dengan menghindari konflik agar tidak terjadi kembali salah satu caranya adalah dengan mengurangi budaya negatif dan menerima budaya positif dari masing-masing kelompok.

Kebudayaan baru yang merupakan campuran antara kebudayaan Dayak dan Madura memang belum terlihat jelas dalam wujudnya, akan tetapi perasaan menerima budaya dengan kesadaran menjadi faktor yang sangat mungkin untuk melahirkan budaya baru tersebut. Perasaan menerima budaya baru hanya lebih terlihat dalam bentuk nilai-nilai normatif, seperti budaya ketergantungan ekonomi, dan ketergantungan fisik, dan meskipun hanya dalam batasan nilai tertentu, namun tidak disadari bahwa proses asimilasi dari proses interaksi dapat terlahir.

Bentuk asimilasi atau percampuran budaya antara masyarakat Madura dengan Masyarakat Dayak sebelum konflik dan sesudah konflik sama-sama hanya terlihat dari luarnya saja. Bentuk asimilasi dalam ketergantungan nilai-nilai ekonomi diwujudkan saling berbagi dalam tukar menukar barang, proses jual beli, yang mayoritas awalnya lebih dimiliki oleh masyarakat pendatang, sedangkan masyarakat Dayak lebih dominan pada perkebunan dan bukan berdagang.

Percampuran budaya ekonomis menjadi unsur pokok dalam proses interaksi budaya pasca konflik di Sampit Kotawaringin Timur. Beberapa masyarakat Dayak sudah mulai banyak bergelut dalam iklim perdagangan menggantikan dominasi kebudayaan mereka yang dominan di perkebunan dan pertanian. Bab sebelumnya menjelaskan bahwa hubungan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal dalam ketergantungan diibaratkan dengan hubungan asmara, benci tapi cinta, atau rindu tapi

benci, dikarenakan dalam interaksinya saling ada ketergantungan dan saling membutuhkan satu dengan lainnya.

Asimilasi dalam bentuk nilai-nilai ekonomis menjadi salah satu faktor cepatnya proses re-evakuasi pengungsi dampak konflik antar etnis di Sampit Kalimantan Tengah dari beberapa dekade yang lalu. Ketergantungan tukar menukar pasar memberikan dampak kehilangan atas proses interaksi yang berjalan dengan baik sebelumnya. Bentuk asimilasi yang telah membaur dan merubah masyarakat lokal dengan menerima kebudayaan baru dalam bidang tata kelola perekonomian menjadi gersang dan kering tanpa adanya persaingan pasar.

Persaingan pasar yang sebelumnya dilakukan secara dinamis, meriah dan spontanitas serta keriangannya warga menjadi terhenti sejenak akibat konflik yang dialami antar etnis di Sampit Kotawaringin Timur di Kalimantan Tengah. Faktor percampuran kebudayaan dari masyarakat pendatang ke masyarakat lokal memberikan nilai-nilai istimewa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat dalam berinteraksi.

Interaksi yang sehat, bersahaja, dan berkesinambungan adalah merupakan deskripsi dari hubungan sosial pasar, dimana masing-masing tidak dominan pada etnis tertentu. Semua etnis melebur menjadi satu dalam hubungan pasar, tanpa menggunakan latar belakang dan ataupun background yang lain. Hubungan yang saling menguntungkan menjadi

rujukan deskripsi dari hubungan pasar pasca konflik etnis di Sampit Kotawaringin Timur.

Bentuk percampuran lainnya adalah percampuran fisik (*body*). Proses percampuran fisik tidak lebih hanya dalam bentuk perkawinan antara lelaki Suku Dayak dengan perempuan Suku Madura, dan ataupun sebaliknya, dan sudah dilakukan semenjak interaksi dari keduanya berlangsung jauh sebelum konflik terjadi. Perkawinan memang cara yang paling mudah untuk menunjukkan rasa simpati terhadap kebudayaan lain.

Ketertarikan terhadap individu baik dari secara fisik maupun non fisik mempermudah proses akulturasi baik dari konteks norma luar maupun norma yang tidak nampak. Norma luar atau perilaku yang sehari-hari ditemukan dalam hubungan sosial antara masyarakat Suku Dayak dengan Suku Madura menjadi magnet sosial bagi individu untuk merekatkan hubungan satu dengan yang lain dengan symbol simpati.

Magnet sosial yang terjalin kemudian membentuk kharisma dan menjadi ikatan nemonon yang tidak nampak namun menimbulkan untaian rasa yang tidak bisa disentuh kecuali dengan interaksi yang halus (*soft interaction*). Percampuran antar rasa dan perasaan yang ditimbulkan dari faktor alami dan alamiah tersebut bersatu menjadi kesatuan yang diwujudkan dalam perkawinan.

Percampuran personal menjadi sebuah ikatan resmi baik secara adat maupun resmi dalam perkawinan tidak menjamin seseorang lepas dari

persoalan identitas yang menyebabkan konflik antar etnis di Sampit Kotawaringin Timur pada era sekarang. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah *Adat Dayak* yang tidak mengakui keturunan darah campuran yang berasal dari keturunan perempuan dari Suku Madura, dimana beberapa dekade yang lalu keturunan campuran yang berasal dari keturunan perempuan dari Suku Madura menjadi korban konflik etnis di Sampit Kotawaringin Timur, dan sedangkan keturunan campuran yang berasal keturunan laki-laki dari Suku Dayak tidak menjadi korban.

Penyebabnya adalah adanya persepsi bahwa ketika laki-laki suku Dayak menikah dengan wanita dari suku Madura, maka yang lebih dominan dalam proses penanaman nilai-nilai budaya adalah dari kehidupan adalah keluarga laki-laki suku Dayak sehingga keturunan dari perkawinan campur tersebut menghasilkan keturunan yang lebih dominan dalam pemahaman adat dan perilaku serta kehidupan suku Dayak.

Perlakuan berbeda juga didapatkan dari perkawinan campuran yang berasal dari keturunan dari laki-laki yang berasal dari Suku Madura. Proses percampuran atas nama perkawinan mungkin akan sedikit mengurangi konflik, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi konflik yang mungkin kembali terjadi.

6.1.1.4 Enkulturasi

Sustainable culture (keberlanjutan budaya) pasca konflik di Sampit Kotawaringin Timur harus dilihat pada masa sebelum konflik berlangsung di tahun 2001. Proses enkulturasi pasca konflik sempat terhenti dikarenakan pertikaian antar etnis masih berlangsung, namun dapat dijelaskan bahwa enkulturasi pada masa sebelum konflik menjadi acuan dasar untuk menuliskan bentuk-bentuk budaya yang dapat diberikan oleh masing-masing kelompok etnis di Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.

Meskipun sedikit data yang diperoleh mengenai bentuk enkulturasi namun pada dasarnya proses enkulturasi dibentuk berdasarkan adanya persamaan nilai dan terdapat rasa simpat dan ketertarikan terhadap budaya baru, artinya proses enkulturasi terjadi karena faktor kepentingan, baik kepentingan ekonomi, politik, budaya, maupun norma.

Bentuk enkulturasi budaya antara etnis Madura dengan etnis Dayak masih sedikit untuk dideskripsikan kedalam bentuk enkulturasi secara mendalam, dan jelas, namun ada beberapa budaya yang dapat diterima oleh sebagian masyarakat baik dari masyarakat etnis Dayak dan Madura, dan sudah di implementasikan diantara keduanya.

Bentuk enkulturasi dapat di petakan menjadi beberapa bagian, enkulturasi dalam konteks ekonomi, dan budaya. Enkulturasi ekonomi dapat terlihat dari beberapa kelompok masyarakat Suku Dayak yang sudah mengaplikasikan beberapa kebudayaan dari Suku Madura, diantaranya

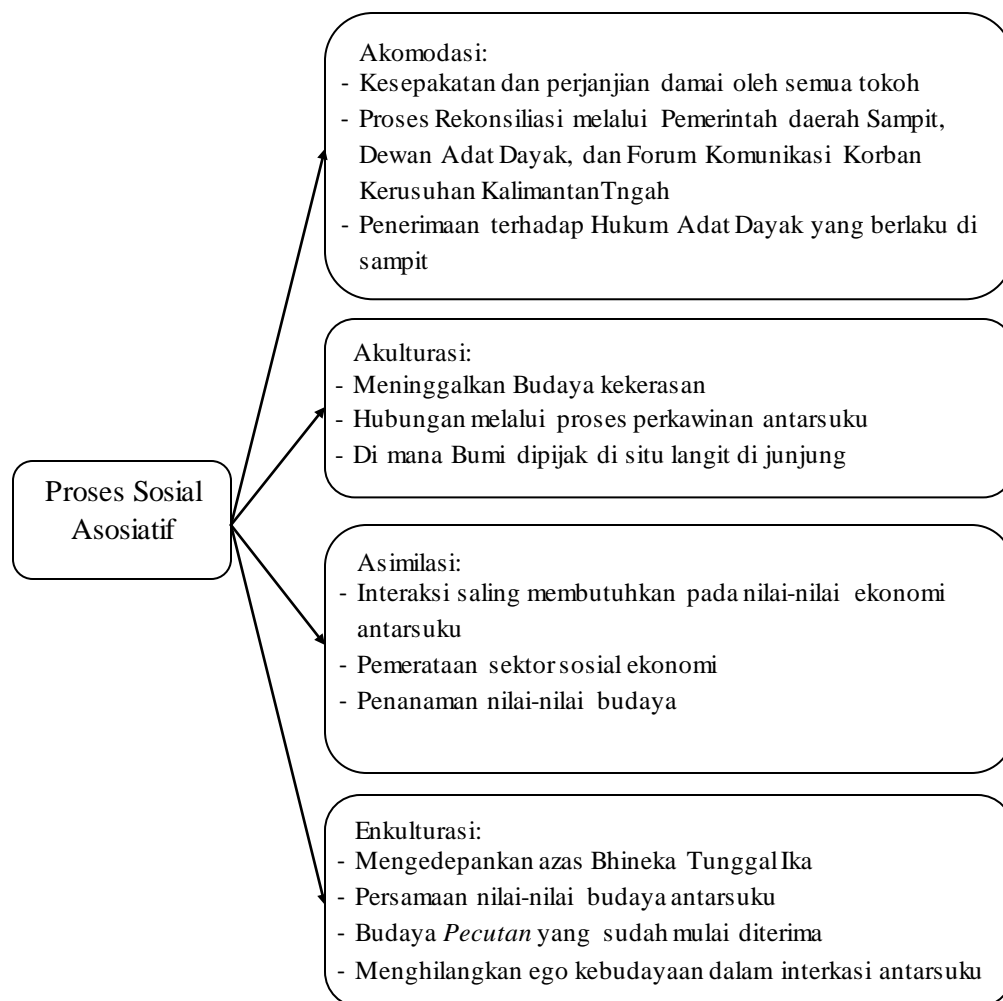
adalah kebiasaan dan budaya *pecutan* semacam arisan yang didalamnya merupakan proses saling bantu membantu tidak melihat dari mana asal sukunya jika dalam masyarakat ada hajatan besar misalnya proses perkawinan salah satu anggota keluarga mereka yang tergabung dalam kelompok *pecutan* tersebut, mereka bersama-sama memberikan sumbangsuhnya agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Bagi masyarakat Dayak beberapa sudah mulai menghargai kebudayaan dari etnis yang berbeda.

Bagi sebagian besar orang Madura nilai-nilai keharmonisan dan nilai kebersamaan yang tercover dalam *dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung* suda menjadi ikon bagi masyarakat Madura dalam menjaga keharmonisan dengan menghindari hal-hal negatif yang berasal dari kebudayaan mereka, misalnya ronggeng, karapan sapi yang didalamnya ada unsur perjudian yang bertentangan dengan Adat Suku Dayak.

Proses enkulturasi nilai-nilai ekonomi menciptakan persaingan pasar yang dahulunya dikuasai dominan pada masyarakat pendatang, dalam konteks pasar bahwa sebagian besar masyarakat lokal sudah melakukan enkulturasi nilai-nilai ekonomi dalam bentuk pertukaran barang di pasar, yang sebelumnya dominan di perkebunan atau pertanian. Makna pasar bagi sebagian besar masyarakat lokal memberikan pemahaman lain bahwa nilai-nilai ekonomi dibangun berdasarkan prinsip kebutuhan hidup selain pertanian dan perkebunan, serta proses penyambungan hubungan dengan

masyarakat lain antar perbedaan etnis, demi mewujudkan kebersamaan, kesamaan berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia.

Pasang surut, untung dan rugi menjadi simbolisasi hubungan antar etnik di Indonesia yang semakin terenkulturasi dengan mengambil kebudayaan yang positif dengan tetap mengedepankan asas ke-Bhinnekaan Tunggal Ika ikon dari NKRI. Sintesa dalam proses enkulturasi kebudayaan adalah pemahaman secara menyeluruh (comprehensive) baik nilai-nilai material maupun non material yang bersumber pada dasar kebersamaan, dan keseimbangan bersama, sehingga proses enkulturasi dapat berjalan dengan semestinya meskipun ada perbedaan dari masing-masing etnis.



Gambar 6.2 Bagan Proses Sosial Asosiatif

6.1.2 Proses Sosial Diasosiatif Pasca Konflik

Diasosiasif diterminoligikan sebagai istilah yang berlaku pada masyarakat dimana terjadi perilaku yang memiliki fungsi sebagai instrument yang berlawanan atau tindakan melawan dari sebuah kelompok. Fungsi diasosiatif adalah fungsi dimana proses sosial memiliki arah berlawanan, bertentangan, meskipun bukan setiap pertentangan atau yang berlawanan merujuk pada proses diasosiatif.

Diasosiatif memiliki persamaan dengan oposisi dalam proses sosial. Oposisi yang dimaksud memiliki pengertian perbedaan pandangan dengan maksud tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kepentingan. Diasosiatif merupakan bentuk perjuangan dalam memperjuangkan eksistensi (*struggle for existence*) untuk bekerjasama agar tetap hidup. Dengan kata lain proses diasosiatif adalah proses yang memiliki pandangan dan mekanisme yang berbeda namun masih dalam kerangka tujuan yang sama atau kepentingan yang sama dalam mewujudkannya.

Proses sosial pasca konflik di Sampit Kotawaringin Timur antara etnis Dayak dan etnis Madura mengalami pasang surut. Perkembangan proses sosial pasca konflik dominan dalam proses asosiatif, akan tetapi beberapa faktor memunculkan beberapa pandangan yang bertentangan sehingga terjadi proses diasosiatif, namun tidak menyebar dalam arena luas

dan bisa diselesaikan dengan kerjasama. Faktor yang mempengaruhi proses diasosiatif adalah faktor histories, persaingan dan konflik.

6.1.2.1 Persaingan/kompetisi

Persaingan terjadi dalam proses sosial di setiap kelompok masyarakat, dikarenakan untuk mewujudkan kepentingan yang harus tercapai, masing-masing menggunakan cara pandang yang berbeda. Dengan kata lain persaingan memiliki fungsi deviasi dan variasi, dimana proses sosial berjalan dengan dinamika yang setiap kali berubah menyesuaikan peran lembaga, kelompok, yang berada pada ruang dan waktu tertentu.

Menceritakan beberapa faktor konflik antar etnis di Sampit Kotawaringin Timur di Kalimantan Tengah, bahwa masyarakat pendatang cenderung memiliki identitas sebagai pekerja keras, ulet dan memilih untuk bekerja sebagai pedagang dalam kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Mereka merantau ke daerah tertentu yang belum banyak saingan dalam pekerjaan mereka, dan daerah tersebut memiliki daya pikat, baik dari masyarakat maupun kondisi geografisnya.

Alasan geografis dan faktor manusia menjadi pertimbangan seorang perantau untuk memijakan kakinya di sebuah wilayah tertentu, dikarenakan faktor dari daerah perantau sendiri dianggap kurang menguntungkan, baik dari segi geografis maupun manusia (terlalu banyak persaingan). Dasar

tersebut menjadikan kebanyakan masyarakat suku Madura menjadi perantau bukan hanya di wilayah Kalimantan, namun tersebar diberbagai wilayah di Indonesia.

Prinsip persaingan yang sudah menjadi akar budaya masyarakat Suku Madura menjadi spirit untuk membanting tulang dan bekerja keras untuk sekedar memenuhi dapur agar tetap ngepul bagi dirinya dan keluarganya, dikarenakan pengalaman dan pertimbangan seorang perantau adalah tujuan awal, dan hasil yang didapat nantinya bisa digunakan untuk kelangsungan hidup bagi keluarganya.

Berbeda dengan prinsip masyarakat Suku Dayak yang sejarah menciptakan mereka berada dalam lingkungan alam yang kaya akan sumberdaya alam, sangat mudah untuk mendapatkan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hanya dari hasil perkebunan dan pertanian yang luas yang dimilikinya. Ranah persaingan hampir tidak ada sama sekali diantara masyarakat Suku Dayak, hasil dari kekayaan alam yang dimilikinya sudah memuaskan dirinya untuk bersyukur kepada Tuhan apa yang dianugerahkan kepada mereka.

Berkembangnya peradaban dari tahun ke tahun, bergesernya wilayah Kalimantan menjadi arena pasar yang ramai, menciptakan kesenjangan yang mencolok diantara etnis pendatang dan etnis lokal. Mayoritas etnis pendatang semakin lebih baik perekonomiannya dan semakin memiliki hak atas tanah dengan semakin banyaknya etnis pendatang memiliki lahan

perkebunan baik dengan cara menyewa atau membeli, menimbulkan rasa persaingan yang mulai nampak muncul, dan diikuti dengan rasa cemburu, iri serta rasa benci.

Persaingan dalam berpolitik juga menjadi faktor persaingan yang menciptakan kecemburuan bagi masyarakat lokal terhadap masyarakat Madura. Semakin banyak masyarakat Madura yang kaya, makin berpeluang mereka untuk mendapatkan tempat politis di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur dan bahkan di beberapa wilayah Kalimantan lainnya. Kooptasi jabatan politik oleh beberapa warga masyarakat dari Suku Madura, diperkirakan akan semakin bertambah menimbulkan praduga yang negatif karena dikuatirkan dengan alasan politik ekonomi, dimana masyarakat lokal semakin terpinggirkan nantinya.

Persaingan politik semakin menguat dikarenakan faktor identitas yang harus selalu berada diatas daripada masyarakat pendatang, menciptakan segregasi yang tinggi diantara elit politik di Kalimantan Tengah, dan selalu berupaya agar tidak terjadi hal demikian. Persaingan politik kemudian menjadi pertarungan politik diantara elit politik dari kedua etnis. Menguatnya pengaruh elit politik dalam kasus konflik Sampit Kotawaringin Timur beberapa waktu yang lalu mencuat setelah masyarakat mengetahui beberapa kasus yang sengaja terdesign, dan adanya pihak aparat keamanan yang ikut terlibat dengan tujuan konflik semakin diperlama dan semakin sulit untuk di selesaikan.

Pasca konflik antar etnis di Sampit Kotawaringin Timur, persaingan yang kompetitif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi di pasar masih normatif dan kesan pertama pasca konflik tidak sedikit masyarakat Madura yang takut untuk memulai berinteraksi dengan masyarakat Suku Dayak, apalagi masyarakat yang memiliki kebiasaan berdagang dalam kesehariannya harus menunggu beberapa saat, dan menunggu waktu yang tepat, waktu dimana kedua etnis bisa saling berinteraksi seperti sedia kala, agar memudahkan mereka dalam berdagang di pasar.

Bagi masyarakat Madura modal sosial ekonomi pasar adalah baiknya hubungan dengan masyarakat lokal, semakin baik hubungan maka pasar dapat berjalan dengan baik, dan semakin menguntungkan. Ekonomi pasar adalah faktor ketergantungan yang mempercepat proses perdamaian di Sampit Kotawaringin Timur, dikarenakan pasar adalah tempat yang mempertemukan diantara kedua masyarakat, selain nilai-nilai non ekonomis yang didapatkan.

Persaingan ekonomi pasca konflik etnis di Sampit Kotawaringin Timur tidak lagi menjadi ikon atau preseden yang menguat untuk menjadikan persaingan ekonomi pasar sebagai faktor pemicu renggangnya hubungan antar kedua etnis di Sampit, dikarenakan didalam ekonomi pasar terdapat nilai-nilai kebutuhan pokok yaitu pemenuhan kehidupan keluarga dan nilai-nilai ketergantungan diantara pekerja keras yang memiliki daya saing tinggi dengan berdagang, dengan perkebunan dan

pertanian. Nilai saling membutuhkan antar etnis memberikan efek pada persaingan ekonomi pasca konflik begitu normative, normal.

Pembeda persaingan politik pasca konflik di Sampit Kotawaringin Timur dengan memberikan batasan pada masyarakat Suku Madura untuk membentuk IKAMA (Ikatan Masyarakat Madura) sebagai bentuk organisasi yang utuh mengalami kendala, dikarenakan dugaan ada penyalahgunaan dalam berjalannya organisasi tersebut jika nanti disahkan menjadi organisasi sungguhan. Ketua Dewan Adat Dayak menyatakan bahwa pemerintah daerah Kotawaringin Timur memang belum memberikan pernyataan bahkan atau membuat pengesahan terkait dengan organisasi tersebut dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat.

Alasan yang digunakan sebagai dasar referensi untuk menghambat lajunya organisasi tersebut adalah dengan pertimbangan agar konflik identitas di Sampit Kotawaringin Timur tidak kembali terjadi. Alasan tersebut sangat relevan dengan asas dan prinsip masyarakat Suku Dayak bahwa yang suka damai dan mengharap konflik tidak terulang kembali adalah harga mati.

6.1.2.2 Kontroversi dan konflik

Menurut Simmel memiliki pandangan pada konflik bahwa secara inherent konflik akan selalu ada dan terjadi didalam sebuah kelompok masyarakat, memperjelas pendapat Simmel bahwa pengertian konflik di

masyarakat era sekarang (millennia), bahwa manusia bukan hanya sekedar suka akan konflik namun juga suka akan menciptakan konflik (Puryanto, 2018). Dengan kata lain bahwa dalam kondisi apapun, masyarakat mampu menciptakan konflik meskipun dia sudah berada dalam sedang berkonflik.

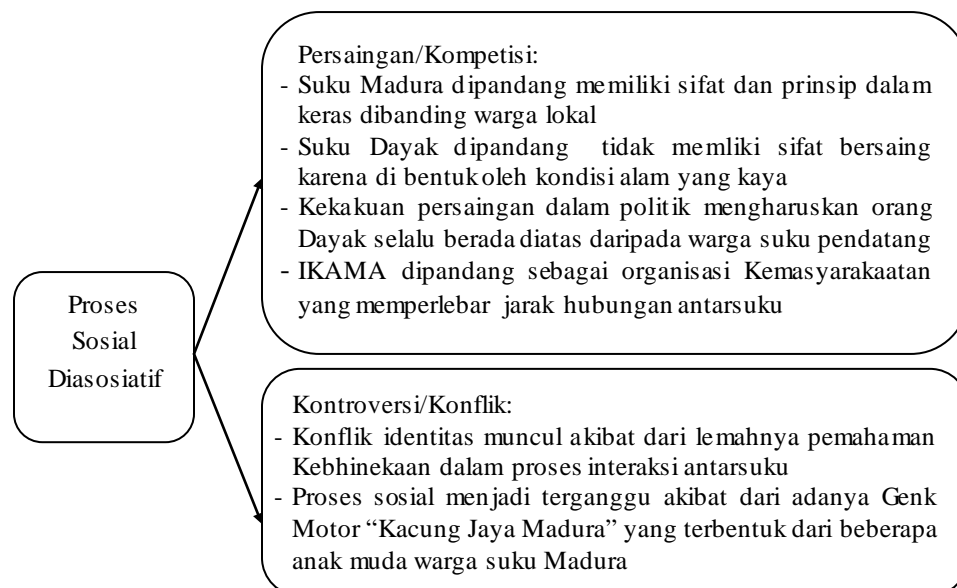
Beberapa kejadian yang menyertakan bahwa pasca konflik di Sampit Kotawaringin Timur masih menjadi perhatian yaitu, beberapa kejadian yang terjadi hampir menyeret dan melebar menjadi konflik identitas diantaranya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang warga Madura terhadap pemuda Suku Dayak, dan kejadian kriminal di Baamang, dimana ada warga Madura yang melakukan tindakan pencurian di sarang burung wallet milik seorang warga Suku Dayak, mengakibatkan jatuhnya korban si pemilik dengan luka bacokan dari parang si perampok.

Peristiwa kontroversi politik lainnya juga terjadi pada saat pemilihan kepala desa di Desa Bajarum Kecamatan Kotabesi Kotawaringin Timur beberapa saat yang lalu, dimana salah seorang kandidat adalah warga campuran yang dominan etnis Madura memenangkan kontestasi politik dengan mengalahkan rivalnya dari kalangan warga Suku Dayak. Kontroversi politik yang terjadi dalam kontestasi pilkades di Desa Bajarum hampir menjadi pertarungan politik identitas, namun mengendur dikarenakan ada upaya pencegahan dari pemerintah dan elit politik.

Persoalan kontroversi dan konflik pada masa setelah konflik etnis di Sampit Kotawaringin Timur memiliki kaitan dengan peristiwa sejarah di

masa kelam, menciptakan kemungkinan konflik identitas muncul kembali jika tidak diimbangi oleh penguatan tentang ke-Bhinnekaan yang dimiliki universal oleh bangsa Indonesia dengan didorong oleh penguatan dari Negara.

Fenomena penguatan Negara dalam menyelesaikan setiap konflik etnis di Indonesia agar dengan cepat terselesaikan dan tidak melebar ke wilayah yang lain, menjadi taruhan bagi pemimpin di Negara ini, dimana masing-masing wilayah memiliki ciri khas budayanya, dan berbagai macam adat istiadat lainnya, mengharuskan bahwa seorang pemimpin harus memberikan kontribusi yang maksimal bagi masing budaya adalah wajib dan tidak bisa di tawar lagi.



Gambar 6.3 Bagan Proses Sosial Diasosiatif Pasca Konflik

Persoalan etnis di Indonesia telah mengalami pasang surut, hendaknya dijadikan referensi dan pembelajaran bagi siapa saja yang menjadi pemimpin selanjutnya, agar memiliki konsep penyelesaian permasalahan konflik yang cepat, dan tuntas, sebagai dasar untuk memperkuat bangsa dan negara dalam mencapai masyarakat yang kuat untuk menjalankan proses demokrasi dengan sebaik-baiknya.

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa proses sosial yang terjadi antara suku Dayak dan suku Madura sebenarnya sudah sangat baik karena kedua pihak yang pernah berkonflik telah bersama menyatu dalam berbagai macam kegiatan salah satunya yang mencolok adalah pada bidang pertanian baik suku Dayak dan Madura bahkan suku lainnya yang ada di Sampit yang telah menyatu dalam kelompok pertanian yang pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama.

Temuan lain juga terungkap bahwa warga Madura sebagian sudah memahami makna "*belum behadat*" atau hidup beradap, sehingga sifat individualis warga suku Madura juga telah hilang serta menjadi lebih terbuka, tetapi sisi negatifnya temuan penelitian ini juga mengungkap bahwa ada sekelompok remaja dari suku Madura yang membentuk genk motor "*Kacung Jaya Madura*" yang beranggotakan beberapa warga dari

pemuda warga suku Madura sehingga sedikit memunculkan ketegangan serta kecurigaan ditengah proses perbaikan pasca konflik.

6.2 Faktor Pengaruh Interaksi Sosial Pasca Konflik Antar Suku Dayak dan Suku Madura di Sampit

Tokoh ilmuwan yang memiliki andil utama sebagai perintis Interaksi Simbolik adalah G. Herbert Mead. Gagasannya mengenai interaksi simbolik berkembang dan mengalir dalam bukunya *Mind, Self, and Society* (1934), yang menjadirujukan teori Interaksi Simbolik. Menurutnya, inti dari teori interaksi simbolik adalah tentang “diri” (*self*), menganggap bahwa konsepsi-diri adalah suatu proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain (Ahmadi, 2008).

Mead menjelaskan, agar interaksi sosial bisa berjalan dengan tertib dan teratur dan agar anggota masyarakat bisa berfungsi secara “normal”, maka yang diperlukan bukan hanya kemampuan untuk bertindak sesuai dengan konteks sosialnya, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk menilai secara objektif perilaku kita sendiri dari sudut pandang orang lain (Norwoko dan Suyanto, 2013:20).

Bagi Mead, individu adalah makhluk yang bersifat sensitif, aktif, kreatif, dan inovatif. Keberadaan sosialnya sangat menentukan bentuk lingkungan sosialnya dan dirinya sendiri secara efektif (Soeprapto, 2002, Ahmadi, 2008). Lebih jauh, Mead menjelaskan bahwa konsep “diri” (*self*)

dapat bersifat sebagai objek maupun subjek sekaligus. Objek yang dimaksud berlaku pada dirinya sendiri sebagai karakter dasar dari makhluk lain, sehingga mampu mencapai kesadaran diri (*self conciousness*), dan dasar mengambil sikap untuk dirinya, juga untuk situasi sosial.

Argumentasi Mead dijabarkan dengan konsep “pengambilan peran orang lain” (*taking the roleof the other,*) sebagai penjelasan “diri sosial”(*social self*) dari William James, dan pengembangan teori “diri” dari Cooley. Menurutnya, “diri” akan menjadi objek terlebih dahulu sebelum ia berada pada posisi subjek. Dalam hal ini, “diri akan mengalami proses internalisasi atau interpretasi subjek, atas realitas struktur yang luas. Dia merupakan produk dialektis dari “*I*” impulsive dari “diri”, yaitu aku, sebagai subjek dan “*Me*” sisi sosial dari manusia yaitu “saya” sebagai objek, Perkembangan “diri” (*self*), sejalan dengan sosialisasi individu dalam masyarakat yakni merujuk kepada kapasitas dan pengalaman manusia sebagai objek bagi diri sendiri. Ringkasnya, argumen Mead, bahwa “diri” muncul dalam proses interaksi karena manusia baru menyadari dirinya sendiri dalam interaksi social (Ahmadi, 2008).

Menurut Mead, orang tak hanya menyadari orang lain tetapi juga mampu menyadari dirinya sendiri. Dengan demikian orang tidak hanya berinteraksi dengan orang lain, tetapi secara simbolis dia juga berinterkasi dengan dirinya sendiri. Interaksi simbolik dilakukan dengan menggunakan bahasa sebagai satu-satunya simbol yang terpenting dan melalui isyarat

simbol bukan merupakan fakta-fakta yang sudah jadi (Sulistiati, 2001). Mead, Simbol berada dalam proses kontinu. Proses penyampaian makna inilah yang merupakan materi subjektif dari sejumlah analisis kaum interaksionalis simbolis. Dalam interaksi orang belajar memahami simbol-simbol konvensional dan dalam suatu pertandingan mereka belajar menggunakannya, sehingga mampu memahami peranan aktor-aktor lainnya (Sulistiati, 2001).

Mead (1934) kadang-kadang menggunakan konsep "*matrix triadic*" untuk menggambarkan dinamika penting dalam semua interaksi. Pertama, setiap organisme akan bergerak di dalam lingkungannya, sehingga ia akan mengirimkan sinyal untuk organisme lain. Kedua, organisme lain melihat gerakan ini dengan menyadari gerak tubuh, dan kemudian merespon gerakan tersebut dengan mengubah gerakan di lingkungan, sehingga sinyal akan terkirim dengan sendirinya. Ketiga, organisme asli merasakan sinyal-sinyal yang terakhir dan merespon mereka dengan mengubah jalurnya perilaku. Ketika tiga peristiwa ini terjadi, maka proses telah selesai dan interaksi telah terjadi (Turner, 1988).

Mead berpendapat bahwa meskipun interaksi manusia mengandung tiga unsur dasar, secara kualitatif berbeda dengan interaksi non-manusia, Perbedaan kualitatif ini berawal dari apa yang Mead percaya (mungkin benar) untuk memastikan kemampuan unik dari manusia. Pertama, manusia menggunakan isyarat "konvensional" atau "signifikan", karena tanda-tanda

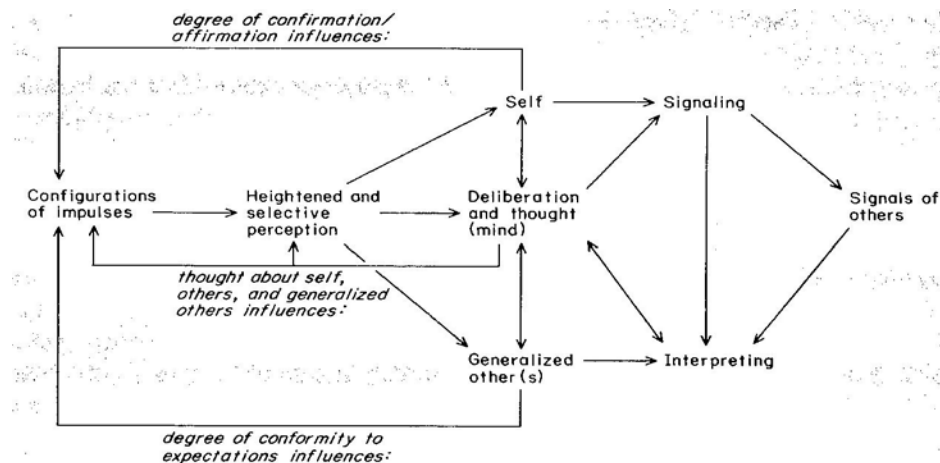
yang terkoordinasi di antara manusia "berarti" hal yang sama baik pada organisme pengirim dan penerima (yaitu, mereka mengajukan tanggapan serupa, baik terselubung atau terbuka(Turner, 1988).

Kedua, manusia memiliki kapasitas untuk "mengambil peran," atau untuk menafsirkan isyarat konvensional orang lain dan secara mental "mengambil" atau menganggap perspektif dan kemungkinan tindakan orang lain. Ketiga, manusia memiliki kapasitas untuk "diri", karena mereka dapat memandang dirinya sebagai objek dalam situasi dengan membaca gerak tubuh mereka sendiri dan juga gerakan orang lain; Dan mereka dapat menggunakan perasaan diri ini sebagai pedoman untuk mengatur tanggapan mereka kepada orang lain.

Keempat, manusia mengungkapkan kapasitas untuk "pikiran" dalam arti bahwa mereka dapat "secara imajinatif melatih" jalur perilaku alternatif, memperkirakan berbagai hasil, menghambat apa yang dilihat sebagai tanggapan yang tidak tepat, dan memilih garis perilaku yang tepat. Kelima, berdasarkan kemampuan mereka untuk "pengambilan peran" dan "pikiran," manusia dapat mengasumsikan perspektif "orang lain yang terionisasi" atau "komunitas sikap" dan menggunakan perspektif ini sebagai kerangka kerja untuk evaluasi diri dan memilih sebuah Garis perilaku yang tepat (Turner, 1988).

Analisis Mead (1938) mengenai "tindakan" tersebut menekankan empat fase: (1) "dorongan," atau keadaan disequilibrium dengan

lingkungan; (2) "persepsi" yang tinggi dan selektif di mana benda, termasuk diri sendiri, orang lain, dan generalisasi orang lain, dipandang berkaitan dengan relevansinya untuk memulihkan keseimbangan; (3) "manipulasi" lingkungan eksternal melalui perilaku terbuka dan atau lingkungan internal dan internal melalui kemampuan perilaku terselubung untuk "pikiran," atau kemampuan untuk "menggunakan secara imajinatif" alternatif; Dan (4) "penyempurnaan," atau penghapusan dorongan. Penyumbatan dorongan meningkatkan intensitasnya, mempertinggi persepsi, dan mendorong pertimbangan pemikiran serta upaya terang-terangan dalam manipulasi lingkungan. Jadi, interaksi adalah, menurut pandangan Mead, selalu dibatasi oleh konfigurasi dorongan, karena ini mempengaruhi persepsi dan pemikiran. Tentu saja, interaksi masa lalu dan masa kini dengan orang lain adalah sumber utama dorongan; Konfigurasi dorongan berubah saat dorongan lama diperbaiki atau frustrasi dengan apa yang baru dimulai (Turner, 1988).



Gambar 6.4 Model interaksi Mead

Daya tarik (1) persepsi "diri" sebagai obyek; (2) persepsi tentang "generalisasi lainnya" yang relevan; (3) manipulasi terselubung, atau pemikiran reflektif dan deliberatif yang melibatkan penilaian alternatif, self, dan generalisasi lainnya (s); (4) manipulasi terbuka, atau memberi sinyal melalui pancaran gerak tubuh; Dan (5) interpretasi orang lain, dan juga tindakan seseorang terhadap generalisasi konsepsi diri. dari seluruh proses baik secara langsung atau tidak langsung, berdampak pada konfigurasi dorongan individu saat mereka membatasi arus interaksi (Turner, 1988).

Mead, membedakan interaksi sosial menjadi dua, yaitu interaksi non-simbolis dan interaksi simbolis. Interaksi non-simbolis berarti bahwa manusia merespon secara langsung terhadap tindakan atau isyarat orang lain, sedangkan interaksi simbolis berarti bahwa manusia menginterpretasikan masing-masing tindakan dan isyarat orang lain tersebut berdasarkan arti yang dihasilkan dari interpretasi yang ia lakukan (Zajuli, 2014:122).

Mead, mendefinisikan berpikir (*thinking*) sebagai “percakapan implisit individu dengan dirinya sendiri dengan memakai isyarat. Mead bahkan menyatakan “berfikir adalah sama dengan berbicara dengan orang lain. Dengan kata lain, berfikir melibatkan tindakan berbicara dengan dirinya sendiri. Jelas disini Mead mendefinisikan berfikir menurut aliran

behavioris. Percakapan meliputi perilaku (berbicara) dan perilaku itu juga terjadi di dalam diri individu; ketika perilaku terjadi, berfikir pun terjadi (Ritzer dan Goodman, 2008).

Simbol signifikan juga memungkinkan Interaksi simbolik. Artinya, orang dapat saling berinteraksi tidak hanya isyarat tetapi juga melalui simbol signifikan. Kemampuan ini jelas mempengaruhi kehidupan dan memungkinkan terwujudnya pola interaksi dan bentuk organisasi sosial yang jauh lebih rumit ketimbang melalui isyarat. Simbol signifikan jelas penting perannya dalam pemikiran Mead (Ritzer dan Goodman, 2008).

Mead (1934) menjelaskan, pikiran sebagai proses percakapan seseorang dengan dirinya sendiri, tidak ditemukan di dalam diri individu; pikiran adalah fenomena sosial. Pikiran muncul dan berkembang dalam proses sosial dan merupakan bagian integral dari proses sosial. Proses sosial mendahului pikiran, proses sosial bukanlah produk dari pikiran. Jadi pikiran juga dijelaskan secara fungsional ketimbang secara substantif. Melakukan sesuatu berarti memberi respon terorganisir tertentu; dan bila seseorang mempunyai respon itu dalam dirinya, ia mempunyai apa yang kita sebut pikiran (Ritzer dan Goodman, 2008).

6.2.1 Faktor Historis

Konflik kelam yang terjadi di Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah pada satu dekade sebelumnya masih memiliki nilai

yang sangat membekas bagi masyarakat kedua suku yang terlibat, yaitu Suku Dayak dan Suku Madura atau masyarakat campuran yang juga ikut terkena dampaknya (menjadi korban, meskipun mereka memiliki darah Suku Dayak). Bagaimana kejadian kelam tersebut kemudian menyebar dari hanya dalam satu wilayah, melebar menjadi beberapa wilayah di keseluruhan Kalimantan Tengah, dan bisa menyebar di seluruh daerah di Kalimantan pada waktu itu jika tidak ada upaya untuk mencegahnya.

Gambaran korban konflik yang begitu parah dengan berbagai kerusakan dan ribuan nyawa yang melayang sedangkan ribuan lainnya mengungsi bahkan ada yang kembali ke tempat asalnya dengan hanya membawa tangan kosong, menimbulkan persoalan baru yang menjadi tanggung jawab bukan hanya pemerintah daerah, namun juga pemerintah pusat. Pertanyaan besar adalah bagaimana Negara menjamin setiap warga negaranya dalam kehidupan yang aman, nyaman dan sejahtera meskipun dalam setiap jengkal tanahnya terdapat perbedaan.

Hubungan antar entis yang menjadi pilar Negara Indonesia pada saat Sumpah Pemuda diikarkan dengan mengucapkan sumpah setia kepada NKRI dengan menjunjung tinggi setiap perbedaan sosial budaya dari masing-masing identitas, menjadi tercemar dikarenakan munculnya konflik SARA yang menyebar di beberapa wilayah di Indonesia pada masa transisi, dimana pemerintah pusat dalam keadaan genting dikarenakan adanya pertentangan dan perdebatan dikalangan elit politik dalam

lingkungan pemerintahan yang kemudian bergerak ke lingkungan dibawahnya menciptakan keadaan ketidak stabilan sebuah Negara.

Faktor elit politik yang menentang pemerintahan Soeharto dan kemudian memunculkan revolusi dalam gerakan mahasiswa yang bertujuan menggulingkan pemerintahan otoriter dan menjadi pemerintahan yang demokratis, menghasilkan pemerintahan masa transisi yang sangat rawan perpecahan dan kekacauan. Kekacauan Negara dimanfaatkan oleh elit kekuasaan tertentu (bahkan kekuatan internasional) dengan menggunakan kepentingan kelompoknya untuk mendapatkan hak-hak demokrasi berupa pemekaran wilayah atau ingin lepas dari NKRI, dengan membuat kegaduhan konflik horizontal.

Memanfaatkan faktor identitas dari masing-masing etnis, agama dan kelompok tertentu yang telah dilakukan oleh elit politik dengan tujuan untuk membuat kekacauan sebuah wilayah, menjadikan masyarakat menerima dampak konflik, sungguh sejarah yang sangat kelam buat bangsa Indonesia pada masa itu. Gambaran bagaimana korban berjatuhan dari masing-masing kelompok, anak-anak, wanita, orang tua, yang mungkin tidak ikut terlibat akan tetapi ikut menjadi korban keganasan konflik horizontal yang terjadi pada masa itu.

Sejarah yang kelam tersebut akankah terulang kembali pada masa sekarang, tentunya membutuhkan renungan yang mendalam pada masing-masing etnis, masyarakat beragama, dan kelompok masyarakat yang

didalamnya ada unsur kepentingan. Renungan adalah bentuk berkaca diri dengan maksud memperbaiki kekurangan dan menambah nilai-nilai interaksi untuk menjaga agar konflik paling tidak bisa di cegah untuk terulang kembali.

Sejarah konflik di Sampit Kotawaringin Timur sangat tidak lepas dari berbagai kejadian konflik yang sebelumnya terjadi di wilayah tersebut ataupun pengaruh dari kejadian di beberapa wilayah seperti di Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Beberapa kejadian misalnya yang hanya berawal dari kontestasi dalam ruang lingkup criminal, akan tetapi menyebar menjadi segregasi identitas etnis dan dampaknya bisa menyeluruh ke wilayah Kalimantan secara keseluruhan.

Pasca konflik antar etnis Madura dan Dayak di Sampit Kotawaringin Timur bisa menjadi preseden tentang sentimenisasi identitas yang tinggi jika pemicu faktor dari konflik sebelumnya tidak diperhatikan dengan serius, dan bukan tidak mungkin sejarah konflik horizontal akan terulang kembali. Bagi masyarakat, pemerintah baik daerah maupun pusat sudah seharusnya memahami konflik identitas secara keseluruhan, historisasi konflik sangat perlu dijadikan dasar ukuran agar proses pasca interaksi dapat berjalan seimbang, aman dan nyaman, dan tentunya konflik antar etnis bisa tidak terulang.

6.2.2 Faktor Sosial Budaya

Budaya, adat istiadat, dan berbagai bentuk identitas dari suatu etnis atau kelompok tertentu menjadi faktor pemantik konflik antar etnis yang terjadi di Kalimantan. Sejarah konflik mencatat bahwa perbedaan identitas bawaan (*in group feeling*) dari masing-masing etnis di Kalimantan yang masih dominan menjadi faktor konflik antar etnis di Kalimantan, khususnya Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, antara Suku Madura dengan masyarakat Suku Dayak.

Budaya ronggeng, karapan sapi yang dibarengi dengan perjudian, dan berbagai perilaku yang mereduksi nilai harmonisasi menjadi budaya yang bertentangan dengan budaya Suku Dayak karena bertentangan dengan adat istiadat kesukuan masyarakat lokal pada umumnya, ikut menjadi sumber konflik antar etnis di Sampit Kalimantan Tengah.

Budaya mengesampingkan nilai adaptasi akan nilai-nilai harmonisasi dari masyarakat pendatang khususnya masyarakat Suku Madura yang bertempat tinggal di Sampit Kotawaringin Timur, diantaranya nilai toleransi, nilai kedekatan, dan nilai kerjasama belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian besar masyarakat Suku Madura, bahkan justru hanya berafiliasi dengan kelompoknya sendiri dengan membentuk koloni yang mengundang dugaan semakin mencolok perbedaan diantara kedua etnis tersebut yang secara formalitas tinggal berdekatan namun tidak dalam nilai dan norma yang sama.

Sikap hanya berafiliasi dengan kelompoknya sendiri dan tidak mau membaur dengan masyarakat lainnya menimbulkan beberapa pandangan (persepsi) negatif tentang penguatan identitas *in group feeling* dari kelompok Suku Madura yang ada di Sampit Kotawaringin Timur. Dengan kata lain bahwa masyarakat Suku Madura ingin menunjukkan etnosentrismya sebagai masyarakat Madura yang diominan dengan identitasnya sendiri, tanpa memahami bahwa ada etnis lain yang lebih berhak atas tanah yang ditempatinya, yaitu masyarakat Suku Dayak.

Budaya dan sikap dari masyarakat Suku Madura dengan etnosentrismya membuat proses re-evakuasi menjadi sulit, dikarenakan tidak sedikit dari masyarakat Suku Dayak yang menolak kehadiran mereka kembali untuk bertempat tinggal di wilayah sekitar mereka. Maksud penolakan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Suku Dayak adalah agar sejarah konflik yang terjadi sebelumnya tidak terulang kembali.

Proses re-evakuasi pasca konflik Sampit Kotawaringin Timur berjalan alot dikarenakan kebanyakan masyarakat Suku Dayak masih belum menerima akan sejarah kebudayaan yang dominan (etnosentris) yang menjadi sebab konflik dengan Suku Madura. Kehawatiran masyarakat Suku Dayak terhadap budaya etnosentris dari Suku Madura bahwa konflik akan terulang muncul setelah meskipun dalam surat perjanjian rekonsiliasi bahwa setiap pendatang harus memahami kebudayaan masyarakat lokal dan wajib menghormatinya dengan berdasar pada prinsip *dimana bumi*

dipijak disitu langit di junjung belum menjadi bahasan yang utama dalam setiap ruang dan waktu.

Persepsi negatif kembali muncul seperti yang diungkapkan oleh Ketua Dewan Tokoh Adat Dayak, bahwa setelah pasca konflik di Sampit Kotawaringin Timur yang terjadi beberapa dekade yang lalu masih banyak warga masyarakat Suku Madura yang belum memahami dan belum mengimplementasikan prinsip nilai-nilai harmonisasi, menghormati budaya masyarakat Suku Dayak sebagaimana persetujuan yang telah disepakati bersama dengan sama-sama melaksanakan prinsip *dimana bumi dipijak disitu langit di junjung*.

Pandangan Tokoh Dewan Adat Suku Dayak tentang konflik bisa terulang bisa saja terjadi, jika masyarakat Suku Madura mengesampingkan prinsip tersebut. Kejadian beberapa waktu yang lalu seperti di Baamang dan di Banjarmasin merfleksikan bahwa masih saja ada yang berujung pada jatuhnya korban dari masyarakat Suku Dayak, meskipun hal tersebut adalah murni tindak pidana criminal, akan tetapi bahwa segregasi sentimen etnis akan tetap muncul dikarenakan korban berasal dari Suku Dayak.

6.2.3 Faktor Ekonomi Politik

Sejarah juga mencatat bahwa faktor ekonomi politik, yang menciptakan kesenjangan dan kecemburuan sosial dimana masyarakat pendatang mendominasi tata kelola perekonomian baik pasar, merembet ke

perkebunan dan pertanian memiliki peran yang signifikan meletusnya konflik antar etnis di Sampit Kalimantan Tengah.

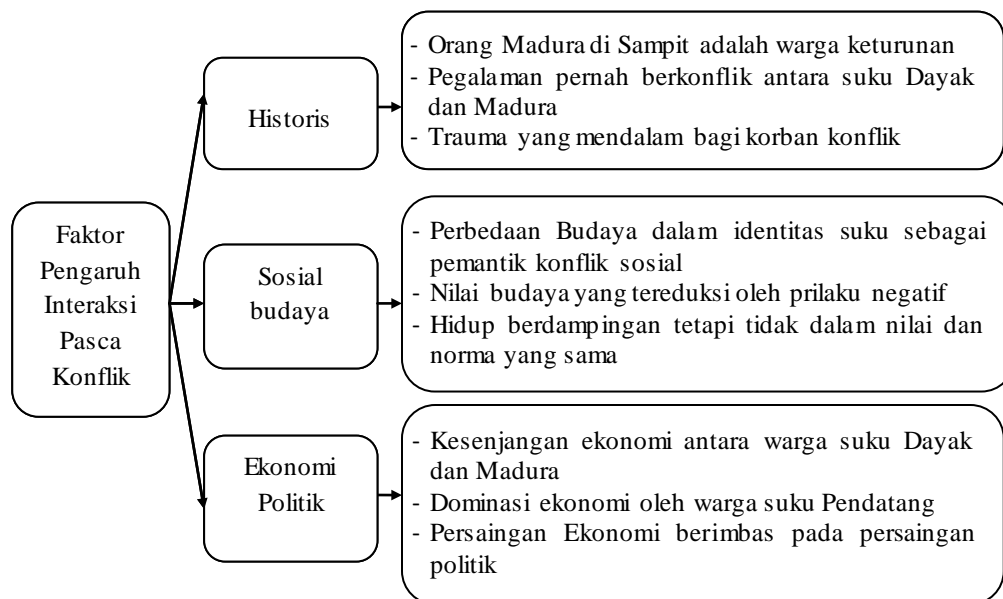
Persaingan ekonomi berkembang menjadi persaingan politik antar elit politik lokal dengan elit politik pendatang (Suku Madura) yang menempati jabatan politis tertentu di pemerintahan kota. Bagi masyarakat Suku Madura yang memiliki tingkat perekonomian mapan sangat mungkin berkesempatan untuk memiliki jabatan politis di pemerintahan, dikarenakan faktor banyak modal politik yang dimilikinya.

Dominasi ekonomi, dan politik menciptakan asumsi akan bergesernya arus etnis mayoritas di Kalimantan. Bagi etnis Suku Dayak hal tersebut adalah sangat rawan (*suspectible*) bagi perkembangan suku asli daerah, dan dianggap akan menghilangkan seluruh budaya asli jika dominasi berlanjut.

Asumsi dan persepsi tentang dominasi etnis pendatang (Suku Madura) akan menghilangkan nilai-nilai budaya asli mencuat dengan seiring dengan menguatnya identitas wilayah dengan demokratisasi kedaerahan yang diwujudkan kedalam bentuk otonomi daerah program desentralisasi. Faktor penguatan identitas dari masing-masing wilayah menjadi barometer untuk menciptakan berbagai macam kebijakan yang disesuaikan dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing.

Sejarah ekonomi politik yang menjadi faktor konflik etnis di Sampit Kotawaringin Timur harus dipandang dengan teliti, dikarenakan permainan

politik tidak hanya pada tingkat lokal akan tetapi dipastikan merembet ke tingkat nasional, dan akan sangat menjadi preseden buruk bagi perkembangan interaksi yang sudah berjalan dengan baik. Politik Negara dalam kerangka NKRI menjadi kewajiban yang harus terus digalakkan kepada semua elemen masyarakat.



Gambar 6.5 Faktor Pengaruh Interaksi Sosial Pasca Konflik

6.3 Potensi Munculnya Konflik Baru Antar Suku Dayak dan Madura di Sampit

Tingkat kerawanan konflik antar etnis yaitu masyarakat Suku Dayak dan Suku Madura di Sampit Kotawaringin Timur sangat mungkin akan kembali terulang seperti masa yang telah lalu, dikarenakan sumber-sumber konflik masih ada. Beberapa hal yang sangat bisa menjadi alasan bahwa potensi konflik kemungkinan besar masih ada adalah; (1) Kebiasaan

masyarakat Suku Madura yang sebagian besar masih belum bisa merubah perilaku-perilaku yang dapat merenggangkan proses interaksi, terutama di tempat-tempat yang dihuni oleh masyarakat Suku Madura seperti di Samuda, Ketapang, Pelalangan, dan desa Bajarum; (2) Perilaku pendatang baru dari masyarakat Suku Madura yang sama sekali tidak bisa menghormati adat dan kebiasaan masyarakat Suku Dayak, artinya tabiatnya masih dominan sebagai masyarakat Madura asli; (3) Hal tersebut memunculkan persepsi negatif kepada warga suku Madura, sehingga sebagian masyarakat Suku Dayak beranggapan bahwa masyarakat Suku Madura masih sangat sulit untuk menjaga sikap patuh dan taat pada aturan yang berlaku di Sampit.

Sikap yang selama ini selalu dijaga oleh masyarakat Suku Dayak dengan slogan “konflik jangan sampai terulang dan itu Harga Mati” seolah tidak membekas dan “*pucuk dicinta namun apalah daya*”. Dengan kata lain bahwa dihati sebagian masyarakat Suku Madura belum bisa menjadi bagian dari pola interaksi dengan masyarakat Suku Dayak dikarenakan, masih dominan mengedepankan *in group feeling*-nya sebagai seorang masyarakat Madura dengan identitasnya.

6.3.1 Persepsi Masyarakat Suku Dayak terhadap Suku Madura Pasca Konflik

Pasca konflik antara suku Dayak dan suku Madura pada tahun 2001, dan setelah kembalinya warga suku Madura antara tahun 2003, 2014 dan sampai dengan 2017 sekarang ini, permasalahan konflik ternyata belum juga selesai, walaupun perjanjian damai serta Peraturan Daerah (Perda) tentang penanganan korban konflik Sampit sudah sejak lama di sosialisasikan tetapi hampir belum mampu untuk mengembalikan suasana di Sampit benar-benar kondusif dan menghilangkan treotif yang ada di masyarakat.

Mengenai komunikasi dan interkasi antara suku dayak dan suku madura sampai saat ini memang dirasakan belum normal, hal tersebut tentu saja berbeda ketika antara 2 tahun pertama sampai dengan 3 tahun pasca konflik serta sekembalinya warga suku madura dari pengungsian yang melahirkan Peraturan Daerah (PERDA) Kotawaringin Timut Nomor 5 Tahun 2004 mengenai penanganan korban konflik.

Menurut Bapak Untung, Dewan Adat Dayak akan terus menerus melakukan sosialisasi agar mengingatkan kembali dan memberikan pendidikan kepada keluarga besar madura yang ada di Kabupaten kotawaringin Timur tentang sejarah kelim konflik antar suku jangan sampai terulang kembali, mengingat bahwa sejarah kelim konflik harus benar menjadi pelajaran berharga sehingga kedepan tidak ada lagi konflik

yang dapat menghancurkan kerukunan antara suku di Sampit Kotawaringin Timur.

Menurut Cumbi Anwar (Wakil Ketua Dewan Adat Dayak), perdamaian adalah merupakan harga mati tidak boleh terulang, konflik pada tahun 2001 adalah untuk yang pertama dan yang terakhir adalah suatu kewajiban semua usur untuk terus menerus menjaga dan menjunjung tinggi kesepakatan damai, tetapi tokoh dayak menilai bahwa dari warga suku madura seringkali yang pertama kali melakukan pelanggaran, tidak mematuhi perda, kesepakatan damai serta perjanjian damai, oleh sebab maka seringkali menjadi pemicu dan membuat keresahan di masyarakat.

Ditambahkan oleh Cumbi, sampai saat ini 15 tahun pasca konflik, sebagian orang Madura masih saya belum mampu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan masa lalu mereka yang dianggap berperilaku kurang sopan dan beradab, sebagai masih menggunakan egonya dan belum bisa membawa diri untuk berinteraksi dengan warga suku dayak dan suku lainnya, sehingga untuk berinteraksi seringkali belum dapat diterima oleh suku Dayak dan juga suku lain yang ada di Sampit Kotawaringin Timur. Tokoh suku Dayak juga sangat berkeyakinan bahwa antara suku Dayak, suku Jawa, Batak, dan Etnis Tionghoa tidak menginginkan konflik kembali terjadi, tetapi melihat sikap, tingkah laku, tutur kata, dan perangai sebagai dari warga suku madura yang kurang baik sehingga potensi dan ancaman konflik dirasakan masih saja ada.



Gambar 6.6 Dokumentasi peneliti bersama para tokoh dan Pengurus Harian Dewan Adar Dayak Kotawaringin Timur

Kebiasaan dengan filosofis membunuh sebagian dari warga suku Madura jika ada terjadi masalah perkelahian dengan suku-suku lainnya di Sampit harus dihilangkan dan harus dirubah, seringkali dikarenakan hal yang sangat kecil saja dengan mudahnya menghilangkan nyawa, akibat hal yang demikian interaksi tidak baik dan kurang harmonis.

Tingginya kecurigaan para tokoh Dayak bahwa yang menjadi biang masalah pasca konflik justru dari pihak suku Madura mengingat seringkali yang terlibat masalah pengedaran obat-obat terlarang dan tindak kejahatan lainnya bersumber dari warga Suku Madura hal tersebut juga menjadi salah satu pemicu konflik.

Para tokoh Dayak di Kotawaringin Timut melalui Dewan Adat Dayak sampai saat ini belum bisa menerima dan menyetujui serta memberikan ijin adanya usulan dari warga suku madura yang menginginkan di dirikannya organisasi Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) di Sampit, karena para tokoh Dayak mengkhawatirkan jusru akan kembali menyulut luka lama. Tetapi para tokoh Dayak melalui Dewan Adat dayak akan memberikan ijin pada warga suku Madura yang belakangan mendesak adanya organisasi yang diakui sebagai tempat mengadu dengan alasan jika adanya organisasi IKAMA orang madura menjadi merasa terwakili dan ada yang di hormati jika ada struktur organisasi yang jelas.

Para tokoh Dayak terus berkoordinasi atas adanya permohonan tersebut justru bukan organiasi IKAMA yang disetujui tetapi hanya dewan kehormatan suku Madura saja yang dibentuk sehingga fokus pada pembinaan etika pada warga suku Madura yang ada di Kotawaringin Timur.

Permasalahan baru yang muncul justru adanya warga Madura pendatang yang berada di Sampit tidak mentaati aturan yang berlaku di Sampit dan tidak melaporkan diri mereka sehingga karena banyak warga suku madura yang datang adalah bukan mereka yang dulu merupakan korban konflik tetapi memang warga suku madura yang baru merantau ke Sampit Kotawringin Timur sehingga menurut warga suku dayak dianggap

tidak kurang memahami budaya dan tidak memiliki beradab bagaimana sebagai warga pendatang seharusnya.

Para tokoh dewan adat dayak menginginkan adanya kendali terhadap siapa saja warga pendatang, dengan memberlakukan kartu kendali sehingga bagi siapa saja perantau akan didata kalau memang bermaksud mencari pekerjaan akan diberikan waktu 3 sampai dengan 6 bulan, tetapi jika dalam batas waktu tersebut belum mendapat pekerjaan maka dengan terpaksa akan dikembalikan ketempat dari mana mereka berasal sebagai usaha menghindari konflik.

Bentuk interaksi antara suku dayak dan suku Madura pasca konflik tidak harmonis dan belum benar-benar tulus dan masih adanya kecurigaan-kecurigaan pada masing-masing suku sehingga para tokoh dewan adat daya mengkhawatirkan masih adanya rasa sakit hati dan dendam, curiga dan prasangka yang tinggi kepada orang dayak atas konflik sampit tersebut.

Orang suku dayak sudah tidak lagi mempermasalahkan konflik masa lalu dan sudah tidak lagi pemikiran untuk berkonflik, tetapi justru orang suku madura yang masih tertutup dan berusaha menjaga dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang dayak.

Pasca konflik banyaknya laporan tentang warga suku madura yang tinggal masih berkelompok serta eksklusif kepada Dewan adat dayak sehingga dewan adat menilai bahwa hal tersebut merupakan tindakan pembiaran dari pihak yang berwenang terhadap warga suku madura yang

tinggal berkelompok dan eksklusif tersebut tentu juga salah satu pemicu konflik karena dewan adat menilai bahwa itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan daerah sehingga dikhawatirkan ada yang melakukan tindakan.

Pada peraturan daerah telah dengan jelas menjelaskan bahwa warga madura yang kembali ke Sampit dari pengungsian tidak boleh lagi tinggal berkelompok tetapi harus menyebar dan beradaptasi ke seluruh kabupaten kotawaringin timur.

Pihak yang berkewajiban menjalankan peraturan daerah masih belum mampu melaksanakannya dengan benar, sehingga masih lemah dalam pelaksanaan perda sehingga sampai saat ini pentunjuk teknis dan siapa yang harus melaksanakan perda juga belum jelas sehingga menurut dewan adat Dayak menyatakan siap membantu pemerintah daerah untuk menjalankan perda tersebut.

Penyebab kurang harmonisnya hubungan masyarakat suku dayak dan masyarakat suku madura di sebagian daerah adalah karena banyaknya laporan pada dewan adat dayak tentang kesan negatif oknum dari suku madura yang sebagian merupakan pengedar obat-obat terlarang sehingga *image* sangat mempengaruhi hubungan di masyarakat disebabkan pada ketidakpercayaan dan prasangka yang memunculkan potensi konflik baru.

Dewan adat dayak jika mendapat laporan masyarakat bahwa keberadaan warga suku madura membuat resah dan masyarakat tidak

tenang maka akan ada tindakan lanjuti laporan tersebut menghindari konflik berkepanjangan.

Hubungan masyarakat suku dayak dengan suku banjar, suku jawa, suku batak dan china di Sampit hampir tidak pernah terjadi konflik penyebabnya menurut dewan adat dayak adalah karena faktor persamaan dan kesepahaman budaya, tidak adanya kecurigaan sehingga hubungan interaksi serta komunikasi serta kekeluargaan yang berjalan di masyarakat sangat erat dan penuh rasa kekeluargaan.

Upaya masyarakat suku dayak melalui dewan adat dayak selalu berusaha untuk menjaga keharmonisan sangat jelas dengan sosialisasi dilingkungan masyarakat salah satu ungkapan “petak danum hayun itah” atau tanah air milik kita, juga merupakan upaya menjaga keharmonisan karena suku dayak berusaha dan mencoba menjadi tuan rumah yang baik bagi warga pendatang.

Suku dayak pada dasarnya bukan suku yang pendendam mereka terikat pada hukum adat Dayak, jika terjadi konflik dan telah dilakukan proses kesepakatan damai maka suku dayak akan sepenuh hati mengikutinya. Berbeda dari warga suku madura karena tingkat pendidikan mereka sebagian masih ada yang tergolong rendah maka seringkali kekerasan menjadi jalan terakhir. Jika muncul masalah yang melibatkan antara warga suku Dayak dan suku madura yang memiliki inisiatif untuk penyelesaian masalah justru adalah orang dayak, sebagai besar warga

madura tidak berani untuk melakukan tindakan pencegahan untuk meredam meluasnya konflik ada kemungkinan disebabkan oleh rasa trauma yang mendalam.

Tidak dapat di pungkiri bahwa potensi konflik masih ada jika melihat fakta bahwa masih banyaknya laporan pada Dewan Adat Dayak Kotawaringin Timur tentang masih adanya warga suku madura yang bersengketa lahan dengan orang Dayak, dan disisi lain warga suku madura seringkali melanggar perjanjian damai, contohnya ketika waktu memelihara ternak dalam hal ini sapi di wilayah pemukiman warga suku Dayak sehingga ini seringkali mendapat penolakan dan protes dari warga karena merasa terganggu dengan pencemaran udara akibat dari memelihara ternah tersebut.

6.3.2 Tragedi Baamang

Kejadian pada tahun yang sama yakni 2016, terjadi di kecamatan Baamang juga membuat warga seluruh wilayah Kotawaringin Timur sudah sebagai melakukan pergerakan masa, karena yang terbunuh adalah warga asli suku Dayak dan juga orang tua dari korban adalah merupakan tokoh dari suku Dayak sehingga pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan sosial di Sampit.

Penyelesaian masalahnya memang tidak dilakukan sidang adat tetapi penyelesaiannya dilakukan dengan prosedur adat dayak, disepakati pelaku

akan memberikan santunan kepada keluarga korban dan seluruh warga suku madura di Kotawaringin timur harus bersama-sama mengumpulkan santunan sebagai efek jera agar kejadian serupa tidak terulang dan pada 29 September 2016 santunan telah diserahkan pada pihak keluarga korban dan tertutuplah keran yang menjadi pemicu terjadinya konflik antar suku Dayak dan suku Madura.

Kejadian bermula dari tindakan kriminal pencurian sarang burung walet di Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 yang di lakukan oleh seorang warga Madura di salah satu rumah masyarakat Suku Dayak. Kejadian pada waktu malam hari tersebut menimbulkan jatuhnya korban luka bacok pada 2 masyarakat Suku Dayak akibat sabetan Mandau yang dilakukan oleh seorang criminal warga dari Suku Madura.

Bermula dari kejadian tersebut, beberapa persepsi muncul kembali tentang sensitifitas kelompok dari masyarakat Suku Dayak terhadap kelompok Suku Madura yang menimbulkan informasi tersebut sangat cepat menyebar ke pedalaman sehingga beberapa kelompok sudah melakukan pergerakan dan berencana untuk membalas, namun dapat diredam oleh para Tokoh Adat setempat.

Tindakan Dewan Adat Dayak berusaha meredam agar kejadian tersebut tidak meruncing dan meluas sehingga akhirnya muncul kesepakatan damai dan disepakati juga bahwa kejadian tersebut murni

tindak kriminal, dan pelaku diserahkan ke pihak berwajib untuk di proses hukum, selain proses hukum pada tingkat kecamatan diselesaikan dengan cara pesta adat berupa pesta perdamaian antara para tokoh Dayak dan tokoh Madura.

Pada tingkat pemerintah daerah Kotawaringin Timur ada naskah perdamaian yang masing-masing di tanda tangani oleh 5 orang dari tokoh suku dayak di yang oleh ketua Dewan Adat Dayak Kotawaringin Timur dan 5 orang tokoh dari suku madura yang disaksikan oleh Bupati beserta wakil bupati, Dandim dan Kapolres kotawaringin Timur.

Beberapa poin isi dalam kesepakatan damai tersebut terangkum dalam lampiran yang menyatakan sebagai berikut: (1) Bahwa kejadian tersebut adalah murni tindakan kriminal, yang sedang diproses oleh penegak hukum; (2) Kesepakatan bahwa bilamana terjadi persoalan antara kedua kelompok dari masyarakat Suku Dayak dengan Suku Madura agar mengedepankan musyawarah untuk mufakat, untuk menghindari kemungkinan konflik yang telah lalu terulang kembali; (3) Melanjutkan sosialisasi Permendagri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik.

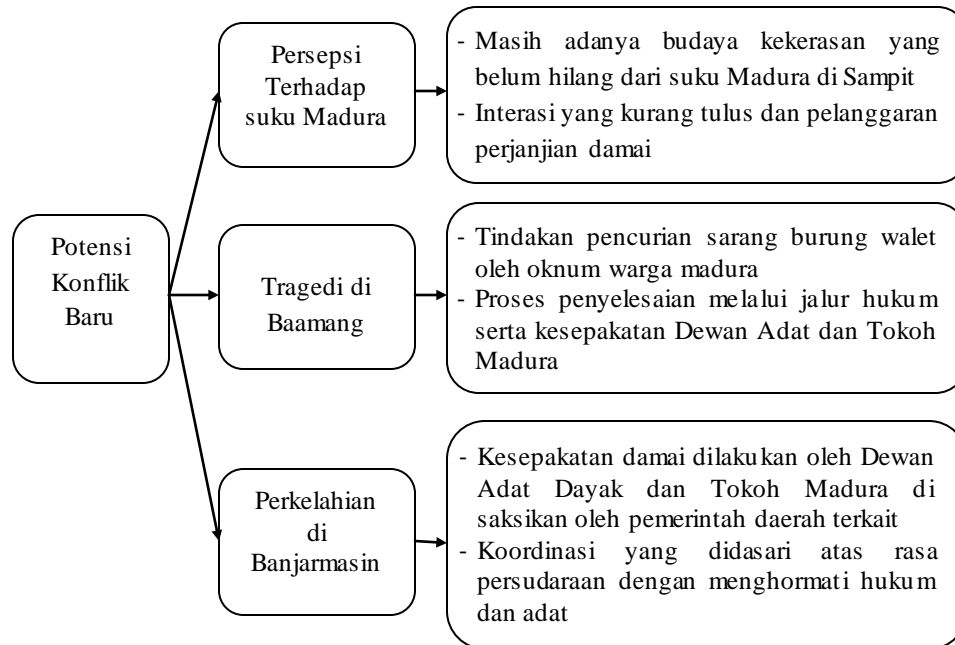
6.3.3 Tragedi Perkelahian di Banjarmasin

Tragedi di Banjarmasin Kalimantan Selatan menimbulkan benih-benih konflik seolah disulut kembali oleh percikan api yang setiap saat bisa menyala dan membara, hingga kemudian berita tersebut berkembang ke Kalimantan Tengah yang merupakan pusat konflik terdahulu. Sejak mendengar peristiwa tersebut masyarakat Suku Dayak kembali bangkit, bergerak dan bersatu untuk membela identitas mereka. Ibarat membangunkan singa yang sedang tidur, masyarakat Suku Dayak sudah bersiap-siap membalas atas terbunuhnya warga dari kaumnya.

Bermula dari sebuah pertengkaran individu antara seorang warga Suku Dayak dengan warga Suku Madura di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada tanggal 20 Februari 2016, dan mengakibatkan meninggalnya seorang warga Suku Dayak yaitu Egy Persia Rianda bin Sukma Jaya. Peristiwa berdarah tersebut menjadi bara dalam sekam yang masih mengepul asap sewaktu-waktu terbakar dan menimbulkan api yang besar.

Namun, lagi-lagi persoalan tersebut tidak melebar dikarenakan kecepatan dan kesigapan dari pihak pemerintah dan masyarakat dalam upaya menyelesaikannya, meskipun dalam tanda kutip masyarakat Suku Dayak menjadi korban namun perasaan solidaritas sama-sama sebagai bagian dari bangsa Indonesia dengan dasar ke-Bhinneka Tunggal Ika yang berdasar pada asas hukum sebagai kekuatan hukum positif menjadi dasar kesadaran untuk kembali meredam konflik parah terulang kembali.

Kesepakatan damai yang dilakukan oleh kedua tokoh adat, dan disaksikan oleh petinggi baik dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, menghasilkan beberapa poin kesepakatan, sebagai berikut; (1) Bahwa peristiwa tersebut adalah tindak pidana murni yang saat ini sedang dalam proses hukum dan masing-masing pihak sudah menyepakati perdamaian dengan memenuhi hukum adat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; (2) Selanjutnya semua pihak wajib memberikan penjelasan dan pemahaman kepada semua warganya untuk menahan diri dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan adat; (3) Semua pihak harus melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif dan intensif yang difasilitasi oleh pemerintah sehingga tercipta dan terpelihara situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 6.7 Potensi munculnya konflik baru

Temuan dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Sampit sebenarnya sudah sangat aman bagi warga Madura, kehidupan sosial sudah berjalan dengan normal akan tetapi dalam rentan waktu 3 tahun belakangan selalu saja ada permasalahan yang memicu dan memunculkan potensi konflik, seperti perkelahian sekelompok warga suku Madura dan Dayak di Kecamatan Baamang pada tahun 2016, dan bahkan perkelahian di Banjarmasin tahun 2017 yang pada dasarnya merupakan Provinsi tetangga juga menimbulkan kekhawairan yang dilatarbelakangi pembunuhan salah satu anak tokoh Dayak.

Temuan penelitian juga mengungkap adanya desakan menghidupkan kembali Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) yang permohonannya di

sampaikan kepada Dewan Adat Dayak (DAD), tetapi permohonan ini tidak mendapat rekomendasi dari Dewan Adat karena ditakutkan akan memunculkan kegaduhan kembali pada lingkungan masyarakat. akan tetapi Dewan Adat akan mempertimbangkan untuk memberikan rekomendasi dibentuknya Dewan Kehormatan Suku Madura.

BAB VII
POLA EDUKASI OLEH PEMERINTAN DAN MASYARAKAT DALAM
MENJAGA KEHARMONISAN PASCA KONFLIK DI SAMPIT
KALIMANTAN TENGAH

7.1 Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Menjaga Keharmonisan Pasca Konflik Antar Suku Dayak dan Madura di Sampit

Setelah kejadian konflik pada tahun 2001 antara masyarakat Suku Dayak dengan Suku Madura, pemerintah dan pihak-pihak terkait dengan dibantu oleh aparat keamanan baik kepolisian dan TNI, serta tokoh-tokoh adat dari kedua belah pihak yang bertikai, terus berupaya mencari dan melakukan mediasi untuk pencegahan agar konflik tidak kembali terjadi.

Upaya yang dilakukan dimulai sejak pasca konflik dalam bentuk rekonsiliasi dua bulan setelah kejadian. Rekonsiliasi dalam bentuk kesepakatan damai dan kemudian re-evakuasi masyarakat Suku Madura yang berada di pengungsian untuk kembali ke daerah Sampit Kalimantan Tengah.

Semenjak konflik terjadi dan menimbulkan bekas luka yang sangat dalam bagi masyarakat Suku Dayak, upaya rekonsiliasi sempat mengalami deadlock dikarenakan mayoritas masyarakat suku Dayak belum mau berdamai dengan warga Suku Madura. Sebagian besar masyarakat Suku Dayak juga menolak re-evakuasi masyarakat suku Madura kembali ketempat ditengah-tengahnya.

Proses mediasi terus dilakukan untuk menemukan kata damai, dengan terbentuknya Kongres Rakyat Kalimantan Tengah pada tanggal 4-7 Juni 2001, yang sebelumnya dilakukan musyawarah yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 20-22 Maret 2001, dengan mediator adalah pemerintah pusat, dengan tema “Penyelesaian Konflik Antaretnik Di Kalimantan Tengah dalam Bingkai Musyawarah Damai Anak Bangsa Di Bumi Kalimantan: Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan”.

Beberapa poin kesimpulan dalam pertemuan tersebut, yaitu; (1) Menerima sepenuhnya Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan hasil musyawarah yang diselenggarakan di Jakarta 20-22 Maret 2001 dan menyetujui pemerintah pusat sebagai mediator; (2) Menolak cara-cara kekesaran dalam penyelesaian konflik etnik di Kalimantan Tengah; (3) Kesiediaan damai dan menerima permintaan maaf; (4) Bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kalimantan Tengah untuk segera menyusun Draft Perda tentang kependudukan yang disosialisasikan dari mulai tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; (5) Proses hukum dan HAM harus tetap dilanjutkan secara adil agar terungkap kebenarannya; (6) Mengambil hikmah dari konflik yang telah berlangsung; (7) Bersama-sama dengan masyarakat etnik lain untuk tetap menjunjung tinggi NKRI dan Budaya Betang (*dimana bumi di pijak, di situ langit di junjung*); (8) Forum Komunikasi Lintas Etnik hendaknya bersifat terbuka.

Hadir dalam musyawarah tersebut adalah 8 tokoh masyarakat Suku Dayak baik dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah serta Kalimantan Sekatan. Sedangkan dari pihak tokoh dari Jawa Timur diwakili oleh dua orang, yang terdiri dari tokoh agama.

Saksi-saksi yang ikut mendampingi dalam pertemuan tersebut adalah diantaranya Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kalsel, Gubernur Kalteng, Gubernur Kaltim serta Gubernur Jawa Timur.

7.1.1 Keputusan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KKRKT)

Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KKRKT) dilaksanakan pada tanggal 4-7 Juni 2001 merupakan tindak lanjut pada pertemuan di Jakarta dengan tema Musyawarah Damai Anak Bangsa Di Bumi Kalimantan: Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan pada tanggal 20-22 Maret 2001.

Sebelum dilaksakana Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KKRKT) telah dilakukan konsolidasi dengan masyarakat Suku Dayak di beberapa Provinsi dan Kabupaten di Kalimantan, diantaranya adalah di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Palangkaraya, Kapuas, Barito Selatan, dan Barito Utara serta di wilayah-wilayah Pembantu Bupati.Calon Kabupaten.

Dasar dari pembentukan kongres ini merujuk pada (1) Bahwa hak semua warga Negara Indonesia untuk berdiam dimanapun juga di wilayah

NKRI dan kewajiban sama-sama menjaga rasa aman tenteram dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma dan hukum yang berlaku serta yang telah di sepakati bersama tentang adat istiadat setempat (budaya betang/rumah panjang); (2) Bahwa masyarakat Suku Dayak pada dasarnya adalah masyarakat terbuka dan cinta damai, menolak cara-cara kekerasan sesuai dengan nilai luhur Rapat Damai Tumbang Anoi 107 Tahun y.l. (1894); (3) Bahwa konflik memiliki nilai hikmah dalam mengembalikan kesadaran berbangsa dan bernegara, dan sebagai masyarakat yang taat hukum untuk terus semangat dalam mempererat persatuan dan kesatuan antar etnik sebagai simbol NKRI.

Kesepakatan dari Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KKRKT) meliputi; (1) Menerima sepenuhnya Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan (TDAB-BK) di Jakarta pada 20-22 Juni 2001 serta mengukuhkan dan menerima sepenuhnya kebijakan peranan/fungsi pemerintah pusat sebagai penengah dalam penyelesaian konflik antar etnik di Kalimantan; (2) Penegak hukum perlu mengungkap tentang kebenaran persoalan latar belakang konflik dan hendaknya terbuka untuk publik agar jelas dan gamblang dalam menyingkapinya demi menghindari persepsi negatif, serta keadilan hukum yang seadil-adilnya bagi masyarakat Suku Dayak; (3) Mendorong proses konsolidasi dan rekonsiliasi serta re-evakuasi warga Suku Madura dengan dua pilihan yaitu masyarakat Suku Madura dipindahkan ke daerah lain atau bersedia di re-evakuasi dengan

syarat-syarat dan melalui seleksi; (4) Demi menghentikan konflik masyarakat Kalimantan Tengah siap menerima ajakan damai dan permintaan maaf dari masyarakat Suku Madura sebagaimana Kesepakatan Musyawarah Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 18-20 Mei 2001; (5) Tujuh akar masalah yang telah diidentifikasi dalam TDAB-BK harus diprogramkan penanggulangnya secara terpadu dan bertahap oleh pemerintah; (6) Hendaknya dalam proses pembangunan pemerintah melibatkan seluruh etnik yang hidup di Kalimantan Tengah dan memberi prioritas kepada masyarakat Suku Dayak.

Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam kesepakatan tersebut bahwa pada dasarnya masyarakat Suku Dayak adalah masyarakat yang cinta damai, dan selalu menjunjung tinggi kebhinnekaan yang merupakan simbol dari NKRI serta sangat mengormati filosofis *rumah betang* yang memiliki pengertian bahwa masyarakat Suku Dayak sangat taat adat istiadat, dan selalu menjunjung tinggi *dimana bumi dipijak disitulah langit dijunjung*.

Peran pemerintah pusat sebagai mediator menjadi titik penentu bagi upaya terselesaikan konflik antar etnik di Sampit Kotawaringin Timur dengan melakukan musawarah besar Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan di Jakarta adalah langkah tepat pemerintah sebagai *policy maker*, yang kemudian menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk menentukan langkah berikutnya.

7.1.2 Musyawarah Besar Pengungsi Korban Kerusuhan Kalimantan

Tengah Se Jawa Timur

Dua bulan setelah Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KKRKT) di Kalimantan Tengah, dilaksanakan Musyawarah Besar Pengungsi Korban Kerusuhan Kalimantan Tengah Se Jawa Timur pada tanggal 22 Agustus 2001 bertempat di Gedung Kawedanan Ketapang Kabupaten Sampang Jawa Timur. Pertemuan tersebut dihadiri oleh petinggi dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Sumenep, aparat keamanan serta tokoh-tokoh agama se Jawa Timur.

Musyawarah ini adalah merupakan tindak lanjut dan sekaligus jawaban atas hasil dari Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KKRKT) di Kalimantan Tengah beberapa bulan yang lalu. Musyawarah ini berlangsung atas peran pemerintah daerah provinsi Jawa Timur dalam upaya menjembatani proses perdamaian dan rekonsiliasi konflik antar etnik di Sampit Kalimantan Tengah.

Hasil dari musyawarah tersebut adalah sebagai berikut; (1) Siap berdamai dan melakukan perjanjian; (2) Meminta dan member maaf; (3) Siap beradaptasi dengan budaya Dayak; (4) Siap berbaur dengan masyarakat Kalteng; (5) Mendukung dibangunnya tugu perdamaian; (6) Siap melakukan kompromi dengan masyarakat Kalteng; (7) Siap merevitalisasi budaya etnis Madura; (8) Siap merubah watak warga Madura; (9) Mengembangkan budaya Madura yang relevan; (10)

Mengganti organisasi IKAMA dengan Dewan Kehormatan Warga Madura (DKWM) dengan paradigm baru yang menjunjung tinggi akhlakul karimah, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945; (11) Siap menjunjung tinggi falsafah budaya; (12) Mengutamakan kemanusiaan dan mengedepankan musyawarah; (13) Menghimbau semua pihak agar tidak mudah terprovokasi isu yang menyesatkan; (14) Menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan; (15) menerima konflik sebagai ujian dari ALLAH SWT dan mengambil hikmah; (16) Pemerintah agar proaktif dalam menangani konflik; (17) menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan; (18) Menerapkan filosofis *huma betang* (dimana bumi berpijak disitulah langit dijunjung).

7.1.3 Kebijakan Pemerintah BAKORNAS PBP

Setelah kedua kelompok masing-masing baik dari kelompok masyarakat Suku Dayak dan kelompok masyarakat Suku Madura berinisiatif untuk mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan dibuktikan dengan upaya yang dilakukan dengan depelopori atas dasar kesadaran masyarakat dan berasas pada kesatuan dan keutuhan NKRI, dimana masing-masing menyetujui pemerintah pusat sebagai mediator maka dua bulan setelahnya pemerintah pusat membuat kebijakan nasional melalui Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP) melakukan sidang terbatas

yang dipimpin oleh Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2001 dan sekaligus ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi para Menteri dan Eselon I Interdep pada tanggal 28 September 2001.

Menetapkan kebijaksanaan nasional percepatan penanganan pengungsi terutama di daerah sumber konflik antara lain melalui penerapan langkah yang berurutan; (1) Langkah pemulangan; kembali kehidupan normal seperti semula. Dengan Menteri Sosial sebagai *leading sector* bersama Pemda; (2) Pemberdayaan; dilaksanakan bila pola I tidak mungkin dilakukan, yaitu dengan mendorong pengungsi menemukan kehidupan baru ditengah masyarakat, dengan Menteri Nakertrans (sector tenaga kerja) sebagai *leading sector* bersama Menteri Koperasi & UKM dan Pemda); (3) Pengalihan; dilaksanakan bila Pola I dan Pola II tidak mungkin dilakukan, yaitu dengan upaya pemukiman kembali dilokasi yang baru, dengan Menteri Kimpraswil ebagai *leading sector* bersama Menteri Nakertrans dan Pemda.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mempercepat rekonsiliasi dan re-evakuasi masyarakat dampak konflik Sampit melalui BAKORNAS PBP menjadi acuan bagi pemerintah provinsi untuk membuat PERDA baru tentang Penanganan Penduduk Dampak konflik, Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2001. Perda tersebut mengatur tentang rekonsiliasi dan re-evakuasi masyarakat dampak konflik yang dipengungsian, rehabilitasi, dan menekankan pada peran dan

kewenangan Damang Kepala Adat dalam persoalan damai untuk menyelesaikan persoalan antar suku, serta tata cara re-evakuasi penduduk dari pengungsian berikut dengan keamanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta sanksi-sanksi.

7.1.4 Tekad Mufakat Masyarakat Kalimantan

Setelah beberapa musyawarah dengan berbagai persetujuan dan kesepakatan dari kedua kelompok, belumlah cukup menjadi syarat percepatan rekonsiliasi dan re-evakuasi masyarakat dampak konflik. Keraguan dan kekhawatiran masih dialami oleh masyarakat dampak konflik yang mengungsi di luar wilayah Kalimantan Tengah, sehingga mereka belum berani untuk kembali pulang ke tempat tinggal masing-masing.

Upaya memantapkan hati masyarakat dampak konflik agar proses rekonsiliasi dan re-evakuasi berjalan dengan sukses, kemudian Menteri Dalam Negeri membuat Keputusan Nomor 200.5-1 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Pra Musyawarah Tekad Mufakat Rakyat Kalimantan tertanggal 2 Januari 2002. Isi dalam surat keputusan tersebut yaitu membentuk Tim Penyelenggara Pra Musyawarah Tekad Mufakat, yang memiliki tugas sebagai berikut: (1) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri menyangkut langkah-langkah yang perlu ditempuh dan aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan musyawarah; (2) Memberikan arah bagi penyelenggaraan

jalannya musyawarah; (3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Pra Musyawarah; (4) Merumuskan skenario dan langkah-langkah; (5) Melakukan komunikasi intensif dengan semua pihak; (6) Menyusun rencana anggaran belanja dan melaporkannya.

Pada tanggal tanggal 1-3 Februari 2002, dari Tim Tim Penyelenggara Pra Musyawarah Tekad Mufakat menyelenggarakan satu pertemuan di Batu Malang Jawa Timur, dalam rangka untuk memantapkan hasil dari musyawarah-musyawarah sebelumnya untuk lebih memberikan informasi kenyamanan kepada masyarakat dampak konflik dengan tujuan mempercepat rekonsiliasi dan re-evakuasi masyarakat dampak konflik. Pertemuan tersebut dihadiri oleh masing-masing delegasi baik dari Kalimantan maupun dari Jawa Timur khususnya dari tokoh-tokoh Suku Madura.

Delegasi dari Kalimantan Tengah seperti dijelaskan melalui Surat Tugas Nomor 300/078/KEB/Kesbang, dengan menugaskan 26 perwakilan dan 29 pendamping, yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, dan didampingi oleh pejabat pemerintahan dan unsur lain. Dalam pertemuan tersebut delegasi dari Kalimantan Tengah tetap mengacu pada kesepakatan yang telah dilakukan pada Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) pada tanggal 4-7 Juni 2001.

Kutipan kesepakatan pada Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) yang menjadi kesepakatan tetap pada Musyawarah Tekad Mufakat yang diselenggarakan di Batu Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima sepenuhnya Tekad Damai Anak Bangsa Di Kalimantan Tengah Hasil Musyawarah Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan di Jakarta 20-22 Maret 2001 sebagai wujud nyata mediasi Pemerintah Pusat dalam konflik antar etnis di Kalimantan Tengah
- 2) Pada prinsipnya dapat menerima pemulangan kembali (re-evakuasi) warga Kalimantan keturunan Madura ke Kalimantan Tengah apabila situasi dan kondisi di masing-masing Kabupaten dan Kota asalnya di Kalimantan Tengah sudah memungkinkan demi kepentingan kedua belah pihak.
- 3) Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota dan DPRD beserta unsur-unsur perwakilan masyarakat dalam waktu singkat menyusun rancangan (draft) Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Kependudukan dan mensosialisasikan kepada semua komponen masyarakat dan pemerintah mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional dalam berbagai forum/pertemuan yang representative sebelum di sahkan, agar proses penghentian konflik, rekonsiliasi, re-evakuasi dan rehabilitasi dapat berjalan secara tertib.
- 4) Berkaitan dengan masalah adanya sebagian warga masyarakat Kalimantan Tengah keturunan Madura yang sudah berupaya pulang kembali secara sukarela ke Kalimantan Tengah sebelum adanya PERDA Kependudukan seperti yang dimaksud diatas, akan ditanggulangi sementara oleh aparat pemerintahan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kesediaan atau ketidaksediaan masyarakat lokal setempat serta pertimbangan Kedamaian atau Majelis Adat setempat, tidak lain demi keamanan dan keselamatan kedua belah pihak.
- 5) Demi supremasi penegakan hukum, Kamtibmas dan penemuan akar masalah Konflik Antar etnik di Kalimantan Tengah proses Hukum dan HAM harus tetap dilanjutkan secara adil agar semua pihak termasuk publik luar negeri dapat mengetahui kebenaran yang sesungguhnya sehingga memudahkan penyelesaian berbagai masalah yang berkaitan dengan konflik tersebut.
- 6) Waktu yang dipergunakan untuk proses penyusunan PERDA Kependudukan dan sosialisasinya, proses rekonsiliasi

musyawarah damai serta proses hukum/HAM, sekaligus bermanfaat untuk proses pendinginan yang sangat diperlukan sebagai persiapan mental psikologis bagi kedua belah pihak.

Delegasi Kalimantan Tengah juga menyarankan bahwa penyelesaian konflik etnis di Kalimantan Tengah harus dilakukan secara komprehensif, karena kasus tersebut melibatkan banyak etnis, tidak semata-mata konflik antara Suku Madura dengan Suku Dayak saja. Maka dari itu, kebijakan pemerintah secara umum harus bisa menjawab 7 persoalan konflik yang telah diidentifikasi pada Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan (TDAB-BK) di Jakarta pada 20-22 Juni 2001, yaitu; kebijakan pemerintah yang kurang tepat dimasa lalu; proses pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang kurang berhasil dimasa lalu; benturan budaya; ketidakadilan; kemiskinan; keamanan yang tidak kondusif; dan ketidakpastian hukum.

Rekomendasi pada Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) pada tanggal 4-7 Juni 2001 tentang pembuatan PERDA telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan dikeluarkannya Perda Nomor 9 Tanggal 6 November 2001. Dalam Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) pada tanggal 4-7 Juni 2001 juga meminta pemerintah kabupaten juga menegeluarkan Perda sebagai wujud dari komitmen pemerintah daerah untuk segera mempercepat proses rekonsiliasi, re-evakuasi dan rehabilitasi warga masyarakat dampak konflik yang masih berada di pengungsian.

Harapan dari Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) pada tanggal 4-7 Juni 2001 adalah Perda yang dimaksud demi kejelasan bertindak dan kepastian hukum dikarenakan berdasar pada landasan operasional, wadah/organisasi, sehingga tercipta komitmen masyarakat.

Adapun cara untuk mencapai target tersebut adalah:

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Tengah dengan mengacu pada Perda Nomor 9 Tanggal 6 November 2001 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Draft Perda Kabupaten Kota tersebut diatas agar terlebih dahulu disosialisasikan kepada semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam berbagai forum/pertemuan yang representative sebelum di sahkan.
- c. Untuk mendukung Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganan pengungsi, sosialisasi hasil-hasil musyawarah.kongres termasuk penyusunan dan sosialisasi draft Perda butir (b) Meningkatkan dialog antar forum masyarakat Kalimantan Tengah keturunan Madura dengan masyarakat Kalimantan Tengah di Kalimantan Tengah, dipandang perlu membentuk Badan/Lembaga Penanganan Pengungsi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, tokoh-tokoh masyarakat, tim ahli baik dari tingkat nasional maupun tingkat lokal.
- d. Jadwal tentatif rehabilitasi (fisik dan mental psikologis) dan re-evakuasi hendaknya mengacu dan menunggu hasil kerja dan pengkajian mendala oleh Badan/Lembaga Penanganan Pengungsi Kabupaten/Kota.

Maka kemudian atas rekomendasi pada Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) pada tanggal 4-7 Juni 2001 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik. Perda tersebut mengatur ketentuan umum di bab kesatu, penanganan penduduk dampak konflik

etnik berikut rekonsiliasi beserta penanganan dan penataan pada bab kedua, penyelenggaraan penanganan penduduk mencakup pendataan dan pendaftaran penduduk, penanganan penduduk dan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengawasan dan pengendalian pada bab ketiga, dan penertiban aset etnik dampak konflik pada bab ke empat berikutnya sanksi bab kelima dan penutup bab keenam.

7.1.5 Peran yang Berkelanjutan

Persoalan konflik etnik di Kalimantan Tengah memiliki keunikan tersendiri pada proses rekonsiliasi dibandingkan dengan konflik yang terjadi baik di Poso maupun Maluku Utara yang dominan pada identitas agama. Proses rekonsiliasi, re-evakuasi berlangsung sangat lama dan dampaknya akan membekas sampai keturunan di kemudian hari.

Konflik dengan dasar identitas memang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kondisi mental dan psikologi dari masing-masing kedua belah pihak yang berkonflik baik antara masyarakat Suku Dayak dan Suku Madura, maka perlu upaya tindakan yang berkelanjutan yang harus dilakukan dengan tujuan agar konflik tidak terjadi lagi.

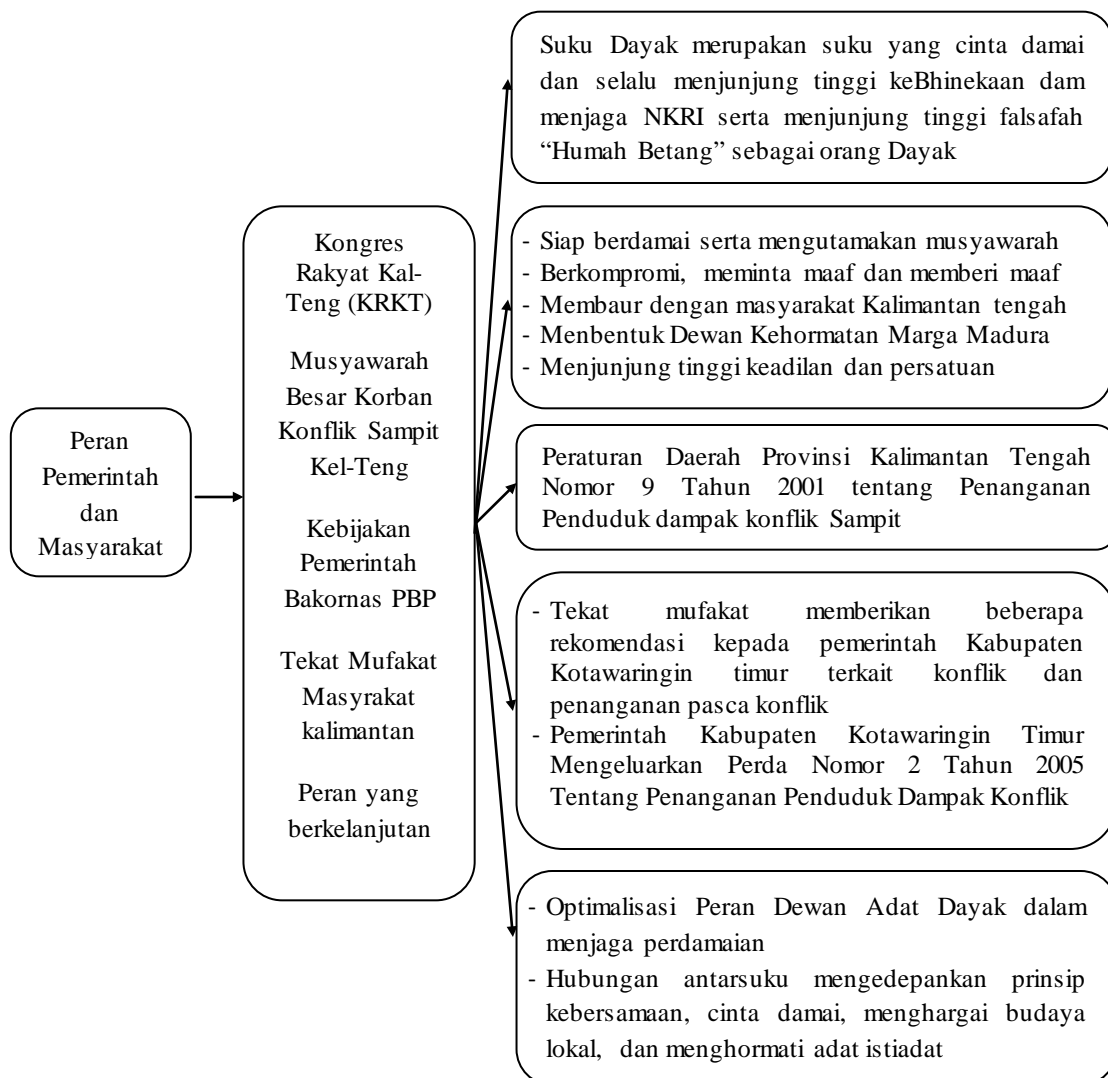
Tindakan pencegahan harus dipahami oleh masing-masing pihak, bahwa sejarah kelim konflik hanya cukup sekali saja, dan tidak boleh terulang kembali. Dengan filosofi *humang betang* yang memiliki

pengertian dimana bumi berpijak disitulah langit dijunjung hendaknya menjadi senjata yang ampuh untuk mencegah konflik kembali terjadi.

Bukan tugas mudah, namun demi kebersamaan dan kesatuan NKRI yang berasis Pancasila dengan ke-Bhinneka Tunggal Ika, maka semua elemen baik dari pemerintah maupun dari tokoh masyarakat harus selalu mengingatkan, khususnya bagi warga pendatang baru yang datang dari berbagai etnik.

Sosialisasi yang berkelanjutan menjadi tugas dan kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memberikan pemahaman filosofis tersebut, bahwa siapapun yang masuk dalam wilayah tertentu harus memiliki prinsip menjaga kebersamaan, cinta damai, menghargai budaya lokal, dan menghormati adat istiadat masing-masing budaya.

Demi menjaga kedamaian di Kalimantan Tengah maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang menekankan tentang adat budaya Suku Dayak.



Gambar 7.1 Peran Pemerintah dan Masyarakat Menjaga Keharmonisan Pasca Konflik

Temuan dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah, Dewan Adat Dayak beserta tokoh Masyarakat telah berperan semaksimal mungkin dalam menjaga keharmonisan pasca konflik antarsuku baik dalam Kongres Rakyat Kalimantan Tengah, Musyawarah Besar

Pengungsi Korban Kerusuhan Kalimantan Tengah, Kebijakan Pemerintah Bakornas PBP, maupun tekad Mufakat Masyarakat Kalimantan.

7.2 Pola Edukasi Masyarakat Pasca Konflik antarsuku di Sampit

Pemerintah Provinsi Jawa timur yang berkerja sama dengan pemerintah Daerah Kalimantan Tengah selama ini telah banyak melakukan pembekalan serta pendidikan bagi korban konflik Sampit, hingga sampai pada akhirnya diperoleh kesepakatan untuk memulangkan secara bertahap warga Madura yang telah bertahun-tahun tinggal di Pengungsian. Sebelum mereka dipulangkan warga suku Madura terlebih dahulu diberikan pembekalan yang dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat suku Madura yang akan pulang dari pengungsian menuju Sampit nantinya mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan warga suku Dayak di Sampit.

Pembekalan dilakukan dengan berbagai macam cara berupa penanaman nilai-nilai agama berbasis multikultural untuk menanamkan nilai rasa kesadaran terhadap multibudaya sehingga memunculan prinsip kebersamaan dalam masyarakat pasca konflik antara suku Dayak dan suku Madura. Menurut Abdul Wahid selaku tokoh suku Madura sekaligus ketua Forum Komunikasi Korban Kurusuhan Kalimantan Tengah (FK-4), selama ini FK-4 telah banyak melakukan kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang bertujuan menghilangkan budaya kekerasan yang selama ini menjadi

image warga suku Madura. Pelatihan budaya dan perdamaian (*Peace Skill*) serta sosialisasi tentang kehidupan budaya Adat masyarakat Dayak Kalimantan Tengah (*Huma Betang*) dan nilai-nilai luhur budaya Madura (*Falsafah Kampung Meiji dan teneyan Lanjeng*), yang bertujuan untuk membuktikan komitmen masyarakat di Kalimantan Tengah keturunan Madura dalam menjunjung tinggi semangat perdamaian dan siap hidup berdampingan secara damai dengan warga masyarakat Dayak.

Pembinaan yang berkelanjutan terhadap korban konflik antar suku terutama pada warga suku Madura selama ini masih terus menerus dilakukan, FK-4 yang memiliki peran yang sangat besar dalam mengedukasi masyarakat warga suku Madura korban Konflik melalui serangkaian kegiatan yang berorientasi pada *Community based approach*, pendekatan pada komunitas akar rumput, pemberdayaan masyarakat pasca konflik, melalui program pendidikan multikultural berbasis lintas budaya, penyuluhan budaya, kampanye perdamaian dan menanamkan nilai-nilai perdamaian, persamaan hak asasi manusia (HAM) serta menanamkan nilai-nilai dimana bumi dipijak disana langit dijunjung melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat.

Pembinaan yang dilakukan selama bertahun-tahun telah banyak membawa perubahan yang sangat berarti bagi keberlangsungan hubungan sosial antara warga suku Madura dan Warga Suku Dayak misalnya proses interaksi yang semakin membaik serta proses pemahaman budaya melalui

jalur perkawinan, yang sebelum konflik sangat jarang terjadi tetapi melalui pendidikan dan usaha yang sangat serius baik masyarakat, tokoh suku, tokoh adat serta pemerintah daerah untuk memberikan edukasi bahwa manusia pada dasarnya memiliki derajat yang sama tidak membedakan asal sukunya telah banyak orang lokal atau warga Dayak yang menikah dengan warga suku Madura.

Walaupun pembinaan dan proses edukasi masyarakat suku Madura disadari masih memiliki banyak kendala karena sebagai besar warga suku Madura korban konflik berpendidikan rendah dan bahkan ada yang buta huruf akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan upaya elaman masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembinaan agar kedepan tidak ada lagi permasalahan yang tidak terselesaikan yang akhirnya menyebabkan terjadinya konflik yang sama di masa yang akan datang.

Proses panjang dalam mengedukasi masyarakat sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti sudah mulai tampak perubahan sosial pada kehidupan warga suku Madura juga sudah terlihat, kebiasaan dalam kehidupan mereka yang dulu pada saat sebelum konflik banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia mudah ada yang baru tamat sekolah Dasar (SD) kemudian dinikahkan paradigma tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan warga suku Madura pasca konflik di Sampit juga telah semakin tinggi, kesadaran ini muncul akibat dari pemahaman yang mulai berkembang bahwa budaya kekerasan yang selama ini ditonjolkan oleh

warga suku Madura adalah salah dan salah satunya karena faktor rendahnya pendidikan serta sumber daya manusia yang tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam berakulturasi dengan warga suku Dayak.

Menurut Penuturan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, pengedukasian masyarakat yang pernah berkonflik selama ini lakukan berbagai macam kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan Sumber Daya Manusia di Sampit sudah berjalan dengan baik melalui pembinaan, kampanye perdamaian serta sosialisasi pentingnya kesadaran pentingnya pendidikan dalam upaya mencegah terjadinya konflik.



Gambar 7.2 Wawancara dengan Wakil Bupati Kotawaringin Timur di Sampit

Dengan berbagai macam kebijakan yang selama ini telah dilakukan kesadaran warga suku Madura akan pendidikan telah semakin baik sehingga sikap arogan dan menonjolkan budaya kekerasan dari warga suku

Madura perlahan sudah hilang walaupun ada mungkin hanya sebagian kecil saja. Pendidikan warga suku Madura pasca konflik 18 tahun sudah mengalami perubahan dan kemajuan dengan banyak dari warga suku Madura yang telah dapat membaca dan banyak dari mereka yang telah berbidik Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan sampai sudah adanya yang berpendidikan sarjana.

Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal yang berkaitan dengan proses revitalisasi kehidupan masyarakat pasca konflik, selalu berkerjasama baik dengan masyarakat dan tokoh suku dan Dewan Adat Dayak (DAD) yang di arahkan pada pemerataan Pendidikan dan pembangunan SDM khususnya mereka yang menjadi korban konflik yang telah kembali ke Sampit.

Penuturan tokoh Madura membenarkan bahwa dulu sikap tidak mau diatur dan mudah untuk dibodohi oleh kepentingan-kepentingan sekelompok orang serta budaya kekerasan yang melekat dalam diri kehidupan sosial warga suku Madura adalah karena mayoritas karena faktor pendidikan yang dulu masih sangat rendah

Tokoh Madura mengakui mengenai rendahnya tingkat pendidikan warga suku Madura sampai saat ini masih menjadi kendala, walaupun sebagian sudah memahami bahwa pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam mengurangi potensi konflik antar suku.

Perubahan sosial kehidupan warga suku Madura juga terlihat dari kebiasaan dalam kehidupan mereka jika dulu sebekum konflik banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia mudah ada yang baru tamat sekolah Dasar (SD) kemudian dinikahkan paradigma tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan warga suku Madura pasca konflik di Sampit juga telah semakin tinggi, kesadaran ini muncul akibat kesadaran bahwa budaya kekerasan yang selama ini ditonjolkan oleh warga suku Madura karena faktor pendidikan dan Sumber Daya manusia yang tidak memiliki pendidikan yang memadai.

Kehidupan warga suku Madura telah banyak mengalami perubahan budaya termasuk misalnya perubahan nilai, perubahan kebiasaan, sikap dan perilaku, pola pikir, perubahan pada penggunaan bahasa, mata pencaharian serta perubahan pendidikan warga suku Madura. Perubahan pada nilai yang tergambar pada tingkat kepekaan sosial serta rasa solidaritas yang semakin tinggi, dari segi perubahan adat dan kebiasaan yang sudah melebur bersama orang Dayak serta budaya ronggeng dan sandur sudah tidak ada, kemudian pada falsafah suku Madura "*lebih baik berputih tulang (Mati) dari berputih mata*" yang menggambarkan perilaku yang cepat tersinggung sudah hilang pada kehidupan warga suku Madura seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan mereka.

Sebelum konflik hampir seluruh orang Madura menguasai sendi-sendi perekonomian misalnya dalam hal perdagangan baik di kota Sampit

maupun sampai pada pelosok desa di kabupaten Kotawaringin Timur, tetapi pasca konflik keadaan telah mengalami banyak perubahan orang Madura yang sudah berani keluar dari kehidupan lama mereka yang selalu tergantung pada pertanian dan perdagangan. Begitu juga pada kehidupan warga suku Dayak juga sudah berani terbuka dalam persaingan pada bidang ekonomi, kemudian pada bidang pertanian pasca konflik juga terjadi perubahan, warga Dayak yang dulu hanya mengenal pertanian sistem ladang berpindah juga belajar dengan warga Madura misalnya pada desa Parebok, Samuda dan lain.

Interaksi sosial memiliki peranan penting dalam menjaga keharmonisan dan pemulihan pasca konflik antar suku Dayak dan suku Madura di Sampit, menjadi penting kerana dalam prosesnya akan ada namanya proses sosial asosiatif yang bersumber dari proses akomodasi, akulturasi, asimilasi serta enkulturasi sedangkan pada proses yang disosiatif akan selalu ada persaingan atau kompetisi dan kontroversi antara warga Dayak dengan warga suku Madura yang kembali ke Sampit.

Konflik yang terjadi di Sampit merupakan akumulasi eksklusifitas masyarakat suku Madura dalam kehidupan sosial sehingga pasca konflik harus dilakukan proses integrasi, mediasi dan resolusi dalam menghadapi persoalan yang akan dapat memicu konflik antara Dayak dan Madura. Sementara warga suku Madura yang merupakan warga pendatang harus

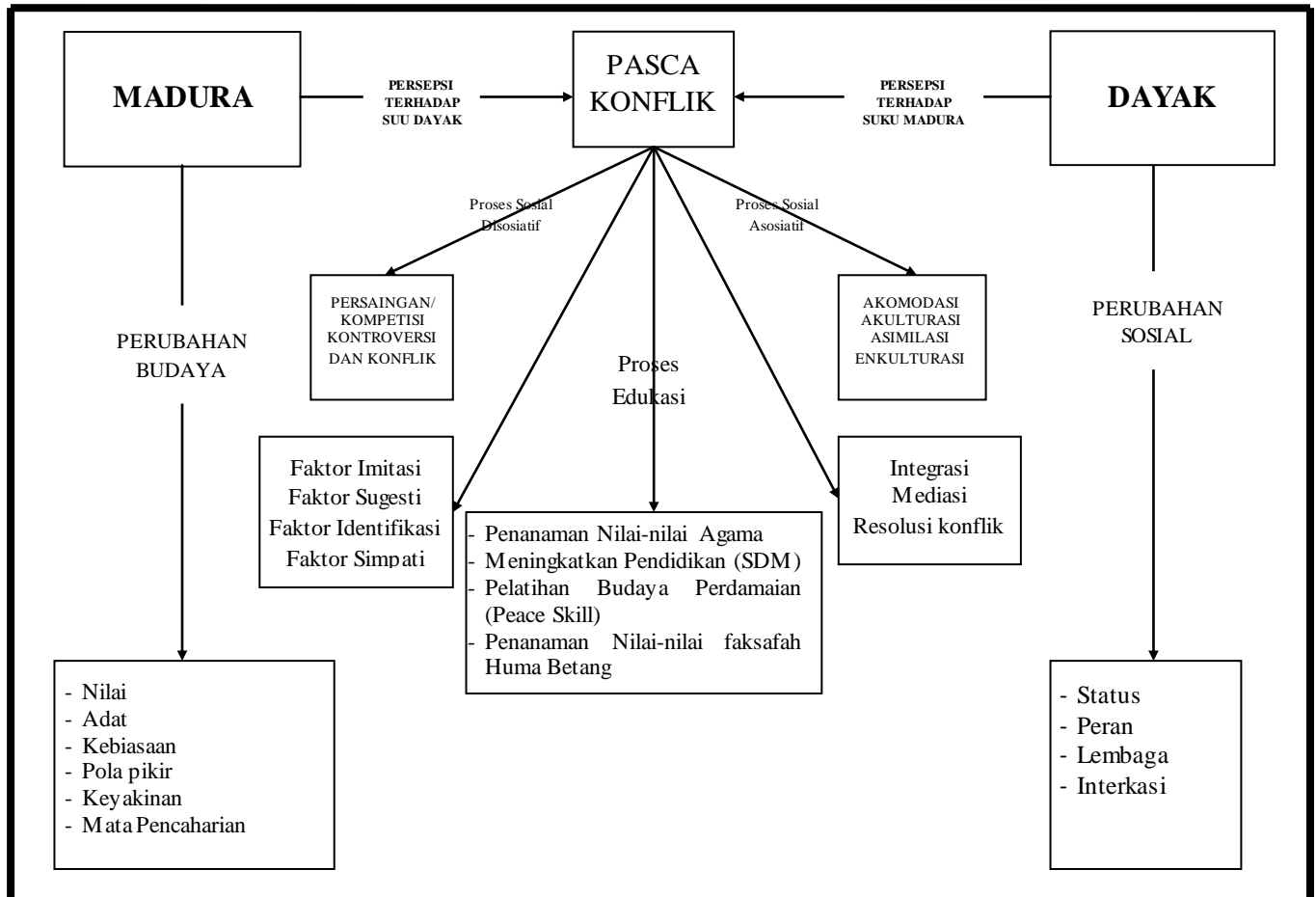
mampu melakukan proses imitasi, sugesti, identifikasi serta simpati agar dapat diterima pada lingkungan sosialnya di Sampit.

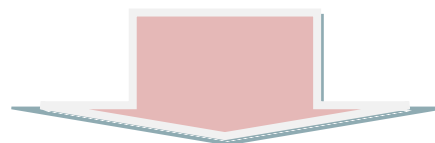
Keberhasilan proses integrasi sosial, mediasi mereka yang berkonflik, serta resolusi konflik baik proses pendidikan multikultural telah membawa dampak yang baik dalam memperbaiki hubungan pasca konflik antara suku Dayak dan suku Madura yang tentu tidak terlepas dari peran pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap perbaikan konflik identitas.

Pasca konflik proses perubahan sosial budaya yang terjadi pada hubungan sosial antara warga suku Dayak dan suku Madura di Sampit merupakan proses yang dilakukan dengan kesadaran untuk bersama membangun hubungan yang harmonis serta toleran yang mengedapankan aspek perubahan sikap, tingkah laku, kebiasaan serta pola pikir yang didasari atas kemaun untuk hidup berdampingan, dan melalui proses kesadaran akan tanpa melihat status sosial, peran dimasyarakat, lembaga-lembaga sosial dengan sadar untuk tidak mengedapankan perbaikan hubungan atau interaksi sosial yang lebih baik.

Dari semua proses yang telah dilalui bersama akan muncul sikap penghargaan yang tinggi terhadap kultur serta corak budaya yang di bawa masing-masing suku sehingga sebagai warga pendatang warga Madura akan menjunjung tinggi nilai-nilai “dimana bumi dipijak disana langit dijunjung”.

Untuk lebih jelasnya mengenai pola edukasi masyarakat pasca konflik antarsuku di Sampit dapat dilihat pada Gambar 7.1 sebagai berikut:




 Pendidikan Nilai-nilai “dimana bumi dipijak disana langit dijunjung”

Gambar 7.3 Pola Edukasi Masyarakat Pasca Konflik

BAB VIII
PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA PASCA KONFLIK ANTARA
SUKU DAYAK DAN SUKU MADURA DI SAMPIT
KOTAWARINGIN TIMUR

8.1 Perubahan Sosial Pasca Konflik Antara Suku Dayak dan Suku Madura di Sampit

Menurut Sztompka (2014), perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Untuk itu konsep dasar mengenai perubahan sosial menyangkut tiga hal yaitu: *pertama*, studi mengenai perbedaan; *kedua*, studi harus dilakukan pada waktu yang berbeda; dan *ketiga*, Pengamatan pada sistem sosial yang sama (Martono, 2016).

Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada sudut pengamatannya: apakah dari sudut aspek, fragmen atau dimensi sistem sosialnya. Ini disebabkan keadaan sistem sosial itu tidak sederhana, tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi muncul sebagai kombinasi atau gabungan hasil keadaan berbagai komponen (Sztompka 2014).

Ditambahkan oleh Sztompka (2014), gabungan berbagai komponen; *pertama*, unsur-unsur pokok (misalnya: jumlah dan jenis individu, serta tindakan mereka); *kedua*, hubungan antar unsur (misalnya: ikatan sosial, loyalitas, ketergantungan, hubungan antarindividu, integrasi); *ketiga*, berfungsi unsur-unsur di dalam sistem

(misalnya: peran pekerjaan yang dimainkan oleh individu atau diperlukannya tindakan tertentu untuk melestarikan ketertiban sosial); *ketiga*, pemeliharaan batas (misalnya: kriteria untuk menentukan siapa saja yang termasuk anggota sistem, syarat penerimaan individu dalam kelompok, prinsip rekrutmen dalam organisasi, dan sebagainya); *keempat*, subsistem (misalnya: jumlah dan jenis seksi, segmen, atau divisi khusus yang dapat dibedakan); *kelima*, lingkungan (misalnya: keadaan alam atau lokasi geopolitik)

Menurut Sztompka (2014), adakalanya perubahan hanya terjadi sebagian, terbatas ruang lingkupnya, tanpa menimbulkan akibat besar terhadap unsur lain dari sistem. Sistem sebagai keseluruhan tetap utuh, tak terjadi perubahan menyeluruh atas unsur-unsurnya meski di dalamnya terjadi perubahan sedikit demi sedikit.

Bagi Sztompka (2014), konsep perubahan sosial meliputi ‘atom’ terkecil dinamika sosial, perubahan keadaan sistem sosial atau perubahan setiap aspeknya. Tetapi perubahan tunggal jarang terjadi dalam keadaan terisolasi. Konsep proses sosial yaitu *pertama*, berbagai perubahan; *kedua*, mengacu pada sistem sosial yang sama (terjadi di dalam atau mengubahnya sebagai satu kesatuan); *ketiga*, saling berhubungan sebab-akibat dan tidak hanya merupakan faktor yang mengiringi atau mendahului faktor yang lain; *keempat*, perubahan itu saling mengikuti satu sama lain dalam rentetan waktu (berurutan menurut rentetan waktu)

Sztompka (2014), untuk memahami masalah perubahan sosial yang sangat kompleks diperlukan tipologi proses sosial. Tipologinya dapat didasarkan atas empat kriteria utama berikut : (1) bentuk proses sosial yang terjadi; (2) hasilnya; (3) kesadaran tentang proses sosial di kalangan anggota masyarakat bersangkutan; (4) kekuatan yang mengerjakan proses itu. Selain itu perlu diperhatikan; (5) tingkat realitas sosial di tempat proses sosial itu terjadi; dan (6) jangka waktu berlangsungnya proses sosial itu.

Hasil temuan peneliti berkaitan dengan Perubahan sosial pasca konflik antara suku Dayak dan Suku Madura di Sampit Kotawaringin Timur sebagai berikut;

8.1.1 Perubahan Status Sosial

Melihat kehidupan masyarakat di Sampit saat ini kita tidak akan pernah menyangka bahwa 16 Tahun lalu pernah terjadi konflik antara suku yang mengusik rasa empati kita terhadap pengusiran paksa warga keturunan Madura, walaupun pada faktanya lebih banyak dari warga suku Madura keturunan yang secara sukarela menghindari konflik antara suku Dayak dan Madura ke beberapa wilayah di Kalimantan Selatan misalnya di Banjarmasin maupun di beberapa daerah di Pulau Madura.

Hampir seluruh warga suku Madura yang dulu pergi menyelamatkan diri dan mengungsi telah kembali untuk menata dan

memulai kembali kehidupan mereka yang porak-poranda yang disebabkan oleh konflik. Ibaratkan hidup pada kesempatan yang kedua, warga suku Madura telah merubah sebagian kehidupannya yang dulu sangat individualis dan mementingkan kepentingan pribadi menjadi lebih mendalami bagaimana kehidupan warga suku Dayak maupun suku lainya yang ada di Sampit.

Melihat sudah banyaknya perubahan dalam kehidupan warga suku Madura yang ada di Sampit, warga suku Dayak yang dulu sangat anti terhadap warga suku Madura juga merasa bahwa konflik masa lalu dijadikan pelajaran yang berharga bahwa sikap saling hormat menghormati baik kepada warga Dayak maupun kepada suku lainya yang ada di Sampit harus selalu di junjung tinggi dalam menjadi keharmonisan bermasyarakat.

Menurut Bapak H. Hadriansyah (Kepala Desa Bajarum) yang merupakan warga suku Madura keturunan, beliau berujar jika dapat membandingkan pada awal tahun 2003 dengan kondisi hubungan sosial antara suku Dayak dan suku Madura sekarang, terlihat perubahan sosial yang semakin harmonis dan tidak ada lagi kecemburuan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Diakui oleh Bapak M. Yudi yang merupakan salah satu tokoh suku Madura di Desa Bajarum, dulu sebelum konflik ada perasaan sombong dalam kehidupan warga suku madura yang kadang tidak mau untuk menikah dengan warga lokal Sampit karena dianggap berbeda

status sosial dan berbeda budayanya, tetapi sekarang warga suku Madura menyadari bahwa hal tersebut adalah kesalahan masa lalu yang sangat berharga sehingga seluruh warga suku Madura yang berada di Sampit khususnya mampu memetik pelajaran untuk menghilangkan potensi konflik di masa yang akan datang.



Gambar 8.1 Wawancara peneliti bersama Kepala Desa Bajarum dan beberapa tokoh suku Madura di Desa Bajarum

Pelajaran pernah berkonflik membuat perubahan cara pandang warga suku madura terhadap warga suku Dayak, sebagai besar warga suku madura yang tidak lagi menganggap bahwa status sosialnya lebih tinggi dari warga Dayak dan warga lokal lainya. Adanya cara pandang tersebut muncul disebabkan oleh anggapan yang salah bahwa warga lokal tidak sederajat dengan warga suku Madura karena dipandang memiliki sifat pemalas dan etos kerja yang rendah.

Sikap yang anti terhadap warga suku Madura sudah tidak nampak lagi pada kehidupan antar suku di Sampit, meskipun di beberapa kecamatan masih menunjukkan stereotype yang menunjukkan hal tersebut tapi pada dasarnya dalam konteks secara umum mereka masyarakat dari Suku Dayak tidak mempersoalkan tentang status sosial sebaliknya masyarakat Suku Madura dari pengungsian.

Sikap masyarakat Suku Dayak tersebut pada dasarnya tidak mengalami perubahan bagaimana cara memandang seseorang bukan dari tingkat status sosialnya, namun pada perilaku yang ditunjukkannya. Masyarakat Suku Dayak bukanlah tipe masyarakat yang antipati terhadap pendatang karena faktor status sosial, namun berubahnya persepsi disebabkan oleh bagaimana perilaku seseorang tersebut. Fakta tersebut dapat terlihat pada saat masyarakat Suku Madura pertama kali datang ke Sampit, mereka diperlakukan sama dengan para pendatang yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Jawa, Batak, bugis dan lain sebagainya, dikarenakan masyarakat Suku Dayak memahami tentang pendatang yang masuk ke lingkungan mereka akan tetap menjaga solidaritas, komitmen dan membaur sebagaimana anggapan mereka.

Disamping itu sosial budaya masyarakat Suku Dayak yang sangat kental dengan adat dan budaya bagaimana menghormati pendatang atau disebut sebagai tamu menjadi bagian dalam kehidupan sehari-harinya. Baik siapapun yang datang berkunjung akan sangat dihargai dan

dihormati, begitu juga dengan masyarakat Suku Madura pada awalnya, tanpa memandang status sosial.

Hal tersebut disebabkan oleh disamping banyaknya masyarakat Suku Madura yang sudah menjadi bagian atau keturunan darah meskipun dalam kontennya disebut sebagai warga Madura keturunan, dan bukan warga Dayak keturunan, namun dalam darah mereka sangat melekat Suku Dayak. Pertimbangan untuk memberikan kesempatan kedua menjadi sangat terbuka dan lebar untuk saling memafkan satu sama lain tanpa memandang status sosial dari masyarakat Suku Madura selepas dari pengungsian atau pasca konflik Sampit.

Pertimbangan yang lain adalah bahwa pengalaman konflik yang terjadi memberikan harapan dari cara pandang bahwa akan membaiknya hubungan dari kedua suku kembali seperti sediakala menjadi faktor pemicu bagi pihak ketiga untuk segera menyandingkan kembali mereka kedalam lingkungan yang harmoni, aman dan nyaman, dikarenakan fakta konflik adalah sebuah absolute dalam berinteraksi, namun juga menjadi sesuatu yang absolute untuk terjalin kembali, dalam peribahasan bahwa hubungan antar kedua suku seperti pasangan kekasih yang saling membutuhkan satu sama lain.

Posisi warga suku Madura dalam status sosial pada lingkungan masyarakat sudah tidak lagi dibeda-bedaan dengan suku-suku pendatang lainnya di sampit, bahkan warga suku madura keturunan sudah ada yang menjadi kepala desa. Kesempatan yang diberikan bagi

masyarakat pendatang untuk memilih dunia politik tidak menjadi ganjalan bagi siapapun pendatang yang hidup di Sampit pasca konflik antar kedua suku. Hal itu meyakinkan bahwa apapun status sosial masyarakat yang tinggal di daerah Sampit dan sekitarnya dipandang sama oleh masyarakat Suku Dayak pada umumnya.

Secara garis besar perubahan terkait status sosial terhadap masyarakat Suku Madura tidak berhubungan dengan apa status sosial yang dimilikinya, dikarenakan secara budaya masyarakat Suku Dayak tidak memiliki pandangan mencibir tentang rendahnya status sosial seseorang, namun lebih pada perilaku, dan atau tata krama atau sopan santun yang ditunjukkan oleh individu khususnya bagi pendatang. Masyarakat Suku Dayak memiliki kesamaan dengan individu lain, yang pada dasarnya lebih mengutamakan solidaritas, kerukunan, dan kenyamanan sosial dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

8.1.2 Perubahan Struktur/lembaga

Menurut Sztompka (2014), mengemukakan tentang perubahan struktur (misalnya, terciptanya ketimpangan, kristalisasi kekuasaan, munculnya ikatan persahabatan, terbentuknya kerjasama atau hubungan kompetitif).

Konflik antar suku membuat warga suku Madura menjadi lebih selektif dalam memilih untuk berkumpul dan berorganisasi dalam kehidupan sosialnya pada masyarakat di Sampit, alasan yang paling

lazim yang diutarakan oleh warga suku Madura adalah mereka tidak ingin memunculkan kecurigaan yang pada akhirnya memunculkan adanya potensi konflik.

Hasil kesepakatan perdamaian antara suku Dayak dan suku Madura yang menyepakati pembubaran organisasi Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) karena merupakan salah satu organisasi yang ikut berperan dalam menambah sentimen kesukuan pada warga suku Madura di Sampit.

Ke-eksklusifan masyarakat Suku Madura dengan menjauhi bentuk solidaritas dan kerukunan dengan lingkungan menjadikan mereka sulit bergaul dan mau menerima struktur kelembagaan yang ada di wilayah mereka. Mereka lebih menonjolkan diri dengan mengaktualisasikan diri mereka dengan kelompoknya sendiri, dengan membentuk lembaga masyarakat secara eksklusif.

Faktor tidak berkembangnya struktur kelembagaan atau organisasi di kalangan Suku Madura dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah dari awal kebanyakan masyarakat Suku Madura hanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi mereka. Tujuan ekonomi menjadi *common sense* mereka tinggal di perantauan. Nampak etos kerja yang tinggi dimata mereka, dan mereka rela bekerja apapun untuk kebutuhan ekonominya.

Ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pandangan lahiriah bagi tetangga dan keluarga di lingkungan mereka, dikarenakan

persepsi ekonomi masih menjadi dominan bagi kebanyakan masyarakat Suku Madura dalam kehidupannya. Maka tidak heran jika faktor ekonomi sangat mempengaruhi tingkah laku dan perangai yang memiliki watak keras, pekerja keras dan tidak pantang menyerah.

Kelembagaan dalam masyarakat Suku Madura menjadi dilirik karena sudah semakin banyaknya keturunan Suku Madura yang berkecimpung dalam dunia politik, dilihat dari beberapa orang yang menjadi bagian dari anggota dewan atau DPRD setempat dan bahkan menjadi pejabat publik seperti wakil bupati. Mulai nampak kegiatan politik menjadi tujuan lain selain ekonomi dalam masyarakat Suku Madura. Hal ini nampak dalam kekacauan di Sampit pada 2001 lalu, keterlibatan tokoh-tokoh politik dicurigai ikut mendukung adanya konflik antar kedua suku.

Dikhawatirkan dengan adanya organisasi yang menaungi warga Suku Madura, dan semakin menambah persepsi negatif yang memberikan efek kedepannya, dikarenakan dalam bayangan masyarakat Suku Dayak akan semakin eksklusifitas nampak dalam kehidupan masyarakat Suku Madura dalam kehidupan kesehariannya, ditambah lagi dengan adanya organisasi yang menaunginya dan pastinya mendapat dukungan politik dari beberapa tokoh, maka dengan pernyataan bersama IKAMA dibubarkan dan diganti dengan Dewan Kehormatan Masyarakat Madura.

Bagi kebanyakan masyarakat dari Suku Madura yang tinggal di Sampit memiliki pandangan yang hampir sama tentang sebuah struktur kelembagaan atau organisasi yang ada hubungan dengan kesukuannya, dan meskipun tahu namun kebanyakan dari mereka tidak begitu detail memahami maksud dan tujuan dalam membentuk organisasi tersebut, dikarenakan dasar pemikiran dari kebanyakan mereka adalah mendulang ekonomi sebanyak-banyaknya. Meskipun demikian dalam fakta dilapangan bahwa kesamaan dan ethnosentris kesukuan yang ada dalam diri mereka melebur pada saat terjadi pentas politik didaerahnya. Hal ini diketahui dengan terpilihnya kepala desa yang berasal dari warga Madura keturunan menjadi kepala desa.

Struktur kelambagaan yang dibangun pada dasarnya hanya untuk kepentingan ekonomi semata, namun seiring berkembangnya waktu bergeser menjadi kepentingan politik ekonomi, dimana organisasi tersebut dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk mendulang ekonomi dan cenderung terjadi mafia (*gangster*) dalam sebuah wilayah seperti yang terjadi dan dilakukan oleh beberapa wilayah baik di Jawa yang didalamnya banyak komunitas warga Madura.

8.1.3 Perubahan Pola Interaksi

Meskipun diawal pasca konflik pola interaksi menjadi hal yang sulit untuk diterima, namun bagi masyarakat Suku Madura keinginan yang kuat untuk berubah dan memperbaiki bagaimana interaksi yang

sebelumnya menjadi faktor pemicu konflik, menjadi sebuah instrument nilai yang mampu menciptakan rekonsiliasi berjalan dengan baik, dan menjadi faktor bagi masyarakat Suku Dayak untuk segera menerima mereka kembali dari pengungsian meskipun dengan beberapa persyaratan yang mengikat, diantaranya adalah harus memahami prinsip *dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung*.

Kesan yang dulu ditampakkan pada warga suku Madura dengan menonjolkan kesukuan dalam konteks pola perilaku dan gaya hidup mereka mulai hilang, konflik benar-benar telah menjadi pembelajaran untuk segera memperbaiki dan menjalin serta ikut menjadi bagian dari masyarakat dengan tidak menonjolkan ke-aku-annya dan juga lebih mengutamakan pola interaksi yang penuh dengan kerjasama, dan solidaritas.



Gambar 8.2 Proses Membaurnya warga suku Madura dengan suku Dayak, Jawa dan Banjar di Desa Parit

Gambar diatas adalah proses persiapan pernikahan serta proses masuk Islamnya salah satu warga suku Dayak yang dilakukan oleh warga suku Madura di Desa Parit, dari proses tersebut dapat dikatakan bahwa interaksi yang terbangun antara warga suku Dayak dan warga suku Madura sudah sangat baik sehingga terlihat tidak ada beban yang menganjal walaupun pada kenyataannya mereka pernah saling berkonflik.

Prinsip dasar interaksi yang selama ini menjadi pemicu konflik, seperti yang disampaikan dalam fakta dengan data sekunder dan wawancara ditunjukkan bahwa faktor pemicu konflik adalah adanya pola perilaku yang memicu disinteraksi antar kedua suku yang hidup berdampingan. Perilaku yang ditunjukkan tidak berdasar pada nilai keutuhan dan kebersamaan (*common sense*).

Pola interaksi yang menjadi prinsip utama sebagaimana dalam pandangan pihak ketiga dalam mendamaikan kedua suku dengan dasar Pancasila sebagai tujuan bermasyarakat dan bernegara dalam kerangka NKRI menjadi tolak ukur agar tercapai tujuan yaitu dengan mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan dan kebangsaan.

Perubahan pola interaksi awal datang dari pengungsian bagi kebanyakan warga Suku Madura menjadi acuan untuk tetap menjaga keutuhan dan kebersamaan dengan warga Suku Dayak hingga sekarang. Namun beberapa kasus yang menyertai dalam perkembangannya seperti kejadian Baamang, Banjarmasin, sempat menjadi instrument yang akan

memicu perseteruan antar kedua suku, akan tetapi itu hanya sebagian kecil saja dan mayoritas warga Suku Madura sudah menunjukkan pola perilaku yang menyesuaikan dengan lingkungan di masyarakat Suku Dayak (*adaptasi*).

8.1.4 Integrasi Sosial

Normalisasi kehidupan sosial masyarakat pasca konflik antarsuku Dayak dan Madura tidak terlepas dari adanya keinginan bersama para tokoh adat Dayak dan tokoh Madura untuk menyelesaikan konflik, mencari solusi terbaik dalam menjaga kesepakatan perdamaian kemudian mencari nilai-nilai persamaan yang dimiliki masing-masing kultur budayadalam menciptakan keselerasan hubungan sosial dan rasa solidaritas masyarakat di Sampit, sehingga dinamika hubungan sosial masyarakat antarsuku di Sampit mengutamakan pengenalan dan jati diri masing-masing suku, dengan arah tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Orang Dayak dengan falsafah hidup "*huma Betang*" yang telah mendarah daging dalam kehidupan sosialnya tentu sudah sangat memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik nilai toleransi, gotong royong, serta nilai kekeluargaan. falsafah tersebut bahkan telah menjadi karakter dalam seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah. Sampit yang memiliki semboyan "*habaring*

hurung' atau gotong royong semakin memperkuat pondasi hubungan sosial dan kehidupan antarsuku, antaretnis dan antaragama masyarakat.

Ketua Dewan Adat Dayak dan tokoh suku Madura sependapat dan mengamini bahwa pada kenyataannya hubungan sosial masyarakat disampit baik suku Dayak dan suku Madura memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Sehingga hal tersebut merupakan modal dasar yang menjadi perekat hubungan yang selama tidak disadari oleh masing-masing suku di Sampit.

Tingkat kesadaran masyarakat pasca konflik di Sampit juga telah dibuktikan dengan banyaknya penyelesaian kasus kekerasan, pencurian dan perkelahian yang melibatkan kedua belah pihak baik suku Dayak dan suku Madura, cara penyelesaian masalahnya melalui jalan perdamaian serta kekeluargaan yang merupakan wujud keberhasilan bersama dalam menjaga dan mengedepankan keserasian integrasi sosial di lingkungan masyarakat.

Konsistensi dalam menjaga marwah Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (Kal-Teng) dan Musyawarah Besar (Mubes) Damang Kepala Adat Kaltengbaik oleh pemerintah Daerah sebagai pemangku kebijakan, tokoh Dayak serta tokoh Madura merupakan keberhasilan pembangunan pasca konflik antarsuku di Sampit. Bidang sosial masyarakat baik identitas, etnisitas dan rasa kebersamaan menciptakan kerukunan dan keamanan sehingga memunculkan rasa aman dalam

kehidupan sosial masyarakat multi etnik, multi agama serta multi budaya di Sampit

Pembangunan yang berkelanjutan pada bidang pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mengarah pada pemerataan ekonomi, pengembangan jatidiri yang fokus pada pembinaan moral juga sudah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan Dewan Adat Dayak, Damang Adat serta tokoh Madura, dan juga tokoh masyarakat lainya yang juga merupakan bagian dari proses integrasi sosial sehingga masyarakat yang multisuku, multietnis yang ada di Sampit dalam mengambil sebuah tindakan memiliki pemikiran yang jernih dalam memahami kondisi sosial masyarakat.

8.1.5 Rekonsiliasi

Proses pengembalian warga suku Madura ke Sampit ternyata memakan waktu yang cukup panjang hingga membutuhkan waktu sampai 3 tahun pasca konflik agar warga suku Madura yang dulu mengungsi bisa kembali ke Sampit Kotawaringin Timur, hal tersebut disebabkan oleh masih adanya penolakan oleh warga suku Dayak serta belum kondusifnya kota Sampit yang merupakan pusat konflik, Penolakan oleh warga Dayak masih terasa sampai pada akhirnya ada kesepakatan damai dari tokoh Dayak yang sebagian besar berada di Sampit khususnya dan juga warga Dayak yang berada di seluruh

Kabupaten Kotawaringin Timur pada umumnya dengan para tokoh Suku Madura untuk mengakhiri konflik.

Proses rekonsiliasi pasca konflik antara para tokoh Dayak dan tokoh Madura dengan melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur beserta Forum Komunikasi Korban Kerusakan Kalimantan Tengah (FK-4) dalam usaha mengembalikan warga suku Madura korban konflik yang berada di pengungsian Sampang Madura, akhirnya membuahkan hasil yang positif dan para tokoh sepakat bahwa warga suku Madura diperbolehkan kembali asalkan dengan menyetujui persyaratan dan bersedia mengikuti aturan-aturan dan patuh terhadap hukum adat yang ada di Sampit Kotawaringin Timur.

8.1.6 Mediasi

Kesepakatan damai dan kesepakatan untuk mengakhiri konflik memuat sejumlah perjanjian diantaranya, warga suku Madura yang diterima dan diperbolehkan kembali ke sampit adalah merupakan warga Madura yang dulu tidak memiliki masalah dengan warga lokal pada lingkungan sosial tempat tinggal mereka sebelum konflik sehingga proses pengembalian yang terjadi telah berjalan dengan baik.

Pengembalian dan pemulangan warga suku Madura ke Sampit tergolong paling cepat, Jika kita bandingkan serta melihat konflik-konflik lain yang ada di Indonesia, penyebabnya adalah karena konflik hanya bersifat lokal dan hanya ada pada lokasi-lokasi serta wilayah

tertentu, seperti daerah Kecamatan Kotabesi dan Desa Bajarum sebagai besar warga suku Madura pada saat konflik memilih mengungsi dan menghindari konflik serta tidak melakukan perlawanan sehingga dua daerah tersebut korban jiwa hampir tidak ada.

Pasca Konflik pada tahun 2001 antara suku dayak dan suku madura di Sampit tepatnya pada tahun 2003 hingga tahun 2017 saat ini, sebagian besar warga Madura di penampungan pengungsi di Sampang telah kembali ke tempat asal mereka masing-masing yang terbagi diberbagai wilayah Kotawaringin Timur diantaranya Kecamatan Kotabesi, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Baamang, Mentawa Baru/Ketapang, Desa Bajarum, mentaya hilir utara, kelurahan Sawahan dan lain-lain.

Kembali ke Sampit Kotawaringin Timur bagi warga suku Madura berarti siap memulai dari nol serta rela dengan tidak menuntut banyak terhadap rumah beserta harta benda yang ditinggalkan yang ikut terbakar imbas dari konflik antara suku. Bagi warga suku Madura korban konflik yang terpenting adalah dapat diperbolehkan kembali ke Sampit untuk menata serta mencari penghidupan yang layak walaupun harus memulai kembali kehidupan mereka dari awal.

Tabel 8.1 Perubahan Sosial di Sampit

Indikator	Sebelum Konflik	Pasca Konflik
Status Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas warga suku Madura adalah sebagai buruh kasar, penarik becak dan pedagang serta petani - Sebagai besar memiliki pendidikan yang rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Status sosial ada yang berprofesi sebagai PNS, Guru, Karyawan Swasta, dan bahkan menjadi kepala Desa - Kesadaran bahwa pendidikan sangat penting telah banyak dari warga suku Madura yang Lulusan SMA bahkan Sarjana
Stuktur/Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> - Organsasi Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) - Peran Dewan adat Dayak (DAD) belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Kehormatan warga suku Madura - Forum Komunikasi Korban Kerusuhan Kalimantan Tengah - Peran Dewan Adat Dayak di fungsikan berserta Damang adat dan seluruh perangkat adat pada setiap desa dan kecamatan
Pola Interaksi	<ul style="list-style-type: none"> - Individualis, eksklusif dan tertutup - Ego Kesukuan dan tingkat emosional yang tinggi - Persepsi negatif terhadap suku Dayak yang dianggap memiliki etos kerja yang rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbuka, kerjasama dan solidaritas yang sudah mulai tumbuh baik - Mengutamakan perdamaian sebagai jalan tengah dalam setiap penyelesaian masalah - Persaingan dan kompetisi yang positif dalam mencari sumber ekonomi, pertanian dan pekerjaan
Integrasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Menonjolkan kesukuan sebagai warga madura - Selalu ingin menang sendiri dan kurang patuh terhadap aturan yang berlaku di Sampit 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencari nilai-nilai persamaan yang ada dalam hubungan antarsuku - Konsisten dalam menjaga marwah Kongres Rakyat Kalimantan dan Musyawarah Besar Damang dan Kepala Adat Dayak
Rekonsiliasi	<ul style="list-style-type: none"> - Warga suku Madura mendapat Penolakan dari warga suku Dayak terhadap mereka yang ingin Kembali ke Sampit 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pengembalian warga suku Madura dilakukan secara bertahap dan sudah mulai mendapat penerimaan dari warga Suku Dayak
Mediasi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya kesepakatan bersama dalam menyelesaikan setiap masalah antarawarga suku Dayak dan Madura 	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian damai dan kesepakatan para Dewan Adat Dayak bersama Tokoh Madura sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh warga di Sampit

Temuan hasil penelitian ini mengungkap bahwa ternyata cara pandang atau persepsi orang Madura yang salah terhadap warga suku Dayak, sehingga sebagian orang Madura ada yang tidak mau menikahkan anaknya dengan orang Dayak dengan alasan berbeda status sosialnya, orang dayak dianggap memiliki status sosial lebih rendah dan tidak sederajat, pemalas serta etos kerja yang rendah jika dibanding dengan orang Madura. Hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa konflik pada kenyataannya telah merubah total seluruh aspek kehidupan warga suku Madura di Sampit, baik pada struktur organisasi kelompok warga suku Madura, pola interaksi, dan mereka berusaha menjaga serta mempertahankan integrasi sosial di Masyarakat, rekonsiliasi pasca konflik serta mediasi jika ada permasalahan agar hubungan antar suku Dayak dan suku Madura semakin membaik.

8.2 Perubahan Budaya Pasca Konflik antara Suku Dayak dan Suku Madura di Sampit

Parsons mendesain skema AGIL untuk digunakan di semua tingkat dalam sistem teorinya. *Organisme Perilaku* adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal. *Sistem kepribadian* melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. *Sistem sosial* menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan

bagian-bagian yang menjadi komponennya. Terakhir, *sistem kultural* melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. (Ritzer dan Goodman, 2008).

Nyata bahwa Parsons mempunyai gagasan yang jelas mengenai “tingkatan” analisis sosial maupun mengenai hubungan antara berbagai tingkatan itu. Susunan hierarkisnya jelas, dan tingkat integrasi menurut sistem Parsons terjadi dalam dua cara: *Pertama*, masing-masing tingkat yang lebih rendah menyediakan kondisi atau kekuatan yang diperlukan untuk tingkat yang lebih tinggi. *Kedua*, tingkat yang lebih tinggi mengendalikan tingkat yang berada di bawahnya (Ritzer dan Goodman, 2008).

Inti pemikiran Parsons ditemukan dalam empat sistem tindakan ciptaannya. Dengan asumsi yang dibuat Parsons dalam sistem tindakannya, kita berhadapan dengan masalah yang sangat diperhatikan Parsons dan telah menjadi sumber utama kritikan atas pemikirannya (Schwanenberg, 1971; Ritzer dan Goodman, 2008).

Menurut Parsons, masyarakat akan berkembang melalui tiga tingkatan utama: (1) primitif; (2) *intermediate*; dan (3) *modern*. Dari tiga tahapan ini, oleh Parson dikembangkan lagi ke dalam subklasifikasi evolusi sosial lagi sehingga menjadi 5 tingkatan: (a) primitif; (b) *advanced primitif and archaic*; (c) *historic*

intermediate; (d) *seedbed societies*; dan (e) *modern societies* (Narwoko dan Suyanto, 2007).

Parsons, menyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama; kultural (pendidikan), kehakiman (integritas) , pemerintahan (pencapaian tujuan) , dan ekonomi (adaptasi). Masing-masing subsistem secara otonom, subkolektif-subkolektif. Dalam konteks ini, kemampuan adaptasi terhadap lingkungan merupakan tolak ukur dari tingkat otonominya (Narwoko dan Suyanto, 2007).

Menurut Parsons, kian adaptif berarti kian tinggi otonominya. Konkretnya, semakin tinggi tingkat masing-masing subkolektif dalam melakukan fungsi utamanya dalam rangka fungsi *interdependency system* secara keseluruhan, semakin besar pula kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, dan ini berarti semakin maju masyarakat yang bersangkutan (Narwoko dan Suyanto, 2007).

Tolak ukur yang digunakan Parsons untuk mendeteksi dan sekaligus membedakan tingkat perubahan masyarakat (ke dalam 5 tingkatan di atas) adalah artikulasi pengembangan fungsi integrasinya. Puncak perkembangan terpenting terhadap fungsi integrasi ini adalah ditemukannya bahasa tulisan dan kunci terhadap persambungan proses evolusi sosial. Penemuan simbol komunikasi bahasa menandai fase transisi dari masyarakat primitif ke tingkat *intermediate*. Sedangkan penemuan hukum formal menandai fase

transisi dari *intermediate* ke masyarakat maju (*advanced*) (Narwoko dan Suyanto, 2007).

Parsons dan rekannya, menyimpulkan prasyarat-prasyarat fungsional, atau syarat-syarat yang perlu, bagi masyarakat. pada daftar teratas semua orang harus dimasukan mekanisme-mekanisme kontrol sosial yang bertujuan melindungi proses sosialisasi untuk memastikan setiap pengikut kelompok anak muda menginternalisasikan norma-norma itu dan mendorong untuk memainkan peran-peran konvensional (Ritzer dan Smart, 2014).

Parsons, memiliki asumsi bahwa setiap subsistem normalnya memiliki sarana untuk menolak perubahan dan sebagian besar tulisan teoritis intinya menganggap perubahan itu menyusahkan karena bisa membahayakan imperatif-imperatif sistem. Kekhawatiran juga dikemukakan oleh Parsons bahwa akibat dari perubahan yang tampaknya remeh boleh jadi jangkauannya lebih luas (dan lebih buruk) dari pada yang mungkin diperhitungkan orang (Ritzer dan Smart, 2014).

Hasil temuan peneliti berkaitan dengan Perubahan Budaya pasca konflik antara suku Dayak dan Suku Madura di Sampit Kotawaringin Timur sebagai berikut;

8.2.1 Perubahan Nilai

Tokoh suku Madura menilai jika sebelum konflik warga Madura hidup dengan kemaunya sendiri dan lebih dikenal dengan sifat keras kepala dan sulit untuk diatur, tetapi pasca konflik pemahaman tentang bagaimana hidup saling menghormati antar suku menjadi semakin tinggi dalam kehidupan warga suku Madura. Misalnya sikap warga suku Madura yang selalu meminta ijin jika ingin mengadakan kegiatan keluarga maupun kegiatan kebudayaan kepada aparat keamanan dan juga warga sekitar lingkungan dimana mereka tinggal warga suku Madura merupakan wujud implikasi keinginan untuk memperbaiki dan merubah citra yang negatif terhadap suku Madura.

Kepekaan sosial pada masyarakat suku Madura juga semakin tinggi jika dilihat dari kehidupan mereka pasca konflik, sikap yang muncul tergambar dari sikap saling tolong menolong serta saling membantu baik antara warga Dayak dan Madura maupun suku-suku lainnya yang ada di Sampit. Sikap seperti ini justru tidak ditemui pada kehidupan warga suku Madura sebelum terjadinya konflik antar suku Dayak dan suku Madura.

Nilai yang tergambar perilaku yang sebelumnya berangsur-angsur melebur dan *lumer* menjadi ikut dalam bagian interaksi dengan lingkungan sekitar. Bilamana dulu nilai yang ditonjolkan dengan keakuannya, sekarang sudah berubah menjadi kelompok sosial yang saling mempererat kerjasama dan keutuhan bersama. Nilai egosentrisme

yang menjadi persoalan interaksi yang ditampilkan dengan ke-eksklusifan dari kelompok masyarakat Suku Madura dengan menjaga keutuhan dalam kelompoknya sendiri dan tidak mau berinteraksi dengan lingkungan menjadi faktor pemicu yang terjadinya konflik, berubah seiring pasca evakuasi dan rekonsiliasi, dimana masyarakat Suku Madura berangsur memahami nilai-nilai interaksi dengan masyarakat Suku Dayak yang berada di lingkungan sekitarnya.

Nilai yang dimiliki tiap personal dan ethnosentrisnya bagi masyarakat Suku Madura adalah bagian yang seolah melebur pada saat menjadi kelompok sosial diantara lingkungan sekitar yang penuh dengan nilai interaksi dengan menjalin kebersamaan dan dapat hidup berdampingan satu dengan lainnya.

Perubahan nilai personal menjadi nilai interaksi menjadi syarat utama sebuah kelompok agar dapat hidup berdampingan dengan kelompok lainnya. Bagi masyarakat Suku Madura pasca rekonsiliasi dan kembali dari pengungsian nilai-nilai interaksi *dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung* menjadi nilai absolute bagi mereka untuk terus hidup berdampingan satu sama lain dengan membentangkan nilai keutuhan dan kebersamaan dibawah ke-Bhinnekaan dan NKRI.

Gambaran bagaimana pribadi masyarakat Suku Madura sebelum konflik yang masih menjunjung tinggi kebudayaannya, loyalitas pada kelompoknya, dan cenderung mengedepankan egosentris pribadinya demi ambisi meraih keuntungan ekonomi semata, menjadikan lupa

bahwa mereka hidup berdampingan dengan kelompok lain yang memiliki nilai dan kebudayaan yang berbeda.

Keinginan untuk meningkatkan tingkat ekonomi mereka menimbulkan nilai untuk menguasai setiap wilayah dimana kelompok masyarakat Suku Madura tinggal menjadikan mereka memaksakan keinginannya bagi siapa saja untuk dijadikan bahwa merekalah yang paling tinggi status sosialnya. Tingkat penguasaan sebuah wilayah bagi setiap kelompok bertentangan dengan nilai *nerimo* bagi prinsip masyarakat Suku Dayak pada umumnya. Nilai progresifitas yang menjadi prinsip keseharian masyarakat Madura sangat berbeda dengan nilai dan budaya masyarakat Suku Dayak yang kalem dan cenderung nyaman.

Hegemoni nilai dan budaya yang dilakukan masyarakat Suku Madura terhadap Suku Dayak menjadi boomerang dikarenakan perasaan higenousitas terkalahkan oleh pendatang. Perasaan sensitifitas masyarakat Suku Dayak muncul setelah adanya upaya untuk merubah nilai-nilai kebudayaan mereka dan menimbulkan tingkat kemarahan yang tinggi. Seperti konflik yang terjadi di berbagai tempat, bertentangannya akan nilai dari pendatang dengan masyarakat asli menjadikan konflik yang berkepanjangan dan sulit terselesaikan (Coser, 1996).

8.2.2 Perubahan Adat Kebiasaan

Adat kebiasaan yang terdahulu pada masyarakat Suku Madura mulai nampak semakin ditinggalkan. Kebiasaan buruk yang selama ini menjadi penghalang terjadinya interaksi yang berkelanjutan berangsur-angsur luntur. Adat ronggeng disertai dengan judi dan minuman keras sudah lumer dan sudah jarang dilakukan oleh masyarakat Suku Madura dalam penyelenggaraan hajatan besar seperti pernikahan dan khitan.

Sempat menjadi pemicu konflik pada tahun 2001, dikarenakan kebudayaan tersebut sangat bertentangan dengan lingkungan kalangan masyarakat Suku Dayak, yang dalam kebiasaannya cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, dikarenakan anggapan bahwa kegiatan perjudian dan minuman keras memiliki nilai negatif.

Adat kebiasaan lain yang menjadi penghalang adalah menurunnya tingkat solidaritas dari masyarakat Suku Madura terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari Suku Dayak. Bentuk penurunan tingkat solidaritas yaitu minimnya ketidakhadiran dalam setiap hajatan atau kegiatan yang dilakukan di lingkungannya menjadi persepsi negative dan kemudian berkembang menjadi kecurigaan sepihak.

Perubahan adat kebiasaan pasca konflik memberikan gambaran bahwa segala kegiatan yang terlihat kurang menjadi instrument untuk mempererat tali persaudaraan, solidaritas sosial dan kerjasama semakin membaik. Nampak dalam kebiasaan dalam banyaknya masyarakat Suku

Madura yang hadir dalam setiap hajatan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat Suku Dayak, dan tidak adanya perhelatan ronggeng yang disertai dengan perjudian dan minuman keras.

8.2.3 Perubahan Budaya Perilaku

Tingkah laku selalu menonjolkan identitas dan kebudayaan dalam interaksi sosial di lingkungan masyarakat di Sampit membuat citra negatif bahwa warga suku Madura belum mampu beradaptasi dengan lingkungan dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat di Sampit khususnya masih sangat sulit untuk dihilangkan. Pandangan tersebut muncul karena memang sikap yang sangat konservatif terhadap kebudayaan etnis Madura di tunjukan melalui kehidupan yang eksklusif serta berkelompok di tengah-tengah masyarakat yang multikultural di Sampit sehingga pada kehidupan yang eksklusif dan berkelompok tersebut membuat pemahaman tentang kebudayaan di luar kebudayaan etnis Madura masih sangat rendah.

Keberadaan warga suku Madura yang melekat dengan nilai-nilai filosofis budaya kekerasan "*lebih baik putih tulang (mati) dari pada berputih mata (tersinggung)*" yang menjadi landasan budaya Carok jelas menggambarkan karakter yang memiliki tingkat keegoisan yang sangat tinggi dalam meghadapi setiap persoalan kemasyarakatan, sehingga persoalan tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi

seringkali lebih mengutamakan tindakan kekerasan dengan melakukan penyerangan secara berkelompok.

Perubahan sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat dari segi perilaku dan moral banyak sekali terjadi perubahan misalkan pada kehidupan masyarakat tidak lagi menonjolkan identitas sebagai orang madura tetapi mencoba untuk bergaul dan berusaha belajar tentang hidup dan kebudayaan suku Dayak misalkan penggunaan bahasa, orang madura yang bisa berbahasa Dayak akan menggunakan bahasa dayak dalam kehidupan sehari-hari tetapi banyak dari mereka yang telah mampu dengan benar menggunakan bahasa banjar sehingga penggunaan bahasa juga merupakan usaha untuk mengurangi stereotip yang ada di masyarakat.

Sikap warga Madura pasca konflik sangat berubah total dengan adanya peristiwa konflik, yang dulu sangat menonjolkan kebudayaan madura seperti ronggeng, sandur dan karapan sapi sudah hampir tidak ada, karena memang tokoh Madura sendiri melarang kegiatan tersebut mengingat kadang kegiatan tersebut dibarengi dengan perjudian sehingga hal tersebut hanya menambah dan menimbulkan konflik justru jika ada orang madura yang sulit diatur akan direkomendasikan di pulangkan saja.

Perubahan sosial pasca konflik pada masyarakat di Kecamatan Kotabesi terlihat sangat jauh lebih baik, warga suku madura yang kembali dari pengungsian tidak lagi menonjolkan budaya mereka

sebagai ukuran, tetapi jika kita melihat dari pesta perkawinan yang diselenggarakan oleh warga suku madura pun saat ini sudah mengikuti cara-cara adat bagaimana perkawinan warga suku Dayak. Kemudian jika ada warga pendatang baru dari suku Madura, jika dulu sebelum konflik warga pendatang dari suku madura bebas saja keluar masuk silih berganti dan tidak pernah sama sekali melapor pada tokoh setempat, tetapi pasca konflik mereka justru menolak warga pendatang walaupun berasal dari suku yang sama hal tersebut dilakukan untuk menghindari masalah dengan warga lokal.

Perubahan budaya perilaku masyarakat pasca konflik bagi Suku Madura sebelum dan sesudah konflik nampak nyata dalam kesehariannya. Perubahan tersebut dikarenakan oleh faktor nilai *common sense*, dengan kata lain bahwa sudah seharusnya dilakukan karena tinggal di daerah lingkungan masyarakat Suku Dayak, dimana budaya perilaku harus disesuaikan dengan adat dan budaya masyarakat Suku Dayak.

Namun demikian, masih banyak juga sebagian masyarakat Suku Madura yang belum memahami sepenuhnya tentang budaya perilaku interaksi. Nampak di beberapa wilayah masih tetap menggunakan budaya eksklusifnya dan hanya membaur didalam kelompoknya sendiri. Secara umum memang sudah makin memperlihatkan tingkat solidaritas yang tinggi.

8.2.4 Perubahan Pola Pikir

Penuturan tokoh madura membenarkan bahwa dulu sikap tidak mau diatur dan mudah untuk dibodohi oleh kepentingan-kepentingan sekelompok orang serta budaya kekerasan yang melekat dalam diri kehidupan sosial warga suku madura adalah mayoritas karena faktor pendidikan yang dulu masih sangat rendah dan dengan tingkat keahlian yang rendah pula.

Pendidikan yang rendah mempengaruhi pola pikir masyarakat Suku Madura dalam menentukan tindakan sosialnya. Pola pikir masyarakat Suku Madura dari awal cenderung hanya memikirkan nilai ekonomi. Bekerja keras yang ditampilkan hanyalah berdagang, dikarenakan kegiatan tersebut tidak memerlukan skill atau alat ketrampilan.

Berdagang adalah kegiatan yang dianggap paling mudah untuk mendulang uang. Bagi yang memiliki modal tentu saja hal tersebut dapat dilakukan, dan bagi yang tidak memiliki modal kebanyakan masyarakat Suku Madura lebih memilih bekerja serabutan.

Pola pikir kecenderungan memiliki nilai ekonomi menjadi pertarungan tantangan kehidupan diperantauan. Sederhana namun sangat vital untuk kelangsungan kehidupannya. Filosofis berdagang menjadi prinsip bagi masyarakat Suku Madura dikarenakan pengaruh budaya agama yaitu Islam. Islam mengajarkan bahwa jika ingin cepat kaya maka jadilah pedagang atau saudagar.

Kapitalistis menjadi idola bagi masyarakat Suku Madura, dimana pandangan kebanyakan masyarakat Suku Madura pada budaya nilai ekonomi sangat dominan dalam kehidupannya baik di lingkungan kepulauan Madura dan dibawa masyarakatnya ke setiap penjuru pelosok negeri yang disinggahinya.

Pola pikir semakin berkembang seiring dengan makin banyaknya orang kaya yang berasal dari masyarakat Suku Madura. Berkembangnya pola pikir orang kaya dari masyarakat Suku Madura nampak makin banyaknya mereka tertarik untuk terjun ke dunia politik dan orientasinya menjadi seorang pejabat. Pandangannya adalah untuk menjadi seorang pejabat harus memiliki modal yang sangat cukup.

Pola pikir yang awalnya hanya diperuntukkan untuk tujuan ekonomi, bergeser menjadi tujuan politik dengan menjadi pejabat. Selain pejabat orientasi pola pikir masyarakat Suku Madura ke arah PNS atau menjadi perangkat keamanan Negara.

8.2.5 Perubahan Budaya Bahasa

Bahasa menjadi instrument vital dalam interaksi, karena didalamnya terdapat substansi komunikasi dapat terjalin. Faktor bahasa menjadi bahasan penting pada konflik antar kedua suku di Sampit Kalimantan Tengah. Kebanyakan masyarakat pendatang khususnya masyarakat Suku Madura yang sudah lama tinggal di Sampit, bahkan hampir beberapa dekade dan kebanyakan mereka adalah warga Madura

keturunan tidak begitu memahami budaya bahasa masyarakat Suku Dayak, apalagi punya kemauan untuk menggunakannya dalam berinteraksi. Masyarakat Suku Madura baik Madura keturunan lebih senang menggunakan bahasa moyang dari Suku Madura ketimbang bahasa Suku Dayak.

Faktor ethnosentris warga Madura keturunan akan budaya bahasa menimbulkan persepsi yang dinyatakan seolah menjauhi untuk mempelajari bahasa masyarakat setempat yang dimiliki oleh garis keturunan dari masyarakat Madura keturunan. Budaya dominan moyang Madura lebih ditonjolkan oleh masyarakat Madura keturunan yang memiliki nisab atau darah dari Suku Dayak.

Pasca konflik, perubahan masyarakat Madura keturunan untuk memahami kebudayaan moyang Suku Dayak sudah mulai tumbuh. Banyak masyarakat Madura keturunan mulai menggunakan bahasa keseharian Suku Dayak dalam berinteraksi. Seluruh aktivitas sehari-hari bahasa tidak lagi menjadi kendala dalam berkomunikasi diantara kedua suku. Perubahan penggunaan bahasa pasca konflik sudah menjadi gaya komunikasi keseharian bagi masyarakat diantara kedua suku yang hidup berdampingan. Gaya komunikasi dengan bahasa tersebut menjadi kunci terjalannya interaksi yang baik antarsuku Dayak dan Madura di Sampit.

8.2.6 Perubahan Mata Pencaharian

Sebelum konflik seluruh pusat-pusat perekonomian mulai dari Perdagangan, Buruh Pelabuhan, seluruhnya di kuasai serta di dominasi oleh warga suku madura melalui monopoli dengan tindakan kekerasan dan premanisme

Pada kehidupan sosial ekonomi warga suku Dayak juga mengalami banyak perubahan di sebabkan oleh terbukanya kesempatan seluas-luasnya bagi warga suku dayak untuk dapat bersaing dengan warga pendatang, disebabkan oleh sumber-sumber perekonomian tidak lagi di monopoli oleh segelintir dari suku tertentu saja.

Menurut penuturan Dewan Adat Dayak sebelum konflik kesenjangan sosial ekonomi antara warga suku dayak dan suku madura sangat nampak perbedaan yang signifikan kerana seluruh kegiatan perekonomian di Sampit di kuasai oleh warga suku madura pada seluruh lini pada sumber ekonomi sehingga membuat masyarakat lokal tidak memiliki akses dalam persaingan pada sektor perekonomian dan seringkali juga memonopoli melalui kelompok Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) baik dengan jalan kekerasan dan premanisme sehingga warga lokal tidak memperoleh akses untuk ikut berjualan di Pasar serta menjadi buruh pelabuhan, sehingga warga lokal sangat memiliki keterbatas dan seringkali terjadi benturan antara warga lokal dengan warga suku madura dalam merebut sumber-sumber ekonomi tidak dapat di hindari.

Perubahan sosial ekonomi orang madura pasca konflik lebih mengedepankan nilai etika dan perilaku yang baik dalam bersaing secara sehat bersama warga lokal, perbandingan kehidupan ekonomi ketika berada di pengungsian dengan saat sekarang membuat berubah yang positif pada cara mereka memperoleh sumber-sumber ekonomi yang lebih baik warga suku madura untuk kehidupan keluarga mereka. Perubahan itu dilihat dari proses mencari sumber ekonomi dengan seluruh anggota keluarga terlibat.

Pasca konflik perubahan sosial yang terjadi pada kehidupan warga suku dayak terutama pada sektor pertanian. Dulu masyarakat suku dayak di kenal dengan sistem Pertanian ladang berpindah tetapi dengan dengan terjadinya konflik antara suku dayak dan suku madura mengharuskan mereka untuk belajar untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tidak hidup ketergantungan dengan warga suku madura, karena warga suku madura pada daerah Parebok, Samuda dll di kenal memiliki kemampuan yang baik pada sektor pertanian padi pada daerah tersebut.

Pada kehidupan sosial ekonomi warga suku Dayak juga mengalami banyak perubahan di sebabkan oleh terbukanya kesempatan seluas-luasnya bagi warga suku dayak untuk dapat bersaing dengan warga pendatang, disebabkan oleh sumber-sumber perekonomian tidak lagi di monopoli oleh segelintir dari suku tertentu saja.

Tabel 8.2 Perubahan Budaya di Sampit

Indikator	Sebelum Konflik	Pasca Konflik
Perubahan nilai	<ul style="list-style-type: none"> - Warga suku Madura Keras Kepala, sulit diatur - Prinsip menerima orang Dayak terhadap apa yang diberikan alam - Terhambatnya interaksi, jarang menghadiri jika ada diundang dari warga lokal dalam acara hajatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap saling menghormati dan menghargai dalam hubungan sosial sudah sangat baik - Warga suku dayak sudah berani berkompetisi dalam bidang sosial ekonomi di Sampit - Memepererat persaudaraan, solidaritas sosial dan kerjasama semakin membaik
Adat kebiasaan	<ul style="list-style-type: none"> - Solidaritas yang rendah warga suku madura - Sebelum Konflik memiliki Sikap progresifitas yang sangat jauh dari budaya asli sebagai orang Madura 	<ul style="list-style-type: none"> - Timbulnya Kepekaan sosial dalam kehidupan sosial dalam wujud tolong-menolong, serta gotong royong - Kembali kepada kebudayaan asli sebagai orang Madura yang menjunjung tinggi nilai kebaikan
Budaya perilaku	<ul style="list-style-type: none"> - Egosentris yang tinggi serta loyalitas hanya dalam kelompok sebagai suku Madura - Etnosentrisme Personal masyarakat suku Madura - Menjunjung tinggi kebudayaan sebagai suku Madura - Sangat Konservatif terhadap kebudayaan Madura - Pemahaman nilai yang salah “lebih baik putih mata dari pada putih tulang” dalam arti mudah cepat tersinggung 	<ul style="list-style-type: none"> - Saling memepererat kerjasama antarsuku dan keutuhan bersama dalam masyarakat - Kerjasama dan telah hidup berdampingan - Pemahaman yang tinggi dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung - Mulai terbuka dan mulai bisa menerima kebudayaan diluar kebudayaan orang Madura - Memilih menyelesaikan masalah melalui jalur kekeluargaan dan meminta masukan Dewan Adat Dayak
Pola pikir	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor pendidikan yang rendah maka sangat mudah untuk dibodohi oleh kepentingan oleh sekelompok orang - Pendidikan yang rendah cenderung hanya berfikir nilai ekonomi saja 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan yang signifikan pada kesadaran akan pentingnya pendidikan warga Suku Madura sehingga tidak adalagi generasi muda madura yang tidak bersekolah - Pola pikir tidak lagi mengantungkan hidup pada sektor ekonomi semata sehingga dengan pendidikan yang baik dimaksudkan dapat bersaing pada sektot lain misalnya karyawan swata dan

		PNS
Budaya bahasa	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya kemauan untuk memahami bahasa Dayak dalam interaksi sehari-hari 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahasa keseharian warga Dayak sudah mulai dipahami dan digunakan oleh warga Madura dalam kehidupan masyarakat terutama dalam sosial ekonomi misalnya di pasar
Mata pencaharian	<ul style="list-style-type: none"> - Dominasi dan monopoli perekonimian dalam wujud penguasaan wilayah perdagangan, buruh pelabuhan - Kesenjangan ekonomi yang sangat jelas terlihat antara warga lokal dan warga suku Madura - Ketergantungan yang tinggi pada warga suku Madura dalam bidang pertanian, warga Madura tergolong petani sukses pada bidang pertanian padi misal di desa Parebok samuda dll 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbuka bagi semua suku untuk bersaing secara sehat dalam perdagangan serta pekerjaan di pelabuhan - Terjadi perubahan sosial ekonomi yang lebih mengedepankan nilai dan etika serta perilaku dalam bersaing secara sehat - Warga suku dayak sudah belajar untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pada bidang pertanian dan banyak belajar dari warga suku madura

BAB IX PENUTUP

9.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Interaksi antara suku Dayak dan suku Madura adalah interaksi yang saling membutuhkan. Proses interaksi yang sebelumnya telah berjalan dengan baik, dimana waktu dulu saling membutuhkan (*take and give*), dengan adanya konflik hal tersebut seolah hilang. Kerinduan masyarakat Suku Dayak akan interaksi yang terjalin baik sebelumnya, nampak dalam kerjasama, gotongroyong, kemesraan pada waktu transaksi di pasar-pasar, menunjukkan bahwa kondisi interaksi tanpa syarat pasca konflik didasari oleh perasaan untuk lebih saling memahami, menghargai bentuk-bentuk nilai budaya dan mengaplikasikannya dalam proses interaksi.
2. Proses sosial pada awal pasca konflik memang tidak semulus seperti apa yang diinginkan, ancaman dan ketakutan masih dirasakan oleh kebanyakan masyarakat Suku Madura. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan serta komitmen masyarakat Suku Madura untuk menjunjung tinggi nilai budaya, proses sosial kembali berjalan seperti semula. Pemahaman prinsip nilai *dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung* dapat diaplikasikan secara nyata dalam proses sosial yang terjadi di Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.

3. Pola Edukasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan pasca konflik telah terlaksana dengan baik sehingga proses rekonsiliasi, perdamaian hingga proses evakuasi masyarakat suku Madura dari pengungsian berjalan dengan baik. Keinginan tekad dan semangat dari masing-masing pihak, baik dari masyarakat Suku Dayak maupun masyarakat Suku Madura komitmen untuk terus menjalin kerjasama, dan keutuhan sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka proses rekonsiliasi dan evakuasi berjalan dengan lancar meskipun mengalami beberapa proses perjanjian dan perundingan.
4. Perubahan sosial budaya masyarakat pasca konflik dimaknai melalui pelaksanaan dan aplikasi nilai-nilai *dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung* sungguh memiliki efek yang signifikan bagi interaksi dari kedua suku, dimana masyarakat Suku Madura tidak lagi cenderung mengutamakan ke-akuannya, seperti yang sebelumnya dilakukan. Pasca konflik masyarakat Suku Madura lebih memahami, menghargai dan bisa menerima nilai budaya masyarakat Suku Dayak diantaranya pada perilaku, adat kebiasaan, pola pikir, pendidikan hingga struktur kelembagaan.

9.2. Saran

Beranjak dari kesimpulan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas maka peneliti memberikan saran-saran;

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu mensosialisasikan kembali makna perjanjian damai yang telah disepakati oleh para pihak yang pernah berkonflik, mengingat bahwa perjanjian damai tersebut sudah hampir dilupakan sehingga dikhawatirkan para generasi yang selanjutnya tidak menyadari bahwa dulu antara suku Dayak dan suku Madura pernah terlibat konflik.
2. Dewan Adat Dayak (DAD) bersama tokoh suku Madura serta tokoh masyarakat lainnya harus bersinergi dalam pemaknaan falsafah “Huma Betang” yang di dalamnya tertuang nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, perlu dijadikan landasan nilai yang selalu dijaga dan dijadikan prinsip hidup yang penuh keterbukaan dan keihlasan serta tidak eksklusif dalam kelompok di tengah masyarakat yang begitu multikultural seperti di Sampit.
3. Prinsip Bhineka Tunggal Ika perlu lebih ditanamkan pada kehidupan sosial masyarakat antarsuku terutama pada masyarakat suku Madura pendatang yang tidak memahami betul kultur dan budaya suku Dayak. Nilai-nilai “Dimana bumi di pijak disitu langit dijunjung” sebagai upaya agar selalu dijunjung tinggi dalam setiap perbedaan pada masyarakat di Sampit.

4. Penelitian ini belum sampai menjangkau dampak serta pengaruh konflik antarsuku terhadap perkembangan psikologis anak korban Konflik sempit, oleh sebab itu peneliti menyarankan kepada peneliti lain agar dapat melakukan analisis serta kajian terhadap permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. A. M. (2012). Cross marriage (sebuah model pembauran budaya antar komunitas cina, arab, india, jawa dan madura di sumenep kota). *Karsa: journal of social and islamic culture*, 12(2), 132-148.
- Abdullah, I. (2014). Penggunaan dan penyalahgunaan kebudayaan di indonesia: kebijakan negara dalam pemecahan konflik etnis. *Antropologi indonesia*.
- Adisusilo, Sutarjo, 2012. *Pembelajaran Nilai-Karakter*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Ahimsa-Putra, S. (2002). Aktualisasi nilai budaya bangsa di kalangan generasi muda. *Jurnal ketahanan nasional*, 6(2002).
- Ahmad & Amri, 2011. *Pengembangan Pembelajaran IPS Terpadu*, Jakarta, Prestasi Pustaka
- Ahmadi, Dadi, 2008. Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar, *Jurnal Media Tor* Vol. 9 No. 2 Desember 2008
- Al Humaidy, M. A. (2012). Analisis stratifikasi sosial sebagai sumber konflik antar etnik di kalimantan barat. *Karsa: journal of social and islamic culture*, 12(2), 180-185.
- Alexander, Keller, Hirsch, 2016. *Teorisasi Rekonsiliasi Pasca-Konflik (Agonisme, Pemulihan, dan Perbaikan)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Ali, M. (2010). Akomodasi nilai-nilai budaya masyarakat madura mengenai penyelesaian carok dalam hukum pidana. *Jurnal hukum ius quia iustum*, 17(1), 85-102.
- Alimi, M. Y. (2013). Judith butler gender dan seks sebagai pertunjukan. *Manusia, perempuan, laki-laki*, 59.
- Alimi, M. Y. (2018, october). The use of content and language integrated learning (clil) as conservation education methodology: an experience

- from state university of semarang. In *aip conference proceedings* (vol. 2019, no. 1, p. 030007). Aip publishing.
- Anna, R. R., wasino, w., & suhandini, p. (2016). Pernikahan beda agama dan implikasinya terhadap pola asuh anak. *Journal of educational social studies*, 5(1), 84-88.
- Ancok, D. (2003). Modal sosial dan kualitas masyarakat. *Psikologika: jurnal pemikiran dan penelitian psikologi*, 8(15), 4-14.
- Ar, E. H. (2013). Integrasi sosial dalam masyarakat multi etnik. *Walisongo: jurnal penelitian sosial keagamaan*, 21(1), 191-218.
- Ardiansyah, s. I. (2010). Konflik etnis samawa dengan etnis bali: tinjauan sosial politik dan upaya resolusi konflik. *Journal unair tahun*, 23.
- Ardiwinata & Hufad, 2009. *Sosiologi Antropologi Pendidikan*. Bandung:Upi Press
- Arraiyah, H. (2018). Menuju Damai Dengan Kearifan Baru (Studi Kasus Pasca Konflik Di Aralle, Tabulahan dan Mambi). *Al-Qalam*, 11(2), 26-42.
- Astri, H. (2011). Penyelesaian konflik sosial melalui penguatan kearifan lokal. *Jurnal aspirasi*, 2(2), 151-162
- Astri, h. (2011). Penyelesaian konflik sosial melalui penguatan kearifan lokal. *Jurnal aspirasi*, 2(2), 151-162.
- Astuti, T. M. P. (2006). Redefinition of the existence of migrant women the case of return migrant in godong, grobogan, central java. *Humaniora*, 18(3), 205-212.
- Astuti, T. M. P. (2009). Sosialisasi anak dan melemahnya tradisi dalam migrasi internasional: kasus tkw dari godong grobogan jawa tengah. *Humaniora*, 21(2), 125-137.
- Astuti, T. M. P. (2012). Ekofeminisme dan peran perempuan dalam lingkungan. *Indonesian journal of conservation*, 1(1).
- Astuti, T. M. P., Kismini, e., & prasetyo, k. B. (2014). The socialization model of national character education for students in elementary school

- through comic. *Komunitas: international journal of indonesian society and culture*, 6(2), 260-270.
- Azhari, F. (2016). Dinamika perubahan sosial dan hukum islam. *Al-tahrir: jurnal pemikiran islam*, 16(1), 197-221.
- Bachtiar, Wardi, 2006. Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Bahari, Y. (2014). Model komunikasi lintas budaya dalam resolusi konflik berbasis pranata adat melayu dan madura di kalimantan barat. *Jurnal ilmu komunikasi*, 6(1)
- Bakri, H. (2015). Resolusi konflik melalui pendekatan kearifan lokal pela gandong di kota ambon. *The politics: jurnal magister ilmu politik universitas hasanuddin*, 1(1), 51-60.
- Bashori, K., Majid, A., & Tago, M. Z. (2015). Dinamika konflik dan integrasi antara etnis dayak dan etnis madura (studi kasus di yogyakarta malang dan sampit). *Afkaruna: indonesian interdisciplinary journal of islamic studies*, 8(1), 60-79.
- Basir, M. (2011). Hubungan antar suku bangsa di daerah rawan konflik (kasus desa dandang dan desa kampung baru kab. Luwu utara) ethnic relations in areas prone to conflict (a case dandang village and village of kampung baru, north luwu regency). *Al-qalam*, 17(2), 191-198.
- Brata, I. B. (2016). Kearifan budaya lokal perekat identitas bangsa. *Jurnal bakti saraswati (jbs)*, 5(1).
- Budimansyah, D. (2016). Kekuasaan yang terpusat pada sekelompok kecil elit dan munculnya kebencian sosial budaya terselubung pada masyarakat indonesia pasca reformasi. *Jurnal moral kemasyarakatan*, 1(1), 1-14.
- Christopher R. Duncan. 2009. "Reconciliation and Revitalization: The Resurgence of Tradition in Postconflict Tobelo, North Maluku, Eastern Indonesia". *Jurnal of Asian Studies*, 66(4): 1077-1104

- Claude Helene Mayer & Christian Boness. 2011. "Spiritual insights in cross-cultural conflicts and mediation in ecclesiastical organizations in Tanzania". *Jurnal Qualitative Research in Organizations and Management*, 6(2): 171-190
- Cohen. J.Bruce, 1983. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Bina Aksara
- Darojah, U., Wasino, W., & Prasetyo, P. E. (2012). Perubahan struktur sosial ekonomi dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri pada masyarakat desa kubangwungu kecamatan ketanggungan kabupaten brebes tahun 1969-2010. *Journal of educational social studies*, 1(2).
- Dayakisni & Hudaniah, 2012. *Psikologi Sosial*. Malang: UMM Press
- Demartoto, A. (2017). Strukturalisme Konflik; Pemahaman Akan Konflik Pada Masyarakat Industri Menurut Lewis Coser Dan Ralf Dahrendore. *Jurnal Sosiologi Dilema*, 24(1).
- Deutsch, Morton, dkk, 2016. *Handbook Resolusi Konflik Teori dan Praktek*, Bandung, Nusa Media
- Dharmawan, A. H. (2005). Konflik sosial dan resolusi konflik: analisis sosio-budaya (dengan fokus perhatian kalimantan barat). In *seminar peragi pontianak* (pp. 10-11)
- Djelantik, S., Indraswari, R., Triwibowo, A., & Apresian, S. R. (2015). Komunikasi internasional dalam era informasi dan perubahan sosial di Indonesia. *Research Report-Humanities and Social Science*, 2.
- Fatia, D., & Thaher, A. (2018). Proes Integrasi Sosial dalam Masyarakat Multikultural (Studi pada Masyarakat yang Berdomisili di Kota Langsa). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 3(1).
- Gerungan, 2004. *Psikologi Sosial*, Bandung, PT Refika Aditama
- Gregg Landsman, Joung Hyun Ham, Hyun Jung Min. 2014. " Multiculturalism in South Korea and Differing Views on Adaptation Based on Foreign

- Interaction with Korean Culture". *Jurnal Advanced Science and Technology Letters*, 71(34): 145-148
- Gunawan, K., & rante, y. (2011). Manajemen konflik atasi dampak masyarakat multikultural di indonesia. *Jurnal mitra ekonomi dan manajemen bisnis*, 2(2), 212-224.
- Haba, J. (2012). Etnisitas, Hubungan Sosial Dan Konflik Di Kalimantan Barat. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 14(1), 31-52.
- Hafid, A. (2016). Hubungan Sosial Masyarakat Multietnik Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. *Al-Qalam*, 22(2).
- Hartono, Y. (2011). Pembelajaran yang multikultural untuk membangun karakter bangsa. *Agastya: jurnal sejarah dan pembelajarannya*, 1(1).
- Haryanto, J. T. (2013). Dinamika kerukunan intern umat islam dalam relasi etnisitas dan agama di kalteng. *Analisa: journal of social science and religion*, 20(1), 13-24.
- Hatu, R. (2011). Perubahan sosial kultural masyarakat pedesaan (suatu tinjauan teoritik-empirik). *Jurnal inovasi*, 8(04).
- Herlambang, Arjawa dan Kebayantini (2015). Masyarakat multikultural : studi tentang interaksi sosial antara masyarakat etnis bali dan etnis sasak di kota amlapura, 1(3), 1-10
- Heryadi, H., & Silvana, H. (2013). Komunikasi antarbudaya dalam masyarakat multikultur. *Jurnal kajian komunikasi*, 1(1), 95-108.
- Hidayah, I., & marhaeni, p. A. (2016). Reinforcement of professional teacher candidates in indonesia through program of graduates educating in the frontier, outermost, and disadvantaged regions (sm-3t). *International journal of research in education and science*, 2(1), 166-171.
- Hidayah, M. S. (2002). Konflik komunal dan resolusi damai: studi kasus di kalimantan tengah. *Psikologika: jurnal pemikiran dan penelitian psikologi*, 7(13), 14-31.

- Himawan, W. (2014). Citra budaya melalui kajian historis dan identitas: perubahan budaya pariwisata bali melalui karya seni lukis. *Journal of urban society's arts*, 1(1), 74-88.
- Hufad, A. (2003). Perilaku kekerasan: analisis menurut sistem budaya dan implikasi edukatif. *Mimbar pendidikan*, 22(2), 52-61
- Humaedi, M. A. (2014). Kegagalan akulturasi budaya dan isu agama dalam konflik lampung. *Analisa: journal of social science and religion*, 21(2), 149-162.
- Idi & Safarina, 2011. Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan. Jakarta Raja Grafindo Persada
- Imadudin, I. (2009). Konflik, Kekerasan, Dan Mediasi Sosial Di Pedesaan Lampung 1988-2001. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 1(1), 1-11.
- Inayah, S. S. (2014). Konflik Dan Negosiasi Dalam Perspektif Komunikasi. *LENTERA*, 16(2 Desember).
- Irfani, A. (2018). Pola kerukunan melayu dan tionghoa di kota singkawang. *Al-hikmah*, 12(1).
- Irham, M. A. (2017). Kebijakan politik multikultural dan upaya mencegah konflik sosial berbau sara, belajar kasus waypanji lampung selatan. *Jurnal tapis*, 9(1), 1-15.
- Iskandar, D. (2004). Identitas budaya dalam komunikasi antar-budaya: kasus etnik madura dan etnik dayak. *Jurnal masyarakat dan budaya*, 6(2), 119-140.
- Iskandar, S. (2009). Resolusi konflik etnik samawa dan etnik bali di sumbawa. *Populasi*, 20(1), 57-72.
- Jacky, 2015. Sosiologi Kosep, Teori dan Metode. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Jati, W. R. (2013). Kearifan lokal sebagai resolusi konflik keagamaan. *Walisongo: jurnal penelitian sosial keagamaan*, 21(2), 393-416.
- Jazuli, 2014. Sosiologi Seni. Yogyakarta:Graha Ilmu

- Juditha, C. (2015). Stereotip dan prasangka dalam konflik etnis tionghoa dan bugis makassar. *Jurnal ilmu komunikasi*, 12(1).
- Juoza Lakis. 2008. "Social conflicts and the culture of cooperation in transitional society". *Baltic Journal of Management*, 4(2): 206-220
- Karliani, E. (2016). Pembinaan masyarakat multikultural dalam meningkatkan integrasi bangsa. *Jurnal ilmiah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*, 24(2).
- Kasnawi, M. Tahir dan Asang, Sulaiman, 2014. Konsep dan Pendekatan Perubahan Sosial. Tengerang Selatan, Universitas Terbuka
- Kesuma, T. A. R. P., & ciciria, d. (2018). Pii pesenggiri: strategi resolusi konflik menggunakan nilai-nilai agama dan pancasila. *Jurnal masyarakat dan budaya*, 19(2), 237-252.
- Kistanto, N. H. (2008). Sistem sosial-budaya di indonesia. *Sabda: jurnal kajian kebudayaan*, 3(2).
- Koentjaraningrat, 1990. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Koentjaraningrat, 2009. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Kolopaking, I. M., Lubis, D. P., & Pattiselanno, A. E. (2007). Jejaring sosial dan resolusi konflik masyarakat di pedesaan (kasus di pulau saparua provinsi maluku). *Jurnal ilmu pertanian indonesia*, 12(3), 188-203.
- Kristanto, B. (2001). Proses terbentuknya heterogenitas etnis di pontianak pada abad ke-19. *Jurnal humaniora*, 13(1), 64-81.
- Kumbara, A. A., & anom, n. (2009). Pluralisme dan pendidikan multikultural di indonesia. *Dalam jurnal jantra*, 4(7), 531-539.
- Kusmayadi, Y. (2018). Eksistensi masyarakat etnik sunda di desa cimrutu kecamatan patimuan kabupaten cilacap. *Jurnal artefak*, 3(2), 161-172.
- Lampe, I. (2014). Identitas etnik dalam komunikasi politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(3).

- Lan, T. J. (2016). Heterogenitas orang keturunan cina (tionghoa) di indonesia dalam perspektif sosial-budaya. *Paradigma, jurnal kajian budaya*, 3(1), 42-53.
- Liliweri, 2014. Pengantar Studi Kebudayaan. Bandung:Nusa Media
- Lubis, 2015. Pemikiran Kritis Kontemporer, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Maharromiyati, M., & Suyahmo, S. (2016). Pewarisan nilai falsafah budaya lokal gusjigang sebagai modal sosial di pondok pesantren entrepreneur al mawaddah kodus. *Journal of educational social studies*, 5(2), 163-172.
- Mahfud, 2014. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Mahrudin, M. (2015). Integrasi sosial dan budaya antar suku pengembara laut dan masyarakat pesisir suku buton (studi kasus di kecamatan talaga raya kabupaten buton). *Al-izzah: jurnal hasil-hasil penelitian*, 8(1), 125-142.
- Mahrudin, M. (2015). Integrasi sosial dan budaya antar suku pengembara laut dan masyarakat pesisir suku buton (studi kasus di kecamatan talaga raya kabupaten buton). *Al-izzah: jurnal hasil-hasil penelitian*, 8(1), 125-142.
- Maill dkk, 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer (Menyelesaika, Mecegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Maksum, Ali, 2016. Sosiologi Pendidikan. Malang: Madani
- Martono, 2012. Kekerasan Simbolik di Sekolah (sebuah ide sosiologi pendidikan pierre Bourdieu, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Martono, Nanang, 2016. Sosiologi Perubahan Sosial persfektif Klasik, modern, Posmodern dan Poskolonial, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Miles, B.Mathew & Huberman Michael A. (1994). *Qualitative Data Analysis*, London:Sage Publications

- Murdianto, M. (2018). Stereotipe, Prasangka dan Resistensinya (Studi Kasus pada Etnis Madura dan Tionghoa di Indonesia). *QALAMUNA-Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 10(2), 137-160.
- Muyassaroh, N. L., & Juhadi, J. (2015). Pengaruh kondisi sosial budaya terhadap kerusakan lahan di das kreo kota semarang dan sekitarnya. *Geo-image*, 4(1).
- Najwan, J. (2009). Konflik antar budaya dan antar etnis di indonesia serta alternatif penyelesaiannya. *Jurnal hukum ius quia iustum*, 16.
- Narwoko & Suyanto, 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Narwoko & Suyanto, 2011. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Narwoko & Suyanto, 2013. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Nasdian F.T, 2015. *Sosiologi Umum*. Jakarta;Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Nashir, Haedar. 2016 “Suara muhammadiyah meneguhkan dan mencerdaskan (membangun martabat bangsa” Suara Muhamdiyah 13/101/1-15 Juli 2016)
- Nashir, Haedar. 2016. *Suara Muhammadiyah Membangun Martabat Bangsa*, Yogyakarta, Muhamadiyah Press
- Nasikun, 1986. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta;Andi offset
- Ngaffi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. *Jurnal pembangunan pendidikan: fondasi dan aplikasi*, 2(1).
- Oluseyi O. Fabiyi, Olufunmilayo E. Thontteh, Paul Borisade. 2012. “Spatial and Social Dimensions of Post Conflict Urban Reconstruction Programme in South Western Nigeria. The Case of Ile-Ife, Nigeria”. *Jurnal of Settlements and Spatial Planning*, 3(2): 163-174

- Patton Quinn Michael (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*, London:Sage Publications
- Pelly, U. (2014). Akar kerusuhan etnis di indonesia: suatu kajian awal konflik dan disintegrasi nasional di era reformasi. *Antropologi indonesia*.
- Permana, N. A. (2014). Revitalisasi lembaga adat dalam menyelesaikan konflik etnis menghadapi otonomi daerah: studi kasus pulau bangka. *Antropologi indonesia*.
- Peter Arthur. 2011. "Capacity Development and Reconstruction in Post-Conflict African Environments". *Jurnal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 2(3/4): 267-306
- Peter Harris dan Ben Reilly, 2000. *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. Depok Indonesia:Ameepro
- Philip Hancock. 2011. "The Spatial and Temporal Mediation of Social Change". *Jurnal of Organizational Change Management*, 19(5): 619-639
- Poerwanto, H. (1999). Asimilasi, Akulturasi, dan Integrasi Nasional. *Humaniora*, 11(3), 29-37.
- Poerwanto, H. (2005). Hubungan Antar Suku Bangsa Dan Golongan Serta Masalah Integrasi Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 10(2005).
- Pranadji, T. (2017, october). Penguatan kelembagaan gotong royong dalam perspektif sosio budaya bangsa: suatu upaya revitalisasi adat istiadat dalam penyelenggaraan pemerintahan. In *forum penelitian agro ekonomi* (vol. 27, no. 1, pp. 61-72).
- Pranata, R. H., & hartati, u. (2017). Interaksi sosial suku sunda dengan suku jawa (kajian akulturasi dan akomodasi di desa buko poso, kabupaten mesuji). *Swarnadwipa*, 1(3).

- Prathama, N. A. (2017). Negosiasi Identitas Dalam Rekonsiliasi Konflik Antaretnis (Kasus: Relasi Etnis Madura Dengan Etnis Dayak). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 110-119.
- Prathama, N. A., Rahardjo, t., & suprihatini, t. (2013). Akomodasi komunikasi dalam rekonsiliasi konflik antaretnis (kasus: relasi etnis madura dengan etnis dayak). *Interaksi online*, 1(3).
- Prayudi, P. Akar Masalah Penyebab Konflik Etnis Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 9(3), 39-59.
- Pruitt & Rubin, 2009. Teori Konflik Sosial, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Puruhita, A A., suyahmo, s., & atmaja, h. T. (2016). Perilaku sosial anak-anak jalanan di kota semarang. *Journal of educational social studies*, 5(2), 104-112.
- Puspitasari, N., wasino, w., & utomo, c. B. (2012). Pengembangan model pembelajaran ips berbasis multikultural. *Journal of educational social studies*, 1(2).
- Putra, R. (2012). Makna di balik teks dayak sebagai etnis headhunter. *Journal communication spectrum*, 1(2).
- Rachman, M. (2016). Pemberdayaan pendekatan pendidikan jalur sekolah dan luar sekolah. *Jurnal ilmu pendidikan*, 8(4).
- Rachman, M., Munandar, A., & Suhardiyanto, A. Padepokan karakter. *Model of karakter development*, 176-190.
- Retnowati, R. (2014). Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Integrasi Sosial Pasca Konflik, Situbondo). *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 21(2), 189-200.
- Ritonga, A. S., & bahri, s. (2017). Asimilasi budaya melayu terhadap budaya pendatang di kecamatan senapelan kota pekanbaru. *Jurnal online mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas riau*, 4(2), 1-15.
- Ritzer & Smart, 2014. Handbook Teori Sosial. Bandung;Nusa media

- Ritzer, George dan Goodman Douglas J, 2008. Teori Sosiologi Modern. Jakarta; Kencana
- Rochana, T. (2012). Orang madura: suatu tinjauan antropologis. *Humanus*, 11(1), 46-51.
- Romli, K. (2015). Akulturasi dan asimilasi dalam konteks interaksi antar etnik. *Ijtimaiyya: jurnal pengembangan masyarakat islam*, 8(1), 1-13.
- Romli, k. (2015). Akulturasi dan asimilasi dalam konteks interaksi antar etnik. *Ijtimaiyya: jurnal pengembangan masyarakat islam*, 8(1), 1-13.
- Rosidi, A. (2016). Integrasi Sosial Umat Beragama dalam Penyelesaian Konflik Bernuansa Agama di Kecamatan Kepil Wonosobo. *Harmoni*, 15(3), 20-32.
- Rozi, S. (2013). Konstruksi identitas agama dan budaya etnis minangkabau di daerah perbatasan: perubahan identitas dalam interaksi antaretnis di rao kabupaten pasaman sumatera barat. *Masyarakat indonesia*, 39(1), 215-245.
- Rozida, A. V. (2011). Pola Komunikasi Masyarakat Suku Nuhatan Sebagai Dampak Akulturasi Budaya. *Reformasi*, 1(1).
- Ruslan, I. (2018). Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Lampung Sebagai Media Resolusi Konflik. *KALAM*, 12(1), 105-126.
- Ruslikan. 2001. "Konflik Dayak-Madura Di Kalimantan Tengah: Melacak Akar Masalah Dan Tawaran Solusi". *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 14(4): 1-12
- Rustanto, Bambang, 2015. Masyarakat Multikultural di Indonesia. Bandung Remaja Rosdakarya
- S Pettalongi, S. (2013). Islam dan pendidikan humanis dalam resolusi konflik sosial. *Cakrawala pendidikan*, (2).
- Sadjim, U. M., Muhadjir, N., & Sudarsono, F. X. (2016). Revitalisasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika dan Kearifan Lokal berbasis Learning

- Society Pascakonflik Sosial di Ternate. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 4(1), 79-91.
- Salam, A. J. (2014). Jejak integrasi indonesia dari kilometer nol: melacak akar budaya nasional bangsa. *Legitimasi: jurnal hukum pidana dan politik islam*, 3(1).
- Saleh, S. (2017). Cinta Damai Upaya Meminimalisir Konflik dalam Masyarakat. *AL-Fikr*, 14(3), 391-398.
- Santosa, B. A. (2017). Peran Media Massa dalam Konflik di Indonesia: Sebuah Alternatif Solusi?. *Jurnal Komunikasi Islam*, 6(2), 67-89.
- Sartini, S. (2004). Menggali kearifan lokal nusantara: sebuah kajian filsafati. *Jurnal filsafat*, 14(2), 111-120.
- Sastrapratedja, M. (1996). Filsafat pancasila dalam kehidupan budaya bangsa. *Jurnal filsafat*, 1(1), 23-30.
- Satya, M. S. (2016). Strategi masyarakat etnis tionghoa dan melayu bangka dalam membangun interaksi sosial untuk memperkuat kesatuan bangsa. *Jurnal pendidikan ilmu sosial*, 25(1), 110-23.
- Setiadi & Kolip, 2011. Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya). Jakarta Prenada Media Group
- Setyaningrum, D., Astuti, T. M. P., & Alimi, M. Y. (2017). Pergeseran nilai masyarakat samin (sedulur sikep) dukuh bombong. *Journal of educational social studies*, 6(1), 29-36.
- Setyawati, Ira. "peran komunikasi massa dalam perubahan budaya dan perilaku masyarakat." *fokus ekonomi*, 2 (3) (2008).
- Sikwan, A. (2017). Dinamika interaksi antaretnik dalam mewujudkan keserasian sosial di wilayah perbatasan negara indonesia-malaysia. *Jurnal sosial humaniora*, 10(2), 71-97.
- Singarimbun, M. (1991). Beberapa aspek kehidupan masyarakat dayak. *Humaniora*, (3).

- Soekanto & Sulisyowati, 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Soemardjan, Selo, 2009. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Jakarta Komunitas Bambu
- Soetomo, 2013. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Stefania Kalogeraki. 2012. "Migrant-Related Attitudes And Perceived Ethnic Threats Between In-Groups And Out-Groups The cases of Greece and Sweden". *Jurnal Of Migration Research*, 2(3): 243–253
- Stephen M. Croucher, Kyle J. Holody, Manda V. Hicks and Deepa Oommen, Alfred De Maris. 2011. "An Examination of Conflict Style Preferences in India". *Jurnal of Conflict Management*, 22(1): 10-34
- Sulistiati, 2001. *Model Pendekatan Terpadu untuk Memecahkan Masalah Anak Rawan: studi pengembangan model implentasi IPS di Masyarakat:Disertasi UPI Bandung*
- Sulistyaningsih, E. (2012). Birokrasi dan potensi konflik di indonesia. *Jurnal kebijakan publik*, 1(2)
- Suratman, Y. P. (2017). Taksonomi Konflik-Konflik Internal Di Indonesia Sebagai Potensi Perang Proxy (Taxonomy Of Internal Conflicts That Leads Into Proxy War In Indonesia). *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(1).
- Suryana & Rusdiana, 2015. *Pendidikan Multikultural (suatu upaya penguatan jati diri bangsa)* Bandung: Pustaka Setia
- Suryanegara, E., & Nahib, I. (2015). *Perubahan Sosial Pada Kehidupan Suku Bajo: Studi Kasus Di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Majalah Ilmiah Globe*, 17(1), 67-78.
- Susan, Novri, 2014. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta Prenada Media Grup

- Susanto, E. S. E. (2012). Kepemimpinan [kharismatik] kyai dalam perspektif masyarakat madura. *Karsa: journal of social and islamic culture*, 11(1), 30-40.
- Suwardani, N. P. (2015). Pewarisan nilai-nilai kearifan lokal untuk memproteksi masyarakat bali dari dampak negatif globalisasi. *Journal of bali studies*, 5(2).
- Suyahmo, S., & Munandar, M. A. (2017). Solusi permasalahan proses demokrasi di indonesia modern melalui peningkatan kemampuan musyawarah sejak dini. *Integralistik*, 28(2), 202-216.
- Sztompka, Piotr, 2014. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta;Prenada Media Grup
- Tilaar, 2004. Multikulturalisme (Tantangan-tantangan global masa depan dalam tranformasi pendidikan nasional), Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Towaf, S. M. (2014). Pendidikan karakter pada matapelajaran ilmu pengetahuan sosial. *Jurnal ilmu pendidikan universitas negeri malang*, 20(1).
- Tripambudi, S. (2014). Interaksi simbolik antaretnik di yogyakarta. *Jurnal ilmu komunikasi*, 10(3).
- Tuhuteru, I. (2018, october). Membina sikap masyarkat dan nilai-nilai demokrasi pasca konflik sosial ambon. In *seminar nasional call for paper & pengabdian masyarakat* (vol. 1, no. 01)
- Turner, 2012. Teori Sosial dan Klasik Sampai Postmodern. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Turner, Jonathan H, 1988. A Theory of Social Interaction. California: Stanford University Press Stanford
- Ulum, R. (2013). Prospek pembangunan masyarakat pasca konflik sambas. *Analisa: journal of social science and religion*, 20(1), 25-36.

- Umar, A. (2017). Komunikasi Antar Budaya Rumpun Bugis Enrekang Dan Suku Bugis Dalam Interaksi Sosial Budaya (Desa Polenga Kabupaten Kolaka). *Journal Ilmu Komunikasi Uho*, 2(1).
- Unwanullah, A. (2012). Tranformasi Pendidikan untuk Mengatasi Konflik Masyarakat dalam Perspektif Multikultural. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 1(1).
- Usman, Sunyoto, 2015. Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Varhney, Ashutosh, 2009. Konflik Etnis dan Peran Masyarakat Sipil Pengalaman India, Jakarta, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
- Vebrynda, R. (2015). Persepsi Antarbudaya sebagai inti Komunikasi Lintas Budaya (Studi Kasus mengenai Mahasiswa Indonesia di India). *Jurnal Komunikator*, 7(2).
- Vicente Martinez-Tur, Vicente Penarroja, Miguel A. Serrano, Vanesa Hidalgo, Carolina Moliner¹, Alicia Salvador, Adria'n Alacreu-Crespo, Esther Gracia¹, Agustin Molina. 2014. "Intergroup Conflict and Rational Decision Making". *Jurnal Intergroup Conflict and Rational Decision Making Plos One*, 9(12): 1-17
- Wahid & Iyas, 2004. Berdamai dengan Sejarah Panduan Praktis Mengelola Konflik, Yogyakarta:Alenia Prees
- Wahyu, 2014. Fenomena Sosial Perspektif Sosiologi, Yogyakarta, CV. Aswaja Pressindo
- Wasino, 2006. Wong Jowo dan Wong Cino (Lika liku hubungan sosial antara etnis jawa di solo tahun 1911-1998) Semarang, Unnes Press
- Wasino, 2014. Modernisasi di jantung budaya jawa mangkunegaraan 1896-1944, jakarta, kompas
- Wasino, W. (2013). Indonesia: from pluralism to multiculturalism. *Paramita: historical studies journal*, 23(2).

- Wasino, W. (2016). Modernisasi budaya politik mangkunegaran. *Jurnal sejarah dan budaya*, 9(2), 257-263.
- Wekke, I. S. (2017). Islam dan adat: tinjauan akulturasi budaya dan agama dalam masyarakat bugis. *Analisis: jurnal studi keislaman*, 13(1), 27-56.
- Wibowo, H. A., wasino, w., & setyowati, d. L. (2012). Kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup (studi kasus masyarakat di desa colo kecamatan dawu kabupaten kudu). *Journal of educational social studies*, 1(1).
- Widyanto, A. B. (2010). Pemuda dalam perubahan sosial. *Jurnal historia vitae*, 24(2), 1-10.
- Wirawan, 2013. Teori-Teori Sosial dalam Tia Paradigma, Jakarta:Kencana Prenada Media
- Y. Yasmi, C.J.P. Colfer L. Yuliani, Y. Indriatmoko and V. Heri. 2007. "Conflict Management Approaches Under Unclear Boundaries Of The Commons: Experiences From Danau Sentarum National Park, Indonesia". *Jurnal Conflict Management Under Unclear Boundaries*, 9(2): 597-609
- Yasir Alimi, M. (2012). Video etnografi: pengalaman penelitian sosial dengan video kamera di sulawesi selatan. *Komunitas: international journal of indonesian society and culture*, 4(1).
- Yasir Alimi, M. Tubuh, ilmu sosial dan ruang publik masyarakat muslim. In *forum ilmu sosial* (vol. 38, no. 1). State university of semarang.
- Yunus, R. (2016). Transformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai upaya pembangunan karakter bangsa. *Jurnal penelitian pendidikan*, 13(1).
- Zeric Kay Smith. 2000. "The Impact Of Political Liberalisation And Democratisation on Ethnic Conflict In Africa: an Empirical Test Of Common Assumptions". *Jurnal of Modern African Studies*, 38(1): 21-39

- Zuber, A., & Haryono, B. (2018). Conflict Resolution Between of Renda Villagers and Ngali, Belo Subdistrict, Bima Regency of The Province of West Nusa Tenggara (NTB). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2).
- Zulfikar, Ulil Multazam, Wahab Hasbullah, 2014. “ Viewpoint of Religious Conflict Based on The Conflict Vulnerable Index In Indonesia Underdeveloped Areas”. *Jurnal of Science and Technology*, 3(4): 9-21



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PASCASARJANA

Gedung A, Kampus Pascasarjana, Jl. Kelud Utara III, Semarang 50237
Telepon +6224-8440516, 8449017, Faksimile +6224-8449969
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>, surel: pps@mail.unnes.ac.id

Nomor : 8564/UN37.2/LT/2017
Hal : Izin Penelitian

31 Juli 2017

Yth. Bupati Kotawaringin Timur
Sampit Kotawaringin Timur

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Didi Susanto
NIM : 0301614001
Program Studi : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3
Semester : Genap
Tahun akademik : 2016/2017
Judul : Interaksi dan Perubahan Sosial Pasca Konflik di Sampit Kalimantan Tengah (Kasus Kerusuhan Antar Suku Dayak dan Suku Madura)

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian disertasi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 1 Agustus 2017 s.d 30 Agustus 2018.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Wakil Direktur Pascasarjana
Wakil Direktur Bid. Akademik dan
Kemahasiswaan Pascasarjana,

Prof. Dr. rer. nat. Wahyu Hardyanto, M.Si.
NIP. 196011241984031002

Tembusan:
Direktur Pascasarjana;
Universitas Negeri Semarang



Nomor Agenda Surat : 825 184 138 6

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2017-07-31 14:08:07)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PASCASARJANA

Gedung A, Kampus Pascasarjana, Jl. Kelud Utara III, Semarang 50237
Telepon +6224-8440516, 8449017, Faksimile +6224-8449969
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>, surel: pps@mail.unnes.ac.id

Nomor : 8560/UN37.2/LT/2017
Hal : Izin Penelitian

31 Juli 2017

Yth. Ketua Dewan Adat Dayak Se-Kecamatan Kotawaringin Timur
Sampit Kotawaringin Timur

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Didi Susanto
NIM : 0301614001
Program Studi : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3
Semester : Genap
Tahun akademik : 2016/2017
Judul : Interaksi dan Perubahan Sosial Pasca Konflik di Sampit Kalimantan
Tengah (Kasus Kerusakan Antar Suku Dayak dan Suku Madura)

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian disertasi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 1 Agustus 2017 s.d 30 Agustus 2018.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Pascasarjana
Wakil Direktur Bid. Akademik dan
Kemahasiswaan Pascasarjana,



Prof. Dr. rer.nat. Wahyu Hardyanto, M.Si.
NIP 196011241984031002

Tembusan:
Direktur Pascasarjana;
Universitas Negeri Semarang





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. ☎(0531) 21093 Fax 24101
SAMPIT

REKOMENDASI

NOMOR : 702/77/Adm

Menindak lanjuti Surat Dari Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Prof. Dr.rer.nat. Wahyu Hardyanto, M.Si nomor: 8559/UN37.2/LT/2017 tanggal 31 Juli 2017 Perihal tentang Izin Penelitian.

Sehubungan hal tersebut pada prinsipnya menyetujui / tidak keberatan memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : DIDI SUSANTO
NIM : 0301614001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang
Program Studi : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3
Judul Proposal : **INTERAKSI DAN PERUBAHAN SOSIAL PASCA KONFLIK DI SAMPIT KALIMANTAN TENGAH (KASUS KERUSUHAN ANTAR SUKU DAYAK DAN SUKU MADURA)**
Lokasi Penelitian : Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur
Lama Penelitian : 01 Agustus 2017 s.d 30 Agustus 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama melaksanakan kegiatan agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban
2. Melaporkan kehadirannya kepada pimpinan Wilayah
3. Melaporkan kembali setelah selesai melakukan penelitian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sampit
Pada tanggal 22 Agustus 2017

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Timur,

Drs. H. KASPUL BAHRI, MT.M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19581128 198603 1008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
2. BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
4. Arsip



KELEMBAGAAN ADAT DAYAK KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DEWAN ADAT DAYAK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Telp. 0531 – 31089 Email : dadkotim@yahoo.co.id
SAMPIT

Sampit, 22 Agustus 2017

Nomor : 143/DAD-KOTIM/DUMP/VIII/2017
Lampiran : -
Perihal : Dispensasi Untuk Melaksanakan Penelitian

Kepada

- Yth : 1. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Cempaga
2. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Kota Besi
3. Damang Kepala Adat Kecamatan Baamang
4. Damang Kepala Adat Kecamatan MB. Ketapang

ADIL KA'TALINO, BACURAMIN KA'SURAGA, BASENGAT KA'JUBATA

Menindaklanjuti Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Nomor : 8561/UN37.2/LT/2017 tanggal 31 Juli 2017 dengan perihal Izin Penelitian kepada saudara :

Nama : **DEDI SUSANTO**
NIM : 0301614001
Program Studi : Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, S3
Semester : Genap
Tahun Akademik : 2016/2017
Judul Penelitian/Disertasi : Interaksi dan Perubahan Sosial Pasca Konplik di Sampit Kalimantan Tengah (Kasus Kerusakan Antar Suku Dayak dan Suku Madura).

Bersama ini kami berikan izin kepada Mahasiswa Program Pascasarjana (S3) tersebut untuk melakukan Penelitian kepada saudara DAD dan Damang tersebut diatas dalam rangka Penyusunan Disertasinya untuk menyelesaikan Pendidikannya Pada Universitas Negeri Semarang.

Mohon yang bersangkutan dapat dilayani dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

DEWAN ADAT DAYAK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Wakil Ketua,


Ds. UNTUNG.TR, M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah di-Palangka Raya
2. Arsip

Lampiran 4

Informan utama dan Informan Pendukung Penelitian

1. Informan Utama Penelitian

No	Nama	Jabatan	Usia	Pekerjaan	Suku
1		Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringtimur	66 Tahun	Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringtimur	Dayak
2	Drs. Untung, M.Pd	Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur	65 Tahun	Pensiunan Guru	Dayak
3	M. Pungkau Canang	Wakil DAD	50 Tahun	Karyawan Swasta	Dayak
4	Cumbi Anwar	Wakil Ketua Harian DAD Kotawaringin Timur	55 Tahun	Karyawan Swasta	Dayak
5	Anang Nur Ali	Damang Dayak Kecamatan Ketapang	56 Tahun	Karyawan Swasta	Dayak
6	Idar	Damang Dayak Kecamatan Kobtabesi	55 Tahun	Petani	Dayak
7	Drs, Abdul Wahid, MM	Ketua Forum Komunikasi Korban Kerusakan kalimantan Tengah (FK-4)	65 Tahun	Mantan Anggota DPRD	Madura
8	H. Hadriansyah	Kepala Desa Bajarum	50 Tahun	Kepala Desa Bajarum	Madura

2. Informan Pendukung Penelitian

No	Nama	Jabatan	Usia	Pekerjaan	Suku
1	Ahmad	-	67	Petani	Dayak
2	Rahmad	Ketua RT Desa Bajarum	39	Pengusaha	Dayak
3	Mohamamd	Ketua RT Pelalangan	52	Karyawan Swasta	Banjar
4	H. Madin	-	65	Petani	Madura
5	Mat Mosel	-	45	Petani	Madura
6	Syamsul Arifin	-	49	Petani	Madura
7	M Yudi	Ketua RT	49	Petani	Madura
8	Nurhayati	-	42	Pedagang	Madura
9	Abdurahman	-	45	Penghulu	Madura

Lampiran 5

Jadwal Wawancara

No	Hari/Tanggal	Nama	Status
1	26 Agustus 2017	Drs. Untung, M.Pd	Informan Utama
2	4 September 2017	M. Pungkau Canang	Informan Utama
3	12 September 2017	Cumbi Anwar	Informan Utama
4	21 September 2017	Anang Nur Ali	Informan Utama
5	23 September 2017	Amang Idar	Informan Utama
6	26 September dan 1 Oktober 2017	Drs, Abdul Wahid, MM	Informan Utama
7	3 Oktober 2017	H. Hadriansyah	Informan Utama
8	28 Oktober 2017	Drs. M. Taufik Mukri, SH.MM (Wakil Bupati Kotim)	Informan Utama
9	22 Oktober 2017	Ahmad	Informan Pendukung
10	22 Oktober 2017	Rahmad	Informan Pendukung
11	28 Oktober 2017	Mohamamd	Informan Pendukung
12	29 Oktober 2017	H. Madin	Informan Pendukung
13	5 Nopember 2017	Mat Mosel	Informan Pendukung
14	5 Nopember 2017	Nurhayati	Informan Pendukung
15	10 Nopember 2017	Syamsul Arifin	Informan Pendukung
16	15 Nopember 2017	M Yudi	Informan Pendukung
17	26 Nopember 2017	Abdurahman	Informan Pendukung

Lampiran 6

PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR
 INTERAKSI DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA PASCA KONFLIK
 ANTAR SUKU DI SAMPIT KALIMANTAN TENGAH
 (KASUS KERUSUKAN ANTARA SUKU DAYAK DAN SUKU MADURA)

Indikator	Sub Indikator
A. Bentuk interaksi sosial antara suku Dayak dan suku Madura pasca konflik antar suku di Sampit Kalimantan Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses interaksi antara suku dayak dan suku Madura pasca konflik di Sampit? 2. Bagaimana proses kontak sosial antara suku Dayak dan suku Madura baik Individu-dengan Individu maupun Individu dan kelompok masyarakat di Sampit ? 3. Faktor seperti apa yang mempengaruhi interaksi antara suku dayak dan suku Madura pasca konflik di Sampit? 4. Sejauhmana perubahan interaksi suku Dayak dan Madura sebelum konflik dan sesudah konflik di Sampit? 5. Dampak apa saja yang muncul dengan adanya interaksi antara suku Dayak dan Madura pasca konflik di Sampit? 6. Apakah dalam proses interaksi baik suku Dayak dan Madura masih menyimpan trauma atau beban psikologis yang mempengaruhi dalam hubungan sosial di Masyarakat?
B. Proses sosial dan faktor apa saja yang mempengaruhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Proses sosial antara suku Dayak dan suku Madura di Sampit?

<p>interaksi sosial pasca konflik antar suku Dayak dan suku Madura di Sampit Kalimantan Tengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Apa yang mendorong proses interaksi sosial antara suku Dayak dan suku Madura di Sampit? 3. Bagaimana pola interaksi antara suku Dayak dan suku Madura pada kehidupan sosial di Sampit? 4. Faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi sosial antara suku Dayak dan suku Madura pada kehidupan sosial di Sampit? 5. Dalam proses kehidupan sosial masyarakat apakah persaingan dan kompetisi antara suku Dayak dan suku Madura masih sering terjadi? 6. Bagaimana Proses akomodasi warga suku Dayak terhadap warga suku Madura pasc konflik di Sampit? 7. Bagaimana Proses akulturasi antara suku Dayak dan suku Madura pasca Konflik di Sampit? 8. Bagaimana Proses asimilasi antara suku Dayak dan suku Madura pasca Konflik di Sampit? 9. Apakah dalam proses interaksi dan kontak sosial di dalam lingkungan masyarakat di Sampit antara suku Dayak dan Madura masih sering terjadi benturan? 10. Upaya seperti apa yang dilakukan dalam menjaga keharmonisan antara suku Dayak dan Madura pasca konflik di Sampit?
<p>C. Pola Edukasi yang dilakukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha seperti apa yang dilakukan

<p>pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan pasca konflik antara suku dayak dan suku Madura di Sampit Kalimantan Tengah</p>	<p>pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengurangi potensi konflik?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Seperti apa Peran Pemerintah daerah dan Masyarakat dalam memberikan edukasi bagi korban konflik di Sampit? 3. Seperti apa peran Dewan Adat Dayak pasca konflik di Sampit? 4. Apakah ada dampak dan pengaruh yang muncul dari proses pembinaan masyarakat pasca konflik di Sampit
<p>D. Perubahan sosial budaya masyarakat pasca konflik antara suku dayak dan suku Madura di Sampit kalimantan tengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasca konflik perubahan seperti apa yang muncul pada warga suku Dayak dan suku Madura di Sampit? 2. Sejauh mana perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial suku Dayak dan suku Madura pasca konflik di Sampit? 3. Berapa lama perubahan sosial terjadi dalam kehidupan sosial suku Dayak dan Madura pasca konflik di Sampit? 4. Apa penyebab perubahan tersebut terjadi dalam kehidupan suku Dayak dan suku Madura di Sampit 5. Dampak dari perubahan sosial dalam kehidupan sosial suku Dayak dan Madura di Sampit?

Lampiran 7

Transkrip Wawancara dengan Drs. Untung, MM

Tempat : Kantor Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur

Waktu : Sabtu, 26 Agustus 2017

Pasca konflik antara suku Dayak dan suku Madura pada tahun 2001, dan setelah kembalinya warga suku Madura antara tahun 2003, 2014 dan sampai dengan 2017 sekarang ini, permasalahan konflik ternyata belum juga selesai, walaupun perjanjian damai serta Peraturan Daerah (Perda) tentang penanganan korban konflik Sampit sudah sejak lama di sosialisasikan tetapi hampir belum mampu untuk mengembalikan suasana di Sampit benar-benar kondusif dan menghilangkan treotif yang ada di masyarakat.

Kejadian pencurian dan pembunuhan yang terjadi di desa Samuda dan Kecamatan Baamang pada tahun 2016 yang membuat salah satu dari warga suku Dayak terluka serta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh oknum dari warga suku Madura kembali membuat hubungan dan interaksi sosial antara warga suku Dayak dan suku Madura mengalami kemunduran, dan kejadian tersebut mengundang perhatian seluruh warga suku Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Kemudian kejadian pada tahun yang sama yakni 2016, terjadi pada kecamatan Baamang juga membuat warga seluruh wilayah Kotawaringin Timur sudah sebagian melakukan pergerakan masa, karena yang terbunuh adalah warga asli suku Dayak dan juga orang tua dari korban adalah merupakan tokoh dari suku Dayak sehingga pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan sosial di Sampit. Penyelesaian masalahnya memang tidak dilakukan sidang adat tetapi penyelesaiannya dilakukan dengan prosedur adat dayak, disepakati pelaku akan memberikan santunan kepada keluarga korban dan seluruh warga suku madura di Kotawaringin timur harus bersama-sama mengumpulkan santunan sebagai efek jera dan pada 29 September 2016 santunan telah diserahkan pada pihak keluarga korban dan tertutuplah keran yang menjadi pemicu terjadinya konflik antar suku Dayak dan suku Madura.

Dewan Adat Dayak berusaha meredam agar kejadian tersebut tidak meruncing dan meluas sehingga akhirnya muncul kesepakatan damai dan disepakati juga bahwa kejadian tersebut murni tindak kriminal, dan pelaku diserahkan ke pihak berwajib untuk di proses hukum, selain proses hukum pada tingkat kecamatan diselesaikan dengan cara pesta adat berupa pesta perdamaian antara para tokoh Dayak dan tokoh Madura. Pada tingkat pemerintah daerah Kotawaringin Timur ada naskah perdamaian yang masing-masing di tanda tangani

oleh 5 orang dari tokoh suku dayak di yang oleh ketua Dewan Adat Dayak Kotawaringin Timur dan 5 orang tokoh dari suku madura yang disaksikan oleh Bupati beserta wakil bupati, Dandim dan Kapolres kotawaringin Timur.

Mengenai komunikasi dan interkasi antara suku dayak dan suku madura sampai saat ini memang dirasakan belum normal, hal tersebut tentu saja berbeda ketika antara 2 tahun pertama sampai dengan 3 tahun pasca konflik serta kembalinya warga suku madura dari pengungsian yang melahirkan Peraturan Daerah (PERDA) Kotawaringin Timut Nomor 5 Tahun 2004 mengenai penanganan korban konflik.

Dewan Adat Dayak akan terus menerus melakukan sosialisasi agar mengingatkan kembali dan memberikan pendidikan kepada keluarga besar madura yang ada di Kabupaten kotawaringin Timur tentang sejarah kelim konflik antar suku jangan sampai terulang kembali, mengingatkan bahwa sejarah kelim konflik harus benar menjadi pelajaran berharga sehingga kedepan tidak ada lagi konflik yang dapat menghancurkan kerukunan antara suku di Sampit Kotawaringin Timur.

Menurut tokoh suku dayak perdamaian adalah merupakan harga mati tidak boleh terulang, konflik pada tahun 2001 adalah untuk yang pertama dan yang terakhir adalah suatu kewajiban semua usur untuk terus menerus menjaga dan menjunjung tinggi kesepakatan damai, tetapi tokoh dayak menilai bahwa dari warga suku madura seringkali yang pertama kali melakukan pelanggaran, tidak mematuhi perda, kesepakatan damai serta perjanjian damai, oleh sebab maka seringkali menjadi pemicu dan membuat keresahan di masyarakat.

Tokoh dayak menilai sampai saat ini 15 tahun pasca konflik, orang madura masih saya belum mampu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan masa lalu mereka yang dianggap berperilaku kurang sopan dan beradab, sebagai masih menggunakan egonya dan belum bisa membawa diri untuk berinterkasi dengan warga suku dayak dan suku lainnya, sehingga untuk berinterasi seringkali belum dapat diterima oleh suku Dayak dan juga suku lain yang ada di Sampit Kotawaringin Timur. Tokoh suku Dayak juga sangat berkeyakinan bahwa antara suku Dayak, suku Jawa, Batak, dan Etnis Tionghoa tidak menginginkan konflik kembali terjadi, tetapi melihat sikap, tingkah laku, tutur kata, dan perangai sebagai dari warga suku madura yang kurang baik sehingga potensi dan ancaman konflik dirasakan masih saja ada.

Kebiasaan membunuh sebagian dari warga suku madura jika ada terjadi masalah perkelahian dengan suku-suku lainya di Sampit harus dihilangkan dan harus dirubah, seringkali dikarenakan hal yang sangat kecil saja dengan

mudahnya menghilangkan nyawa, akibat hal yang demikian interaksi tidak baik dan kurang harmonis.

Tingginya kecurigaan para tokoh dayak bahwa yang menjadi biang masalah pasca konflik justru dari pihak suku madura menginggit seringkali yang terlibat masalah pengedaran obat-obat terlarang dan tindak kejahatan lainnya bersumber dari warga Suku Madura hal tersebut juga menjadi salah satu pemicu konflik.

Para tokoh Dayak di Kotawaringin Timur melalui Dewan Adat Dayak sampai saat ini belum bisa menerima dan menyetujui serta memberikan ijin adanya usulan dari warga suku madura yang menginginkan di dirikannya organisasi Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) di Sampit, karena para tokoh Dayak mengkhawatirkan justru akan kembali menyulut luka lama. Tetapi para tokoh Dayak melalui Dewan Adat dayak akan memberikan ijin pada warga suku Madura yang belakangan mendesak adanya organisasi yang diakui sebagai tempat mengadu dengan alasan jika adanya organisasi IKAMA orang madura menjadi merasa terwakili dan ada yang di hormati jika ada struktur organisasi yang jelas.

Para tokoh Dayak terus berkoordinasi atas adanya permohonan tersebut justru bukan organisasi IKAMA yang disetujui tetapi hanya dewan kehormatan suku Madura saja yang dibentuk sehingga fokus pada pembinaan etika pada warga suku Madura yang ada di Kotawaringin Timur.

Permasalahan baru yang muncul justru adanya warga Madura pendatang yang berada di Sampit tidak mentaati aturan yang berlaku di Sampit dan tidak melaporkan diri mereka sehingga karena banyak warga suku madura yang datang adalah bukan mereka yang dulu merupakan korban konflik tetapi memang warga suku madura yang baru merantau ke Sampit Kotawaringin Timur sehingga menurut warga suku dayak dianggap tidak kurang memahami budaya dan tidak memiliki beradab bagaimana sebagai warga pendatang seharusnya.

Transkrip Wawancara dengan M. Pungkau Canang

Tempat : Kantor Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur

Waktu : Senin, 4 September 2017

Para tokoh dewan adat dayak menginginkan adanya kendali terhadap siapa saja warga pendatang, dengan memberlakukan kartu kendali sehingga bagi siapa saja perantau akan didata kalau memenag berbaksud mencari pekerjaan akan diberikan waktu 3 sampai dengan 6 bulan, tetapi jika dalam batas waktu tersebut belum mendapat pekerjaan maka dengan terpaksa akan dikembalikan ketempat dari mana mereka berasal sebagai usaha menghindari konflik

Orang suku dayak sudah tidak lagi memperlmasalahkan konflik masa lalu dan sudah tidak lagi pemikiran untuk berkonflik, tetapi justru orang suku madura yang masih tertutup dan berusaha menjaga dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang dayak. Para tokoh dayak melalui dewan adat dayak kotawaringin timur menginginkan bahwa kepala desa atau lurah harus berasal dari warga suku dayak.

Pasca konflik banyaknya laporan tentang warga suku madura yang tinggal masih berkelompok serta eksklusif kepada Dewan adat dayak sehingga dewan adat menilai bahwa hal tersebut merupakan tindakan pembiaran dari pihak yang berwenang terhadap warga suku madura yang tinggal berkelompok dan eksklusif tersebut tentu juga salah satu pemicu konflik karena dewan adat menilai bahwa itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan daerah sehingga dikhawatirkan ada yang melakukan tindakan.

Pada peraturan daerah telah dengan jelas menjelaskan bahwa warga madura yang kembali ke Sampit dari pengungsian tidak boleh lagi tinggal berkelompok tetapi harus menyebar dan beradaptasi ke seluruh kabupaten kotawaringin timur.

Pihak yang berkewajiban menjalankan peraturan daerah masih belum mampu melaksanakannya dengan benar, sehingga masih lemah dalam pelaksanaan perda sehingga sampai saat ini pentunjuk teknis dan siapa yang harus melaksanakan perda juga belum jelas sehingga menurut dewan adat Dayak menyatakan siap membantu pemerintah daerah untuk menjalankan perda tersebut.

Penyebab kurang harmonisnya hubungan masyarakat suku dayak dan masyarakat suku madura adalah karena banyaknya laporan pada dewan adat dayak tentang kesan negatif oknum dari suku madura yang sebagian merupakan pengedar obat-obat terlarang sehingga *image* sangat mempengaruhi hubungan di masyarakat disebabkan pada ketidakpercayaan sehingga muncul potensi masalah baru. Dewan adat dayak jika mendapat laporan masyarakat bahwa keberadaan

warga suku madura membuat resah dan masyarakat tidak tenang maka akan ada tindakan lanjuti laporan tersebut menghindari konflik berkepanjangan

Hubungan masyarakat suku dayak dengan suku banjar, suku jawa, suku batak dan china di Sampit hampir tidak pernah terjadi konflik penyebabnya menurut dewan adat dayak adalah karena faktor persamaan dan kesepahaman budaya, tidak adanya kecurigaan sehingga hubungan interaksi serta komunikasi serta kekeluargaan yang berjalan di masyarakat sangat erak dan penuh rasa kekeluargaan.

Upaya masyarakat suku dayak melalui dewan adat dayak selalu berusaha untuk menjaga keharmonisan sangat jelas dengan sosialisasi dilingkungan masyarakat salah satu ungkapan “petak danum hayun itah” juga merupakan upaya menjaga keharmonisan karena suku dayak berusaha dan mencoba menjadi tuan rumah yang baik bagi warga pendatang.

Suku dayak pada dasarnya bukan suku yang pendendam mereka terikat pada hukum adat dayak sehingga jika terjadi konflik sementara sudah di lakukan proses kesepakatan damai maka suku dayak akan sepenuh hati mengikutinya. Tetapi jika dari warga suku madura karena tingkat pendidikan mereka sebagai masih rendah sehingga kekerasan seringkali menjadi jalan terakhir.

Ketika muncul masalah yang melibatkan antara warga suku Dayak dan suku madura yang memiliki inisiatif untuk penyelesaian masalah justru adalah orang dayak, sebagai besar warga madura tidak berani untuk melakukan tindakan pencegahan ada kemungkinan disebabkan oleh rasa trauma mendalam. Potensi konflik masih ada jika melihat fakta bahwa banyaknya laporan pada dewan adat dayak kotawaringin timur dengan masih adanya warga suku madura yang bersengketa lahan dengan orang dayak sampai saat ini masih belum selesai sehingga potensikonflik masih sangat tinggi.

Dewan adat dayak memandang warga suku madura seringkali melanggar perjanjian damai, contohnya ketika waktu memelihara ternak dalam hal ini sapi di wilayah pemukiman warga suku Dayak sehingga ini seringkali mendapat penolakan dan protes dari warga karena merasa terganggu dengan pencemaran udara akibat dari memelihara ternah tersebut.

Transkrip Wawancara dengan Anang Nur Ali

Tempat : Kantor Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur

Waktu : Kamis, 21 September 2017

Pada kecamatan ketapang warga madura yang kembali pasca konflik tersebut di daerah Sawahan, Telaga, Pasar Sampit tetapi masih banyak yang menggunakan budaya. Sebagian besar warga suku Madura pasca konflik, sudah berusaha menyesuaikan diri dan mencoba menyatu serta membaur dengan warga Suku Dayak dan Suku-Suku lainnya yang ada di kecamatan ketapang, dulu sebelum konflik menurut tokoh Dewan Adat Dayak Kecamatan Ketapang warga suku madura sama sekali tidak mau menghadiri setiap kegiatan yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka.

Perasaan sebagai warga pendatang dan merupakan suku minoritas harus selalu di tekankan pada jiwa orang Madura sehingga tidak ada persaan. Namun pada beberapa daerah dimana penduduk warga suku Madura merupakan mayoritas mereka pada kenyataannya masih saja membawa dan menonjolkan budayanya masing-masing. Untuk menghilangkan rasa trauma seharusnya warga suku madura harus mampu berasimilasi dan berakulturasi dengan budaya dari warga suku dayak. Perubahan sosial masyarakat pada bidang perekonomian pada kenyataannya tidak banyak berubah, warga suku madura masih mendominasi kegiatan perdagangan

Transkrip Wawancara dengan Amang Idar

Tempat : Kantor Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur

Waktu : Sabtu, 23 September 2017

Perkembangan warga madura korban konflik yang ada di kecamatan kotabesi sudah bisa menyatu dengan warga suku lainya, baik dari warga suku dayak, suku jawa, suku banjar dan suku bugis serta suku lainya yang ada di kecamatan Kotabesi.

Hubungan sosial warga madura yang ada di kotabesi sebelum dan sesudah konflik tidak jauh berbeda, dulu ketika pecah konflik antar suku, barang-barang yang dimiliki oleh warga suku madura banyak yang dititipkan pada tetangga yang merupakan warga suku dayak yang ada di kotabesi, ketika warga suku madura di pengungsian ada yang meminta harta benda yang ditinggalkan dijual, justru warga suku dayak yang dengan sikarela untuk membantu menjual dan dananya diserahkan ketika warga madura berada di pengungsian, begitu juga ketika warga suku madura kembali dari pengungsian seluruh barang yang dulu dititikan seluruhnya di kembalikan kembali pada warga suku madura.

Kehidupan warga madura yang ada di Kecamatan Kotabesi sudah hidup berdampingan seperti semula dan hubungan justru semakin baik, karena masyarakat suku dayak di Kecamatan Kotabesi menyadari bahwa sebagian orang suku madura hanya terkena imbas dari perbuatan segelintir orang dari suku madura yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Dewan Adat Dayak korban jiwa akibat pecahnya konflik di Kecamatan Kotabesi hampir tidak ada, baik dari warga suku Dayak maupun dari warga Suku Madura karena proses asimilasi dan akulturasi hubungan antara suku berjaan dengan baik, hingga sampai saat ini warga suku madura semakin berusaha untuk mempererat lagi hubungan tali persaudaraan agar tetap terciptanya kerukunan baik dalam kegiatan arisan, kelompok pertanian dan perdagangan.

Warga madura yang kembali dari pengungsian ke kecamatan Kotabesi secara keseluruhan samasekali tidak ada penolakan, karena perilaku dan sikap warga suku madura yang ada di kotabesi memang tidak pernah bermasalah dengan warga suku dayak sehingga proses pengembaliannya sangat cepat dibanding daerah-daerah lain yang ada di kotawaringin timur.

Dewan adat dayak justru bersyukur dengan kedatangan warga suku madura dari pengungsian karena roda perekonomian kembali berjalan, dimasyarakat pun

tidak ada yang lagi yang berusaha mengungkit-ungkit masalah etnis dan sara di tengah masyarakat.

Hubungan sosial terbilang cukup baik, tergambar dari kegiatan gotong royong yang selalu di ikuti oleh warga suku madura, termasuk jika ada warga suku Dayak yang melaksanakan berbagai macam kegiatan kemasyarakatan warga suku madura bersedia untuk membantu dan tidak memperdulikan dari mana asal sukunya baik suku jawa, suku banjar, suku bugis dan suku lainnya mencoba menyatu. Karena merasa warga madura yang kembali tidak pernah bermasalah, sehingga penerimaan dari warga suku Dayak itu benar-benar ikhlas

Warga suku Dayak juga menerima dengan tangan terbuka kedatangan warga suku madura asalkan menjunjung tinggi kesepakatan yang telah ditentukan oleh dewan adat dayak, ada harapan agar kondisi dan suasana kerukunan antar suku untuk terus menerus dijaga sebaik baiknya.

Berkaca dari pengalaman konflik pada tahun 2001, warga suku dayak yang ada di Kecamatan kotabesi, dengan adanya kejadian perkelahian di Kecamatan Samuda dan Kecamatan Baamang yang melibatkan warga suku dayak dan warga suku Madura pada tahun 2016 yang lalu, baik dari pihak Suku Dayak tidak lagi mau terpancing emosi dan memilih untuk menunggu sampai ada hasil keputusan dari pihak berwajib.

Untuk menjaga keharmonisan antara warga suku dayak dan warga suku madura untuk menjaga hubungan yang baik dengan membentuk kelompok tani yang diberi nama rukun makmur dan sampai saat ini kelompok ini tetap berjalan dan dijadikan alat untuk menambah eratnya hubungan antar suku yang ada di kecamatan Kotabesi.

Dewan adat dayak kecamatan Kotabesi melihat kondisi masyarakat sudah tidak lagi menyimpan perasaan dendam dibuktikan dengan 16 Tahun pasca konflik, masyarakat dalam keadaan rukun, dan justru bertambah akrab misalkan dengan adanya bantuan dari pemerintah dalam peternakan berupa bibit anak sapi, orang madura yang mengajari orang dayak agar bisa memelihara dan beternak sapi dengan baik. Kemudian jika ada bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN) misalnya juga tidak ada diskriminasi semua warga baik dari warga suku Dayak dan suku madura semua mendapat jatah yang sama.

Perubahan sosial pasca konflik pada masyarakat di Kecamatan Kotabesi terlihat sangat jauh lebih baik, warga suku madura yang kembali dari pengungsian tidak lagi menonjolkan budaya mereka sebagai ukuran, tetapi jika kita melihat dari pesta perkawinan yang diselenggarakan oleh warga suku madura pun saat ini

sudah mengikuti cara-cara adat bagaimana perkawinan warga suku Dayak. Kemudian jika ada warga pendatang baru dari suku Madura, jika dulu sebelum konflik warga pendatang dari suku madura bebas saja keluar masuk silih berganti dan tidak pernah sama sekali melapor pada tokoh setempat, tetapi pasca konflik mereka justru menolak warga pendatang walaupun berasal dari suku yang sama hal tersebut dilakukan untuk menghindari masalah dengan warga lokal.

Menurut dewan adat dayak masyarakat suku madura yang ada di kecamatan Kotabesi sejauh ini belum pernah ada yang melanggar hukum dan aturan adat suku dayak, Kaerena Dewan adat dayak selalu memberikan sosialisai pada warga Madura jika ada warga pendatang dari Madura agar segera diminta untuk melaporkan keberadaan tamunya , tujuannya kedatanganya untuk apa serta berapa lama tinggal sehingga jelas maksud dan tujuannya datang ke wilayah tersebut.

Transkrip Wawancara dengan Drs. Abdul Wahid, MM

Tempat :

Waktu : Selasa, 26 September 2017

Awal hubungan sosial masyarakat di sampit ketika kepulangan warga suku madura dari pengungsian sangat terasa berbeda dengan kondisi sebelum konflik, pada awal masa kepulangan warga suku madura ke Sampit, sebagai besar warga madura seperti orang asing dan ada perasaan ragu apakah warga suku Dayak bisa menerima mereka di kehidupan masyarakat. ketika memutuskan kembali ke sampit masih ada perasaan yang membuat takut, tetapi dengan keyakinan yang kuat karena warga suku madura merasa sama sekali tidak terlibat dengan konflik dan hanya sebagai korban maka sebelum mereka sudah mempersiapkan mental dengan sangat matang.

Warga suku Madura yang kembali kesampit adalah merupakan korban konflik yang mengungsi di Sampang Madura, karena sebagian besar warga suku Madura keturunan yang berada di Sampit berasal dari Sampang. Pasca konflik Di sampit warga suku madura di pengungsian telah dipersiapkan dengan pemberian arahan, sosialisasi serta nasehat kemudian bagi mereka yang akan kembali telah di berikan surat pernyataan yang berisikan sembilan pokok kesanggupan yakni bersedia menjunjung tinggi falsafah “dimana bumi di pijak di situ langit di junjung”, sanggup menghilangkan budaya kekerasan, menyatakan bersedia menghilangkan perasaan dendam, dan menyatakan bahwa konflik adalah merupakan ketetapan dari Allah, serta mengihklaskan harta benda dengan lapang dada, menghindari konflik dan menghilangkan sifat emosional.

Pada tingkat desa dan kecamatan sebelum warga suku Madura kembali telah dilakukan koordinasi dan pendekatan pada tokoh dewan adat dan tokoh masyarakat dengan harapan warga suku Madura dapat diterima sesuai dengan tempat tinggal mereka semula sebelum pecahnya konflik.

Sebelum warga suku madura kembali dilakukan pemetaan untuk mengetahui asal domisili sebelum konflik dan seleksi yang ketat terhadap setiap individu, agar dapat menyesuaikan dengan keinginan serta persyaratan yang diminta dari hasil kesepakatan bersama para tokoh Dayak. Sehingga mereka yang bisa diterima adalah yang dulu berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak kriminal, dan kepulangan warga madura ke Sampit tentu diakukan dengan bertahap sehingga kepulangannya tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Penyesuaian diri warga suku madura yang kembali dari pengungsian dapat dikatakan. Faktanya memang antara suku dayak dan suku madura dapat

dipastikan hubungan yang saling membutuhkan serta saling ketergantungan satu sama lain mengingat bahwa dulunya antara warga suku Madura dan suku Dayak hidup secara berdampingan, karena warga suku madura terkenal dengan etos kerjanya sangat tinggi, tetapi dengan budaya dan perilaku serta sifat yang keras orang Madura yang dikenal dengan “menang tibi, kerebe tibi, dan tengkal konah serta tidak mau diatur sehingga sifat itu mau tidak mau harus dihilangkan.

Sebenarnya tidak semua warga madura yang memiliki sifat kurang baik tetapi jika dapat dipersentasikan hanya sebagian kecil saja yang perilakunya kurang baik, tetapi kadang persepsi di lingkungan masyarakat jumlah yang sedikit tadi menjadi persentasi mewakili seluruh warga suku Madura sehingga citra orang madura menjadi tidak baik.

Sambutan sebagian besar warga Dayak terhadap kembalinya orang Madura ke Sampit, ada yang negatif dan ada yang positif tergantung kepribadian dari individu warga suku Madura ketika dulu sebelum konflik, tetapi jika dulu memiliki perilaku dan tabiat kurang baik masyarakat juga tidak bersedia menerima dan juga tidak diperbolehkan pulang.

Pasca konflik sebagian besar masyarakat yang ada di sampit Kotawaringin Timur pada faktanya memang sudah melupakan peristiwa konflik, stereotipe yang dulu awal kepulangan warga suku madura sangat kental, perlahan sudah mulai hilang. Pada lingkungan masyarakat di Sampit juga sudah tidak nampak adanya perbedaan karena masyarakat suku Madura sudah hampir mampu membaaur di dalam lingkungan masyarakat.

Masih adanya kehidupan yang eksklusif dan berkelompok warga suku Madura pasca konflik pada dasarnya bukan karena mereka yang menghendaki tetapi memang disebabkan oleh kondisi ruang lingkup sumber-sumber pekerjaan yang tersedia, jika warga suku Madura sudah merasa betah dalam menggeluti suatu pekerjaan dan pada lokasi tersebut dan peluang masih tersedia serta terbuka lebar orang madura yang dikenal memiliki rasa kekeluargaan tinggi akan langsung berusaha mengajak saudaranya untuk ikut mengisi peluang-peluang usaha dan pekerjaan tersebut.

Antara suku madura dan suku Dayak sebagian besar sudah mampu berasimilasi, berakulturasi dan membaaur, serta sudah banyak yang melakukan perkawinan silang antara suku dayak dan suku Madura oleh sebab itu maka proses pengembalian warga suku Madura ke Sampit tergolong paling cepat jika kita membandingkan dengan konflik-konflik lain yang ada di Indonesia misalkan konflik Poso, konflik sambas dan konflik maluku.

Proses komunikasi yang dilakukan untuk mempererat rasa persaudaraan dan silaturahmi antara warga suku Dayak dan Suku Madura dengan bersama-sama terjun dan mengikuti kegiatan gotong-royong dan kegiatan lainya di masyarakat, pengalaman pahit konflik sangat membekas pada kehidupan warga suku Madura, jika dulu sebelum konflik warga suku Madura sombong dan kadang tidak mau mengikuti kegiatan di masyarakat sekarang pasca konflik perilaku demikian sudah hampir tidak ada.

Ada pertemuan dan sosialisasi rutin yang dilakukan oleh tokoh dayak dan tokoh madura untuk menjaga keharmonisan melalui pembinaan, karena sebagian besar warga suku madura pada kenyataannya berpendidikan rendah.

Perubahan sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat dari segi perilaku dan moral banyak sekali terjadi perubahan misalkan pada kehidupan masyarakat tidak lagi menonjolkan identitas sebagai orang madura tetapi mencoba untuk bergaul dan berusaha belajar tentang hidup dan kebudayaan suku Dayak misalkan penggunaan bahasa, orang madura yang bisa berbahasa Dayak akan menggunakan bahasa dayak dalam kehidupan sehari-hari tetapi banyak dari mereka yang telah mampu dengan benar menggunakan bahasa banjar sehingga penggunaan bahasa juga merupakan usaha untuk mengurangi stereotip yang ada di masyarakat.

Sikap warga Madura pasca konflik sangat berubah total dengan adanya peristiwa konflik, yang dulu sangat menonjolkan kebudayaan madura seperti ronggeng, sandur dan karapan sapi sudah hampir tidak ada, karena memang tokoh Madura sendiri melarang kegiatan tersebut mengingat kadang kegiatan tersebut dibarengi dengan perjudian sehingga hal tersebut hanya menambah dan menimbulkan konflik justru jika ada orang madura yang sulit diatur akan direkomendasikan di pulangkan saja.

Karena pengalaman pernah terlibat dalam konflik maka sedikit saja adanya perkelahian yang melibatkan antara suku Dayak dan Suku Madura, sehingga dengan mudah akan menjadi besar dan ditambah lagi dengan perkembangan media tehnologi informasi dalam penyebaran isu dan berita yang belum tentu kebenarannya dengan mudah tersebar ditengah-tengah masyarakat sehingga menimbulkan gesekan sosial dalam masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya orang yang berusaha membesar-besarkan dan memelihara isu konflik serta mengambil kesempatan di balik kurang harmonisnya hubungan antara suku Dayak dan suku Madura yang pernah berkonflik.

Tanggapan beberapa orang Madura yang dianggap sebagai tokoh justru menginginkan jika memang ada orang madura terlibat dalam kasus kriminal agar

kiranya cepat diselesaikan proses hukum dan kalau memang bersalah harus dihukum seberat-beratnya sehingga isu tidak lagi meluas dan tidak membuat kecurigaan di dalam masyarakat seakan-akan ada yang berusaha melindungi agar hubungan di masyarakat kembali normal baik menggunakan berbagai macam pola misalnya dengan pola pendekatan budaya, tindakan hukum dan membangun komunikasi yang baik.

Kondisi psikologi warga suku Madura pasca konflik jelas masih sangat trauma, tegambar dari sikap dan kondisi warga madura jika ada isu akan terjadi konflik mereka tidak berani keluar dari rumah dan langsung ingin pulang dan meninggalkan kota sampit.

Tokoh Dayak dan tokoh madura berusaha mencari berbagai macam cara atau pola untuk memperbaiki hubungan interaksi sosial mulai dari pembinaan dan sosialisasi kepada kedua belah pihak untuk selalu menjaga sikap saling menghormati antara suku lainya yang ada di sampit Kotawaringin Timur

Transkrip Wawancara dengan H. Hadriansyah

Tempat : Rumah bapa H. Hadriansyah di Desa Bajarum

Waktu : Selasa, 3 Oktober 2017

Hubungan sosial masyarakat di Desa Bajarum yang di kenal masyarakatnya sangat multikultural karena terdiri dari berbagai macam etnis, agama dan suku dapat dikatakan sangat harmonis dan semakin erat, keharmonisan tersebut terlihat ketika dalam pemilihan kepala desa yang diadakan secara langsung di Desa Bajarum beberapa waktu yang lalu misalnya dari lima orang yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa semuanya terdiri dari berbagai macam suku yani dari Suku Dayak, Suku Bugis dan Suku Madura.

Pada pemilihan kepala desa bajarum, faktanya memang ada usaha membawa masalah politik tersebut ke arah isu perbedaan suku dan etnis tetapi pada kenyataannya hal tersebut hanya sebatas isu yang disebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang sumbernya ternyata dari orang yang tidak berdomisili di Desa bajarum. Isu yang beredar di masyarakat adalah warga suku Dayak melakukan penolakan pada salah satu calon yang berasal dari warga Suku Madura penyebabnya adalah ditakutkan salah satu calon masih ada menyimpan rasa dendam karena pada saat konflik orangtuanya menjadi korban.

Tetapi pada saat proses berlangsungnya pemilihan, apa yang di khawatirkan tidak terbukti dan pemilihan berlangsung aman dan lancar dan yang terpilih adalah kepala desa saat ini yang merupakan warga suku Madura Keturunan campuran berdarah suku Madura dan Suku Dayak. Ini membuktikan bahwa di beberapa daerah khususnya desa bajarum kecamatan Kotabesi tingkat toleransinya sangat tinggi jika dibandingkan dengan desa-desa lainya yang ada di Kotawaringin Timur walaupun mayoritas suku adalah merupakan warga dari suku dayak tetapi dalam hal memilih pemimpin desa pada kenyataannya tidak ada diskriminasi.

Perbandingan sikap dan perilaku warga suku madura sebelum konflik dan pasca konflik jauh sangat berbeda, sebelum konflik tempramen tinggi dan sikap keras sangat melekat pada identitas warga suku Madura tetapi pasca konflik sikap tersebut sudah tidak terlihat lagi. Sehingga sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan pada masyarakat multisuku di Kecamatan Kotabesi, kepala Desa Selalu mengupayakan untuk saling mengingatkan agar jika ada kelompok dan perkumpulan di masyarakat harus di laporkan dan mendapat persetujuan dari Kepala Desa untuk menghindari kecurigaan didalam Masyarakat.

Adanya isu konflik pada tahun 2016 jelas sangat berdampak pada interaksi kehidupan sosial masyarakat multisuku yang ada di Kecamatan Kotabasi tidak

terkecuali pada warga suku Madura yang ada di desa Bajarum, hubungan sosial masyarakat yang sudah damai dan tenteram kembali terusik adanya isu konflik suku, sehingga diperlukan kesigapan para tokoh di daerah untuk memerikan penjelasan dan pemahaman pada warga masyarakat untuk tidak cepat terpancing dan tetap tenang pada hal yang belum tentu kebenarannya.

Trauma jelas masih nampak dan membekas pada warga suku Madura di desa Bajarum walaupun konflik sudah berlalu. Proses akulturasi antara budaya suku Dayak dan suku Madura pasca konflik sebenarnya sudah terjadi, sebagian dari warga suku Dayak juga sudah ada yang menikah dengan warga suku Madura dan proses upacara perkawinannya pun tidak kental dengan budaya Madura tetapi sudah mengikuti proses budaya adat perkawinan suku Dayak kebanyakan. Proses penyatuan budaya tersebut disadari oleh warga suku Madura yang sudah memahami bahwa mereka merupakan warga pendatang yang harus menjunjung tinggi budaya lokal yang menjunjung tinggi falsafah dimana bumi dipijak disitu bumi dijunjung.

Tradisi dan budaya warga suku Madura yang dapat memancing dan memunculkan permasalahan seperti ronggeng dan sandur sudah tidak diijinkan pelaksanaannya untuk menghindari munculnya benik-benih konflik

Transkrip Wawancara dengan Bapak Ahmad

Tempat : Rumah Informan di Desa Kotabesi

Waktu : Minggu, 22 Oktober 2017

Setelah mendapat rekomendasi dari Camat, lurah serta beberapa tokoh suku Dayak warga Suku Madura di ijin kembali, tetapi walaupun begitu proses pengembalian warga suku Madura tidak berjalan baik karena pada awalnya juga ada yang mendapat penolakan dari warga suku Dayak dengan berbagai macam alasan misalkan menginggit tabiat dan perilaku warga suku madura sebelum konflik

Kondisi pada saat awal konflik dengan sekarang menurut bapak ahmad jauh sangat berbeda kalau dulu warga madura yang bisa kembali ke Sampit adalah mereka yang lahir di Sampit, saat ini pasca konflik sudah ada warga madura yang bukan korban konflik sampit memberanikan diri untuk mengadu nasib dan mencari pekerjaan yang tersebar di beberapa wilayah sampit.

Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan seluruh adat istiadat dan kebudayaan yang identik dengan warga suku madura seperti Ronggeng dan Sandur yang dulu dilakukan hampir pada setiap ada acara perkawinan dan pernikahan sudah sama sekali ditinggalkan oleh warga suku madura

Pasca konflik Sampit warga suku madura jauh sangat berbeda pada saat sebelum konflik, sekarang jika ada warga suku madura yang ingin melaksanakan kegiatan yang mengundang orang banyak mereka tidak berani melaksanakan jika belum meminta ijin dan mendapat persetujuan dari para tokoh dan warga suku Dayak dan sesudah konflik perubahan tersebut tergambar dari perilaku warga suku Madura yang dulu selalu mengendepankan sifatnya individualis dan tidak peduli dengan lingkungan masyarakat sekarang sudah mulai perbaikan misal jika ada acara perkawinan mereka terlebih dahulu menyampaikan langsung dengan pada tokoh-tokoh disekitartempat tinggal mereka.

Menurut bapak ahmad ada perbedaan yang sangat mencolok antara sebelum konflik. Jika ada warga suku Dayak yang melakukan kegiatan, warga suku madura sekarang telah membur dan seringkali kebanyakan membantu. Menurut ahmad konflik merupakan pelajaran bagi warga suku Madura yang selama ini ddianggap semena-mena terhadap warga yang ada di seluruh wilayah kotawaringin timur

Lampiran 1

Transkrip Wawancara dengan Bapak Mohammad

Tempat : Rumah Informan di Desa Kotabesi

Waktu : Sabtu, 28 Oktober 2017

Ada orang lokal merasa curiga dengan warga suku madura dengan adanya hiburan musik elekton, elekton juga digunakan oleh warga dayak dan warga madur. Dulu sebagian besar warga madura membeca di sampit. Warga suku madura perihatin dengan adanya kejadian genk motor yang dan meminta kepada orang tua untuk memberikan pendidikan pada remaja warga suku Madura untuk menjaga anak-anaknya masing-masing.

Warga suku madura merasa ada perasaan tidak di hargai oleh warga suku dayak, warga suku dayak harusnya juga memberi contoh jika hukum adat dayak di jalankan harus semuanya di jalankan jangan tebang pilih ketika ada warga suku madura yang terkiabat kasus di laksanakan hukum adat, tetapi ketika ada warga suku dayak yang bermaslah ada kesan tidak dilakukan hukum adat dayak

Budaya sandur dulu diadakan budaya pecutan sekarang sudah berubah menjadi budaya elekton tetapi kegiatan pecutan masih tetap dipertahankan oleh warga suku Madura, Dengan adanya budaya pecutan atau arisan kadang menimbulkan kecurigaan terhadap adanya mobilisasi masa

Pecutan merupakan budaya yang terus menerus di pertahankan karena merupakan budaya saling bantu membantu ketika ada hajatan perkawinan, jika ada warga yang memberikan berar maka nanti hal yang sama. Tokoh madura juga merasa bingung dengan sikap dan perilaku warga suku madura yang ada di sampit, jika berkaca dari budaya warga suku madura di pulau Madura justru memelikisikap dan perilaku yang sopan dan memiliki tata kerama yang tinggi, jika dibandingkan dengan warga pengungsi saat itu masih lumayan tinggi pendidikan warga pengungsi.

Tokoh madura memang mengakui bahwa pendidikan warga suku madura masih sangat rendah, Tokoh madura membuat sekolah dengan tujuan pemberian pendidikan kepada warga suku Madura. Pemerintah daerah di harapkan melakukan seleksi ketat dan mendata terhadap warga suku madura yang ada di sampit Persaingan sangat tinggi karena etos kerja warga madura sangat tinggi, Kebanyakan warga pendatang yang sering kali tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan warga Dayak.

Lampiran 1

Transkrip Wawancara dengan Mat Mosel

Tempat : Rumah Informan Jl. Cilik Riwut Desa Kotabesi

Waktu : Minggu, 5 Nopember 2017

Pasca konflik di Sampit setelah warga suku madura kembali, awalnya memang ada sebagian warga dayak yang melakukan penolakan terhadap warga Madura yang datang, sehingga membuat warga suku madura sempat berfikir untuk pulang kembali ke Sampang Madura. Tetapi karena ada sebagian dari suku dayak yang berani menjamin keselamatan mereka, sehingga warga suku madura memutuskan diri untuk tetap bertahan.

Kondisi penerimaan warga suku madura sekembalinya dari pengungsian sangat beragam, ada yang sudah berusaha melakukan komunikasi dan kontak sosial dan ada juga sebagian warga suku dayak yang masih berusaha menghindari jika bertemu warga suku Madura. Tetapi setelah berjalannya waktu, kondisi pada lingkungan masyarakat berangsur-angsur mulai berubah

Pada kecamatan kotabesi tidak semua warga suku Madura dapat diterima untuk kembali, karena sebagian warga Madura tidak mendapat rekomendasi dari tokoh adat dan masyarakat yang ada di wilayah tersebut, alasan penolakan warga suku Dayak pada sebagian warga suku madura adalah karena faktor hubungan sosial sebelum konflik yang tidak harmonis dan seringkali menimbulkan masalah. Adanya penolakan pada sebagian warga suku Madura yang kembali membuat warga suku madura yang diterima menyadari bahwa ada yang perlu diperbaiki dari pola interaksi sosial yang selama ini dibangun, kesadaran itu muncul karena sebagian besar warga suku madura yang ditolak adalah mereka yang memang pada saat konflik tidak bisa membaur dan berinteraksi dengan baik dan keberadaannya sering kali membuat keresahan pada masyarakat lokal